LKPJ TAHUN 2022

LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN (LKPJ) BUPATI AKHIR TAHUN ANGGARAN 2022 KEPADA DPRD KABUPATEN KEDIRI



PEMERINTAH KABUPATEN KEDIRI
TAHUN 2023

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum waroh matullohi wabarokatuh.

Alhamdulillahi rabbil 'alamin, puji syukur kehadirat Allah Swt., Tuhan Yang Maha Kuasa yang senantiasa memberikan hidayah, taufiq dan kekuatan serta kesehatan kepada kita semua dalam menjalankan tugas dinas kita sehari-hari, sehingga kami dapat menyelesaikan penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Kediri Akhir Tahun Anggaran 2022.

Penyusunan LKPJ didasarkan pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD), mengamanatkan bahwa Kepala Daerah wajib menyampaikan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir.

Melalui LKPJ diharapkan DPRD Kabupaten Kediri memiliki informasi secara lengkap sebagai bahan evaluasi terhadap penyelenggaraan pemerintahan yang dapat mencerminkan kinerja Kepala Daerah Tahun 2022, sekaligus dapat menjadi bahan informasi bagi berbagai pihak untuk melihat dan mengukur pelaksanaan kinerja Pemerintah Kabupaten Kediri Tahun 2022.

Perlu diketahui bahwa ruang lingkup LKPJ ini ada dua. *Pertama,* hasil penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah. *Kedua,* hasil pelaksanaan tugas pembantuan dan penugasan.

Kami menyadari sepenuhnya bahwa dampak wabah pandemi Covid-19 masih terasa dan berpengaruh terhadap semua tatanan, baik politik, sosial, budaya, dan ekonomi, bahkan dalam kehidupan masyarakat. Hal tersebut tentunya juga berimbas pada kebijakan yang harus diambil oleh Pemerintah Kabupaten Kediri, oleh karena itu kami selaku Kepala Daerah bersama jajaran Perangkat Daerah di lingkup Pemerintah Kabupaten Kediri

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

menyadari segala keterbatasan kemampuan dalam melaksanakan urusan pemerintahan pada tahun 2022.

Demikian LKPJ ini disusun untuk kami sampaikan kepada DPRD Kabupaten Kediri. Semoga data yang kami sajikan dapat menjadi bahan pertimbangan untuk menerima LKPJ Bupati Kediri Tahun 2022. Kritik dan saran yang membangun kami terima dengan sangat terbuka, dalam rangka peningkatan kinerja pemerintahan daerah guna mewujudkan Kabupaten Kediri maju dan sejahtera.

Wassalamu'alaikum warah matullahi wabarakatuh,

Kediri, 20 Maret 2023

Ditandatangani secara elektronik oleh:

BUPATI KEDIRI

H. HANINDHITO HIMAWAN PRAMANA, S.H.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR **1**
DAFTAR ISI **4**
DAFTAR TABEL **7**
DAFTAR GAMBAR **8**
BAB I : PENDAHULUAN **9**
1.2 Dasar Hukum 9
1.2 Visi Misi Kepala Daerah 9
1.3 Data Umum Daerah 10
a. Data Geografis Wilayah 10
b. Jumlah Penduduk 11
c. Laju Pertumbuhan Penduduk 12
d. Jumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) 12
e. Realisasi Anggaran Pendapatan Menurut Jenis Pendapatan 14
f. Realisasi Belanja Menurut Jenis Belanja 16
g. Realisasi Pembiayaan Menurut Jenis Pembiayaan 17
BAB II : PERUBAHAN PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH **19**
2.1. Kondisi Umum dan Kebijakan Perubahan Pendapatan Daerah 19
2.1.1. Kondisi Umum Perubahan Pendapatan Daerah 19
2.1.2. Permasalahan Utama Perubahan Pendapatan Daerah 19
2.1.3. Kebijakan Umum Perubahan Pendapatan Daerah 20
2.2. Kondisi Umum Dan Kebijakan Perubahan Anggaran Belanja Daerah 21
2.2.1. Kondisi Umum Perubahan Belanja Daerah 21
2.2.2. Permasalahan Utama Perubahan Belanja Daerah 31

2.2.3. Kebijakan Umum Perubahan Belanja Daerah.....31

2.2.4. Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Belanja Daerah 32

2.3. Kondisi Dan Kebijakan Perubahan Anggaran Pembiayaan.....33

2.3.1. Kondisi Umum Perubahan Pembiayaan 33

2.3.2. Permasalahan Utama Perubahan Pembiayaan 34

2.3.3. Kebijakan Umum Perubahan Pembiayaan 35

BAB III : HASIL PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG MENJADI KEWENANGAN DAERAH.....36

3.1 Capaian Pelaksanaan Program dan Kegiatan.....36

3.1.1 Capaian Kinerja Program sesuai dengan Target Kinerja yang Ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja.....36

3.1.2 Perbandingan Target Dan Realisasi Indikator Kinerja.....39

3.2 Analisa Efisiensi Sumber Daya 67

3.3 Akuntabilitas Kinerja.....88

3.3.1 Analisa Akuntabilitas Kinerja.....88

3.3.2 Capaian Kinerja Keluaran Kegiatan dan Masalah yang Dihadapi serta Solusi Pemecahannya.....219

3.4 Kebijakan Strategis yang Ditetapkan.....826

3.4.1 Prioritas Pembangunan Kabupaten Kediri 826

3.5 Tindak lanjut Rekomendasi DPRD Tahun Anggaran Sebelumnya.....844

BAB IV : CAPAIAN KINERJA PELAKSANAAN TUGAS PEMBANTUAN DAN PENUGASAN.....956

4.1 Urusan Pemerintahan yang Ditugas-Pembantuan 956

4.1.1. Identifikasi tugas pembantuan urusan pemerintahan yang diterima dari pemerintah tingkat atasnya.....956

4.2 Hambatan/Permasalahan dalam Pelaksanaan Tugas Pembantuan dan Upaya Penyelesaian.....956

1) Hambatan/permasalahan pelaksanaan Tugas Pembantuan Pekerjaan Revitalisasi Pasar Wates Desa Tawang, Kecamatan Wates Kabupaten Kediri.....956

BAB V : P E N U T U P.....958

DAFTAR TABEL

Tabel 1 Data Jumlah Penduduk Kabupaten Kediri Menurut Jenis Kelamin Tahun 2020 s.d 2022 11
Tabel 2 Laju Pertumbuhan Penduduk Tahun 2020 s.d 2022.....12
Tabel 3 Jumlah Pegawai Kabupaten Kediri Menurut Pangkat/Golongan, Tingkat Pendidikan Dan Kelompok Jabatan tahun 2022 13
Tabel 4 Rincian Pendapatan Daerah TA 2022 dan 2021 15
Tabel 5 Rincian Belanja Menurut Jenis Belanja TA 2022 dan 2021 16
Tabel 6 Rincian Pembiayaan TA 2022 dan 2021 17
Tabel 7 Belanja Daerah Sesuai Pembagian Urusan Pemerintahan Tahun 2022 23
Tabel 8 Ringkasan Belanja Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022.....32
Tabel 9 Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022.....34
Tabel 10 Skala Kategori Capaian Kinerja 38
Tabel 11 PERBANDINGAN ANTARA TARGET DAN REALISASI INDIKATOR KINERJA UTAMA PEMERINTAH KABUPATEN KEDIRI TAHUN 2022 39
Tabel 12 PERBANDINGAN CAPAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA DENGAN CAPAIAN DUA TAHUN TERAKHIR PEMERINTAH KABUPATEN KEDIRI TAHUN 2022 47
Tabel 13 PERBANDINGAN REALISASI TAHUN 2022 DENGAN TARGET AKHIR RPJMD PEMERINTAH KABUPATEN KEDIRI TAHUN 2022 59
Tabel 14 Rentang Kategori Efisiensi 68
Tabel 15 PERBANDINGAN KINERJA DAN ANGGARAN PEMERINTAH KABUPATEN KEDIRI TAHUN 2022 68
Tabel 16 PERBANDINGAN CAPAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA DENGAN CAPAIAN PROVINSI DAN NASIONAL PEMERINTAH KABUPATEN KEDIRI TAHUN 2022 78
Tabel 17 Perbandingan Indikator Kinerja Utama 87
Tabel 18 TUJUAN DAN SASARAN MASING-MASING MISI 827
Tabel 19 PENJELASAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH.....831

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Kerangka Analisa Kinerja 89
Gambar 2 Lingkup Misi 1.....90
Gambar 3 Lingkup Misi 2.....120
Gambar 4 Lingkup Misi 3.....145
Gambar 5 Lingkup Misi 4 156
Gambar 6 Lingkup Misi 5.....177
Gambar 7 Lingkup Misi 6 192
Gambar 8 Lingkup Misi 7.....197
Gambar 9 Lingkup Misi 8.....207
Gambar 10 Lingkup Misi 9.....213

BAB I
PENDAHULUAN

1.2 Dasar Hukum

Kabupaten Kediri adalah daerah otonom sebagaimana di maksud dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kota praja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730) dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Provinsi DjawaTimur, Djawa Tengah, Djawa Barat, dan dalam Daerah Istimewa Jogjakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang NR 16 dan 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45).

1.2 Visi Misi Kepala Daerah

Dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, diperlukan adanya visi dan misi yang merupakan arahan bagi penyusunan program dan kegiatan selama periode tertentu. Visi menggambarkan arah pembangunan atau kondisi masa depan daerah yang ingin dicapai *(desired future)* dalam masa jabatan selama 5 (lima) tahun. Visi dilaksanakan melalui sejumlah misi yang merupakan serangkaian upaya yang dilakukan untuk mencapai visi yang telah ditetapkan. Dalam konteks pelaksanaan pembangunan, suatu pemerintahan membutuhkan adanya visi dan misi sebagai panduan bagi penyusunan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan.

Visi pembangunan daerah dalam RPJMD Kabupaten Kediri Tahun 2021-2026 merupakan penjabaran dari visi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih. Visi menggambarkan arah pembangunan atau kondisi masa depan daerah yang ingin dicapai (desired future) dalam masa jabatan selama 5 (lima) tahun.

Dengan mempertimbangkan potensi, kondisi, permasalahan, tantangan dan peluang yang ada di Kabupaten Kediri, maka Visi yang hendak dicapai sebagaimana tertuang RPJMD Kabupaten Kediri 2021-2026 adalah :

"Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Kediri yang Maju, Berkarakter Nasionalis-Religius, serta Sejahtera Berdasarkan Ekonomi Kerakyatan yang Didukung Birokrasi yang Melayani"

Memperhatikan visi serta perubahan paradigma dan kondisi yang akan dihadapi pada masa yang akan datang, maka dalam upaya mewujudkan Visi pembangunan Kabupaten Kediri Tahun 2021-2026, Misi pembangunan sebagai berikut :

1. Pengembangan Sumber Daya Manusia yang Berkarakter Nasionalis-Religius;
2. Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik;
3. Pengembangan Ekonomi Kerakyatan dan Peningkatan Investasi Daerah;
4. Revitalisasi Pertanian untuk Ketahanan dan Swasembada Pangan;
5. Peningkatan Infrastruktur dan Konektivitas antar Wilayah;
6. Optimalisasi Kepariwisataan berbasis Kearifan Lokal;
7. Optimalisasi Tata Kelola Lingkungan Hidup, Sumber Daya Alam dan Mitigasi Bencana;
8. Pengembangan Seni Budaya, Olahraga dan Kreativitas Pemuda; dan
9. Perwujudan Kemandirian Desa untuk Kesejahteraan Masyarakat.

1.3 Data Umum Daerah

a. Data Geografis Wilayah

Secara astronomis wilayah Kabupaten Kediri terletak pada koordinat antara 111° 47' 05" s.d. 112º 18' 20" Bujur Timur dan 7º 36' 12'' s.d. 8º 0' 32" Lintang Selatan, dengan batas administratif sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Kabupaten Jombang dan Kabupaten Nganjuk;
- Sebelah Timur : Kabupaten Malang dan Kabupaten Jombang;
- Sebelah Selatan : Kabupaten Tulungagung dan Kabupaten Blitar;
- Sebelah Barat : Kabupaten Nganjuk dan Kabupaten Tulungagung.

Berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia nomor: 100.1-1-6117 Tahun 2022 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan, bahwa luas wilayah Kabupaten Kediri adalah kurang lebih 1.523,563 km^2.

b. Jumlah Penduduk

Berdasarkan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) yang digunakan Kementerian Dalam Negeri dalam melayani administrasi kependudukan masyarakat didapatkan pada tahun 2022 jumlah penduduk Kabupaten Kediri sebanyak 1.674.818 jiwa terdiri dari laki-laki 845.526 (50,48%) dan perempuan 829.292 (49,52%). Hal tersebut berarti *sex ratio* Kabupaten Kediri tahun 2022 adalah 101,96. *Sex ratio* selama tiga tahun terakhir di atas 100%, hal itu menunjukkan jumlah penduduk laki-laki lebih besar dibandingkan perempuan. Perkembangan jumlah penduduk selama tiga tahun terakhir sebagaimana tabel berikut:

Tabel 1
Data Jumlah Penduduk Kabupaten Kediri Menurut Jenis Kelamin Tahun 2020 s.d 2022

NO	JENIS KELAMIN	TAHUN		
		2020	2021	2022
1	Laki-laki	846.441	845.152	845.526
2	Perempuan	827.128	828.006	829.292
J u m l a h		1.673.569	1.673.158	1.674.818
Sex Ratio		102,3	102,1	101,96

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kediri Per 31 Desember 2022

Sex Ratio (Rasio Jenis Kelamin) adalah perbandingan jumlah penduduk laki-laki dengan jumlah penduduk perempuan, biasanya dinyatakan dalam banyaknya penduduk laki-laki per 100 penduduk perempuan. Data mengenai rasio jenis kelamin berguna untuk pengembangan perencanaan pembangunan yang berwawasan gender, terutama yang berkaitan dengan perimbangan pembangunan laki-laki dan perempuan secara adil, juga guna merancang pengembangan pendidikan berwawasan gender harus memperhitungkan kedua

jenis kelamin dengan mengetahui berapa banyaknya laki-laki dan perempuan dalam umur tertentu. Informasi tentang rasio jenis kelamin juga dianggap penting untuk diketahui oleh para politisi, terutama untuk mengetahui keterwakilan perempuan dalam parlemen. Dari data diatas pada tahun 2022 di Kabupaten Kediri setiap 100 penduduk perempuan terdapat 102 penduduk laki-laki.

c. Laju Pertumbuhan Penduduk

Pertumbuhan penduduk merupakan angka yang menunjukkan tingkat pertambahan penduduk per tahun dalam jangka waktu tertentu. Pertumbuhan penduduk Kabupaten Kediri dapat dilihat dari tabel berikut:

Tabel 2
Laju Pertumbuhan Penduduk Tahun 2020 s.d 2022

No	Uraian	Tahun		
		2020	2021	2022
1.	Jumlah penduduk	1.635.294	1.644.400	1.656.020
2.	Laju Pertumbuhan Penduduk	0,84	0,74	0,71

Sumber : BPS Kab. Kediri

d. Jumlah Aparatur Sipil Negara (ASN)

Jumlah ASN Kabupaten Kediri menurut sumber data dari Badan Kepegawaian Daerah pada akhir tahun 2022 adalah 9.184 terdiri dari 8.036 orang PNS dan 1.148 orang PPPK. Berikut adalah gambaran ASN Kabupaten Kediri berdasarkan pangkat/golongan, tingkat pendidikan dan kelompok jabatan:

Tabel 3

Jumlah Pegawai Kabupaten Kediri Menurut Pangkat/Golongan, Tingkat Pendidikan Dan Kelompok Jabatan tahun 2022

No	Kepangkatan/Pendidikan/ Jabatan	Jenis Kelamin		Jumlah
		Laki-Laki	Perempuan	
1	2	3	4	1
	DATA PNS			
A	**Pangkat/Golongan**			
1	Juru Muda/(I/c)	9	0	9
2	Juru Tingkat I/(I/d)	51	4	55
3	Pengatur Muda/(II/a)	65	2	67
4	Pengatur Muda Tingkat I/(II/b)	42	9	51
5	Pengatur Muda/(II/c)	184	208	392
6	Pengatur Tingkat I/(II/d)	304	257	561
7	Penata Muda/(III/a)	312	1017	1329
8	Penata Muda Tingkat I/(III/b)	388	809	1197
9	Penata Muda/(III/c)	278	388	666
10	Penata Tingkat I/(III/d)	554	807	1361
11	Pembina /(IV/a)	427	508	935
12	Pembina Tingkat I/(IV/b)	483	830	1313
13	Pembina Utama Muda/(IV/c)	42	57	99
14	Pembina Utama Madya/(IV/d)	1	0	1
	Jumlah	3.140	4.896	8.036
B	**Tingkat Pendidikan**			
1	SD	38	1	39
2	SLTP	77	7	84
3	SLTA	583	353	936
4	D-I	0	27	27
5	D-II	82	140	222
6	D-III	196	710	906
7	D-IV	23	118	141
8	S-1	1.916	3.378	5.294
9	S-2	220	161	381

10	S-3	5	1	6
	Jumlah	3.140	4.896	8.036
C	**Kelompok Jabatan**			
1	Struktural	292	151	443
2	Fungsional	1.709	3.390	5.099
3	Pelaksana	1.139	1.355	2.494
	Jumlah	3.140	4.896	8.036

No	**Kepangkatan/Pendidikan/ Jabatan**	**Jenis Kelamin**		**Jumlah**
		Laki-Laki	**Perempuan**	
1	2	3	4	5
DATA PPPK				
A	**Golongan**			
1	V	13	1	14
2	VII	10	22	32
3	IX	379	723	1.102
	Jumlah	402	746	1.148
B	**Tingkat Pendidikan**			
1	SLTA	13	1	14
2	D-III	10	22	32
3	S-1	379	723	1.102
	Jumlah	402	746	1.148
C	**Kelompok Jabatan Fungsional**			
1	Teknis	42	24	66
2	Pendidikan	350	699	1.049
3	Kesehatan	10	23	33
	Jumlah	402	746	1.148

Sumber data: BKD Kabupaten Kediri

e. Realisasi Anggaran Pendapatan Menurut Jenis Pendapatan

Pendapatan Daerah Tahun Anggaran (TA) 2022 dianggarkan sebesar Rp 2.903.461.029.809,00 dan terealisasi sebesar Rp 3.059.858.480.152,76 atau 105,39%. Realisasi Pendapatan Daerah TA 2022 mengalami peningkatan sebesar 4,68% dibanding realisasi Pendapatan Daerah TA 2021.

Berdasarkan rincian Pendapatan Daerah di atas, terlihat bahwa:

1) Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp. 649.630.917.161,76 atau 125,82%. Realisasi PAD TA. 2022 mengalami peningkatan sebesar Rp. 135.857.891.021,00 atau 26,44%
2) Realisasi Pendapatan Transfer sebesar Rp. 2.378.321.143.873,00 atau 101,24%. Realisasi Pendapatan Transfer TA. 2022 mengalami penurunan realisasi sebesar Rp. 23.154.804.878,00 atau 0,96% dibandingkan dengan realisasi TA 2021;
3) Realisasi Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah sebesar Rp. 31.906.419.118,00 atau 84,22% dari anggaran Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah TA. 2022. Realisasi Lain-lain Pendapatan yang Sah TA. 2022 mengalami peningkatan sebesar Rp. 24.044.550.151,00 atau 305,84% dibandingkan dengan realisasi TA 2021.

Rincian Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2022 sebagai berikut:

Tabel 4

Rincian Pendapatan Daerah TA 2022 dan 2021

No	Uraian	TA 2022		%	Realisasi TA 2021 (Rp)
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)		
1	2	3	4	5	6
1.	Pendapatan Asli Daerah	516.304.197.074,00	649.630.917.161,76	125,82	513.773.026.141,24
2.	Pendapatan Transfer	2.349.272.944.082,00	2.378.321.143.873,00	101,24	2.401.475.948.751,00
1	2	3	4	5	6
3.	Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	37.883.888.653,00	31.096.419.118,00	84,22	7.861.868.977,00
Jumlah		**2.774.767.059.554,00**	**2.886.618.430.809,00**	**105,72**	**2.923.110.843.869,24**

Sumber data: BPKAD Kabupaten Kediri (Data per 8 Maret 2023) – Unaudited

f. Realisasi Belanja Menurut Jenis Belanja

Sebagai penerapan dari kebijakan belanja daerah, maka pada TA 2022 Belanja Daerah Kabupaten Kediri dialokasikan sebesar Rp 3.428.699.159.232,00 dan terealisasi sebesar Rp 3.154.101.883.124,31 atau 91,99%. Realisasi Belanja Daerah TA. 2022 meningkat sebesar Rp. 216.677.431.210,23 atau 7,38% dari realisasi Belanja Daerah TA. 2021.

Rincian Belanja Daerah TA. 2022 menurut jenis belanja adalah sebagai berikut:

Tabel 5

Rincian Belanja Menurut Jenis Belanja TA 2022 dan 2021

No.	Uraian	TA 2022			TA 2021
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
A	Belanja Operasi	2.301.452.268.711,00	2.146.481.341.065,11	93,27	1.994.571.255.560,31
B	Belanja Modal	479.089.556.904,00	370.827.255.677,20	77,40	319.312.867.444,77
C	Belanja Tak Terduga	13.744.622.201,00	3.063.084.500,00	22,29	34.261.986.572,00
D	Belanja Transfer	634.412.711.416,00	633.730.201.882,00	99,89	589.278.342.337,00
Jumlah		**3.428.699.159.232,00**	**3.154.101.883.124,31**	**91,99**	**2.937.424.451.914,08**

Sumber data: BPKAD Kabupaten Kediri

Berdasarkan rincian Belanja Daerah di atas, terlihat bahwa:

1) Realisasi Belanja Operasi Daerah Rp. 2.301.452.268.711,00 atau 93,27% dari Anggaran Belanja Operasi TA. 2022. Realisasi Belanja Operasi TA. 2022 mengalami peningkatan sebesar Rp. 151.910.085.504,80 atau 7,62% dibandingkan dengan realisasi Belanja Operasi TA 2021;
2) Realisasi Belanja Modal sebesar Rp. 370.827.255.677,20 atau 77,40% dari Anggaran Belanja Modal TA. 2022. Realisasi Belanja Modal TA. 2022 mengalami peningkatan sebesar Rp. 51.514.388.232,43 atau 16,13% dibandingkan dengan realisasi Belanja Modal TA 2021;

3) Realisasi Belanja Tak Terduga sebesar Rp. 3.063.084.500,00 atau 22,29% dari Anggaran Belanja Tak Terduga TA. 2022. Realisasi Belanja Tak Terduga TA. 2022 mengalami penurunan sebesar Rp. 31.198.902.072,00 atau 90,18% dibandingkan dengan realisasi Belanja Tak Terduga TA 2021;

4) Realisasi Belanja Transfer sebesar Rp. 633.730.201.882,00 atau 99,89% dari Belanja Transfer TA. 2022. Realisasi Belanja Transfer TA. 2022 mengalami peningkatan sebesar Rp. 44.451.859.545,00 atau 7,54% dibandingkan dengan realisasi Belanja Transfer TA 2021;

g. Realisasi Pembiayaan Menurut Jenis Pembiayaan

Pembiayaan merupakan seluruh transaksi keuangan Pemerintah Kabupaten Kediri, baik penerimaan maupun pengeluaran, yang perlu dibayar atau akan diterima kembali. Dalam penganggarannya terutama dimaksudkan untuk menutup defisit atau memanfaatkan surplus anggaran.

Tabel 6

Rincian Pembiayaan TA 2022 dan 2021

PEMBIAYAAN	TA 2022	TA 2021
	(Rp)	(Rp)
1) Penerimaan Pembiayaan	559.022.029.423,00	578.335.637.468,33
2) Pengeluaran Pembiayaan	33.783.900.000,00	5.000.000.000,00

Sumber data: BPKAD Kabupaten Kediri

Penerimaan Pembiayaan adalah seluruh transaksi penerimaan yang dimaksudkan untuk menutup defisit anggaran dan berasal dari penggunaan SILPA tahun sebelumnya, pencairan dana cadangan dan penerimaan piutang daerah. Realisasi penerimaan pembiayaan tahun 2022 adalah sebesar Rp. 559.022.029.423,00 atau 100% dan menurun sebesar Rp. 19.313.608.045,33 atau 3,34% dari Penerimaan Pembiayaan TA. 2021.

Pengeluaran pembiayaan adalah seluruh transaksi pengeluaran yang dimaksudkan untuk memanfaatkan surplus anggaran dan pada tahun 2022 digunakan untuk pembentukan dana cadangan dan penyertaan modal pemerintah

daerah. Realisasi Pengeluaran Pembiayaan TA. 2022 terdiri dari Pembentukan Dana Cadangan sebesar Rp. 30.000.000.000,00 dan Penyertaan Modal Daerah Pada BUMD yaitu PD. Bank Pasar sebesar Rp. 3.783.900.000,00

BAB II
PERUBAHAN PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

2.1. Kondisi Umum dan Kebijakan Perubahan Pendapatan Daerah

Sebagaimana telah diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, bahwa Daerah diberikan hak otonomi sehingga Pemerintah Daerah mendapatkan pelimpahan kekuasaan dan kewenangan dalam rangka pengelolaan keuangan daerah. Dalam kenyataannya daerah sangat tergantung pada dana perimbangan yang diberikan oleh Pemerintah dikarenakan prosentase komponen dana perimbangan yang sangat besar dibanding dengan komponen lainnya yaitu Pendapatan Asli Daerah dan Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah.

Sehingga Pemerintah Daerah dituntut untuk meningkatkan pendapatan daerah melalui intensifikasi Pendapatan Asli Daerah, dengan mempertimbangkan penyesuaian target Pendapatan Asli Daerah di masa pemulihan pandemi COVID-19.

2.1.1. Kondisi Umum Perubahan Pendapatan Daerah

Dalam Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022, perubahan pendapatan daerah adalah sebagai berikut:

1. Kenaikan Pendapatan Asli Daerah terdiri dari Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah.
2. Kenaikan Pendapatan Transfer yang terdiri dari: Transfer Pemerintah Pusat dan Transfer Antar Daerah
3. Perubahan target Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah.

2.1.2. Permasalahan Utama Perubahan Pendapatan Daerah

Perangkaan dalam Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022, perubahan pendapatan daerah sebesar Rp. 2.886.618.430.809,00 naik sebesar Rp. 111.851.371.255,00 atau 4,03%

dari APBD Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp. 2.774.767.059.554,00. Pendapatan Daerah Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022 terdiri dari:

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp. 500.873.873.074,00 terdiri dari:
   a. Pajak Daerah sebesar Rp. 221.000.000.000,00.
   b. Retribusi Daerah sebesar Rp. 23.654.691.420,00.
   c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan sebesar Rp. 10.068.418.139,00.
   d. Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah sebesar Rp.246.150.763.515,00.
2. Pendapatan Transfer sebesar Rp. 2.347.860.669.082 terdiri dari:
   a. Transfer Pemerintah Pusat sebesar Rp. 2.169.264.001.695,00.
   b. Transfer Antar Daerah sebesar Rp. 178.434.547.387,00.
3. Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah sebesar Rp. 37.883.888.653,00 terdiri dari:
   a. Hibah sebesar Rp. 23.201.991.114,00.
   b. Dana Darurat sebesar Rp. 0,00.
   c. Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebesar Rp. 14.681.897.539,00.

2.1.3. Kebijakan Umum Perubahan Pendapatan Daerah

1. Kebijakan Perubahan Pendapatan Asli Daerah (PAD)

   Kebijakan Perubahan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang dilaksanakan dengan melaksanakan perhitungan ulang target PAD APBD TA 2022 dengan mempertimbangkan realisasi penerimaan PAD semester I TA 2022 dan potensi;

2. Kebijakan Perubahan Pendapatan Transfer

   Kebijakan pendapatan transfer daerah dengan melaksanakan penyesuaian Alokasi Pendapatan Transfer dari Pemerintah Pusat tahun 2022 dan Pendapatan Transfer dari Pemerintah Provinsi tahun 2022 sesuai dengan peraturan yang telah diterbitkan yaitu :

   a. Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2021 Tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2022 tentang alokasi pendapatan transfer dan dana desa kedaerah antara lain,

Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus Fisik, Dana Alokasi Khusus Non Fisik dan Dana Insentif Daerah dan perubahannya yaitu Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 98 tahun 2022.

b. Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 34/KM.&/2021 merupakan aturan yang mendukung pemotongan pendapatan DAU untuk dukungan operasional pelaksanaan vaksinasi Covid 19 dan pendanaan untuk pembayaran insentif atau honor pelaksana vaksinasi oleh TNI dan/atau Kepolisian Negara RI.

c. Bantuan Keuangan Khusus (BKK) dari Pemerintah Provinsi Jawa Timur kepada Pemerintah Kabupaten Kediri berdasarkan Surat Gubernur Jawa Timur Nomor 903/747.8/101.1/2022, Surat Gubernur Jawa Timur Nomor 412.2/207/112.3/2022, dan Surat Gubernur Jawa Timur Nomor 045.2/2256/102.1/2022.

d. Alokasi Pajak Rokok Triwulan IV Tahun Anggaran 2021 berdasarkan Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 188/941/KPTS/013/2021 tanggal 29 Desember 2021 tentang Penetapan Alokasi Dana Bagi Hasil Pajak Rokok untuk Kabupaten/Kota di Jawa Timur berdasarkan Realisasi Penerimaan Kas Triwulan IV Tahun Anggaran 2021.

e. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 127/PMK.07/2022 tentang Penetapan Kurang Bayar dan Lebih Bayar Dana Bagi Hasil Pada Tahun 2022.

2.2. Kondisi Umum Dan Kebijakan Perubahan Anggaran Belanja Daerah

2.2.1. Kondisi Umum Perubahan Belanja Daerah

Belanja Daerah merupakan semua kewajiban daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan disusun berdasarkan pendekatan anggaran kinerja yang berorientasi pada pencapaian hasil dari input yang direncanakan. Hal tersebut bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran serta memperjelas efektifitas dan efisiensi penggunaan alokasi anggaran. Penyusunan belanja daerah diprioritaskan untuk menunjang efektifitas,

efisiensi dan tanggung jawab dalam pelaksanaan tugas dan fungsi masing-masing satuan kerja perangkat daerah untuk melaksanakan kewajiban daerah yang menjadi kewenangannya.

Kondisi umum Belanja Daerah sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 11 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022, terdapat beberapa perubahan baik perubahan karena adanya penambahan kegiatan baru ataupun pergeseran kegiatan yang disesuaikan dengan perkembangan pelaksanaan APBD. Perubahan-perubahan tersebut antara lain disebabkan:

1. Adanya penyempurnaan program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam Lampiran Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 11 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022.
2. Adanya perubahan perencanaan belanja yang disebabkan:
    a. Penyesuaian anggaran belanja dengan terbitnya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 127/PMK.07/2022 tentang Penetapan Kurang Bayar dan Lebih Bayar Dana Bagi Hasil Pada Tahun 2022.
    b. Penyesuaian belanja daerah dengan terbitnya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 134/PMK.07/2022 tentang Belanja Wajib Penanganan Dampak Inflasi Tahun Anggaran 2022.
    c. Adanya Bantuan Keuangan Khusus dari Provinsi Jawa Timur kepada Pemerintah Kabupaten Kediri;
    d. Perubahan Prioritas terkait kondisi mendesak dan darurat.
    e. Perubahan sasaran SKPD terkait pelaksanaan program dan kegiatan.
3. Adanya Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun 2021 berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 yang harus digunakan dan dianggarkan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022.

Disamping itu, sesuai prinsip efisiensi dan efektifitas, maka dalam mengalokasikan anggaran, Pemerintah Kabupaten Kediri lebih mengutamakan pada aspek sinkronisasi program dan kegiatan antara pemerintah pusat dan daerah serta capaian kinerja dari program dan kegiatan. Dengan memperhatikan

kondisi sosial dan perekonomian daerah, maka pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022, Pemerintah Kabupaten Kediri mengalokasikan anggaran belanja sebesar Rp.3.411.694.440.232,00 mengalami penambahan sebesar Rp.221.995.906.484,00 atau 6,5% dari APBD Tahun Anggaran 2022.

Belanja Daerah disusun sesuai dengan pembagian Urusan Pemerintahan yang diformulasikan ke dalam :

1. urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar;
2. urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar;
3. urusan pemerintahan pilihan;
4. unsur pendukung urusan pemerintahan;
5. unsur penunjang urusan pemerintahan;
6. unsur pengawasan urusan pemerintahan;
7. unsur kewilayahan;
8. unsur pemerintahan umum;

Disusun sesuai dengan pembagian Urusan Pemerintahan yang dirinci sebagai berikut:

Tabel 7

Belanja Daerah Sesuai Pembagian Urusan Pemerintahan Tahun 2022

NO.	SKPD	APBD	PAPBD	BERTAMBAH/ BERKURANG
1	**2**	**3**	**4**	**5 = 4-3**
1	1.01.2.19.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan	918.234.567.169,00	936.292.222.216,00	18.057.655.047,00
2	1.02.0.00.0.00.02.0000 Dinas Kesehatan	265.869.066.896,00	300.467.979.726,00	34.598.912.830,00
3	1.02.0.00.0.00.02.0001 RSUD	252.404.017.868,00	258.110.519.470,00	5.706.501.602,00

	Kabupaten Kediri			
4	1.02.0.00.0.00.02.0002 RSUD SLG	115.641.744.145,00	163.264.157.101,00	47.622.412.956,00
5	1.03.0.00.0.00.03.0000 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	184.064.726.124,00	194.820.782.874,00	10.756.056.750,00
6	1.04.1.03.2.10.04.0000 Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	135.744.530.370,00	143.352.373.576,00	7.607.843.206,00
7	1.05.0.00.0.00.05.0000 Satuan Polisi Pamong Praja	22.424.352.750,00	29.979.858.756,00	7.555.506.006,00
8	1.05.0.00.0.00.29.0000 Badan Penanggulangan Bencana Daerah	9.059.452.500,00	7.708.567.250,00	(1.350.885.250,00)
9	1.06.0.00.0.00.06.0000 Dinas Sosial	12.420.039.510,00	28.690.781.701,00	16.270.742.191,00
10	2.07.3.32.0.00.07.0000 Dinas Tenaga Kerja	7.422.655.120,00	11.894.110.020,00	4.471.454.900,00

1	2	3	4	5 = 4-3
11	2.09.3.27.0.00.08.0000 Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan	26.548.033.695,00	40.386.608.766,00	13.838.575.071,00
12	2.11.0.00.0.00.09.0000 Dinas Lingkungan Hidup	34.330.148.950,00	34.027.603.136,00	(302.545.814,00)
13	2.12.0.00.0.00.10.0000 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	14.880.704.456,00	12.949.713.451,00	(1.930.991.005,00)
14	2.13.0.00.0.00.11.0000 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa	38.313.943.500,00	38.637.607.785,00	323.664.285,00
15	2.14.2.08.0.00.12.0000 Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	25.250.688.506,00	25.867.393.886,00	616.705.380,00
16	2.15.0.00.0.00.13.0000 Dinas Perhubungan	18.339.544.003,00	18.406.480.705,00	66.936.702,00

1	2	3	4	5 = 4-3
17	2.16.2.21.2.20.14.0000 Dinas Komunikasi dan Informatika	17.989.689.131,00	30.803.734.610,00	12.814.045.479,00
18	2.17.0.00.0.00.15.0000 Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	12.164.234.804,00	19.078.955.625,00	6.914.720.821,00
19	2.18.0.00.0.00.16.0000 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	5.426.941.127,00	4.886.970.696,00	(539.970.431,00)
20	2.24.2.23.0.00.17.0000 Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	5.348.173.429,00	4.386.844.800,00	(961.328.629,00)
21	3.25.0.00.0.00.18.0000 Dinas Perikanan	8.692.245.387,00	9.081.485.516,00	389.240.129,00
22	3.26.2.22.0.00.19.0000 Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	16.986.367.618,00	22.340.620.421,00	5.354.252.803,00

1	2	3	4	5 = 4-3
23	3.27.0.00.0.00.20.0000 Dinas Pertanian dan Perkebunan	62.713.624.510,00	74.387.300.897,00	11.673.676.387,00
24	3.30.3.31.0.00.21.0000 Dinas Perdagangan	19.374.993.530,00	23.436.832.568,00	4.061.839.038,00
25	4.01.5.06.0.00.25.0000 Sekretariat Daerah			
a.	4.01.5.06.0.00.25.0001 Bagian Tata Pemerintahan	2.190.456.076,00	986.734.025,00	(1.203.722.051,00)
b.	4.01.5.06.0.00.25.0002 Bagian Hukum	4.295.721.804,00	2.355.089.186,00	(1.940.632.618,00)
c.	4.01.5.06.0.00.25.0003 Bagian Kesejahteraan Rakyat	22.307.965.818,00	44.623.703.390,00	22.315.737.572,00
d.	4.01.5.06.0.00.25.0004 Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam	12.713.932.165,00	14.472.338.465,00	1.758.406.300,00

1	2	3	4	5 = 4-3
31	5.05.0.00.0.00.26.0000 Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah	8.656.144.050,00	9.126.524.940,00	470.380.890,00
32	6.01.0.00.0.00.27.0000 Inspektorat	13.465.507.194,00	11.833.434.526,00	(1.632.072.668,00)
33	7.01.0.00.0.00.30.0000 Kecamatan Mojo	3.226.231.402,00	2.441.729.275,00	(784.502.127,00)
34	7.01.0.00.0.00.31.0000 Kecamatan Kras	3.097.421.034,00	2.825.789.673,00	(271.631.361,00)
35	7.01.0.00.0.00.32.0000 Kecamatan Ngadiluwih	2.998.271.300,00	2.842.707.600,00	(155.563.700,00)
36	7.01.0.00.0.00.33.0000 Kecamatan Kandat	2.584.077.198,00	2.267.800.700,00	(316.276.498,00)
37	7.01.0.00.0.00.34.0000 Kecamatan Wates	2.840.237.749,00	2.378.199.775,00	(462.037.974,00)
38	7.01.0.00.0.00.35.0000 Kecamatan Ngancar	2.314.031.300,00	1.956.327.400,00	(357.703.900,00)
39	7.01.0.00.0.00.36.0000 Kecamatan Puncu	2.797.781.084,00	2.535.459.975,00	(262.321.109,00)
40	7.01.0.00.0.00.37.0000 Kecamatan Plosoklaten	2.863.434.687,00	2.218.062.320,00	(645.372.367,00)

1	2	3	4	5 = 4-3
41	7.01.0.00.0.00.38.0000 Kecamatan Gurah	2.953.511.750,00	2.439.034.545,00	(514.477.205,00)
42	7.01.0.00.0.00.39.0000 Kecamatan Pagu	3.423.887.500,00	2.592.889.824,00	(830.997.676,00)
43	7.01.0.00.0.00.40.0000 Kecamatan Gampengrejo	2.455.100.540,00	2.029.726.100,00	(425.374.440,00)
44	7.01.0.00.0.00.41.0000 Kecamatan Grogol	2.807.031.392,00	2.507.026.166,00	(300.005.226,00)
45	7.01.0.00.0.00.42.0000 Kecamatan Papar	3.062.227.477,00	2.778.107.900,00	(284.119.577,00)
46	7.01.0.00.0.00.43.0000 Kecamatan Purwoasri	3.391.446.200,00	3.085.903.240,00	(305.542.960,00)
47	7.01.0.00.0.00.44.0000 Kecamatan Plemahan	2.797.812.565,00	2.523.089.950,00	(274.722.615,00)
48	7.01.0.00.0.00.45.0000 Kecamatan Pare	5.542.560.819,00	4.847.401.555,00	(695.159.264,00)
49	7.01.0.00.0.00.46.0000 Kecamatan Kepung	2.906.111.106,00	2.441.554.950,00	(464.556.156,00)
50	7.01.0.00.0.00.47.0000 Kecamatan Kandangan	2.885.946.600,00	2.585.315.860,00	(300.630.740,00)

1	2	3	4	5 = 4-3
51	7.01.0.00.0.00.48.0000 Kecamatan Tarokan	3.029.631.130,00	2.796.671.742,00	(232.959.388,00)
52	7.01.0.00.0.00.49.0000 Kecamatan Kunjang	2.845.690.292,00	2.358.632.488,00	(487.057.804,00)
53	7.01.0.00.0.00.50.0000 Kecamatan Banyakan	3.539.473.800,00	2.833.926.300,00	(705.547.500,00)
54	7.01.0.00.0.00.51.0000 Kecamatan Ringinrejo	2.818.850.608,00	2.132.848.700,00	(686.001.908,00)
55	7.01.0.00.0.00.52.0000 Kecamatan Kayen Kidul	2.874.357.830,00	2.064.664.620,00	(809.693.210,00)
56	7.01.0.00.0.00.53.0000 Kecamatan Ngasem	2.531.239.395,00	2.070.864.516,00	(460.374.879,00)
57	7.01.0.00.0.00.54.0000 Kecamatan Badas	2.684.741.300,00	2.333.739.927,00	(351.001.373,00)

1	2	3	4	5 = 4-3
58	7.01.0.00.0.00.55.0000 Kecamatan Semen	3.453.314.683,00	2.594.439.570,00	(858.875.113,00)
59	8.01.0.00.0.00.28.0000 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	12.887.218.590,00	13.069.633.725,00	182.415.135,00
TOTAL		**3.189.860.653.748,00**	**3.411.856.560.232,00**	**221.995.906.484,00**

Sumber Data : BPKAD Kabupaten Kediri

Sehingga pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022, total Belanja Daerah sebesar Rp.3.411.856.560.232,00 apabila dibandingkan dengan Pendapatan Daerah sebesar Rp.2.886.618.430.809,00 terdapat Defisit Anggaran sebesar (Rp. 525.238.129.423,00).

2.2.2. Permasalahan Utama Perubahan Belanja Daerah

Permasalahan utama yang dihadapi dalam menyusun Belanja Daerah pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022 sebagai berikut:

1). Perubahan Alokasi Transfer ke Daerah dan Dana Desa, penyesuaian Pendapatan Asli Daerah dan perubahan alokasi Pendapatan Transfer Antar Daerah.

2). Penyesuaian belanja untuk penanganan dampak Inflasi.

3). Adanya kebijakan dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi terkait dengan program dan kegiatan yang harus dilaksanakan Pemerintah Daerah.

2.2.3. Kebijakan Umum Perubahan Belanja Daerah

Kebijakan Umum Belanja Daerah pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022 adalah untuk membiayai kegiatan sesuai tugas dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam rangka melaksanakan Urusan Pemerintahan Daerah yang menjadi kewenangannya berdasarkan skala prioritas sesuai dengan ketentuan berlaku dan untuk meningkatkan

kesejahteraan masyarakat. Kebijakan belanja daerah dalam penggunaan dana diwujudkan dengan mengevaluasi program/kegiatan yang telah direalisasikan hingga semester pertama selanjutnya melakukan pergeseran rekening belanja untuk disesuaikan dengan kebutuhan belanja daerah dalam semester kedua.

2.2.4. Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Belanja Daerah

Ringkasan Belanja Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022 sebagai berikut :

Tabel 8

Ringkasan Belanja Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022

KODE REKENING	URAIAN	APBD	PAPBD	BERTAMBAH/ BERKURANG
1	2	3	4	5 =4-3
5	**BELANJA**			
5.1	**BELANJA OPERASI**	**2.115.283.517.382,00**	**2.301.051.468.711,00**	**185.767.951.329,00**
5.1.01	Belanja Pegawai	1.142.990.193.643,00	1.052.449.791.797,00	(90.540.401.846,00)
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	795.583.648.203,00	955.804.852.177,00	160.221.203.974,00
5.1.05	Belanja Hibah	114.336.171.989,00	176.971.038.464,00	62.634.866.475,00
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	62.373.503.547,00	115.825.786.273,00	53.452.282.726,00
5.2	**BELANJA MODAL**	**434.534.383.305,00**	**463.260.692.904,00**	**28.726.309.599,00**
5.2.01	Belanja Modal Tanah	15.353.328.350,00	21.632.965.000,00	6.279.636.650,00
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	100.614.437.839,00	137.672.369.109,00	37.057.931.270,00
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	145.439.290.046,00	157.576.736.496,00	12.137.446.450,00

1	2	3	4	5 = 4-3
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	132.046.679.870,00	142.791.293.919,00	10.744.614.049,00
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	38.080.647.200,00	3.587.328.380,00	(34.493.318.820,00)
5.2.06	Belanja Modal Aset Lainnya	3.000.000.000,00	0	(3.000.000.000,00)
5.3	**BELANJA TIDAK TERDUGA**	**45.870.316.061,00**	**14.143.162.201,00**	**(31.727.153.860,00)**
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	45.870.316.061,00	14.143.162.201,00	(31.727.153.860,00)
5.4	**BELANJA TRANSFER**	**594.172.437.000,00**	**633.401.236.416,00**	**39.228.799.416,00**
5.4.01	Belanja Bagi Hasil	24.609.268.000,00	23.642.556.000,00	(966.712.000,00)
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	569.563.169.000,00	609.758.680.416,00	40.195.511.416,00
Jumlah Belanja		**3.189.860.653.748,00**	**3.411.856.560.232,00**	**221.995.906.484,00**

Sumber: BPKAD

2.3. Kondisi Dan Kebijakan Perubahan Anggaran Pembiayaan

2.3.1. Kondisi Umum Perubahan Pembiayaan

Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.

Berdasarkan Pasal 70 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019, ketentuan dalam pembiayaan daerah adalah sebagai berikut:

a. Pembiayaan daerah terdiri atas:
   1) penerimaan pembiayaan; dan
   2) pengeluaran pembiayaan.

b. Pembiayaan daerah dirinci menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, jenis, objek, dan rincian objek pembiayaan daerah.

Adapun pembiayaan pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022 adalah sebagai berikut :

Tabel 9

Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022

Kode	Jenis Pembiayaan Daerah	APBD	PAPBD	Bertambah / (berkurang)
6	**PEMBIAYAAN DAERAH**			
6.01	**PENERIMAAN PEMBIAYAAN**	**433.877.494.194,00**	**559.022.029.423,00**	**125.144.535.229,00**
6.01.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	433.877.494.194,00	559.022.029.423,00	125.144.535.229,00
6	**PEMBIAYAAN DAERAH**			
6.02	**PENGELUARAN PEMBIAYAAN**	**18.783.900.000,00**	**33.783.900.000,00**	**15.000.000.000,00**
6.02.01	**Pembentukan Dana Cadangan**	15.000.000.000,00	30.000.000.000,00	15.000.000.000,00
6.02.02	Penyertaan Modal Daerah	3.783.900.000,00	3.783.900.000,00	0,00

Sumber Data : BPKAD Kabupaten Kediri

2.3.2. Permasalahan Utama Perubahan Pembiayaan

Permasalahan utama pembiayaan pada Rancangan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022 adalah adanya Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun Anggaran 2021 yang harus digunakan dan dianggarkan

kembali pada tahun berjalan dalam rangka menutup defisit anggaran dan penambahan Pembentukan Dana Cadangan.

2.3.3. Kebijakan Umum Perubahan Pembiayaan

Kebijakan Umum Pembiayaan pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022 adalah sebagai berikut:

1. Penggunaan sisa lebih penerimaan anggaran tahun sebelumnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
2. Sisa dana yang berasal dari sumber dana spesifik, dianggarkan kembali atau dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
3. Sisa dana yang berasal dari sumber dana non spesifik digunakan untuk pembangunan daerah yang menjadi prioritas dalam perubahan kebijakan umum APBD.
4. Sisa Lebih Anggaran Tahun 2021 dana BLUD.
5. Pembentukan Dana Cadangan untuk pendanaan pemilihan Bupati Kediri dan Wakil Bupati Kediri Tahun 2024.

BAB III
HASIL PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG MENJADI KEWENANGAN DAERAH

3.1 Capaian Pelaksanaan Program dan Kegiatan

3.1.1 Capaian Kinerja Program sesuai dengan Target Kinerja yang Ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja

Akuntabilitas kinerja sendiri merupakan perwujudan kewajiban suatu instansi Pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah diamanatkan para pemangku kepentingan dalam rangka mencapai misi organisasi secara terukur dengan sasaran/target kinerja yang telah ditetapkan melalui Laporan Kinerja Instansi Pemerintah yang disusun secara periodik. Hal ini mengandung makna bahwa capaian kinerja pemerintahan diukur dengan indikator dan target yang sudah ditetapkan sebelumnya dan disetujui bersama antara pemerintah dan DPRD, yaitu target kinerja yang ada di dalam RPJMD melalui Peraturan Daerah Kabupaten Kediri nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Tahun 2021-2026.

Dalam konteks perencanaan pembangunan dan penganggaran tahunan, maka manajemen kinerja yang dimaksud adalah membandingkan antara capaian kinerja dengan perencanaan kinerja yang sudah dilaksanakan dalam rencana kerja pemerintah daerah (RKPD) Pemerintah Kabupaten Kediri tahun 2022. Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, dinyatakan bahwa Laporan Kinerja Instansi Pemerintah adalah membandingkan antara sasaran strategis, indikator kinerja dan target yang sudah dituangkan dalam Perjanjian Kinerja (PK) dengan realisasi kinerja yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah.

Prinsip-prinsip dan sistematika yang diinformasikan memuat hal-hal sebagai berikut;

1. Perbandingan antara target dan realiasi tahun ini berdasarakan kinerja kepala daerah.
2. Perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan beberapa tahun terakhir.
3. Perbandingan realisasi kinerja sampai tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan jangka menengah/RPJMD.
4. Perbandingan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional (jika ada).
5. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan.
6. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.
7. Analisis atas efektifitas dan efisiensi penggunaan sumber daya.

Pada tahun 2022, Pelaporan kinerja ini adalah tahun pelaporan pertama dalam RPJMD tahun 2021-2026.

Dalam mengukur persentase capaian, rumus yang digunakan adalah sebagai berikut;

a. Persentase capaian positif

   Rumus persentase capaian positif digunakan untuk mengukur target yang meningkat adalah sebagai berikut:

$$\frac{Realisasi}{Target} \; x\,100$$

b. Persentase capaian negatif

   Rumus persentase capaian negatif digunakan untuk mengukur target yang menurun adalah sebagai berikut:

$$\frac{Target - (Realisasi - Target)}{Target} \; x\,100$$

Dalam menentukan keberhasilan capaian kinerja dalam Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Kediri, skala kategori capaian yang digunakan sebagai berikut:

Tabel 10

Skala Kategori Capaian Kinerja

No	Rentang Capaian (%)	Kategori
1	$\geq$ 100	Sangat Baik
2	80 $\leq$ x < 100	Baik
3	60 $\leq$ x $\leq$ 80	Cukup Baik
4	60 <	Kurang Baik

Sumber data : Bag. Organisasi SETDA Kab. Kediri

3.1.2 Perbandingan Target Dan Realisasi Indikator Kinerja

TABEL 11

PERBANDINGAN ANTARA TARGET DAN REALISASI INDIKATOR KINERJA UTAMA

PEMERINTAH KABUPATEN KEDIRI

TAHUN 2022

No		Tujuan/Sasaran	Indikator	Target 2022	Realisasi 2022	Persentase Capaian	Kategori
	Misi 1 **Pengembangan Sumberdaya Manusia yang Berkarakter Nasionalis-Religius**						
1	Tujuan:	Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang unggul dan berdaya saing	Indeks Pembangunan Manusia	73,35	73,46	100,14%	Sangat Baik
			Tingkat Pengangguran Terbuka	5	6,83	136,6 %	Sangat Baik
	Sasaran :	Meningkatnya aksesibilitas dan kualitas pendidikan	Harapan Lama Sekolah	13,25	13,61	102,72%	Sangat Baik
			Rata-rata lama sekolah	8,10	8,23	101,60%	Sangat Baik

No		Tujuan/Sasaran	Indikator	Target 2022	Realisasi 2022	Persentase Capaian	Kategori
		Meningkatnya aksesibilitas dan kualitas layanan kesehatan Masyarakat	Indeks Kesehatan (UHH)	72,61	72,97	100,4%	Sangat Baik
		Meningkatnya kualitas tenaga kerja dan kesempatan kerja	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	70,9%	68,73%	96,93%	Baik
2	Tujuan:	Menurunkan angka kemiskinan	Persentase Angka Kemiskinan	9,832	11,64*	118,38%	Sangat Baik
	Sasaran :	Meningkatnya Kesejahteraan Masyarakat Berbasis Keluarga	Persentase Keluarga Sejahtera	71,11%	70,80%	99,56%	Baik
3	Tujuan:	Meningkatkan harmonisasi dan kondusivitas daerah	Indeks Demokrasi Indonesia (IDI)	60	76,61	127,68%	Sangat Baik
	Sasaran :	Meningkatnya penerapan nilai nasionalisme, agama, dan semangat demokrasi di masyarakat	Tingkat kondusivitas daerah	100%	100%	100%	Sangat Baik
	Misi 2 **Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik**						
1	Tujuan:	Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan	Indeks Reformasi Birorkasi	68	65,66	96,55%	Baik

No		Tujuan/Sasaran	Indikator	Target 2022	Realisasi 2022	Persentase Capaian	Kategori
		dan Pelayaann Publik					
	Sasaran :	Membangun Institusional Pemerintahan yang Efektif dan Bersih	Nilai SAKIP	69,5	68,33	98,3%	Baik
			Indeks Kepuasan Masyarakat	84	85,77	102,10%	Sangat Baik
			Opini BPK	WTP	WTP*	100%	Sangat Baik
			Indeks Persepsi Anti Korupsi	3,7	3,49	94,32%	Baik
		Meningkatnya Professionalitas ASN	Indeks Professionalitas ASN	60	55,22**	92,03%	Baik
		Transformasi digital penyelenggaraan pelayanan public	Indeks SPBE	4.04	2.61	64,60%	Cukup Baik
	Misi 3						

No		Tujuan/Sasaran	Indikator	Target 2022	Realisasi 2022	Persentase Capaian	Kategori
	Pengembangan Ekonomi Kerakyatan dan Peningkatan Investasi Daerah						
1	Tujuan:	Meningkatkan Daya Saing Sektor Ekonomi Daerah	Pertumbuhan Ekonomi	2,34	4,90	209,40%	Sangat Baik
	Sasaran :	Meningkatnya investasi di daerah	Pertumbuhan Realisasi Investasi	5%	28,48%	569,6%	Sangat Baik
		Meningkatnya daya beli masyarakat	Indeks Pengeluaran	1.062.000	963.750	90,74%	Baik
	Misi 4 **Revitalisasi Pertanian untuk Ketahanan dan Swasembada Pangan**						
1	Tujuan:	Meningkatkan Daya Dukung dan Kemandirian Sektor Pertanian	Pertumbuhan PDRB Sektor Pertanian	0,43	0,71*	165,11%	Sangat Baik
	Sasaran :	Meningkatnya Ketersediaan Pangan dan Akses Pangan Masyarakat	Ketersediaan Pangan Utama	143,22	117.48	82.03%	Baik
		Meningkatnya Kesejahteraan Petani	Nilai Tukar Petani	103	103,5	100,48%	Sangat Baik
			Nilai Tukar Petani Perikanan	95	97,62	102,75%	Sangat Baik

No		Tujuan/Sasaran	Indikator	Target 2022	Realisasi 2022	Persentase Capaian	Kategori
	Misi 5 **Peningkatan Infrastruktur dan Konektivitas antar Wilayah**						
1	Tujuan:	Menurunkan Kesenjangan antar Wilayah	Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur	66,90	66,82	99,88%	Baik
	Sasaran :	Meningkatnya Sarana Infrastruktur Daerah	Proporsi Panjang Jaringan Jalan dalam Kondisi Baik	77,12	74,68	96,83%	Baik
			Persentase Jaringan Irigasi dalam Kondisi Baik	88,17	87,99	99,79%	Baik
			Cakupan Penyelesaian Tata Ruang	62,50	50	80%	Baik
			Cakupan desa/kelurahan yang mendapat air minum	78,28%	85,23%	108,87%	Sangat Baik
			Persentase Rumah Layak Huni	16,48%	29,95%	181,73%	Sangat Baik
		Meningkatnya Pelayanan Transportasi Daerah	Nilai Survei Kepuasan Masyarakat terhadap Unit Layanan Perhubungan	65	86	132,30%	Sangat Baik

No		Tujuan/Sasaran	Indikator	Target 2022	Realisasi 2022	Persentase Capaian	Kategori
	Misi 6 **Optimalisasi Kepariwisataan berbasis Kearifan Lokal**						
1	Tujuan:	Meningkatkan Daya Saing Pariwisata Daerah	Pertumbuhan PDRB Sektor Penyediaan Akomodasi dan Makanan Minum	1,41	14,52%	1029,78%	Sangat Baik
	Sasaran :	Meningkatnya Pendapatan Daerah dari Sektor Pariwisata	Pertumbuhan PAD Pariwisata	1	94,59%	9459,00%	Sangat Baik
	Misi 7 **Optimalisasi Tata Kelola Lingkungan Hidup, Sumberdaya Alam dan Mitigasi Bencana**						
1	Tujuan:	Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup dan Kelestarian Sumber Daya Alam	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	53	64.79	122,2%	Sangat Baik
	Sasaran :	Meningkatkan Kualitas Lingkungan	IKA	62,77	62,22	99,12%	Sangat Baik
			IKU	77,5	80,94	104,43%	Sangat Baik
			IKL	37,42	39,34	105,13%	Sangat

No		Tujuan/Sasaran	Indikator	Target 2022	Realisasi 2022	Persentase Capaian	Kategori
							Baik
		Meningkatnya Sinergitas antar Pemerintah, Masyarakat dan Swasta dalam Penanggulangan Bencana	Indeks Resiko Bencana	74	112,47	151,98%	Sangat Baik
	Misi 8 **Pengembangan Seni Budaya, Olahraga dan Kreativitas Pemuda**						
1	Tujuan:	Meningkatkan Potensi dan Budaya Generasi Muda Untuk Membangun Daerah	Tingkat Pelestarian Potensi Seni Budaya Daerah	82%	37,65%	45,91%	Kurang Baik
			Indeks Kapasitas Lembaga Kepemudaan dan Olahraga	79,00	73,96	93,62	Baik
	Sasaran :	Meningkatnya pelestarian Seni Budaya Daerah	Cakupan Event Budaya Skala Kabupaten	6%	25,57%	426,16%	Sangat Baik
		Meningkatnya Daya Dukung Generasi Muda Bagi Daerah	Persentase Kepemudaan dan Olahraga yang dicapai	80,00%	58,26%	72,83%	Cukup Baik
	Misi 9						

No		Tujuan/Sasaran	Indikator	Target 2022	Realisasi 2022	Persentase Capaian	Kategori
	Perwujudan Kemandirian Desa untuk Kesejahteraan Masyarakat						
1	Tujuan:	Mendorong Daya Saing Ekonomi Masyarakat dan Desa	Rata-rata Indeks Desa Membangun Tingkat Kabupaten	0,71	0,73	102,81%	Sangat Baik
	Sasaran	Meningkatnya Kemandirian Masyarakat Desa	Persentase Desa Maju dan Desa Mandiri didasarkan IDM	40,82	63,56	155,70%	Sangat Baik

Sumber data : Bag. Organisasi SETDA Kab. Kediri

Capaian Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Kediri pada tahun 2022 ini terdapat 26 indikator kinerja yang masuk dalam kategori sangat baik, 14 indikator kinerja masuk dalam kategori baik, dan 3 indikator kinerja masuk dalam kategori cukup baik, serta 1 indikator kinerja yang masuk dalam kategori kurang baik. Dengan hal tersebut, 59,09% masuk dalam kategori sangat baik, 31,8% masuk dalam kategori baik, 6,8% masuk dalam kategori cukup baik dan 2,27% masuk dalam kategori kurang baik. Dengan demikian, mayoritas indikator kinerja utama Pemerintah Kabupaten Kediri dicapai dengan kategori sangat baik.

TABEL 12

PERBANDINGAN CAPAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA DENGAN CAPAIAN DUA TAHUN TERAKHIR

PEMERINTAH KABUPATEN KEDIRI

TAHUN 2022

No		Keterangan	Indikator	Capaian 2020			Capaian 2021			Capaian 2022		
				Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)
	Misi 1 **Pengembangan Sumberdaya Manusia yang Berkarakter Nasionalis-Religius**											
1	Tujuan:	Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang unggul dan berdaya saing	Indeks Pembangunan Manusia	**	72,05	**	72,784	72,56	99%	73,358	73,46	100,14%
			Tingkat Pengangguran Terbuka	**	5,24	**	5,1	5,15	99,01%	5	6,83	136,6 %
	Sasaran:	Meningkatnya	Harapan Lama	13,21	12,87	97,43	13,2	13,44	98,46	13,25	13,61	102,72%

No		Keterangan	Indikator	Capaian 2020			Capaian 2021			Capaian 2022		
				Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)
		aksesibilitas dan kualitas pendidikan	Sekolah									
			Rata-rata lama Sekolah	**	8,02	**	8,05	8,08	100,3%	8,10	8,23	101,60%
		Meningkatnya aksesibilitas dan kualitas layanan kesehatan masyarakat	Indeks Kesehatan (UHH)	**	72,61	**	72,55	72,65	100,1%	72,61	72,97	100,4%
		Meningkatnya kualitas tenaga kerja dan kesempatan kerja	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	62	70,65	110,39	70,75	69,34	103,5	70,9%	68,73%	96,93%
2	Tujuan:	Menurunkan angka kemiskinan	Persentase Angka Kemiskinan	**	11,40	**	10,279	11,64	86,7%	9,832	11,64*	118,38%

No		Keterangan	Indikator	Capaian 2020			Capaian 2021			Capaian 2022		
				Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)
	Sasaran:	Meningkatnya Kesejahteraan Masyarakat Berbasis Keluarga	Persentase Keluarga Sejahtera	**	**	**	70,61	70,51%	99,8%	71,11%	70,8%	99,56%
3	Tujuan:	Meningkatkan harmonisasi dan kondusivitas daerah	Indeks Demokrasi Indonesia (IDI)	**	**	**	**	**	**	60%	76,71	127,68%
	Sasaran:	Meningkatnya penerapan nilai nasionalisme, agama, dan	Tingkat kondusivitas daerah	**	100%	**	100%	100%	100%	100%	100%	100%

No		Keterangan	Indikator	Capaian 2020			Capaian 2021			Capaian 2022		
				Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)
		semangat demokrasi di masyarakat										
	Misi 2 **Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik**											
1	Tujuan:	Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayaann Publik	Indeks Reformasi Birorkasi	**	61,03	**	64	63,36	99%	68	65,66	96,55%
	Sasaran:	Membangun Institusional Pemerintahan yang Efektif dan Bersih	Nilai SAKIP	70	67,18	94,91	68	68,21	85,26%	69,5	68,33	98,3%
			Indeks Kepuasan Masyarakat	85	84,14	96,7	83	84,23	101,48%	84	85,77	102,10%

No		Keterangan	Indikator	Capaian 2020			Capaian 2021			Capaian 2022		
				Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)
			Opini BPK	WTP	WTP	100%	WTP	WTP	100%	WTP	WTP*	100%
			Indeks Persepsi Anti Korupsi	**	3,68	**	3,69	3,33	90%	3,7	3,49	94,32%
		Meningkatnya Professionalitas ASN	Indeks Professionalitas ASN	84	82,4	98%	57,00	54.41	95%	60	54,91	91,5%
		Transformasi digital penyelenggaraan pelayanan public	Indeks SPBE	**	3.56	**	3,88	3.12	80%	4.04	2.61	64,60%
	Misi 3 **Pengembangan Ekonomi Kerakyatan dan Peningkatan Investasi Daerah**											
1	Tujuan:	Meningkatkan Daya Saing Sektor	Pertumbuhan Ekonomi	**	-2,41	**	-0,88	3,06	347%	2,34	4,90	209,40%

No		Keterangan	Indikator	Capaian 2020			Capaian 2021			Capaian 2022		
				Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)
		Ekonomi Daerah										
	Sasaran:	Meningkatnya investasi di daerah	Pertumbuhan Realisasi Investasi	502.748,00	2.637.140,00	524%	517.830,71	636.142,00	122,85%	5%	28,48%	569,6%
		Meningkatnya daya beli masyarakat	Indeks Pengeluaran	**	916.000	**	979.746	927.250	94,69%	1.062.451	963.750	90,7%
	Misi 4 **Revitalisasi Pertanian untuk Ketahanan dan Swasembada Pangan**											
1	Tujuan:	Meningkatkan Daya Dukung dan Kemandirian Sektor Pertanian	Pertumbuhan PDRB Sektor Pertanian	**	0,42	**	0,42	0,71	169%	0,43	0,71*	165,11%
	Sasaran:	Meningkatnya Ketersediaan Pangan dan Akses	Ketersediaan Pangan Utama	140,40	153,60	109,40%	141,80	144,58	101,96%	143,22	117.48	82.03%

No		Keterangan	Indikator	Capaian 2020			Capaian 2021			Capaian 2022		
				Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)
		Pangan Masyarakat										
		Meningkatnya Kesejahteraan Petani	Nilai Tukar Petani	**	100, 85	**	102	100, 02	98%	103	103,5	100,48%
			Nilai Tukar Petani Perikanan	**	*	**	**	*	**	95	97,62	102,75%
	Misi 5 **Peningkatan Infrastruktur dan Konektivitas antar Wilayah**											
1	Tujuan:	Menurunkan Kesenjangan antar Wilayah	Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur	**	66,19	**	66,45	66,69	100,36%	66,90	66,82	99,88%
	Sasaran:	Meningkatnya Sarana Infrastruktur Daerah	Proporsi Panjang Jaringan Jalan dalam Kondisi Baik	80,50	86,94	90,98	86,95	76,61	104,61%	88,17	87,99	99,79%

No		Keterangan	Indikator	Capaian 2020			Capaian 2021			Capaian 2022		
				Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)
			Persentase Jaringan Irigasi Dalam Kondisi Baik	93	69,74	93,48	73,23	88,63	101,93%	77,12	74,68	96,83%
			Cakupan Penyelesaian Tata Ruang	**	**	**	50%	**	**	62,50	50	80%
			Cakupan desa/kelurahan yang mendapat air minum	**	83,22%	**	74,57	84,89	113,8%	78,28%	85,23%	108,87%
			Persentase Rumah Layak Huni	**	*	**	0,42%	15,22%	**	16,48%	29,95%	181,72%
		Meningkatnya Pelayanan Transportasi Daerah	Nilai Survei Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Perhubungan	76,5	83,82	109,57%	60	84,15	140,25%	65	86	132,30%

No		Keterangan	Indikator	Capaian 2020			Capaian 2021			Capaian 2022		
				Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)
	Misi 6 **Optimalisasi Kepariwisataan berbasis Kearifan Lokal**											
1	Tujuan:	Meningkatkan Daya Saing Pariwisata Daerah	Pertumbuhan PDRB Sektor Penyediaan Akomodasi dan Makanan Minum	**	-5,96	**	-5,32	2,35%	441,72%	1,41	14,52%	1029,78%
	Sasaran:	Meningkatnya Pendapatan Daerah dari Sektor Pariwisata	Pertumbuhan PAD Pariwisata	**	**	**	0,5%	25,43%	5086%	1%	94,59%	9459,00%
	Misi 7 **Optimalisasi Tata Kelola Lingkungan Hidup, Sumberdaya Alam dan Mitigasi Bencana**											
1	Tujuan:	Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup dan Kelestarian	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	**	63,10	**	50	62,84	125%	53	64.79	122,2%

No		Keterangan	Indikator	Capaian 2020			Capaian 2021			Capaian 2022		
				Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)
		Sumber Daya Alam										
	Sasaran:	Meningkatkan Kualitas Lingkungan	IKA	**	62,67	**	62,72	62,77	100,07%	62,77	62,22	99,12%
			IKU	**	77,38	**	77,44	76,68	99,01%	77,5	80,94	104,43%
			IKL	**	37,42	**	37,42	37,34	99,78%	37,42	39,34	105,13%
		Meningkatnya Sinergitas antar Pemerintah, Masyarakat dan Swasta dalam Penanggulangan Bencana	Indeks Resiko Bencana	**	131,5	**	69	121,46	**	74	112,47	151,98%
	Misi 8 **Pengembangan Seni Budaya, Olahraga dan Kreativitas Pemuda**											

No		Keterangan	Indikator	Capaian 2020			Capaian 2021			Capaian 2022		
				Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)
1	Tujuan:	Meningkatkan Potensi dan Budaya Generasi Muda Untuk Membangun Daerah	Tingkat Pelestarian Potensi Seni Budaya Daerah	**	80,85%	**	80%	87%	108,7%	82%	37,65%	45,91%
			Indeks Kapasitas Lembaga Kepemudaan dan Olahraga	**	**	**	70,00	48,37	**	79,00	73,96	93,62
	Sasaran:	Meningkatnya pelestarian Seni Budaya Daerah	Cakupan Event Budaya Skala Kabupaten	**	**	**	5%	66,67%	**	6%	25,57%	426,16%
		Meningkatnya Daya Dukung Generasi Muda Bagi Daerah	Persentase Kepemudaan dan Olahraga yang dicapai	**	75%	**	75%	80%	**	80,00%	58,26%	72,83%

No		Keterangan	Indikator	Capaian 2020			Capaian 2021			Capaian 2022		
				Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)
	Misi 9 **Perwujudan Kemandirian Desa untuk Kesejahteraan Masyarakat**											
1	Tujuan:	Mendorong Daya Saing Ekonomi Masyarakat dan Desa	Rata-rata Indeks Desa Membangun Tingkat Kabupaten	**	**	**	**	**	**	0,71	0,73	102,81%
	Sasaran	Meningkatnya Kemandirian Masyarakat Desa	Persentase Desa Maju dan Desa Mandiri didasarkan IDM	**	**	**	33,82	**	**	40,82	63,56	155,70%

Sumber data : Bag. Organisasi SETDA Kab. Kediri

**) Indikator yang digunakan adalah indikator dalam RPJMD tahun 2021-2026 yang tidak ada pada RPJMD sebelumnya.

***) Data Sementara

TABEL 13

PERBANDINGAN REALISASI TAHUN 2022 DENGAN TARGET AKHIR RPJMD

PEMERINTAH KABUPATEN KEDIRI

TAHUN 2022

No		Keterangan	Indikator	Realisasi 2022	Target Akhir RPJMD	Persentase Capaian
	Misi 1 **Pengembangan Sumberdaya Manusia yang Berkarakter Nasionalis-Religius**					
1	Tujuan:	Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang unggul dan berdaya saing	Indeks Pembangunan Manusia	73,46	75,654	97,09%
			Tingkat Pengangguran Terbuka	6,83	4,6	148.47%
	Sasaran:	Meningkatnya aksesibilitas dan kualitas Pendidikan	Harapan Lama Sekolah	13,61	13,65	99,70%
			Rata-rata lama	8,23	8,3	99,15%

No		Keterangan	Indikator	Realisasi 2022	Target Akhir RPJMD	Persentase Capaian
			Sekolah			
		Meningkatnya aksesibilitas dan kualitas layanan kesehatan masyarakat	Indeks Kesehatan (UHH)	72,97	72,87	100,13%
		Meningkatnya kualitas tenaga kerja dan kesempatan kerja	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	68,73	71,5	96,12%
2	Tujuan:	Menurunkan angka kemiskinan	Persentase Angka Kemiskinan	11,64*	8,044	144,70%
	Sasaran:	Meningkatnya Kesejahteraan Masyarakat Berbasis Keluarga	Persentase Keluarga Sejahtera	70,80%	73,11	96,84%
3	Tujuan:	Meningkatkan harmonisasi dan kondusivitas daerah	Indeks Demokrasi Indonesia (IDI)	76,71	70%	109,58%
	Sasaran:	Meningkatnya penerapan nilai nasionalisme, agama, dan	Tingkat kondusivitas daerah	100%	100%	100%

No		Keterangan	Indikator	Realisasi 2022	Target Akhir RPJMD	Persentase Capaian
		semangat demokrasi di masyarakat				
	Misi 2 **Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik**					
1	Tujuan:	Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayaann Publik	Indeks Reformasi Birorkasi	65,66	80%	82,07%
	Sasaran:	Membangun Institusional Pemerintahan yang Efektif dan Bersih	Nilai SAKIP	68,33	82	83,33%
			Indeks Kepuasan Masyarakat	85,77	86	99,73%

No		Keterangan	Indikator	Realisasi 2022	Target Akhir RPJMD	Persentase Capaian
			Opini BPK	WTP*	WTP	100%
			Indeks Persepsi Anti Korupsi	3,49	3,8	91,84%
		Meningkatnya Professionalitas ASN	Indeks Professionalitas ASN	55,22**	71	77,77%
		Transformasi digital penyelenggaraan pelayanan publik	Indeks SPBE	2.61	5	52,2%
	Misi 3 **Pengembangan Ekonomi Kerakyatan dan Peningkatan Investasi Daerah**					
1	Tujuan:	Meningkatkan Daya Saing Sektor Ekonomi Daerah	Pertumbuhan Ekonomi	4,90	6,22	78,77%
	Sasaran:	Meningkatnya investasi di daerah	Pertumbuhan Investasi Daerah	28,48%	9%	316,44%
		Meningkatnya daya beli masyarakat	Indeks Pengeluaran	963.750	1.393.267	69,17%
	Misi 4 **Revitalisasi Pertanian untuk Ketahanan dan Swasembada Pangan**					
1	Tujuan:	Meningkatkan Daya Dukung dan Kemandirian Sektor Pertanian	Pertumbuhan PDRB Sektor Pertanian	0,71*	0,44%	161,36%

No		Keterangan	Indikator	Realisasi 2022	Target Akhir RPJMD	Persentase Capaian
	Sasaran:	Meningkatnya Ketersediaan Pangan dan Akses Pangan Masyarakat	Ketersediaan Pangan Utama	143.22	117.48	82.03%
		Meningkatnya Kesejahteraan Petani	Nilai Tukar Petani	105	98,57%	105
			Nilai Tukar Petani Perikanan	97,62	97	100,63%
	Misi 5 **Peningkatan Infrastruktur dan Konektivitas antar Wilayah**					
1	Tujuan:	Menurunkan Kesenjangan antar Wilayah	Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur	66,82	69,30%	96,42%
	Sasaran:	Meningkatnya Sarana Infrastruktur Daerah	Proporsi Panjang Jaringan Jalan Kabupaten dalam Kondisi Baik	87,99	89,69%	98,19%
			Persentase Jaringan Irigasi dalam Kondisi Baik	74,68	100%	74,68%
			Cakupan Penyelesaian Peraturan Tata Ruang	50%	71,42%	70,00%
			Cakupan desa/kelurahan yang mendapat layanan air minum	85,23%	93,15%	91,49%

No		Keterangan	Indikator	Realisasi 2022	Target Akhir RPJMD	Persentase Capaian
			Persentase Rumah Layak Huni	29,95%	82,51%	36,29%
		Meningkatnya Pelayanan Transportasi Daerah	Nilai Survei Kepuasan Masyarakat terhadap Unit Layanan Perhubungan	86	85	101,17%
	Misi 6 **Optimalisasi Kepariwisataan berbasis Kearifan Lokal**					
1	Tujuan:	Meningkatkan Daya Saing Pariwisata Daerah	Pertumbuhan PDRB Sektor Penyediaan Akomodasi dan Makanan Minum	14,52	5,04	288,09%
	Sasaran:	Meningkatnya Pendapatan Daerah dari Sektor Pariwisata	Pertumbuhan PAD Pariwisata	94,59	9	1051,00%
	Misi 7 **Optimalisasi Tata Kelola Lingkungan Hidup, Sumberdaya Alam dan Mitigasi Bencana**					

No		Keterangan	Indikator	Realisasi 2022	Target Akhir RPJMD	Persentase Capaian
1	Tujuan:	Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup dan Kelestarian Sumber Daya Alam	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	64,79	65	99,56%
	Sasaran:	Meningkatkan Kualitas Lingkungan	IKA	62,22	62,97	98,80%
			IKU	80,94	77,68	104,19%
			IKL	39,34	37,42	105,13%
		Meningkatnya Sinergitas antar Pemerintah, Masyarakat dan Swasta dalam Penanggulangan Bencana	Indeks Resiko Bencana	112,47	90	124,96%
	Misi 8 **Pengembangan Seni Budaya, Olahraga dan Kreativitas Pemuda**					
1	Tujuan:	Meningkatkan Potensi dan Budaya Generasi Muda Untuk Membangun Daerah	Tingkat Pelestarian Potensi Seni Budaya Daerah	37,65	90%	41,8%
			Indeks Kapasitas Lembaga Kepemudaan dan Olahraga	73,96	99%	74,70%
	Sasaran:	Meningkatnya pelestarian Seni Budaya Daerah	Cakupan Event Budaya Skala Kabupaten	25,57%	10%	255,7%

No		Keterangan	Indikator	Realisasi 2022	Target Akhir RPJMD	Persentase Capaian
		Meningkatnya Daya Dukung Generasi Muda Bagi Daerah	Persentase Kepemudaan dan Olahraga yang dicapai	58,26%	100%	58,26%
	Misi 9 **Perwujudan Kemandirian Desa untuk Kesejahteraan Masyarakat**					
1	Tujuan:	Mendorong Daya Saing Ekonomi Masyarakat dan Desa	Rata-rata Indeks Desa Membangun Tingkat Kabupaten	0,73	0,75	97,33%
	Sasaran	Meningkatnya Kemandirian Masyarakat Desa	Persentase Desa Maju dan Desa Mandiri didasarkan IDM	63,56	68,80	92,38%

Sumber data : Bag. Organisasi SETDA Kab. Kediri

3.2 Analisa Efisiensi Sumber Daya

Analisa efisiensi digunakan untuk mengukur ketepatan cara dalam mencapai target dalam menjalankan sesuatu dengan memerhatikan waktu, tenaga, biaya. Analisa dalam hal ini menggunakan pendekatan perbandingan hasil realisasi kinerja dan realisasi anggaran. Hasil perbandingan tersebut dikategorisasikan menggunakan penedekatan jika perhitungan efisiensi menghasilkan angka lebih dari 0 maka proses yang dihasilkan dalam mencapai indikator tersebut efisien. Namun jika perhitungan yang dihasilkan kurang dari 0 maka proses yang dihasilkan dalam mencapai indikator tersebut tidak efisien.

Efisiensi merupakan hal penting untuk meninjau proses yang telah dilaksanakan. Dari analisa efisiensi tersebut menggambarkan ketepatan dalam sisi manajemen waktu, tenaga yang terfokus, dan penggunaan biaya yang sesuai. Apabila hasil analisa masuk kedalam kategori efisien, maka dapat disimpulkan bahwa proses pelaksanaan kinerja tersebut memiliki tingkat ketepatan waktu yang tinggi, ketepatan tenaga, dan ketepatan alokasi biaya yang tinggi. Namun, apabila hasil analisa masuk kedalam kategori tidak efisien maka didapati adanya proses pelaksanaan kinerja yang memiliki tingkat ketepatan waktu yang rendah, ketepatan tenaga yang rendah, serta ketepatan alokasi biaya yang rendah.

Kendati demikian, tidak mengesampingkan pula terdapatnya faktor-faktor eksternal yang berdampak besar terhadap pencapaian kinerja. Baik itu berdampak positif ataupun berdampak negatif, diluar proses internal yang telah dilaksanakan. Oleh karena demikian, faktor-faktor eksternal tersebut turut dijadikan variabel pencapaian kinerja disamping faktor-faktor proses pelaksanaan kinerja secara internal. Faktor penunjang dan penghambat tersebut dijelaskan dalam penjelasan pelaksanaan sasaran strategis.

Analisa efisiensi Sumber Daya dianalisa dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$\frac{Realisasi\ Kinerja}{Target\ Kinerja} \times 100 - \frac{Realisasi\ Anggaran}{Alokasi\ Anggaran} \times 100 = Hasil\ Efisiensi$$

Rentang kategorisasi yang digunakan adalah sebagai berikut:

Tabel 14

Rentang Kategori Efisiensi

No	Hasil Analisa Efisiensi	Kategori
1	≥ 0	Efisien
2	0 <	Tidak Efisien

Sumber data : Bag. Organisasi SETDA Kab. Kediri

Analisa efisiensi dari Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Kediri tahun 2022 terdapat dalam tabel sebagai berikut:

TABEL 15

PERBANDINGAN KINERJA DAN ANGGARAN

PEMERINTAH KABUPATEN KEDIRI

TAHUN 2022

No	Sasaran Strategis	Indikator	Kinerja			Anggaran			Efisiensi	Ket
			Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)		
	Misi 1 **Pengembangan Sumberdaya Manusia yang Berkarakter Nasionalis-Religius**									
1	Meningkatnya aksesibilitas dan kualitas pendidikan	Harapan Lama Sekolah	13,25	13,61	102,72%	300.994.956.605,00	285.815.360.697,17	94,96%	7,76	Efisien
		Rata-rata lama Sekolah	8,1	8,23	101,60%				6,66	Efisien
2	Meningkatnya aksesibilitas dan	Indeks Kesehatan	72,61	72,91	100,4%	300.467.979.726,00	255.553.761.073,53	85%	15%	Efisien

No	Sasaran Strategis	Indikator	Kinerja			Anggaran			Efisiensi	Ket
			Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)		
	kualitas layanan kesehatan masyarakat	(UHH)								
3	Meningkatnya kualitas tenaga kerja dan kesempatan kerja	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	70,9	68,73	96,8%	8.481.063.220	8.002.924.270	95,4%	1,4%	Efisien
4	Meningkatnya Kesejahteraan Masyarakat Berbasis Keluarga	Persentase Keluarga Sejahtera	71%	68,73%	99,56%	8.481.063.220	8.002.924.270	88,9%	10,66	Efisien
5	Meningkatnya penerapan nilai nasionalisme, agama, dan semangat demokrasi di masyarakat	Tingkat kondusivitas daerah	100%	100%	100%	10.805.557.825	9.666.355.730	97%	3%	Efisien

No	Sasaran Strategis	Indikator	Kinerja			Anggaran			Efisiensi	Ket
			Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)		
	Misi 2 **Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik**									
6	Membangun Institusional Pemerintahan yang Efektif dan Bersih	Nilai SAKIP	69,5	68,33	98,3%	1.284.103.361	1.245.660.071	97%	1,3%	Efisien
		Indeks Kepuasan Masyarakat	84	85,77	102%	-	-	102%	102%	Efisien
		Opini BPK	WTP	WTP*	100%	644.731.486.777	629.219.029.288	97%	3%	Efisien

No	Sasaran Strategis	Indikator	Kinerja			Anggaran			Efisiensi	Ket
			Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)		
		Indeks Persepsi Anti Korupsi	3,7	3,49	94%	5.273.228.555	4.401.187.945	83%	11%	Efisien
7	Meningkatnya Professionalitas ASN	Indeks Professionalitas ASN	60	55,22**	92%	10.796.127.780,00	9.972.779.406	92,37%	0,37%	Efisien
8	Transformasi digital penyelenggaraan pelayanan public	Indeks SPBE	4.04	2.61	64.60%	26.355.597.110	22.427.677.662	86.41%	-21,81%	Tidak Efisien
	Misi 3 **Ekonomi Kerakyatan dan Peningkatan Investasi Daerah**									
9	Meningkatnya investasi di daerah	Pertumbuhan Realisasi	5%	28,48%	569,6%	2.238.507.565	2.180.948.022	97,4%	472,2	Efisien

No	Sasaran Strategis	Indikator	Kinerja			Anggaran			Efisiensi	Ket
			Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)		
		Investasi								
	Meningkatnya daya beli masyarakat	Indeks Pengeluaran	1.062.000	963.750	90%	23.436.832.568	22.395.012.691	95,55%	-5,55%	Tidak Efisien
	Misi 4 **Revitalisasi Pertanian untuk Ketahanan dan Swasembada Pangan**									
10	Meningkatnya Ketersediaan Pangan dan Akses Pangan Masyarakat	Ketersediaan Pangan Utama	143,22	117.48	82.03%	3.033.780.685,00	2.959.635.157,00	97.56%	-15,53	Tidak Efisien
12	Meningkatnya Kesejahteraan Petani	Nilai Tukar Petani	103	103,5	100,5%	50.852.697.717	48.059.669.388	94,5%	6%	Efisien
		Nilai Tukar Petani Perikanan	95	97,62	102,76%	9.081.485.516	8.946.980.596	98,52%	4,24%	Efisien
	Misi 5									

No	Sasaran Strategis	Indikator	Kinerja			Anggaran			Efisiensi	Ket
			Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)		
	Infrastruktur dan Konektivitas antar Wilayah									
13	Meningkatnya Sarana Infrastruktur Daerah	Proporsi Panjang Jaringan Jalan dalam Kondisi Baik	77,12	74,68	96,83	19.185.220.174	17.273.256.795	90,03	6,8%	Efisien
		Persentase Jaringan Jalan Dalam Kondisi Baik	88,17	87,99	99,79	82.712.842.305	74.839.984.392	90,48	9,37%	Efisien
		Cakupan Penyelesaian Tata Ruang	62,50	50	80,00	2.235.084.400	1.572.044.821	70,33	19,67 %	Efisien
		Cakupan desa/kelurahan yang mendapat	78,28 %	85,23%	108,87%	6.282.966.300,00	5.941.065.156,00	94,56%	14,31	Efisien

No	Sasaran Strategis	Indikator	Kinerja			Anggaran			Efisiensi	Ket
			Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)		
		air minum								
		Persentase Rumah Layak Huni	16,48 %	29,95%	181,72%	13.312.796.450,00	13.306.280.110,00	99,95%	81,77	Efisien
14	Meningkatnya Pelayanan Transportasi Daerah	Nilai Survei Kepuasan Masyarakat terhadap Unit Layanan Perhubungan	65	86	132,31%	18.406.480.705,00	18.035.307.042,00	97,98%	34,33 %	Efisien
	Misi 6 **Kepariwisataan berbasis Kearifan Lokal**									
15	Meningkatnya Pendapatan Daerah dari Sektor	Pertumbuhan PAD Pariwisata	1%	94,59%	9459,00%	2.000.000.000	2.898.646.000	144,93 %	9.314,07	Efisien

No	Sasaran Strategis	Indikator	Kinerja			Anggaran			Efisiensi	Ket
			Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)		
	Pariwisata									
	Misi 7 **Tata Kelola Lingkungan Hidup, Sumberdaya Alam dan Mitigasi Bencana**									
16	Meningkatkan Kualitas Lingkungan	IKA	66,77	62,22	99,1	24.595.969.625	23.613.748.225	96%	3,1	Efisien
		IKU	77,5	80,94	104,1				8,1%	Efisien
		IKL	37,45	39,34	105,1				9,1%	Efisien
17	Meningkatnya Sinergitas antar Pemerintah, Masyarakat dan Swasta dalam Penanggulangan Bencana	Indeks Resiko Bencana	123,59	112,47	108,9	7.708.567.250	6.103.422.660	79,18%	29,72	Efisien
	Misi 8									

No	Sasaran Strategis	Indikator	Kinerja			Anggaran			Efisiensi	Ket
			Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)		
	Pengembangan Seni Budaya, Olahraga dan Kreativitas Pemuda									
18	Meningkatnya pelestarian Seni Budaya Daerah	Cakupan Event Budaya Skala Kabupaten	6%	25,57%	426,16%	22.340.620.421	20.882.141.525	93,47%	332,69 %	Efisien
19	Meningkatnya Daya Dukung Generasi Muda Bagi Daerah	Persentase Kepemudaan dan Olahraga yang dicapai	80%	58,26%	72,83%	2.231.421.200,00	1.489.710.000,00	66,76%	6,07%	Efisien

	Misi 9 **Perwujudan Kemandirian Desa untuk Kesejahteraan Masyarakat**									
20	Meningkatnya Kemandirian Masyarakat Desa	Persentase Desa Maju dan Desa Mandiri didasarkan IDM	40,82	63,56	155%	39.649.082.785	38.278.401.534	96,54%	58,56 %	Efisien

Sumber data : Bag. Organisasi SETDA Kab. Kediri

Dari perhitungan diatas, sasaran strategis yang masuk dalam kategori efisien terdapat 28 sasaran. Sedangkan 3 sasaran strategis lainnya masuk dalam kategori tidak efisien. Persentase sasaran yang masuk dalam kategori efisien adalah 89%, sedangkan persentase sasaran yang masuk dalam kategori tidak efisien adalah 11%. Dengan demikian, mayoritas capaian efisiensi sasaran strategis Pemerintah Kabupaten Kediri masuk dalam kategori efisien.

TABEL 16

PERBANDINGAN CAPAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA DENGAN CAPAIAN PROVINSI DAN NASIONAL

PEMERINTAH KABUPATEN KEDIRI

TAHUN 2022

No		Tujuan/Sasaran	Indikator	Kabupaten Kediri	Provinsi Jawa Timur	Nasional	Sumber Data	Keterangan
	Misi 1 **Pengembangan Sumberdaya Manusia yang Berkarakter Nasionalis-Religius**							
1	Tujuan:	Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang unggul dan berdaya saing	Indeks Pembangunan Manusia	73,46	72.75	72,91	BPS	Provinsi (+) Nasional (+)
			Tingkat Pengangguran Terbuka	6,83	5,49	5,68	BPS	Provinsi (+) Nasional (+)
	Sasaran:	Meningkatnya aksesibilitas dan kualitas Pendidikan	Harapan Lama Sekolah	13,61	13,37	13,10	BPS	Provinsi (+) Nasional (+)

No		Tujuan/Sasaran	Indikator	Kabupaten Kediri	Provinsi Jawa Timur	Nasional	Sumber Data	Keterangan
			Rata-rata lama sekolah	8,23	8,03	8,69	BPS	Provinsi (+) Nasional (-)
		Meningkatnya aksesibilitas dan kualitas layanan kesehatan masyarakat	Indeks Kesehatan (UHH)	72,97	71,74	71,85	BPS	Provinsi (+) Nasional (+)
		Meningkatnya kualitas tenaga kerja dan kesempatan kerja	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	68,73%	61,75%*	68,63%	BPS	Provinsi (+) Nasional (+)
2	Tujuan:	Menurunkan angka kemiskinan	Persentase Angka Kemiskinan	11,64*	10,49*	9,54*	BPS	Provinsi (+) Nasional (+)
	Sasaran:	Meningkatnya Kesejahteraan Masyarakat Berbasis Keluarga	Persentase Keluarga Sejahtera	68,73%	-	-		
3	Tujuan:	Meningkatkan harmonisasi dan	Indeks Demokrasi Indonesia (IDI)	76,71%	81,31%*	78,12%*	BPS	Provinsi (-) Nasional (-)

No		Tujuan/Sasaran	Indikator	Kabupaten Kediri	Provinsi Jawa Timur	Nasional	Sumber Data	Keterangan
		kondusivitas daerah						
	Sasaran:	Meningkatnya penerapan nilai nasionalisme, agama, dan semangat demokrasi di masyarakat	Tingkat kondusivitas daerah	100%	100%	-	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Timur	Provinsi (=)
	Misi 2 **Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik**							
1	Tujuan:	Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayaann Publik	Indeks Reformasi Birorkasi	65,66	76,71*	-	Kementerian PAN & RB	Provinsi (-)
	Sasaran:	Membangun Institusional Pemerintahan yang Efektif dan Bersih	Nilai SAKIP	68,33	83,17*	-	Kementerian PAN & RB	Provinsi (-)

No		Tujuan/Sasaran	Indikator	Kabupaten Kediri	Provinsi Jawa Timur	Nasional	Sumber Data	Keterangan
			Indeks Kepuasan Masyarakat	85,77	90.5	-	Biro Organisasi Provinsi Jawa Timur	Provinsi (-)
			Opini BPK	WTP	WTP	-	Biro Organisasi Provinsi Jawa Timur	Provinsi (=)
			Indeks Persepsi Anti Korupsi	3,49	-	3,93	BPS	Nasional (-)
		Meningkatnya Professionalitas ASN	Indeks Professionalitas ASN	55,22	-	-		
		Transformasi digital penyelenggaraan pelayanan public	Indeks SPBE	2.61	2,68	2,76	Kementerian PAN & RB	Provinsi (-) Nasional (-)
	Misi 3 **Pengembangan Ekonomi Kerakyatan dan Peningkatan Investasi Daerah**							
1	Tujuan:	Meningkatkan Daya Saing Sektor Ekonomi Daerah	Pertumbuhan Ekonomi	3.06%*	3,57%*	5,44%*	BPS	Provinsi (-) Nasional (-)

No		Tujuan/Sasaran	Indikator	Kabupaten Kediri	Provinsi Jawa Timur	Nasional	Sumber Data	Keterangan
	Sasaran:	Meningkatnya investasi di daerah	Pertumbuhan Realisasi Investasi	28,48%	38,8%	42,1%	Kementerian Investasi/BKPM	Provinsi (-) Nasional (-)
		Meningkatnya daya beli masyarakat	Indeks Pengeluaran	963.750	999,333	956,833	BPS	Provinsi (-) Nasional (+)
	Misi 4 **Revitalisasi Pertanian untuk Ketahanan dan Swasembada Pangan**							
1	Tujuan:	Meningkatkan Daya Dukung dan Kemandirian Sektor Pertanian	Pertumbuhan PDRB Sektor Pertanian	0,71*	1,15*	1,84*	BPS	Provinsi (-) Nasional (-)
	Sasaran:	Meningkatnya Ketersediaan Pangan dan Akses Pangan Masyarakat	Ketersediaan Pangan Utama	117,48	135,84	116,47	BPS	Provinsi (-) Nasional (+)
		Meningkatnya Kesejahteraan Petani	Nilai Tukar Petani	103,5	105,13	106,82	BPS	Provinsi (-) Nasional (-)

No		Tujuan/Sasaran	Indikator	Kabupaten Kediri	Provinsi Jawa Timur	Nasional	Sumber Data	Keterangan
			Nilai Tukar Petani Perikanan	97,62	-	-		
	Misi 5 **Peningkatan Infrastruktur dan Konektivitas antar Wilayah**							
1	Tujuan:	Menurunkan Kesenjangan antar Wilayah	Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur	66,82	-	-		
	Sasaran:	Meningkatnya Sarana Infrastruktur Daerah	Proporsi Panjang Jaringan Irigasi dalam Kondisi Baik	74,68	-	-		
			Persentase Jaringan Jalan Dalam Kondisi Baik	87,99	89,61	91,27%	Kementerian PUPR	Provinsi (-) Nasional (-)
			Cakupan Penyelesaian Tata Ruang	50	-	-		
			Cakupan desa/kelurahan yang mendapat air minum	85,23	95,05	90,78	Kementerian PUPR	Provinsi (-) Nasional (-)

No		Tujuan/Sasaran	Indikator	Kabupaten Kediri	Provinsi Jawa Timur	Nasional	Sumber Data	Keterangan
			Persentase Rumah Layak Huni	97,75	66,28	60,68	Kementerian PUPR	Provinsi (+) Nasional (+)
		Meningkatnya Pelayanan Transportasi Daerah	Nilai Survei Kepuasan Masyarakat terhadap Unit Layanan Perhubungan	86	87.35	-		Provinsi (-)
	Misi 6 **Optimalisasi Kepariwisataan berbasis Kearifan Lokal**							
1	Tujuan:	Meningkatkan Daya Saing Pariwisata Daerah	Pertumbuhan PDRB Sektor Penyediaan Akomodasi dan Makanan Minum	14,52%	6*	-	BPS	Provinsi (+)
	Sasaran:	Meningkatnya Pendapatan Daerah dari Sektor Pariwisata	Pertumbuhan PAD Pariwisata	94,59%	-	-		
	Misi 7 **Optimalisasi Tata Kelola Lingkungan Hidup, Sumberdaya Alam dan Mitigasi Bencana**							

No		Tujuan/Sasaran	Indikator	Kabupaten Kediri	Provinsi Jawa Timur	Nasional	Sumber Data	Keterangan
1	Tujuan:	Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup dan Kelestarian Sumber Daya Alam	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	64.72	-	72,42	Kementerian LHK	Nasional (-)
	Sasaran:	Meningkatkan Kualitas Lingkungan	IKA	62,22	-	53,88	Kementerian LHK	Nasional (+)
			IKU	80,94	-	88,06	Kementerian LHK	Nasional (-)
			IKL	39,34	-	60,72	Kementerian LHK	Nasional (-)
		Meningkatnya Sinergitas antar Pemerintah, Masyarakat dan Swasta dalam Penanggulangan Bencana	Indeks Resiko Bencana	112,47	108,69	134,16	BNPB dan BPBD Provinsi Jawa Timur	Provinsi (-) Nasional (+)
	Misi 8 **Pengembangan Seni Budaya, Olahraga dan Kreativitas Pemuda**							
1	Tujuan:	Meningkatkan Potensi dan Budaya Generasi Muda Untuk Membangun Daerah	Tingkat Pelestarian Potensi Seni Budaya Daerah	37,65%	-	-		

No		Tujuan/Sasaran	Indikator	Kabupaten Kediri	Provinsi Jawa Timur	Nasional	Sumber Data	Keterangan
			Indeks Kapasitas Lembaga Kepemudaan dan Olahraga	73,96	-	-		
	Sasaran:	Meningkatnya pelestarian Seni Budaya Daerah	Cakupan Event Budaya Skala Kabupaten	25,57%	-	-		
		Meningkatnya Daya Dukung Generasi Muda Bagi Daerah	Persentase Prestasi Kepemudaan dan Olahraga yang dicapai	58,26%	-	-		
	Misi 9 **Perwujudan Kemandirian Desa untuk Kesejahteraan Masyarakat**							
1	Tujuan:	Mendorong Daya Saing Ekonomi Masyarakat dan Desa	Rata-rata Indeks Desa Membangun Tingkatn Kab.	0,73	-	-		
	Sasaran	Meningkatnya Kemandirian Masyarakat Desa	Persentase Desa Maju dan Desa Mandiri didasarkan IDM	63,56	69%	35%	Kementerian Desa & PTT	Provinsi (-) Nasional (+)

Sumber data : Bag. Organisasi SETDA Kab. Kediri

*) Indikator yang digunakan adalah indikator dalam RPJMD tahun 2021-2026 yang tidak ada pada RPJMD sebelumnya.

Keterangan:

1. (+) Lebih tinggi

2. (-) Lebih rendah

Dari perbandingan data diatas, perbandingan Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Kediri adalah sebagai berikut;

Tabel 17

Perbandingan Indikator Kinerja Utama

No	Capaian Kabupaten	Provinsi	Nasional
1	Lebih Tinggi	10 Indikator	13 Indikator
2	Lebih Rendah	16 Indikator	12 Indikator
3	Sama Dengan	2 Indikator	0 Indikator
4	Tidak Ada Data	16 Indikator	19 Indikator
	Total	44 Indikator	44 Indikator

Sumber data : Bag. Organisasi SETDA Kab. Kediri

3.3 Akuntabilitas Kinerja

Kinerja Pemerintah Kabupaten Kediri pada tahun 2022 ini akan ditinjau dari berbagai perspektif. Terutama dalam upaya pencapaian Indikator Kinerja Utama, pelaksanaan agenda kinerja, capaian kinerja organisasi, realisasi agenda kinerja dan *benchmarking*, realisasi anggaran dan analisa efisiensi sumber daya, analisa faktor penunjang dan penghambat, *gap analysis,* kinerja lain-lain, dan evaluasi dan peningkatan akuntabilitas kinerja.

Merujuk pada konsep akuntabilitas, penjelasan tentang akuntabilitas kinerja dalam penjelasan berikutnya didasarkan dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), prosedur dan alur manajemen, menakisme komunikasi dan koordinasi, pelaksanaan operasional, dan manajemen kinerja yang bermutu. Konsep-konsep secara operasional akan dijelaskan menggunakan pendekatan-pendekatan lain yang relevan dengan sistem akuntabilitas.

3.3.1 Analisa Akuntabilitas Kinerja

Dalam upaya memberikan penjelasan tentang akuntabilitas kinerja di Pemerintah Kabupaten Kediri, Pemerintah Kabupaten Kediri dalam menganalisa kinerja akan menggunakan pendekatan *performance analysis tools* yang dikembangkan oleh *Institute of Innovative Construction.*

Secara umum analisa kinerja akan didasarkan pada konsep dengan pendekatan analisa organisasi, analisa kesenjangan, dan analisa lingkungan. Dari faktor-faktor tersebut akan diketahui penyebab dan hasil kinerja akan dapat dipetakan. Oleh karena demikian, pelaporan *performance analysis* akan mengacu pada konsep dibawah ini

Gambar 1

Kerangka Analisa Kinerja



1. Misi 1

Pengembangan Sumberdaya Manusia yang Berkarakter Nasionalis-Religius

Gambar 2

Lingkup Misi 1



No	Tujuan	Indikator	Capaian		Target	Realisasi	Capaian	Keterangan
			2020	2021	2022	2022	2022	
1	Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang unggul dan berdaya saing	Indeks Pembangunan Manusia	72,05	72,56	73,358	73,46	100,14%	Melebihi Target
		Tingkat Pengangguran Terbuka	5,24	5,15	5	6,83	136,6 %	Dibawah Target
2	Menurunkan angka kemiskinan	Persentase Angka Kemiskinan	10,15	11,64	9,832	10,65	118,38%	Dibawah Target
3	Meningkatkan harmonisasi dan kondusivitas daerah	Indeks Demokrasi Indonesia (IDI)	-	-	60%	76,71	127,68%	Melebihi Target

No	Sasaran	Indikator	Capaian		Target	Realisasi	Anggaran	Realisasi Anggaran	Keterangan
			2020	2021	2022	2022			
1	Meningkatnya aksesibilitas dan kualitas pendidikan	Harapan Lama Sekolah	13,15	13,44	13,25	13,61	300.994. 956.605,00	285.815. 360.697,17	Melebihi Target
		Rata-rata lama	8,02	8,08	8,1	8,23			Melebihi Target

		sekolah							
2	Meningkatnya aksesibilitas dan Kualitas laya nan kesmas	Indeks Kesehatan (UHH)	72,61	72,65	72,61	72,91	300.467. 979.726,00	255.553. 761.073,53	Melebihi Target
3	Meningkatnya kualitas tenaga kerja dan kesempatan kerja	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	70,65	69,34	70,9	68,73	8.481. 063.220	8.002. 924.270	Dibawah Target
4	Meningkatnya Kesejahteraan Masyarakat Berbasis Keluarga	Persentase Keluarga Sejahtera	-	70,61	71,11%	70,8%	8.481. 063.220	8.002. 924.270	Diatas Target
5	Meningkatnya penerapan nilai nasionalisme, agama, dan semangat demokrasi di masyarakat	Tingkat kondusivitas daerah	100%	100%	100%	100%	10.805. 557.825	9.666. 355.730	Sesuai Target

a. Meningkatnya Aksesibilitas dan Kualitas Pendidikan

Pendidikan adalah investasi modal manusia (human capital investment). Merujuk Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, pada 2030 mendatang usia produktif penduduk Indonesia mencapai 70 persen jumlah penduduk. Tingginya angka penduduk usia kerja tersebut menjadi bonus apabila penyediaan kesempatan kerja sudah sesuai dengan jumlah penduduk usia kerja serta ditopang oleh kualitas angkatan kerja yang baik. Kualitas angkatan kerja inilah yang harus dipenuhi dari bidang pendidikan.

Menurut Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, aksesibilitas pendidikan adalah kemudahan yang diberikan kepada setiap warga masyarakat untuk menggunakan kesempatannya memasuki suatu program pendidikan. Akses tersebut dapat berupa sikap sosial yang nondiskriminatif, kebijakan politik dalam bentuk peraturan perundang-undangan

yang mendukung dan mencegah diskriminasi, tersedianya fasilitas pendidikan yang aksesibel, tersedianya alat bantu belajar/mengajar yang sesuai, dan biaya pendidikan yang terjangkau, yang memungkinkan setiap warga masyarakat menggunakan kesempatannya untuk mengikuti proses belajar/mengajar pada program pendidikan yang dipilihnya.

Partisipasi anak sekolah berusia 7-18 tahun secara umum dipengaruhi oleh banyak hal. Hal pertama adalah kondisi keluarga yang terbagi atas empat hal, yakni tingkat pendidikan orang tua, usia perkawinan orang tua, dan pendapatan orang tua, dan jumlah anggota keluarga. Dengan demikian, perlu pendekatan-pendekatan yang optimal agar partisipasi anak usia 7-18 tahun untuk bersekolah semakin meningkat.

Dalam upaya meningkatkan kualitas pendidikan, harus melaksanakan penyelenggaraan pendidikan sesuai dengan Sistem Pendidikan Nasional. Prinsip-prinsip yang digunakan dalam menyelenggarakan pendidikan sesuai dengan UU nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional adalah sebagai berikut;

1. Pendidikan diselenggarakan secara demokratis berkeadilan serta tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai keagamaan, nilai kultural dan kemajemukan bangsa;
2. Pendidikan diselenggarakan sebagai suatu kesatuan yang sistemik dengan sistem terbuka dan multimakna;
3. Pendidikan diselenggarakan sebagai suatu proses pembudayaan dan pemberdayaan peserta didik yang berlangsung sepanjang hayat;
4. Pendidikan diselenggarakan dengan memberi keteladanan, membangun kemauan dan mengembangkan kreativitas peserta didik dalam proses pembelajaran;
5. Pendidikan diselenggarakan dengan mengembangkan budaya membaca, menulis dan berhitung bagi segenap warga masyarakat;
6. Pendidikan diselenggarakan dengan memberdayakan semua komponen masyarakat melalui peran serta dalam penyelenggaraan dan pengendalian mutu layanan pendidikan.

Pemerintah Kabupaten Kediri bersama-sama dengan instansi pemerintahan lainnya sedang berbondong-bondong menyambut visi Indonesia emas tahun 2045. Hal tersebut akan berhasil terwujud ditunjang dengan sumber daya manusia (SDM) yang memadahi. Konsep sumber daya manusia (SDM) yang memadahi baik dari segi kualifikasi dan kompetensinya. Surplus demografi yang akan dilampaui oleh Indonesia pada beberapa

tahun mendatang harus dimanfaatkan sebaikmungkin agar tidak ada lagi surplus demografi yang membebani.

Peningkatan aksesibilitas dan kualitas pendidikan terus diupayakan untuk masyarakat Kabupaten Kediri. Baik itu sistem pendidikan taman kanak-kanak, pendidikan 12 tahun, dan pendidikan tinggi. Mengacu pada hal tersebut, upaya peningkatan kualitas pendidikan dengan yang bermutu sudah menjadi kewajiban untuk dilaksanakan.

1) Permasalahan

Upaya peningkatan pendidikan dengan pendekatan esensi memiliki permasalahan yang kompleks, dimana hampir diseluruh sisi memiliki permasalahan. Adapun permasalahan tersebut adalah sebagai berikut:

- Aspek peningkatan mutu, permasalahan yang cukup kompleks terutama di bidang SDM pendidik dan motivasi siswa. Manajemen mutu pendidikan dalam sisi operasional perlu untuk dioptimalkan, karena di taraf konsep dan perencanaan sudah disusun dengan baik namun di sisi operasional masih banyak kendala.
- Aspek pemerataan, permasalahan yang kompleks dalam sisi pemerataan adalah dengan upaya untuk memberikan sarana, prasarana, dan mutu pendidikan yang sama di setiap sekolahan yang ada di Kabupaten Kediri. Dalam operasionalnya, ditemui cukup banyak kendala yang harus dioptimalkan lagi pengembangannya.
- Aspek efisiensi manajemen, manajemen sekolah kini menjadi perhatian utama. Terutama dari proses manajemen di masing-masing sekolah dengan menggunakan siklus manajemen. Mulai dari perencanaan yang efektif, pengendalian yang akuntabel, laporan yang transparan, dan evaluasi yang berkelanjutan.
- Aspek peran serta masyarakat dan wali murid, dalam upaya untuk mendukung aksesibilitas dan kualitas pendidikan yang baik, dukungan masyarakat dan wali murid menjadi penting untuk dilaksanakan. Namun begitu masih ditemui kendala-kendala yang menyebabkan aksesibilitas dan kualitas pendidikan tidak dapat dilaksanakan dengan baik.
- Akuntabilitas, perlunya pertanggung-jawaban kinerja dari masing-masing sekolah dalam rangka menjamin aksesibilitas dan mutu. Masing-masing sekolah dan guru perlu untuk memertanggung-jawabkan kinerjanya sesuai dengan perencanaan, visi, dan misi yang telah disusun sebelumnya.

2) Tantangan

Selain permalasahan diatas, identifikasi tentang tantangan pendidikan di Kabupaten Kediri masihlah kompleks. Hal tersebut telah diidentifikasikan sebagai berikut:

1. Angka Melek Huruf dan Minat Baca di Kabupaten Kediri memiliki tren menurun.
2. Rata-rata Lama Sekolah (RLS) memiliki tren yang fluktuatif cenderung menurun.
3. Harapan Lama Sekolah masih belum mencapai 16 tahun (lulus perguruan tinggi).
4. Layanan pendidikan masih banyak yang belum mampu menyelenggarakan pendidikan inklusif dan berpihak pada golongan rentan.
5. Biaya pendidikan yang gratis.
6. Angka Partisipasi Murni (APM) jenjang SMP masih dibawah standar nasional.
7. Angka Partisipasi Kasar (APK)jenjang SMP masih dibawah standar nasional.
8. Menurunnya persentase tenaga pengajar TK, SD, SMP, PLB dari tahun ke tahun.

3) Pelaksanaan Program dan Kegiatan

Dalam upaya meningkatkan pendidikan di Kabupaten Kediri dengan berbagai permasalahan dan tantangan diatas, Pemerintah Kabupaten Kediri melalui Dinas Pendidikan telah menetapkan tujuan yakni meningkatnya aksesibilitas dan kualitas pendidikan dalam rangka menunjang pembangunan manusia Kabupaten Kediri yang berkarakter Nasionalis-Religius dan Berdaya Saing. Penetapan rencana tersebut terdiri atas dua indikator utama yakni Rata-rata Lama Sekolah (RLS) sebesar 8,1 tahun dan Harapan Lama Sekolah (HLS) sebesar 13,25 tahun. Perhitungan RLS dan HLS didasarkan pada komponen utama perhitungan Indeks Pembangunan Manusia (IPM).
Meninjau pula dari permaslaahan dan tantangan diatas, telah ditetapkan strategi dan program pencapaian tujuan tersebut sebagai berikut:

- Peningkatan angka transisi SD-SMP dan SMP-SMA
- Peningkatan APM dan APK SD dan SMP
- Keterjangkauan Layanan Pendidikan Dasar dan Menengah secara Gratis, Inklusif, Berkualitas, dan Kearifan Lokal

- Pemenuhan Kompetensi, Sertifikasi, dan Kesejahteraan, Tenaga Pendidik dan Kependidikan
- Peningkatan Akreditasi Lembaga Pendidikan Dasar dan Menengah (Kompetensi Pendidik, Sarana dan Prasaran, Pengelolaan Lembaga, dan Keterlibatan *Stakeholder*).
- Meningkatkan Angka Melek Aksara dan Budaya Baca (Kemampuan Literasi dan Numerasi).

Dalam pelaksanaan operasionalnya Pemerintah Kabupaten Kediri melalui Dinas Pendidikan dicapai angka Harapan Lama Sekolah sebesar 13,61 melewati target yang telah ditentukan yakni 13,25%. Selain itu, angka Rata-rata Lama Sekolah sebesar 8,23 melewati target yang telah ditentukan yakni 8,10. Pencapaian tersebut ditunjang dengan beberapa hal yang berupaya ditingkatkan melalui koordinasi dari berbagai pihak.

4) Analisa Kinerja, Efisiensi, dan Capaian RPJMD

Analisa Kinerja

Indikator	Capaian 2020	Capaian 2021	Target 2022	Capaian 2022	Persentase Capaian	Anggaran	Realisasi Anggaran	Persentase Realisasi
HLS	**13,15**	**13,44**	**13,25**	**13,61**	**100,4%**	**300.467. 979.726**	**255.553. 761.073**	**85%**
RLS	**8,02**	**8,08**	**8,10**	**8,23**	**101,60%**			

Analisa Efisiensi Anggaran

Indikator	Persentase Capaian Kinerja	Persentase Realisasi Anggaran	Formula Perhitungan	Hasil Analisa Efisiensi	Keterangan
HLS	**100,4%**	**94,96%**	**100,4%-94,96%**	**5,44**	**Efisiensi Tinggi**
RLS	**101,60%**	**94,96%**	**101,6%-94,96%**	**6,64**	

Analisa Perbandingan Target Akhir RPJMD tahun 2021-2026

Indikator	Target Tahun 2022	Capaian Tahun 2022	Target Akhir RPJMD	Persentase Capaian RPJMD

HLS	**13,25**	**13,61**	**13,65**	**99,7%**
RLS	**8,1**	**8,23**	**8,3**	**99,15%**

5) Faktor-faktor Pendukung

Upaya untuk mendukung capaian-capaian seperti HLS dan RLS ditunjang dengan beberapa kegiatan yang telah dilaksanakan. Hal yang telah dilaksanakan tersebut dipayakan dengan meningkatkan pembangunan, rehabilitasi, pengadaan sarana dan prasaranan pendidikan. Selain itu pula, peningkatan kesejahteraan kepada para guru GTT (Guru Tidak Tetap) PTT (Pegawai Tidak Tetap) serta memberikan Bisyaroh kepada guru keagamaan untuk meningkatkan kualitas pendidikan.

Untuk mengupayakan peningkatan angka lama sekolah, Pemerintah Kabupaten Kediri memberikan cukup banyak beasiswa pendidikan. Baik itu beasiswa untuk anak SD, SMP, SMA serta bantuan beasiswa kuliah melalui GNOTA (Gerakan Nasional Orang Tua Asuh) yang berdampak signifikan terhadap capaian rata-rata lama belajar Kabupaten Kediri. Selain itu pula, peningkatan akses dan kemudahaan akan kejar paket A, B, dan C semakin ditingkatkan untuk menambah kuantitas masyarakat Kabupaten Kediri yang mendapatkan ijazah pendidikan 12 tahun.

6) Faktor-faktor Penghambat

Secara umum, faktor-faktor penghambat dalam bidang pendidikan tidak memiliki kendala yang berarti. Apalagi dukungan Bupati Kediri dalam meningkatkan aksesibilitas, kuantitas, dan kualitas pendidikan sangat tinggi. Dengan dukungan dan komitmen yang kuat dari Bupati Kediri tersebut menjembatani masalah-masalah yang menghambat permasalahan pendidikan di Kabupaten Kediri.

7) **Benchmarking**

Perbandingan Capaian Urusan
Pendidikan Tahun 2022

No	Keterangan	HLS	RLS
1	Kabupaten Kediri	13,61	8,23
2	Kab. Banyuwangi	13,11	7,66
3	Kota Kediri	15,44	10,45

4	Kab. Blitar	12,56	7,82
5	Kab. Tulungagung	13,33	8,65
6	Provinsi Jawa Timur	13,37	8,03
7	Nasional	13,10	8,69

Dalam upaya untuk mengembangkan pendidikan di Kabupaten Kediri, diperlukan satu pendekatan yang Merujuk UU nomor 23 tahun 2014, Pemerintah Kabupaten/Kota mendapatkan tanggung-jawab untuk mengurusi pendidikan dasar yakni Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama.

Dalam upaya meningkatkan kreativitas dan intelektual siswa, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan melalui konsep merdeka belajar dan merdeka mengajar. Kendati demikian, upaya besar-besaran untuk mengubah mindset dari guru administratif menjadi guru kreatif. Guru kreatif adalah guru yang mampu memantik pemikiran siswa untuk berkembang, bertanggung-jawab, dan gigih.

Pemerintah Kabupaten Kediri melalui Dinas Pendidikan telah memulai pelatihan Merdeka Mengajar kepada para guru di Kabupaten Kediri. Pelatihan ini sebagai langkah awal pembentukan guru kreatif dan inovatif. Merdeka mengaja r mendukung banyak inovasi dalam dunia pendidikan, selain itu pula turut meningkatkan kompetensi guru.

8) Kesimpulan

Capaian angka Harapan Lama Sekolah sebesar 13,61 melewati target yang telah ditentukan yakni 13,25%. Selain itu, angka Rata-rata Lama Sekolah sebesar 8,23 melewati target yang telah ditentukan yakni 8,10. Capaian tersebut dicapai dengan penggunaan anggaran sebesar 285.815.360.697,00 dari anggaran yang ditetapkan sebesar 300.994.965.605,00.

9) Rencana Tindak Lanjut

Melihat perkembangan diatas, Pemerintah Kabupaten Kediri tengah mengupayakan beberapa hal sebagai berikut; Optimalisasi Pendidikan Kesetaraan (Kejar Paket) bagi Anak Putus Sekolah, Penambahan kuota penerima bantuan/beasiswa Pendidikan GNOTA, Penambahan kuota Guru PPPK, penerima Insentif GTT/PTT dan Bisyaroh Guru Keagamaan; dan Regrouping SDN untuk meningkatkan kualitas Pendidikan Sekolah Dasar.

b. Meningkatnya Aksesibilitas dan Kualitas Layanan Kesehatan

Upaya meningkatkan aksesibilitas dan kualitas layanan kesehatan ini bertujuan meningkatkan kesadaran, kemauan dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar terwujud derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya. Pembangunan kesehatan tersebut merupakan upaya seluruh potensi, baik dari masyarakat, swasta, maupun pemerintah.

Aspek peri-kemanusiaan (*humanitarian*) dan etika menjadi dasar utama pembangunan kesehatan., Kementerian Kesehatan telah mengeluarkan Sistem Kesehatan Nasional (SKN) yang menjadi acuan pikir dan tindakan kesehatan. Adapun prinsip-prinsip tersebut adalah;

1. Perikemanusiaan
2. Hak Asasi Manusia
3. Keadilan, Kemerataan, dan Keberpihakan terhadap rakyat
4. Pemberdayaan dan Kemandirian Masyarakat
5. Kemitraan
6. Pengutamaan dan Manfaat
7. Tata Kelola Pemerintahan Kesehatan yang Baik

Kompleksivitas terkait masalah layanan kesehatan tidak jarang menimbulkan permasalahan. Sesuai dengan data dari Biro Hukum dan Organisasi Kementerian Kesehatan, Hal-hal tersebut diidentifikasikan dengan hal-hal sebagai berikut:

1. Tingginya ketidakpastian, terutama dengan apa yang terjadi di masa depan. Seperti contohnya, merebaknya kasus demam berdarah memerlukan biaya perawatan tinggi. Padahal, hal tersebut memerlukan persiapan baik dari segi anggaran, obat-obatan, dan sumber daya manusia.
2. Informasi asimetris, dengan pasien yang kurang terbuka dalam memberikan informasi kepada tenaga medis. Kurang terbukanya informasi tersebut disebabkan karena masih tingginya rasa malu pada masyarakat ketika menderita penyakit, hal tersebut menyebabkan mereka kurang terbuka terhadap kondisi medisnya. Selain itu pula, masih cukup tingginya masyarakat yang tidak memercayai pelayanan medis modern turut mempengaruhi kondisi kesehatan di suatu wilayah.
3. Eksternalitas, bagaimana jejak penyebab medis pasien seperti seorang perokok ketika ia sakit meminta hak pelayanan kesehatan yang lebih tinggi daripada mereka yang

bukan perokok. Tentu hal tersebut akan menimbulkan konflik, terutama dalam asas kesetaraan atas pelayanan kesehatan.

Jika dulu banyak masyarakat yang mengesampingkan kesehatan, kini kesehatan modern telah menjadi tujuan utama bagi masyarakat. Kesadaran akan pentingnya menjaga kesehatan mulai perlahan-lahan meningkat. Terutama setelah munculnya wabah Covid-19 pada tahun 2021 kemarin, menyebabkan kesadaran masyarakat akan kesehatan di Kabupaten Kediri meningkat. Dengan hal tersebut pula ekspektasi masyarakat akan pelayanan dan kualitas kesehatan juga meningkat.

Prioritas kesehatan di Kabupaten Kediri didasarkan pada dua hal utama, yakni peningkatan akses jaminan kesehatan (*health coverage*) dan peningkatan kualitas unit layanan. Kedua hal tersebut diangkat karena ekspektasi masyarakat terhadap perbaikan pelayanan kesehatan di Kabupaten Kediri sangatlah tinggi pada dua hal tersebut.

1) Permasalahan dan Tantangan

Melihat hal tersebut, Pemerintah Kabupaten Kediri mengupayakan akan meningkatkan aksesibilitas dan kualitas layanan kesehatan. Namun demikian, permasalahan dan tantangan yang dihadapi dalam pengembangan peningkatan aksesibilitas dan kualitas layanan kesehatan diidentifikasi sebagai berikut:

1. Koordinasi pelaksanaan regulasi bidang kesehatan antar pemangku kepentingan di Kabupaten Kediri masih perlu ditingkatkan.
2. Keterampilan Tenaga Kesehatan yang belum memadahi.
3. Jumlah dan Jenis Tenaga Kesehatan yang belum memenuhi standar.
4. Sarana dan Prasarana Kesehatan Dasar dan Rujukan yang belum merata.
5. Intensitas penyakit menular dan tidak menular semakin tinggi (*new emerging* dan *re-emerging*).
6. Kualitas Kesehatan Lingkungan dan Sanitasi perlu ditingkatkan.
7. Jumlah verifikator perijinan PIRT, Apotek, Toko Obat yang kurang memadai dibandingkan dengan jumlah pemohon sehingga waktu tunggu verifikasi pemohon lebih lama.
8. Kurangnya Prosentase Desa Siaga Aktif yang menjadi Purnama Mandiri (PURI)
9. Rendahnya kehadiran balita di Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu).
10. Capaian pemberian Air Susu Ibu (ASI) ekslusif pada bayi usia 0-6 tahun masih rendah.

11. Penuruan Angka Kematian Ibu (AKI) dan Angka Kematian Bayi (AKB) masih belum optimal.
12. Mobilitas penduduk yang tinggi membuat pelayanan tidak maksimal
13. Kepatuhan Nakes dalam penerapan SOP masih perlu ditingkatkan.
14. Partisipasi masyarakat dalam upaya peningkatan kualitas kesehatan perlu untuk ditingkatkan.
15. Cakupan Universal Health Coverage (UHC) Kabupaten Kediri pada bulan Desember 2022 sebesar 78,74% dengan jumlah peserta BPJS Kesehatan 1.318.223 peserta dari 1.674.140 jiwa penduduk Kabupaten Kediri.
16. Capaian Indeks Keluarga Sehat (IKS) Kabupaten Kediri Tahun 2022 sebesar 0,201 (termasuk kategori TIDAK SEHAT).

2) Pelaksanaan Program dan Kegiatan

Dalam upayanya untuk meningkatkan kesehatan di Kabupaten Kediri, Pemerintah Kabupaten Kediri melalui Dinas Kesehatan telah menetapkan tujuan yakni Meningkatnya Aksesibilitas dan Kualitas Kesehatan. Dengan meninjau dari permasalahan dan tantangan yang telah diidentifikasi diatas, telah ditetapkan indikator dengan tinjauan Angka Harapan Hidup dengan target usia 72,61. Dalam upaya untuk mencapai tujuan tersebut, Pemerintah Kabupaten Kediri melaui Dinas Kesehatan telah menetapkan strategi dan program sebagai berikut:

1. Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat dengan kegiatan Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota, Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota, Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi, Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C dan D serta Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah.
2. Peningkatan Kapasistas Sumber Daya Manusia (SDM) Kesehatan dengan Pemberian izin praktek tenaga kesehatan di kabupaten / kota, Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota, Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota.
3. Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman dengan kegiatan Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optical, UMOT, Penerbitan Sertifikat

Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor PIRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga, Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga.

4. Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan dengan kegiatan Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota, Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota, dan Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota.

Dalam operasionalisasi pencapaian strategi dan program di bidang kesehatan tahun 2022 ini, telah ditetapkan indikator Usia Harapan Hidup (UHH) sebesar 72,61. Dalam operasionalnya tidak begitu ditemui banyak kendala, terutama pada program dan kegiatan kesehatan yang dilaksanakan melalui unit-unit layanan kesehatan di Kabupaten Kediri.
Capaian Usia Harapan Hidup (UHH) di Kabupaten Kediri mencapai 72,97 atau 100,3% dengan realisasi anggaran sebesar sebesar Rp. 255.652.192.715,53 atau 85,1% dari anggaran yang ditetapkan. Dengan hal tersebut, upaya pencapaian target Usia Harapan Hidup telah berjalan optimal dengan melebihi target yang telah ditentukan. Upaya di bidang kesehatan menemui efisiensi yang tinggi dengan hasil dampak yang dirasakan oleh masyarakat dalam hal ini UHH (Usia Harapan Hidup).

3) Analisa Kinerja, Efisiensi dan Capaian RPJMD

Analisa Kinerja

Indikator	Capaian 2020	Capaian 2021	Target 2022	Capaian 2022	Persentase Capaian	Anggaran	Realisasi Anggaran	Persentase Realisasi
UHH	**72,61**	**72,65**	**72,61**	**72,97**	**100,4%**	**300.467. 979.726**	**255.553. 761.073**	**85%**

Analisa Efisiensi Anggaran

Indikator	Persentase Capaian Kinerja	Persentase Realisasi Anggaran	Formula Perhitungan	Hasil Analisa Efisiensi	Keterangan
UHH	**100,3%**	**85%**	**100,3%-85%**	**15,3%**	**Efisiensi Tinggi**

Analisa Perbandingan Target Akhir RPJMD tahun 2021-2026

Indikator	Target Tahun 2022	Capaian Tahun 2022	Target Akhir RPJMD	Persentase Capaian RPJMD
UHH	**72,61**	**72,97**	**72,87**	**100,1%**

Keberhasilan diatas tidak terlepas dari adanya berbagai macam upaya baik internal maupun eksternal yang menunjang tercapainya angka Usia Harapan Hidup. Faktor internal maupun eksternal tersebut dijelaskan berikut.

4) Faktor-faktor Pendukung Kinerja

Komitmen pimpinan yang besar terhadap berjalannya pelayanan kesehatan di Kabupaten Kediri menjadi faktor pendukung yang utama. Dengan komitmen dari pimpinan tersebut, proses perjalanan program dan kegiatan yang telah ditargetkan menjadi lebih solid dan kolaboratif terutama dari dinas-dinas terkait.

Selain itu, kesadaran masyarakat akan pentingnya kesehatan pasca Covid-19 menjadi hal yang juga mendukung kinerja di Kabupaten Kediri. Dengan hal tersebut, banyak masyarakat yang mulai aktif merawat kesehatannya, seperti berolahraga, bersepeda, menjalani *work-life balance,* yang memiliki dampak besar dalam perkembangan kesehatan di Kabupaten Kediri.

Dukungan Pemerintah Daerah dalam rangka menjamin keberlangsungan dan kesehatan keuangan peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yaitu melalui penganggaran iuran dan bantuan iuran bagi peserta Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) dan Bukan Pekerja (BP) yang didaftarkan oleh Pemerintah Daerah.

5) Faktor-faktor Penghambat Kinerja

Belum maksimalnya capaian UHC (*Universal Health Coverage*) pada Tahun 2022 disebabkan karena dengan jumlah penduduk Kabupaten Kediri sebesar 1.674.140 jiwa jumlah peserta terdaftar BPJS Kesehatan sebanyak 1.318.223 peserta (78,74%) sehingga masih ada 355.917 jiwa yang belum mempunyai jaminan kesehatan. Keterbatasan anggaran daerah dalam membiayai kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional belum maksimal didukung dengan peran serta masyarakat, pekerja swasta, BUMN, BUMD dan pihak swasta (badan usaha) Kabupaten Kediri.

6) Benchmarking

Perbandingan Usia Harapan Hidup

No	Keterangan	Capaian
1	Kabupaten Kediri	72,91
2	Kabupaten Banyuwangi	71,60
3	Kota Kediri	74,34
4	Kabupaten Malang	72,95
5	Provinsi Jawa Timur	71,74
6	Nasional	71,85
7	Global/Internasional	73,20

Usia Harapan Hidup di Kabupaten Kediri secara umum masih lebih tinggi daripada UHH Provinsi Jawa Timur maupun Nasional. Namun begitu, capaian tersebut tidak signifikan berbeda. Capaian UHH Kabupaten Kediri masih berada dibawah capaian UHH secara global/internasional. Dengan fakta tersebut perlu dikembangkan lebih lanjut skema pembangunan kesehatan di Kabupaten Kediri, terutama yang berkaitan dengan Usia Harapan Hidup (UHH).

Namun demikian, Pemerintah Kabupaten Kediri melalui Dinas Kesehatan tetap menjalakan upaya pembangunan kesehatan yang mengacu pada *Sustainable Development Goals.* Seperti upaya kesehatan berbasis masyarakat, prevalensi penyakit menular ataupun tidak menular, serta pengelolaan sanitasi dan pencemaran lingkungan tetap diupayakan oleh Pemerintah Kabupaten Kediri.

7) Kesimpulan

Upaya Pemerintah Kabupaten Kediri untuk meningkatkan kesehatan masyarakat secara umum telah dilaksanakan dengan baik. Capaian indikator peningkatan UHH mencapai 72,91 melewati target yang telah ditetapkan yakni 72,61. Hal tersebut tidak terlepas dari meningkatnya kesadaran masyarakat Kabupaten Kediri akan pentingnya kesehatan.

8) Rencana Tindak Lanjut

Pemerintah Kabupaten Kediri berupaya untuk tetap menjaga dan meningkatkan kualitas layanan di bidang kesehatan. Upaya peningkatan kualitas kesehatan akan tetap mengacu pada RPJMD tahun 2021-2026 yang targetnya meningkat setiap tahunnya dengan pelaksanaan prinsip-prinsip Sistem Kesehatan Nasional.

Peserta Bursa Kerja Tahun 2022 di Simpang Lima Gumul Convention Center sedang Mengambil Berkas Pendaftaran

c. Meningkatnya kualitas tenaga kerja dan kesempatan kerja

Ketenagakerjaan menurut Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 adalah segala hal yang berhubungan dengan tenaga kerja pada waktu sebelum, selama, dan sesudah masa kerja. Berikutnya, tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan/atau jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat. Kendati demikian, kondisi di lapangan menunjukkan tidak semua populasi yang tersedia dapat bekerja. Seperti masih dalam masa menempuh studi, ibu rumah tangga, ataupun kondisi-kondisi lainnya.

Merujuk pada hal demikian, Pemerintah Kabupaten Kediri memilih indikator Tingkat Partisipasi Angkat Kerja (TPAK) sebagai Indikator Kinerja Utama. TPAK dipilih karena menggambarkan satu dimensi angkatan kerja (individu dalam usia produktif) yang memiliki pekerjaan dan mendapatkan imbalan.

Kondisi ketenagakerjaan di Kabupaten Kediri berada dalam pasar kerja yang dipengaruhi oleh tingkat upah, nilai produksi, dan nilai investasi. Perubahan pada faktor-faktor tersebut akan mempengaruhi jumlah tenaga kerja yang diserap pada suatu lapangan usaha.

Menurut Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003, tujuan pembangunan ketenagakerjaan antara lain :

1. Memberdayakan dan mendayagunakan tenaga kerja secara optimal dan manusiawi.
2. Mewujudkan pemerataan kesempatan kerja dan penyediaan tenaga kerja yang sesuai dengan kebutuhan pembangunan nasional dan daerah.
3. Memberikan perlindungan kepada tenaga kerja dalam mewujudkan kesejahteraan.
4. Meningkatkan kesejahteraan tenaga kerja dan keluarganya.

Tujuan permbangunan sebagaimana tersebut diatas selaras dengan prinsip ketenagakerjaan yang telah diterbitkan oleh Organisasi Buruh Internasional yaitu :

1. Kebebasan berserikat dan pengakuan secara efektif hak untuk melakukan perundingan dan bernegosiasi terhadap perusahaan.
2. Menghapuskan segala bentuk kerja paksa dan kerja wajib.
3. Menghapuskan pekerja anak secara efektif.
4. Menghapuskan diskriminasi dalam pekerjaan dan jabatan

Kondisi Covid-19 di Indonesia menyebabkan menurunnya angka tingkat partispasi angkatan kerja. Berdasarkan data yang dirilis BPS dua tahun terakhir sejumlah tenaga kerja di Indonesia kehilangan pekerjaan baik penuh ataupun paruh waktu. Data dari Kementerian Ketenagakerjaan dan Kementerian Keuangan Republik Indonesia menyebutkan bahwa penurunan angka partisipasi kerja mayoritas terjadi pada sektor non-pertanian.

Dalam upaya mempersiapkan bonus demografi di Kabupaten Kediri dilaksanakan beberapa program dan kegiatan untuk meningkatkan kualifikasi dan kompetensi SDM di Kabupaten Kediri. Semakin unggul SDM yang terdapat di Kabupaten Kediri, secara simultan akan membangun potensi ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan secara umum. Upaya dengan kolaborasi aktif dengan berbagai *stakeholder* untuk meningkatkan jumlah penawaran kerja, agar tercapai *optimum employment* di Kabupaten Kediri dalam berbagai sektor ketenagakerjaan.

1) Permasalahan dan Tantangan

Secara umum ketenagakerjaan di Kabupaten Kediri terdapat banyak permasalahan dan hambatan dalam upaya peningkatan ketenagakerjaan di Kabupaten Kediri. Hambatan-hambatan yang ditemui adalah sebagai berikut:

1. Masih rendahnya koordinasi antar *stakeholder* tentang pentingnya data dan informasi, baik mengenai pelatihan dan penempatan tenaga kerja.
2. Kurangnya dukungan anggaran pada beberapa kegiatan terkait pemberdayaan masyarakat.
3. Kurangnya pemahaman masyarakat terkait pentingnya pelatihan standar kompetensi dalam dunia industri.
4. Masih minimnya penyebaran luasan informasi pasar kerja.

Selain hambatan-hambatan secara umum diatas, masih terdapat permalasahan teknis yang masih menjadi permasalahan teknis di Kabupaten Kediri. Permasalahan teknis yang berhasil dihimpun adalah sebagai berikut:

1. Kurangnya koordinasi dari dinas terkait, terutama persiapan lulusan baru baik jenjang SMA/SMK ataupun Kuliah yang akan dijadikan dasar pelatihan, penempatan, dan kesesuaian kerja baik di secara formal ataupun informal.
2. Alumni pelatihan Dinas Tenaga Kerja masih membutuhkan pembinaan lebih lanjut kepada dinas terkait, agar mampu melakukan manajemen bisnis dan jaringan pemasaran skala kecil agar bisa menjadi wirausaha baru.
3. Masalah pengangguran secara umum bukan hanya permasalahan bagi Dinas Tenaga Kerja saja, namun juga perlu melibatkan banyak *stakeholder* dari banyak perspektif.
4. Pandemi Covid-19 menyebabkan banyak perusahaan di Kabupaten Kediri melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK)
5. Menurunnya angka rekrutmen terhadap *fresh-graduate* lulusan SMK dan kuliah baru.
6. Berhentinya proses keberangkatan Pekerja Migran Indonesia (PMI) di negara-negara yang masih memberlakukan *lockdown.*
7. Masih ada pengusaha yang kurang memerhatikan pentingnya norma ketenagakerjaan (kepersetaan BPJS Ketenagakerjaan).

2) Pelaksanaan Program dan Kegiatan

Meninjau dari perkembangan permasalahan diatas, Pemerintah Kabupaten Kediri melalui Dinas Tenaga Kerja memberikan strategi dan upaya dalam rangka peningkatan kualitas tenaga kerja di Kabupaten Kediri. Adapun teknis strategi dan upaya yang dilakukan adalah sebagai berikut:

1. Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja dengan kegiatan pelatihan berdasarkan unit kompetensi, pembinaan lembaga pelatihan kerja swasta, konsultasi produktivitas pada perusahaan kecil, dan pengukuran produktivitas tingkat daerah kabupaten/kota.
2. Penempatan Tenaga Kerja dengan kegiatan pelayanan antar kerja di daerah kabupaten/kota, penerbitan lembaga penempatan tenaga kerja swasta (LPTKS),

pengelolaan informasi pasar kerja, perlindungan PMI (Pekerja Migran Indonesia), penerbitan perpanjangan IMTA.

3. Hubungan Industrial dengan kegiatan pengesahan peraturan perusahaan dan pendaftarann perjanjian kerja bersama, pencegahan dan penyelesaian perselisihan hubungan industrial, mogok kerja dan penutupan perusahaan di daerah.
4. Pembangunan Kawasan Transmigrasi dengan kegiatan penataan persebaran penduduk yang berasal dari satu daerah.

Target yang ditetapkan dalam upaya peningkatan kualitas tenaga kerja dan kesempatan kerja adalah Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) dengan angka 70,9%. Target tersebut ditetapkan dengan berbagai macam pertimbangan, utamanya pertimbangan pemulihan ekonomi pasca pandemi covid-19.

Pada tahun 2022 ini, capaian TPAK menurun 0,61% dari tahun sebelumnya dari 69,34% menjadi 68,73%. Dalam pemulihan ekonomi ini, cukup banyak perpindahan angkatan kerja dari sektor formal menuju sektor informal. Perpindahan yang terjadi kemungkinan tidak tercatat oleh Siskernas (Sistem Ketenagakerjaan Nasional) yang terbatas dalam pencatatan sektor formal.

Selain itu, cukup tingginya minat pemuda untuk menjadi wirausaha juga memengaruhi berjalannya TPAK. Karena dengan tingginya minat di sektor informal, maka pertumbuhan di sektor formal mengalami tren penurunan.

3) Analisa Kinerja, Efisiensi dan Perbandingan Target Akhir RPJMD

Analisa Kinerja

Indikator	Capaian 2020	Capaian 2021	Target 2022	Capaian 2022	Persentase Capaian	Anggaran	Realisasi Anggaran	Persentase Realisasi
TPAK	**70,65**	**69,34**	**70,9%**	**68,73%**	**96,93%**	**8.481. 063.220**	**8.002. 924.270**	**95,4%**

Analisa Efisiensi Anggaran

Indikator	Persentase Capaian Kinerja	Persentase Realisasi Anggaran	Formula Perhitungan	Hasil Analisa Efisiensi	Keterangan

TPAK	**96,93%**	**95,4%**	**96,8%-95,4%**	**1,4%**	**Efisien**

Analisa Perbandingan Target Akhir RPJMD tahun 2026

Indikator	Capaian Tahun 2022	Target tahun 2022	Target Akhir RPJMD	Persentase Capaian RPJMD
TPAK	**68,73**	**70,9**	**71,5**	**96%**

4) Faktor-faktor Pendukung Kinerja

Dengan adanya peningkatan yang cukup besar pada Kegiatan Pelatihan berbasis kompetensi dan Kegiatan padat karya yang ada pada Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Kediri, memberikan kontribusi yang cukup besar terhadap pengurangan pengangguran, hal ini di dukung data adanya kenaikan daya beli masyarakat, penurunan Angka kemiskinan dan adanya peningkatan UMKM yang ada di Kabupaten Kediri. Sebagaimana dalam mempersiapkan tenaga kerja kita dengan adanya pembangunan Bandara di Kabupaten Kediri. Diharapkan hasil hasil Pelatihan yang sudah kita siapkan mampu memenui proporsi masyarakat Kabupaten Kediri yang bekerja di Bandara cukup besar guna menunjang peningkatan partisipasi angkatan kerja di Kabupaten Kediri.

Dan untuk meningkatkan *entrepeneurship* yaitu dengan memberikan pelatihan berbasis kompetensi. Upaya tersebut dipilih karena tingginya minat masyarakat muda untuk menjadi *entrepreneur* dan membuka lapangan kerja / Menciptakan wirausaha Baru.

Selain itu pula, Job Fair / Bursa Kerja serta kegiatan-kegiatan yang memertemukan pencari kerja dengan pengusaha selalu kita lakukan. Baik itu melalui skema Bursa kerja *online, offline* ataupun melalui skema-skema lain seperti pengumuman lowongan kerja pada Dinas Tenaga Kerja.

5) Faktor-faktor Penghambat Kinerja

Tidak dapat dipungkiri bahwa pandemi Covid-19 masih memberi pengaruh yang panjang terhadap sektor ketenagakerjaan. Migrasi sistem tenaga kerja formal menuju sektor informal pada pandemi Covid-19 di Kabupaten Kediri telah meningkat. Hal tersebut didukung dengan meningkatnya jumlah UMKM sebesar 40%.

Selain itu, masih belum dibukanya beberapa batas negara menyebabkan Pekerja Migran Indonesia (PMI) asal Kabupaten Kediri belum dapat kembali bekerja. Baik itu yang baru akan berangkat ataupun mereka yang dipulangkan oleh negara-negara saat Covid-19.

Selama pandemi Covid-19 ini, terdapat penurunan permintaan tenaga kerja dari korporasi-korporasi yang ada di Kabupaten Kediri. Hal tersebut terjadi karena sedang ada upaya penghematan menyebabkan permintaan tenaga kerja baru *freshgraudate* mengalami penurunan.

Kompetensi dan keahlian calon tenaga kerja dengan permintaan tenaga kerja seringkali tidak bertemu. Hal tersebut seringkali menjadi penyebab perkembangan ketenagakerjaan di Kabupaten Kediri tidak dapat berjalan optimal.

Tidak akuratnya data dari sektor informal menyebabkan kebijakan-kebijakan yang diambil masih belum dapat menggambarkan kondisi real di lapangan. Meningkatnya Wirausahawan Baru (WUB) hasil peralihan dari sektor formal juga memerlukan pendekatan-pendekatan lanjutan, terutama oleh *stakeholder* terkait baik dari segi pelatihan, perizinan, bantuan, dsb.

Adanya Penyakit Kuku dan Mulut (PMK) pada hewan ternak menyebabkan banyak peternak mengalami kerugian cukup besar. Akibat hal tersebut, cukup banyak masyarakat yang bekerja di sektor peternakan harus beralih fungsi pada sektor lain, baik itu peternak pemilik ataupun peternak penggarap.

Namun demikian, dengan berbagai hal diatas menyebabkan tenaga kerja di Kabupaten Kediri beralih pada sektor-sektor lain yang berpotensi menimbulkan pertumbuhan ekonomi. Namun sayangnya, arus peralihan tenaga kerja yang tidak lancar menyebabkan angka pengangguran di Kabupaten Kediri tumbuh diangka 1,68 menjadi 6,83.

6) **Benchmarking**

Perbandingan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)

No	Keterangan	Capaian
1	Kabupaten Kediri	68,73
2	Kabupaten Jombang	66,65
3	Kota Kediri	69,93
4	Kabupaten Nganjuk	66,79

5	Kota Malang	63,08
6	Provinsi Jawa Timur	71,23
7	Nasional	68,63
8	Global/Internasional	59,00*

Dari perbandingan data diatas, perkembangan ketenagakerjaan di Kabupaten Kediri jika dibandingkan dengan daerah-daerah lainnya memiliki angka yang lebih baik. Faktor pandemi Covid-19 masih berdampak terhadap ketenagakerjaan di Kabupaten Kediri. Capaian TPAK di Kabupaten Kediri masih berada diatas capaian global dan nasional serta daerah-daerah lain seperti Kabupaten Nganjuk, Kabupaten Jombang, dan Kota Malang. Namun demikian, capaian TPAK di Kabupaten Kediri masih berada di bawah capaian Kota Kediri dan Provinsi Jawa Timur.

7) Kesimpulan

Capaian TPAK pada tahun 2022 sebesar 68,73% ini masih berada dibawah target yang telah ditetapkan yakni 70,9%. Kendati demikian, trend menurunnya partisipasi angkatan kerja juga terjadi di banyak tempat skala nasional ataupun internasional. Tingginya angka alih fungsi tenaga kerja dari sektor formal menjadi sektor informal ketika Covid-19, menyebabkan partisipasi angkatan kerja menurun.

8) Rencana Tindak Lanjut

Pemerintah Kabupaten Kediri melalui Dinas Tenaga Kerja dan OPD terkait tengah merencanakan hal sebagai berikut:

1. Meningkatkan pelatihan berbasis kompetensi kebutuhan pasar kerja dan *entrepreneur*.
2. Pelatihan wirausaha pada kelompok masyarakat (PMI Purna).
3. Meningkatkan jalinan kerjasama dengan perusahan-perusahaan terkait kebutuhan tenaga kerja formal melalui Smartnaker.
4. Membatasi TKA yang masuk Kabupaten Kediri.
5. Upaya meningkatkan perlindungan tenaga kerja.

6. Menjaga hubungan industrial yang harmonis di lingkungan perusahaan baik dari pekerja dan pengusaha.

d. Meningkatnya Kesejahteraan Masyarakat Berbasis Keluarga

Kesejahteraan berbasis keluarga adalah hal yang penting, menurut PBB keluarga adalah sebuah sistem yang memiliki fungsi signifikan dalam meningkatkan kesejahteraan. Dalam sistem keluarga, terdiri atas bapak, ibu, dan anak-anak serta anggota keluarga lainnya seperti kakek, nenek, dsb. Dengan hal tersebut, didapati bahwa keluarga memiliki efek yang panjang terutama dalam bidang kesejahteraan manusia.

Menurut PBB keluarga adalah institusi pertama pembangunan manusia. Pembangunan manusia dalam keluarga berdampak pada banyak aspek mulai dari aspek rata-rata sekolah, harapan lama sekolah, usia harapan hidup, indeks konsumsi, kecukupan gizi, serta hal-hal lain yang menunjang pembangunan manusia. Anak-anak yang tumbuh dari keluarga sejahtera akan memiliki kesempatan pembangunan manusia yang lebih baik daripada anak-anak yang tumbuh dari keluarga pra-sejahtera.

Menurut Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) keluarga memiliki delapan fungsi sebagai berikut:

1. Keagamaan
2. Sosial Budaya
3. Cinta kasih,
4. Melindungi
5. Reproduksi
6. Sosialisasi dan Pendidikan
7. Ekonomi
8. Pembinaan lingkungan

Upaya Pemerintah Kabupaten Kediri dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat menggunakan basis keluarga. Upaya peningkatan berbasis keluarga ini dilaksanakan sebagai upaya peningkatan kesejahteraan. Keluarga sejahtera telah melingkupi status sosial, status budaya, status gender, dan status perekonomian.

1) Permasalahan dan Tantangan

Namun begitu, upaya Pemerintah Kabupaten Kediri dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat berbasis keluarga masih menemui berbagai macam hambatan. Hambatan tersebut diidentifikasi-kan sebagai berikut;

1. Kurangnya keterlibatan aktif, advokasi, dan koordinasi terhadap kelompok kerja Pengarusutamaan Gender (PUG).
2. Kurang pemahaman masyarakat tentang program KB.
3. Masih adanya pelanggaran terhadap hak anak, dimana sosialisasi terhadap hak anak dan peran strategis PPA masih belum optimal.
4. Adanya pemahaman di masyarakat tentang semakin banyak jumlah anak semakin baik.
5. Unmet Need masih tinggi dimana masih tingginya angka ke-engganan penggunaan alat kontrasepsi baik untuk laki-laki ataupun perempuan.
6. Usia perkawinan dibawah 20 tahun masih cukup tinggi.

2) Pelaksanaan Program dan Kegiatan

Melihat kompleksnya permasalahan terkait keluarga sejahtera di Kabupaten Kediri, Pemerintah Kabupaten Kediri melalui Dinas P2KBP3A telah menyusun rencana dan upaya pencapaian peningkatan kesejahteraan keluarga dengan upaya dibawah ini:

1. Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan dengan kegiatan Pelembagaan Pengarusutamaan Gender, Pemberdayaan Pemerpuan bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyrakatan.
2. Perlindungan Perempuan dengan kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota, Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi.
3. Peningkatan Kualitas Keluarga dengan kegiatan Peningkatan Kualitas Keluaga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak, Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak.
4. Perlindungan Khusus Anak dengan kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Anak yang melibatkan para pihak lingkup daerah Kabupaten/Kota, Penyediaan Layanan bagi ANak yang memerlukan perlindungan khusus, serta penguatan dan pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi anak.

5. Peningkatan Pembinaan Keluarga Berencana melalui kegiatan Adokasi, KIE program Bangga Kencana, Pengendalian dan Pendistribusian kebutuhan Alat Kontrasepsi serta pelaksanaan pelayanan KB dan Pemberdayaan serta peningkatan peran organisasi kemasyarakatan dan lini lapangan.
6. Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera melalui kegiatan pembinaan ketahanan keluarga dan keserjateraan keluarga peningkatan peran serta organisasi kemasyarakatan serta pendewasaan usia perkawinan
7. Penyediaan data mikro keluarga secara menyeluruh melalui kegiatan pemaduan dan sinkronisasi kebijakan serta pemetaan perkiraan pengendalian penduduk.

Dengan strategi yang telah ditetapkan, dalam operasionalnya Pemerintah kabupaten Kediri berhasil meningkatkan capaian kinerja Persentase Keluarga Sejahtera sebesar 0,29 menjadi 70,80. Capaian tersebut masih berada dalam target yang telah ditetapkan yakni 71,11. Namun demikian, upaya Pemerintah Kabupaten Kediri dalam upaya meningkatkan persentase keluarga sejahtera akan senantiasa dioptimalkan.

3) Analisa Kinerja, Efisiensi, dan Capaian RPJMD

Analisa Kinerja

Indikator	Capaian 2020	Capaian 2021	Target 2022	Capaian 2022	Persentase Capaian	Anggaran	Realisasi Anggaran	Persentase Realisasi
Persentase Keluarga Sejahtera	**-**	**70,51%**	**71,11%**	**70,8%**	**99,56%**	**22.702. 330.431**	**20.158. 577.077**	**88,9%**

Indikator	Persentase Capaian Kinerja	Persentase Realisasi Anggaran	Formula Perhitungan	Hasil Analisa Efisiensi	Keterangan
Persentase Keluarga Sejahtera	**99,56**	**88,90**	**99,56-88,90**	**10,66%**	**Efisien**

Analisa Perbandingan Target Akhir RPJMD tahun 2021-2026

Indikator	Target Tahun 2022	Capaian Tahun 2022	Target Akhir RPJMD	Persentase Capaian RPJMD
Persentase Keluarga Sejahtera	**71,11**	**70,80**	**73,11**	**96%**

4) Faktor-faktor Penunjang

Dukungan kegiatan dalam upaya peningkatan kesejahteraan keluarga memiliki dampak yang besar, terutama pada para perempuan. Hal tersebut terjadi karena dukungan pelatihan kepada ibu-ibu semakin masif dijalankan. Selain itu pula, peningkatan peran

perempuan dalam pembangunan melalui pembinaan dan kelompok organisasi perempuan juga semakin ditingkatkan.

Upaya lain dalam rangka pendampingan terhadap ibu melahirkan dan bayi umur 0 – 59 bulan terus dilaksanakan untuk menekan angka *stunting* dengan menjaga kualitas gizi bayi dan ibu. Serta peningkatan pelayanan KB secara gratis dalam upaya meningkatkan kepersetaan KB masyarakat Kabupaten Kediri.

Koordinasi dengan OPD-OPD terkait memberikan satu kemudahan dalam lingkup kolaboratif, terutama dalam upaya peningkatan kesejahteraan keluarga dan pencegahan *stunting.* Kolaborasi tersebut secara umum telah berjalan dalam upaya pencapaian *one digit stunting* Kabupaten Kediri. Dukungan anggaran dan kebijakan Pemerintah Kabupaten Kediri secara simultan mendukung operasionalisasi kinerja di Kabupaten Kediri.

5) Faktor-faktor Penghambat

Tidak dipungkiri bahwa terdapat beberapa hambatan dalam melaksanakan kinerja. Faktor penghambat adalah :

1. Aplikasi Sistem Informasi Pangkalan Data Keluarga (SiPanda) yang merupakan pangkalan data keluarga masih dalam proses pengerjaan
2. Kolaborasi data masih perlu ditingkatkan untuk efisiensi intervensi

6) Kesimpulan

Upaya Pemerintah Kabupaten Kediri dalam meningkatkan persentase keluarga sejahtera mengalami peningkatan sebesar 0,29. Meskipun peningkatan tersebut belum memenuhi target yang telah ditetapkan yakni 71,11 dengan realisasi anggaran sebesar 20.158.577.077 dari 22.702.330.431 anggaran yang telah ditetapkan.

7) Rencana Tindak Lanjut

Melihat semakin meningkatnya target pada tahun 2023, Pemerintah Kabupaten Kediri melalui Dinas P2KBP3A mengupayakan :

1. Pemanfaatan aplikasi SiPanda untuk upadate data keluarga Sejahtera
2. peningkatan koordinasi bersama dengan pemangku kepentingan terkait dalam upaya meningkatkan kesejahteraan keluarga akan menggunakan kampanye DASHAT (*Dapur Sehat Atasi Stunting*) terutama pada kampung-kampung KB dampingan Dinas P2KBP3A.

3. Dilaksanakan pelatihan kewirausahaan terhadap Perempuan Kepala Keluarga (Peka) untuk meningkatkan ekonomi keluarga

e. Meningkatnya Penerapan Nilai Nasionalisme, Agama, dan Semangat Demokrasi di Masyarakat

Penerapan nilai nasionalisme, agama, dan semangat demokrasi ditinjau dari tingkat pemahaman elemen masyarakat mulai menurun baik dari wawasan kebangsaan, nilai-nilai kebangsaan, serta karakter bangsa. Disamping itu, diwarnai dengan mulai memudarnya tingkat partisipasi masyarakat dalam ikut serta menjaga dan memelihara kondusvitas lingkungan dan kondusivitas wilayah/daerah. Sedangkan dari aspek tingkat parsitipasi demokrasi, masyarakatpun mulai ada sedikit pergeseran pemahaman dan pengetahuan terkait demokrasi di Kabupaten Kediri. Karena ketiga hal tersebut adalah faktor-faktor kunci daerah yang kondusif.

Nasionalisme, agama, serta semangat demokrasi dalam hal ini dimaksudkan sebagai karakter masyarakat yang cinta tanah air. Hal tersebut diejawantahkan dengan dimensi-dimensi nasionalisme sebagai berikut;

1. Kebanggaan sebagai warga negara Indonesia
2. Memiliki semangat sadar bela negara
3. Menerima kebhineka-tunggal-ikaan, suku, ras, dan agama
4. Bangga terhadap budaya serta produk dalam negeri yang beraneka ragam
5. Sadar akan partisipasi demokrasi Indonesia

Selain meningkatkan karakter nasionalis dan agama masyarakat Kabupaten Kediri yang akan diwujudkan dengan meningkatnya kerukunan antar umat beragama, terpeliharanya semangat kepahlawanan, nilai-nilai dan karakter kebangsaan, serta partisipasi demokrasi dengan dimensi sebagai berikut;

1. Meningkatnya toleransi umat beragama dengan menerima dan saling menghormati perbedaan keyakinan, baik dalam kehidupan sosial ataupun dalam peribadatan.
2. Penerapan nilai-nilai dan karakter kebangsaan
3. Menumbuhkan semangat kepahlawan dalam sadar bela negara
4. Meningkatnya partisipasi demokrasi masyarakat khusunya bagi pemilih pemula di Kabupaten Kediri.

Demokrasi dalam hal ini menekankan sebuah sistem sosial dan budaya yang menurut BPS terbagi atas beberapa aspek. Aspek tersebut sesuai dengan kebijakan dari BPS Pusat terjadi perubahan metode penilaian dan indicator Indeks Demokrasi Indonesia diantaranya aspek kebebasan sipil, hak-hak politik, peran lembaga demokrasi menjadi aspek

1. Aspek kebebasan sipil,
2. Aspek kesetaraan,
3. Aspek kapasitas kelembagaan demokrasi.

Dengan semangat demokrasi, Pemerintah Kabupaten Kediri tengah berupaya untuk mengembalikan marwah demokrasi di Kabupaten Kediri. Demokrasi yang bertanggung-jawab dan saling mengawasi. Dengan semangat tersebut, diupayakan akan adanya rasa persatuan dan kesatuan dari masyarakat di Kabupaten Kediri.

1) **Permasalahan dan Tantangan**

Secara umum, permasalahan yang menajdi penghambat upaya peningkatan penerapan nilai nasionalisme, agama, dan semangat demokrasi di masyarakat telah diidentifikasikan sebagai berikut:

1. Kurang optimalnya peran aparatur, elite politik, tokoh agama, tokoh masyarakat, LSM, tenaga pendidik, pelajar dan mahasiswa dalam memerkokoh wawasan kebangsaan.
2. Kurang optimalnya peran-peran masyarakat dalam menjaga inklusivitas dan demokrasi di Kabupaten Kediri.
3. Perlunya peningkatan keterpaduan sistem pengamanan melalui penataan komunikasi dan koordinasi yang efektif antar *stakeholder.*
4. Jaringan data informasi strategis dalam rangka peningkatan kewaspadaan daerah perlu untuk ditingkatkan.
5. Perlunya sosialisasi terkait upaya pemecahan dan solusi atas upaya memberikan pemahaman terkait pentingnya persatuan dan kesatuan.
6. Perlunya sosialisasi ketahanan nasional melalui penanaman ideologi bangsa kepada masyarakat.

2) Pelaksanaan Program dan Kegiatan

Dengan permasalahan dan hambatan yang telah diidentifikasikan diatas, Pemerintah Kabupaten Kediri melalui Badan Kesatuan Bangsa dan Politik telah menetapkan strategi dan upaya sebagai berikut:

1. Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan dengan kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila.
2. Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi Sosial dan Budaya dengan kegiatan perumusan kebijakan teknis dan pemantapan pelaksanaan bidang ketahanan ekonomi, sosial dan budaya.
3. Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitas dengan kegiatan perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan pemantapan kewaspadaan nasional dan penanganan konflik sosial dan meningkatnya partisipasi masyarakat dalam politik.
4. Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan etika serta Budaya Politik dengan kegiatan Permusuan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintah, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/ Pemilu Kepala Derah serta Pemantauan Situasi Politik.
5. Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan dengan kegiatan Permusuan Kebijakan Teknis dan Pemantaban Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Ormas.

Dalam upanyanya meningkatkan penerapan nilai nasionalisme, agama, dan semangat demokrasi dimaksud, telah ditetapkan indikator Tingkat Kondusivitas Daerah dengan target 100%.

Dalam operasionalnya, Pemerintah Kabupaten Kediri melalui Badan Kesatuan Bangsa dan Politik telah melaksanakan tugas dan pengupayaan peningkatan penerapan nilai nasionalisme, agama, dan semangat demokrasi di masyarakat dengan cukup kompleks. Namun demikian, capaian tingkat kondusivitas daerah pada Tahun 2022 di Kabupaten Kediri mencapai 100%. Adapun konflik-konflik yang terjadi di Kabupaten Kediri diluar kewenangan dari Pemerintah Kabupaten/Kota, seperti konflik agraria dengan Perhutani dan dampak kenaikan BBM.

3) Faktor-faktor Pendukung

Dalam upaya pencapaian Tingkat Kondusivitas Daerah ini, Pemerintah Kabupaten Kediri didukung dengan komitmen bersama dari para pemangku kepentingan dan masyarakat Kabupaten Kediri pada saat-saat terjadinya konflik diantaranya telah dibentuk Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat serta Tim Deteksi Dini yang melibatkan masyarakat itu sendiri dengan jaringan intelejen intansi terkait. Dengan komitmen bersama untuk menjaga kebersamaan tersebut, ketercapaian tingkat kondusivitas di Kabupaten Kediri mencapai 100%.

Dalam pencapaian indikator tujuan Indeks Demokrasi Indonesia, beberapa dimensi dalam Indeks tersebut mendapati nilai yang tinggi. Seperti aspek kebebasan sebesar, aspek kesetaraan dalam pelayanan sebesar dan aspek kapasitas Lembaga demokrasi. Hal-hal tersebut juga secara langsung menunjang tingkat kondusivitas daerah di Kabupaten Kediri.

4) Faktor-faktor Penghambat

Tidak dapat dipungkiri bahwa pencapaian penerapan demokrasi di Kabupaten Kediri masih memiliki kelemahan. Nilai yang cukup rendah berada dalam dimensi keterbukaan infomrasi publik (KIP) dan indikator kesempatan kerja antar wilayah. Selain itu, keterwakilan perempuan dalam dewan masih berada dibawah 30%. Hal tersebut juga menjadi perhitungan dalam penerapan demokrasi di Kabupaten Kediri.

5) Analisa Kinerja, Efisiensi, dan Capaian RPJMD

Analisa Kinerja

Indikator	Capaian 2020	Capaian 2021	Target 2022	Capaian 2022	Persentase Capaian	Anggaran	Realisasi Anggaran	Persentase Realisasi
Tingkat Kondusivitas Daerah	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**13.069.633.725,00**	**12.293.430.252,00**	**94,06%**

Analisa Efisiensi Anggaran

Indikator	Persentase Capaian Kinerja	Persentase Realisasi Anggaran	Formula Perhitungan	Hasil Analisa Efisiensi	Keterangan
Tingkat Kondusivitas	**100**	**94,06**	**100-94,06**	**5,94%**	**Efisien**

Daerah					

Analisa Perbandingan Target Akhir RPJMD tahun 2021-2026

Indikator	Capaian Tahun 2022	Target Tahun 2022	Target Akhir RPJMD	Persentase Capaian RPJMD	Keterangan
Tingkat Kondusivitas Daerah	**100**	**100**	**100**	**100%/100%x100=100%**	**Sesuai dengan Jalur perencanaan**

6) Benchmarking

No	Keterangan	Capaian Tingkat Kondusivitas Daerah
1	Kabupaten Kediri	100%
2	Provinsi Jawa Timur	100%

Capaian Tingkat Kondusivitas Daerah (TKD) di Kabupaten Kediri 100%, capaian tersebut sama besarnya dengan capaian Tingkat Kondusivitas Daerah (TKD) di Provinsi Jawa Timur.

7) Kesimpulan

Capaian kinerja Tingkat Kondusivitas Daerah Pemerintah Kabupaten Kediri tahun 2022 ini mencapai 100%, hal tersebut sesuai dengan target yang telah ditentukan. Capaian tersebut didukung dengan anggaraan sebesar 10.805.557.825 dengan realisasi sebesar 9.666.355.730,00. Ketercapaian ini sama seperti tahun-tahun sebelumnya yakni Tingkat Kondusivitas Daerah sebesar 100%.

8) Rencana Tindak Lanjut

Melihat dari kompleksnya permasalahan diatas, Pemerintah Kabupaten Kediri melalui Badan Kesatuan Bangsa dan Politik akan berkoordinasi dengan OPD terkait. Hal yang akan menjadi *concern* bagi Pemerintah Kabupaten Kediri adalah keterwakilan perempuan dalam dewan yang belum mencapai 30%. Dengan hal tersebut, koordinasi dengan partai

politik, Sekretariat DPRD, serta pemangku kepentingan yang lain menjadi perlu untuk ditingkatkan.

2. Misi 2

Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik

Gambar 3

Lingkup Misi 2



No	Tujuan	Indikator	Capaian 2020	Capaian 2021	Target 2022	Capaian 2022	Keterangan
1	Meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik	Indeks Reformasi Birokrasi	61,03	63,36	68	65,66	Dibawah Target

No	Sasaran	Indikator	Capaian 2020	Capaian 2021	Target 2022	Capaian 2022	Anggaran	Realisasi Anggaran	Ket
1	Membangun institusional penyelenggaraan pemerintah yang efektif dan bersih	Nilai SAKIP	61,03	68,21	69,5	68,33	1.284. 103.361	1.245. 660.071	Dibawah Target
		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	84,14	84,23	84	85,77	-	-	Melebihi Target
		Opini BPK terhadap	WTP	WTP	WTP	WTP	644.731.	629.219.	Sesuai Target

		LKPD					486.777	029.288	
		Indeks Persepsi Anti Korupsi (IPAK)	3,68	3,33	3,70	3,49	5.273. 228.555	4.401. 187.945	Dibawah Target
2	Meningkatkan Profesionalitas ASN	Indeks profesionalitas ASN	*	54.41	60	54,91	10.796. 127.780	9.972. 779.406	Dibawah Target
3	Transformasi digital penyelenggaraan pelayanan public	Indeks SPBE	3.56	3.12	4.04	2.61	26.355. 597.110	22.427. 677.662	Dibawah Target

Bupati Kediri bersama jajaran saat melakukan *launching* Aplikasi Srikandi

a. Membangun Institusional Penyelenggaraan Pemerintah yang Efektif dan Bersih

Sasaran ini terbagi atas lima indikator yakni Nilai SAKIP, Nilai IKM, Opini BPK, Indeks Professionalisme ASN, dan Indeks SPBE. Dari keempat indikator tersebut diupayakan penyelenggaraan pemerintahan yang efektif dan bersih dapat dilaksanakan dengan baik. Karena dari ke-empat indikator tersebut dapat menggambarkan telah efektif dan bersihnya penyelenggaraan pemerintah.

Sudah menjadi upaya bagi Pemerintah Kabupaten Kediri untuk mengembangkan upaya pembangunan pemerintahan yang efektif dan bersih. Tidak dapat dipungkiri bahwa ekspektasi masyarakat dewasa ini terhadap kinerja pemerintahan yang baik dan bersih semakin tinggi. Sebagai penyelenggara pemerintahan sesuai dengan marwah demokrasi yakni dari rakyat, untuk rakyat, dan kepada rakyat harus dilaksanakan dalam upaya memenuhi ekspektasi masyarakat.

Urusan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

Akuntabilitas secara umum diartikan sebagai pertanggungjawaban atau keadaan yang dapat dimintai pertanggungjawaban. Dalam menjalankan pemerintahan, pemerintah harus berjalan dengan pertanggung-jawaban atas apa yang dilaksanakannya. Akuntabilitas

adalah prinsip yang selalu diterapkan oleh seluruh individu dalam satu organisasi, mulai dari pimpinan tertinggi sampai pegawai terendah dalam menjalankan tugasnya. Pelaksanaan akuntabiltias dengan prinsip transparancy, effectiveness, efficiency, dan strategic vision, karena terkait dengan aktivitas kepemerintahan dan kehidupan sosial masyarakat.

Prinsip-prinsip akuntabilitas adalah:

1. Adanya komitmen dari pimpinan dan seluruh staf untuk melakukan pengelolaan organisasi yang memiliki nilai akuntabel.
2. Merupakan sistem yang menjamin penggunaan sumber daya secara konsisten berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Menunjukkan tingkat pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.
4. Berorientasi pada visi, misi, hasil, dan manfaat yang diperoleh organisasi.
5. Memegang erat nilai kejujuran, transparan, objektif dan inovatif.

Dalam upaya membangun institusional Pemerintah Kabupaten Kediri yang Efektif dan Bersih, ada beberapa hal perlu diperhatikan:

1. Optimalisasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) sesuai dengan Permen PAN & RB nomor 88 tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
2. Perubahan pola pikir tentang pentingnya pelaksanaan akuntabilitas dan reformasi birokrasi di Pemerintah Kabupaten Kediri menjadi penting untuk dilaksanakan.
3. Dalam kesesuaiannya dengan Permen PAN & RB nomor 25 tahun 2021 tentang Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi yang akan dirubah menggunakan Reformasi Birokrasi Tematik diperlukan penyesuaian-penyesuaian lanjutan.

1) Permasalahan dan Tantangan

Dengan perhatian terhadap hal tersebut, didapati berbagai macam permasalahan dalam pembangunan institusional Pemerintahan yang efektif dan bersih. Dengan hal tersebut, didapati beberapa permasalahan dan isu-isu sebagai berikut:

1. Penerapan Good Government dalam Penyelenggaraan Pemerintah Kabupaten Kediri belum Optimal.
2. Kurangnya optimalnya penerapan akuntabilitas kinerja di masing-masing OPD.

2) Pelaksanaan Program dan Kegiatan

Melihat dari permasalahan tersebut, Pemerintah Kabupaten Kediri melalui Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Sekretariat Daerah, dan Inspektorat telah menetapkan upaya pembangunan institusi pemerintahan daerah yang efektif dan bersih. Upaya tersebut telah direncanakan sebagai berikut:

1. Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi terkait Akuntabilitas dan Good Governance di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kediri.
2. Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah dengan kegiatan Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan, Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah.

Indikator yang digunakan dalam rangka membangun Institusional Penyelenggaraan Pemerintah yang Efektif dan Bersih ini menggunakan Nilai SAKIP yang diukur oleh Kementerian PAN & RB. Kondisi akhir yang ditetapkan dalam RPJMD tersebut adalah Nilai SAKIP bernilai 82 dengan predikat A pada tahun 2026.

Dalam pelaksanaan operasionalnya, jika Instansi Pemerintah ingin naik predikat dari B menuju BB atau A, maka diperlukan sample akuntabilitas dari masing-masing OPD. Rata-rata OPD di Kabupaten Kediri menurut evaluator Kementerian PAN & RB belum menggambarkan sistem kinerja yang akuntabel. Hal tersebut terjadi karena penggunaan indikator yang belum menggambarkan kondisi yang ada, serta tidak sesuainya tugas dan fungsi OPD dengan tujuan dan sasaran yang ditetapkan.

Dengan pelaksanaan dan upaya pembangunan yang dilakukan pada tahun 2021-2022 ini, capaian Akuntabilitas Kinerja di Pemerintah Kabupaten Kediri masih berada diangka yang sama yakni N/A. Angka tersebut tidak memiliki perkembangan yang signifikan. Meskipun RPJMD mengalami perubahan, namun begitu perkembangan akuntabilitas dari sisi perencanaan masih belum mengalami perkembangan yang signifikan.

3) Analisa Capaian dan Efisiensi

Analisa Kinerja

Indikator	Capaian 2020	Capaian 2021	Target 2022	Capaian 2022	Persentase Capaian	Anggaran	Realisasi Anggaran	Persentase Realisasi

Nilai SAKIP	**67,18**	**68,21**	**69,5**	**68,33**	**98,3%**	**1.284.103. 361,00**	**1.245.660. 071,00**	**97%**

Analisa Capaian RPJMD

Indikator	Target Tahun 2022	Capaian Tahun 2022	Hasil Akhir RPJMD	Persentase Capaian dan RPJMD	Keterangan
Nilai SAKIP	**69,5**	**68,33**	**80**	**85,4%**	**Dibawah Jalur Perencanaan**

Analisa Efisiensi

Indikator	Persentase Capaian	Persentase Realisasi Anggaran	Formula Perhitungan	Hasil Analisa Efisiensi	Keterangan
Nilai SAKIP	**98,3%**	**97%**	**98-97%**	**1,3%**	**Efisien**

4) Faktor-faktor Pendukung

Dengan ditetapkannya RPJMD baru tahun 2021-2026 memiliki pendekatan-pendekatan SMART (Specific, Measurable, Achiavable, Realible, Time Specific) yang mana dapat meningkatkan peran akuntabilitas Pemerintah Kabupaten Kediri.

5) Faktor-faktor Penghambat

Evaluator KemenPANRB menilai keselarasan hubungan operasional antara Tujuan dan Sasaran Bupati dengan Tujuan dan Sasaran OPD belum terlihat. Selain itu, munculnya Permen PANRB nomor 89 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah menghapus komponen capaian kinerja. Perhitungan SAKIP hanya mengukur perencanaan, pelaksanaan, pelaporan, dan pengevaluasian Instansi Pemerintah dan Organisasi Perangkat Daerah

6) Kesimpulan

Capaian Sistem Akuntabiltas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) di Pemerintah Kabupaten Kediri diumumkan mendapatakn predikat B. Dimana predikat tersebut masih belum secara resmi diumumkan oleh Kementerian PANRB. Capaian tersebut masih sesuai dengan target yang tengah ditetapkan yakni 69,5 atau dalam predikat B. Selain hal tersebut, perbedaan persepsi mengenai makna SAKIP masih tinggi antar OPD.

7) Rencana Tindak Lanjut

Melihat semakin meningkatnya target pada tahun 2023, ada rencana untuk menyamakan persepsi. Hal tersebut menjadi penting, karena dengan persamaan persespsi, terutama dengan evaluator Kementerian PANRB. Hal tersebut terjadi agar makna tentang akuntabilitas (pertanggung-jawaban kinerja) dapat memiliki kesamaan persepsi dan memudahkan perbaikan bersama.

Selain hal diatas, adanya perubahan metode evaluasi Reformasi Birokrasi yang awalnya menggunakan 8 area perubahan, kini dirubah menjadi RB Tematik. Dalam metode RB Tematik, evaluator akan mengevaluasi langsung pada dampak yang dihasilkan, tidak lagi mengevaluasi sistem tata kelola 8 area perubahan. Oleh karena demikian, metode baru evaluasi Reformasi Birokrasi Tematik tersebut akan ditindaklanjuti bersama dengan OPD terkait.

b. Urusan Indikator Indeks Kepuasan Masyarakat

Survei Kepuasan Masyarakat merupakan kegiatan pengukuran secara komprehensif tentang tingkat kepuasan masyarakat terhadap kualitas layanan yang diberikan oleh penyelenggara pelayanan publik dengan tujuan untuk mengetahui kelemahan atau kekurangan dari masing-masing unsur penyelenggara pelayanan public. Selain itu pula, Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) digunakan untuk mengetahui kinerja penyelenggara pelayanan yang telah dilaksanakan oleh unit pelayanan publik secara periodik.

Sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, setiap penyelenggara pelayanan publik, baik yang memberikan pelayanan kepada masyarakat secara langsung maupun tidak langsung wajib menyusun, menetapkan, dan menerapkan standar pelayanan untuk setiap jenis pelayanan sebagai tolak ukur dalam penyelenggaraan pelayanan di lingkungan masing- masing.

Salah satu upaya guna meningkatkan kualitas pelayanan publik, sebagaimana diamanatkan dalam Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Program Pembangunan Nasional (PROPENAS), perlu disusun Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) sebagai tolak ukur untuk menilai tingkat kualitas pelayanan. Serta merujuk pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik menegaskan bahwa penyelenggara pelayanan publik berkewajiban melakukan penilaian kinerja penyelenggaraan pelayanan publik secara berkala. Selain itu ,data IKM akan dapat

menjadi bahan penilaian terhadap unsur pelayanan yang masih perlu perbaikan dan menjadi pendorong setiap unit penyelenggara pelayanan untuk meningkatkan kualitas pelayanannya.

Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) adalah data dan informasi tentang tingkat kepuasaan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif atas pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari aparatur penyelenggara pelayanan publik dengan membandingkan antara harapan dan kebutuhannya terutama dari citizen perspective atau perspektif masyarakat. Survei IKM bertujuan untuk mengetahui tingkat kinerja unit pelayanan secara berkala sebagai bahan untuk menetapkan kebijakan dalam rangka peningkatan kualitas Pelayanan publik selanjutnya.

Kepuasan masyarakat dewasa ini menjadi salah satu upaya untuk meningkatkan akuntabilitas kinerja di pemerintahan. Dengan hal tersebut, kepuasan telah ditetapkan sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan peran Pemerintah Kabupaten Kediri. Urusan ini secara langsung diampu oleh hampir seluruh OPD mulai dari Dinas, Badan, Bagian, Kecamatan.

Oleh karena demikian, dalam upaya untuk meningkatkan kepuasan masyarakat Pemerintah Kabupaten Kediri telah menargetkan Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat sebesar 84 pada tahun 2022.

1) Pelaksanaan Program dan Kegiatan

Dalam operasionalisasi pelaksanaan kegiatan yang diukur dengan perspektif kepuasan masyarakat, digunakanlah Survei Kepuasan Masyarakat (SKM). Penyelenggaraan SKM ini mengacu pada Peraturan Menteri PAN & RB nomor 14 tahun 2017 tentang Pedoman Survei Kepuasan Masyarakat terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik dan Peraturan Menteri PAN & RB nomor 17 tahun 2017 tentang Pedoman Evaluasi Kinerja Penyelenggara Pelayanan Publik.

Secara umum Survei Kepuasan Masyarakat ini dihimpun di akhir tahun yakni pada tanggal 15 Desember 2022. Sampel yang digunakan sebanyak 56 OPD sebagai sampling yang ada di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kediri. Dalam hasil evaluasi tersebut, didapati nilai IKM Pemerintah Kabupaten Kediri mendapatkan nilai 85,77.

Capaian IKM tersebut diisi dengan komposisi capaian tingkat Dinas/Badan tertinggi adalah Dinas Sosial Kabupaten Kediri tahun 2022 sebesar 97,75 sedangkan untuk Kecamatan tertinggi adalah Kecamatan Pare sebesar 97,96. Sedangkan untuk Dinas/Badan terendah adalah Dinas P2KBP3A dengan nilai 79,75 sedangkan untuk Kecamatan terendah adalah Kecamatan Tarokan dengan nilai IKM sebesar 76,11.

Angka capaian tersebut oleh Kementerian PAN & RB mendapatkan evaluasi yang cukup serius. Pertama, Kementerian PAN & RB melihat adanya kesenjangan yang cukup lebar antara OPD dengan perolehan tinggi dengan OPD yang mendapat perolehan rendah. Kedua, Kementerian PAN & RB melihat pula adanya fluktuasi nilai IKM yang didapatkan oleh OPD.

Dengan dua evaluasi dari Kementerian PAN & RB tersebut, perlu bagi Pemerintah Kabupaten Kediri untuk menurunkan kesenjangan IKM dengan upaya asistensi dan pendampingan bagi OPD-OPD yang masih mendapati nilai IKM yang rendah. Sedangkan untuk fluktuasi nilai, Pemerintah Kabupaten Kediri akan menggunakan nilai rata-rata capaian IKM sebagai dasar perencanaan tindak lanjut dalam periode perencanaan selanjutnya.

2) Analisa Kinerja dan Capaian RPJMD

Analisa Kinerja

Indikator	Capaian Tahun 2020	Capaian Tahun 2021	Target Tahun 2022	Capaian Tahun 2022	Keterangan
IKM	**84,14**	**84,23**	**84**	**85,77**	**Diatas Jalur perencanaan**

Analisa capaian RPJMD

Indikator	Capaian Tahun 2022	Target Tahun 2022	Hasil Akhir RPJMD	Persentase Capaian dan RPJMD	Keterangan
IKM	**85,77**	**84**	**86**	**85,77/86x100=99,7%**	**Diatas Jalur perencanaan**

3) Faktor-faktor Pendukung

Pelaksanaan Indeks Kepuasan Masyarakat di Kabupaten Kediri mengalami pertumbuhan yang cukup baik. Ketersediaan layanan yang semakin ditingkatkan waktu demi waktu, inovasi yang ditingkatkan oleh masing-masing OPD menunjang capaian IKM tahun 2022 ini melamapaui target yang telah direncanakan.

4) Faktor Penghambat

Tidak dapat dipungkiri bahwa pelaksanaan IKM di Kabupaten Kediri masih terjadi beberapa hambatan, terutama pada hal-hal yang menyangkut pada kualitas pelayanan seperti waktu penyelesaian dan perilaku petugas yang perlu ditingkatkan menjadi service excellent. Selain itu pula, pentingnya ketepatan waktu juga menjadi perhatian sebagaimana keterbukaan informasi publik yang perlu untuk dimonitor secara berkala.

5) Kesimpulan

Capaian IKM Pemerintah Kabupaten Kediri melalui 63 OPD yang ada didapati nilai yang cukup tinggi yakni 85,77 melebihi target yang telah ditetapkan yakni 84. Hal tersebut akan senantiasa ditingkatkan dengan mengidentifikasi masalah-masalah yang menjadi titik lemah kepuasan masyarakat untuk ditingkatkan lagi kedepannya.

6) Rencana Tindak Lanjut

Dengan kompleksnya capaian IKMdi Pemerintah Kabupaten Kediri peninjauan titik-titik lemah seperti service of excellence, ketepatan waktu, dan fasilitas pelayanan di Kabupaten Kediri perlu untuk ditingkatkan, terutama dalam upaya ketepatan waktu, fasilitas layanan di ruang tunggu, optimalisasi teknologi, dsb.

c. Urusan Indikator Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) adalah istilah atau opini yang diberikan oleh Auditor kepada suatu entitas keuangan, khusus untuk pengelolaan keuangan pemerintah baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah dengan auditornya adalah Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Setiap tahunnya BPK melakukan pemeriksaan atas laporan keuangan sebagai pertanggung jawaban penggunaan anggaran baik kepada Pemerintah Pusat berupa pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) maupun

kepada Pemerintah Daerah dalam mengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Entitas Akuntansi adalah unit pemerintahan pengguna anggaran/pengguna barang dan oleh karenanya wajib menyelenggarakan akuntansi dan menyusun laporan keuangan untuk digabungkan pada entitas pelaporan. Sedangkan Opini audit merupakan pernyataan dari auditor terhadap kewajaran laporan keuangan dari entitas yang sudah diaudit, kewajaran ini menyangkut hal-hal berkaitan materialitas, posisi keuangan, serta arus kas.

Opini auditor atas laporan keuangan dari entitas yang diaudit dapat dikelompokkan sebagai berikut :

1. Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atau *unqualified opinion*: Menyatakan bahwa laporan keuangan entitas yang diperiksa, menyajikan secara wajar dalam semua hal yang material, posisi keuangan, hasil usaha, dan arus kas entitas tertentu sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia.
2. Opini WTP diberikan jika system pengendalian internal memadai dan tidak ada salah saji materialistis atas pos-pos laporan keuangan. Secara keseluruhan laporan keuangan telah disajikan secara wajar sesuai Sistem Akuntansi Pemerintah.
3. Opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) atau qualified opinion: Menyatakan bahwa laporan keuangan entitas yang diperiksa menyajikan secara wajar dalam semua hal yang material, posisi keuangan, hasil usaha dan arus kas entitas tersebut sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia, kecuali untuk dampak hal-hal yang berhubungan dengan yang dikecualikan.
4. Opini WDP diberikan jika system pengendalian internal memadai, namun terdapat salah saji yang material pada beberapa pos laporan keuangan. Laporan keuangan dengan opini WDP dapat diandalkan, tetapi pemilik kepentingan harus memperhatikan masalah yang diungkap.
5. Opini Tidak Wajar atau adversed opinion: Menyatakan bahwa laporan keuangan entitas yang diperiksa tidak menyajikan secara wajar posisi keuangan, hasil usaha, dan arus kas entitas tertentu sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia.

6. Opini ini diberikan jika system pengendalian internal tidak memadai dan terdapat salah saji pada banyak pos laporan keuangan yang material. Secara keseluruhan laporan keuangan tidak disajikan secara wajar sesuai SAP.

Pernyataan menolak memberikan opini (disclaimer of opinion) atau Tidak Memberikan Pendapat (TMP) Memberi gambaran bahwa Auditor tidak menyatakan pendapat atas laporan apabila lingkup audit yang dilaksanakan tidak cukup untuk membuat suatu opini.

Upaya pengembangan pemerintahan yang efektif dan bersih secara umum harus melakukan efektivikasi di bidang keuangan. Pemerintah Kabupaten Kediri telah menetapkan target Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah pada tahun 2022.

1) Permasalahan dan Tantangan

Namun begitu, permasalahan yang menghambat upaya pembangunan pemerinthaan yang efektif dan bersih masih cukup kompleks, terutama dalam urusan keuangan daerah. Hasil identifikasi permasalahan dapat dilihat sebagai berikut:

1. Pengelolaan keuangan belum maksimal mengacu pada aturan yang ada baik di entitas akuntansi maupun di entitas pelaporan.
2. Realisasi Belanja Daerah Kabupaten Kediri tahun Anggaran 2022 sebesar 90,78% yang terinci dalam Belanja Operasi 92,52%, Belanja Modal 72,32%, BTT 22,29% dan Belanja transfer 99,91% dari anggaran sebesar Rp3.428.699.159.232,00 sedangkan realisasi terbesar pada belanja transfer mencapai 99,91 % dari total anggaran belanja transfer.
3. Dengan realisasi belanja tahun anggaran 2022 sebesar 90 % dari total anggaran belanja daerah, hal ini masih menjadi catatan bahwa realisasi belanja operasi masih lebih tinggi dari belanja Modal, yang mana belanja pegawai masih dominan realisasinya sebesar 96,39 %;

2) **Pelaksanaan Program dan Kegiatan**

Melihat kompleksnya permasalahan yang ada pada urusan keuangan, Pemerintah Kabupaten Kediri melalui Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah dan Inspektorat telah menetapkan beberapa strategi dalam rangka mendukung capaian Opini BPK terhadap LKPD berpredikat WTP. Adapun Strategi dan upaya telah ditetapkan adalah sebagai berikut:

1. Pengelolaan Keuangan Daerah dengan strategi peningkatan kualitas pengelolaan keuangan daerah.
2. Pengelolaan Barang Milik Daerah dengan strategi peningkatan pengelolaan kualitas Barang Milik Daerah (BMD).

Dalam operasionalnya, tidak begitu banyak kendala yang ditemui. Apalagi dengan perencanaan yang matang dan mitigasi permasalahan yang sudah berusaha dihindari sejak awal, capaian Opini BPK terhadap LKPD Kabupaten Kediri mendapat predikat WTP. Capaian tersebut dapat terlaksana karena semua kegiatan yang direncanakan dapat terealisasi.

3) Analisa Kinerja, Efisiensi dan Capaian RPJMD

Analisa Kinerja

Indikator	Capaian 2020	Capaian 2021	Target 2022	Capaian 2022	Persentase Capaian	Anggaran	Realisasi Anggaran	Persentase Realisasi
Opini BPK	**WTP**	**WTP**	**WTP**	**WTP**	**100%**	**644.731. 486.777**	**629.219. 029.288**	**97,65%**

Analisa Efisiensi

Indikator	Persentase Capaian	Persentase Realisasi Anggaran	Formula Perhitungan	Hasil Analisa Efisiensi	Keterangan
Opini BPK	**100%**	**97,65%**	**100%-97,65%**	**2,35%**	**Efisien**

Analisa Capaian RPJMD

Indikator	Target Tahun 2022	Capaian Kinerja Tahun 2022	Target Akhir RPJMD	Persentase Capaian RPJMD
Opini BPK	**WTP**	**WTP***	**WTP**	**100%**

*Data tahun 2022 belum rilis, menggunakan data Tahun 2021

4) Faktor Penunjang

Secara umum, intensifnya koordinasi dengan OPD dalam melaksanakan rencana dan kegiatan yang sesuai dengan rencana menjadi faktor kunci dalam tercapainya predikat WTP (Wajar Tanpa Pengecualian) oleh BPK.

5) Kesimpulan

Secara umum pelaksanaan capaian Wajar Tanpa Pengeculaian oleh BPK telah dicapai. Hal tersebut dapat tercapai karena intensifnya koordinasi, ketepatan waktu, ketepatan penyerapan anggaran, serta pelaksanaan kegiatan yang sesuai dengan perencanaan.

6) Rencana Tindak Lanjut

Melihat berhasilnya pencapaian WTP dari Pemerintah Kabupaten Kediri, diupayakan agar senantiasa meningkatkan koodinasi, ketepatan waktu, ketepatan penyerapan anggaran, serta senantiasa menyesuaikan pelaksanaan kegiatan yang sesuai dengan perencanaan. Hal tersebut juga sesuai dengan amanah Bupati Kediri yang menjelaskan bahwa untuk senantiasa melaksanakan kegiatan sesuai dengan perencanaan dan tidak segan-segan untuk menolak apabila tidak sesuai dengan spesifikasi dan ketentuan yang berlaku.

Petugas Anti Korupsi bersama dengan Inu dan Kirana Kabupaten Kediri menjelaskan bahaya korupsi kepada siswi-siswi SMA pada Peringatan Hari Anti Korupsi Sedunia 2022

d. Urusan Persepsi Anti Korupsi (IPAK)

KPK merilis sembilan nilai integritas yang bisa mencegah terjadinya tindak korupsi. Kesembilan nilai itu adalah jujur, peduli, mandiri, disiplin, tanggung jawab, kerja keras, sederhana, berani, dan adil. Represif. Menurut KPK, pelaksanaan prinsip anti korupsi yang ideal adalah sebagai berikut; penanganan laporan pengaduan masyarakat, perbaikan sistem, edukasi dan kampanye, strategi preventif, strategi detektif.

Menurut BPS, berbagai macam unsur yang mampu menggambarkan perilaku korupsi sehari-hari atau (petty corruption) masyarakat Indonesia.Untuk mengukur perilaku anti korupsi di masyarakat, disusun sebuah indikator yaitu Indeks Perilaku Anti Korupsi (IPAK). IPAK disusun berdasarkan dua dimensi, yaitu Dimensi Persepsi dan Dimensi Pengalaman. Dimensi Persepsi berupa penilaian atau pendapat terhadap kebiasaan perilaku anti korupsi

di masyarakat. Sementara itu, Dimensi Pengalaman berupa pengalaman anti korupsi yang terjadi di masyarakat.

Data yang dikumpulkan melalui IPAK mencakup pendapat terhadap kebiasaan di masyarakat dan pengalaman berhubungan dengan pelayanan publik dalam hal perilaku penyuapan (bribery), pemerasan (extortion) dan nepotisme. Penyuapan (bribery), yakni apabila seorang pegawai pemerintah menerima imbalan yang disodorkan oleh seorang dengan maksud mempengaruhinya agar memberikan perhatian istimewa pada kepentingan si pemberi. Pemerasan (extortion) yakni permintaan pemberian-pemberian atau hadiah dalam pelaksanaan tugas-tugas publik, termasuk pejabat-pejabat yang menggunakan dana publik yang mereka urus bagi keuntungan mereka sendiri atau mereka yang bersalah melakukan penggelapan di atas harga yang harus dibayar oleh publik. Nepotisme yaitu pengangkatan sanak saudara, teman-teman atau rekan-rekan politik pada jabatan-jabatan publik tanpa memandang jasa mereka atau konsekuensinya pada kesejahteraan publik.

Dalam era globalisasi, ekspektasi masyarakat akan pemerintahan yang efektif dan efisien telah mendorong gerakan anti korupsi yang tinggi. Antusiasme akan gerakan anti korupsi tersebut harus ditunjang dengan kebijakan dan regulasi yang mengatur dan meminamalisir peluang-peluang korupsi di dalam pemerintahan. Hingga setiap pegawai dapat memahami dengan mendalam prinsip-prinsip anti korupsi yaitu akuntabilitas, transparansi, kewajaran, kebijakan, dan kontrol kebijakan dalam suatu organisasi/institusi.

Selain dengan hal tersebut, pembangunan yang baik adalah pembangunan yang tidak terdapat korupsi didalamnya. Tata Kelola Pemerintahan yang baik juga mensyaratkan kegiatan anti korupsi didalamnya. Hal tersebut pula sesuai dengan arahan Bupati Kediri, Pemerintah Kabupaten Kediri harus menerapkan prinsip anti korupsi dalam setiap pelaksanaan program kegiatannya.

1) Permasalahan dan Tantangan

Upaya Pemerintah Kabupaten Kediri dalam meningkatkan persepsi anti korupsi masih menemui beberapa hambatan dan kendala. Hambatan dan kendala tersebut dapat diidentifikasikan sebagai berikut:

1. Penentuan target dan kinerja sasaran pengawasan belum sepenuhnya berbasis resiko
   Penentuan target dan sasaran pengawasan masih berdasarkan jumlah obyek pemeriksanaan (obrik) dan amanat dari peraturan perundang-undangan saja, belum

berdasarkan skala prioritas dari hasil analisis terhadap nilai setrategis dan beban kinerja masing-masing obrik atau pnegawasan belum berbasis resiko. Hal tersebut menyebabkan kinerja pengawasan belum efektif dan efisien artinya belum menyentuh kepada permasalahan-permasalahan yang strategis kepada perangkat daerah.

2. Belum optimalnya penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) pada perangkat daerah

   Masih terdapatnya temuan berulang hasil pemeriksaan APIP maupun BPK merupakan pertanda bahwa SPIP belum terselenggara secara efektif. Tentu, hal tersebut memerlukan tindak lanjut SPIP yang efektif sesuai dengan Peraturan Pemerintah nomor 60 tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP).
3. Pelaksanaan Reformasi Birokrasi yang belum Optimal

   Reformasi Birokrasi dalam upaya pencapaian *good governance* dalam melakukan pembaharuan dan perubahan mendasar penyelenggaraan pemerintahan akan memberikan satu asumsi baru tentang pemerintahan yang efektif dan efisien. Dari efektivitas dan efisiensi kinerja pemerintah tersebut, diharapkan dapat meminimalisir korupsi dan kegiatan-kegiatan lainnya.

2) Pelaksanaan Program dan Kegiatan

Dengan kompleksnya permasalahan diatas, Pemerintah Kabupaten Kediri melalui Inspektorat telah menetapkan beberapa rencana dalam upaya meningkatkan Indeks Persepsi Anti Korupsi (IPAK) sebagai berikut:

1. Penyelenggaraan Pengawasan dengan kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan Internal dan Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu dalam hal ini Penyelesaian Kerugian Negara.
2. Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi dengan kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis di bidang pengawasan dan Fasilitasi pengawasan serta Pendampingan dan Asistensi.

Dalam pelaksanaannya Pemerintah Kabupaten Kediri melalui Inspektorat dan OPD terkait telah berupaya untuk meningkatkan IPAK. Inspektorat dengan program penyelenggaraan pengawasan dan program perumusan kebijakan, pendampingan dan asistensi telah bekerja melakukan pengawasan dan pendampingan persepsi anti korupsi di Kabupaten Kediri.

Dalam hal ini, indikator yang diambil adalah indikator Indeks Persepsi Anti Korupsi (IPAK). Indikator ini diambil sebagai upaya preventif dan proaktif terhadap kondisi real di Kabupaten Kediri mengenai pandangan masyarakat mengenai korupsi. Dari IPAK tersebut dapat dipetakan potensi-potensi serta dimensi rawan yang dapat ditindaklanjuti nantinya.

Capaian nilai Indeks Persepsi Anti Korupsi (IPAK) tahun 2022 Kabupaten Kediri meningkat 0,16 dari tahun sebelumnya menjadi 3,49. Capaian ini masih berada di bawah target yang telah ditetapkan yakni 3,70. Dengan hal tersebut, pendekatan-pendekatan baru terkait Indeks Persepsi Anti Korupsi (IPAK) Kabupaten Kediri perlu untuk diekplorasi lebih lanjut.

3) Analisa Capaian RPJMD dan Efisiensi

Analisa Kinerja

Indikator	Capaian 2020	Capaian 2021	Target 2022	Capaian 2022	Persentase Capaian	Anggaran	Realisasi Anggaran	Persentase Realisasi
IPAK	**3,68**	**3,33**	**3,70**	**3,49**	**94,32%**	**5.273.228. 555,00**	**4.401.187. 945,00**	**83,46%**

Analisa Capaian RPJMD

Indikator	Target Tahun 2022	Capaian Tahun 2022	Hasil Akhir RPJMD	Persentase Capaian dan RPJMD	Keterangan
IPAK	**3,70**	**3,49**	**3,80**	**3,49/3,80x100=91%**	**Dibawah Jalur Perencanaan**

Analisa Efisiensi

Indikator	Persentase Capaian Kinerja	Persentase Realisasi Anggaran	Formula Perhitungan	Hasil Analisa Efisiensi	Keterangan
IPAK	**94,32%**	**83,46%**	**94,32%-83,46%**	**10,86**	**Efisien**

4) Analisa Faktor Penunjang

Hal yang menjadi penunjang pelaksanaan IPAK ini secara umum adalah mulai tumbuhnya kesadaran masyarakat terhadap persespi anti korupsi. Dengan meningkatnya tanggung-jawab, pengetahuan akan konsekuensi hukum, serta pendekatan kearifan lokal dan keagamaan menyebabkan adanya tren peningkatan persepsi anti korupsi meskipun tidak signifikan.

5) Analisa Faktor Penghambat

Tidak dapat dipungkiri bahwa peran anti korupsi memerlukan banyak elemen. Terutama elemen-elemen lain yang berada di luar Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kediri. Pada tahun 2022 ini, koordinasi dan sosialiasi terhadap *stakeholder* masihlah rendah. Hal tersebut secara tidak langsung menyebabkan kurangnya pemahaman masyarakat tentang persepsi anti korupsi.

6) **Benchmarking**

Perbandingan Capaian IPAK Tahun 2022

No	Keterangan	Capaian IPAK
1	Kabupaten Kediri	3,49
2	Provinsi Jawa Timur	-
3	Nasional	3,93

Data BPS Kabupaten Kediri

Data Indeks Persepsi Anti Korupsi (IPAK) sendiri diambil oleh BPS menggunakan *survey* berdasarkan sektor-sektor yang telah ditetapkan. Responden penilaian IPAK juga diambil berdasarkan pendekatan-pendekatan yangmenyeluruh baik menurut gender, jenjang pendidikan, pekerjaan, usia, serta pendapatan.

IPAK diambil secara konsisten menggunakan dua dimensi, dimensi persepsi, dimensi pengalaman. Dalam dimensi persepsi, diukur dengan sub dimensi persespi keluarga, persepsi komunitas, dan persepsi publik. Dalam dimensi pengalaman, diukur dengan sub dimensi pengalaman publik dan sub dimensi pengalaman lainnya.

Capaian IPAK Kabupaten Kediri masih berada dibawah capaian IPAK nasional dengan rentang 0,54. Jarak yang cukup signifikan tersebut tentu harus menjadi perhatian bagi Pemerintah Kabupaten Kediri. Perlunya identifikasi pada faktor-faktor apasaja yang menjadi *critical factor* dalam IPAK perlu untuk menjadi perhatian.

7) Kesimpulan

Upaya peningkatan IPAK di Kabupaten Kediri secara umum masih fluktuatif namun memiliki tren yang meningkat setiap waktunya. Hal tersebut menunjukkan bahwa persepsi masyarakat Kabupaten Kediri pada tahun-tahun sebelumnya dengan tahun 2023 ini berkembang namun tidak signifikan.

8) Rencana Tindak Lanjut

Kinerja Pemerintah Kabupaten Kediri melalui Inspektorat perlu untuk ditingkatkan terutama dalam upaya *engagement* dengan pemangku kepentingan di bidang IPAK baik dari dalam instansi pemerintah ataupun dari luar. Namun demikian, penekanan persepsi anti korupsi dengan sosialisasi terhadap rasio responden IPAK seperti ibu rumah tangga, anak-anak sekolah, serta para pemangku kebijakan akan menjadi perhatian utama pada tahun-tahun mendatang.

e. Meningkatkan Profesionalitas ASN

Seorang ASN (Aparatur Sipil Negara) merupakan seorang pegawai yang berfungsi sebagai pelaksana kebijakan publik, pelayanan publik, serta perekat dan pemersatu bangsa. Dalam hal ini pegawai ASN juga bertugas dalam melaksanakan kebijakan publik yang dibuat oleh pemangku jabatan pembina kepegawaian yang berwenang sesuai dengan ketentuan dari perundang-undangan yang ada.

Maka diperlukan adanya pengukuran tingkat profesionalitas pada ASN itu sendiri. Pengukuran tersebut dilakukan melalui/diatur dalam Peraturan BKN Nomor 8 Tahun 2019-Tata Cara Pengukuran Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara. Peraturan ini sejatinya ditetapkan dalam tujuan melaksanakan ketentuan Pasal 17 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 38 Tahun 2018 tentang Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara.

Profesionalitas ASN juga memiliki standar dasar dengan kriteria yang digunakan dalam mengukur Indeks Profesionalitas ASN mencakup dimensi kualifikasi, kompetensi, kinerja, dan disiplin. Kualifikasi diukur dari indikator riwayat pendidikan formal, kompetensi diukur dari riwayat pengembangan kompetensi, kinerja diukur prestasi kerja PNS (Sasaran Kerja Pegawai dan perilaku kerja) dan disiplin diukur dari riwayat penjatuhan hukuman disiplin yang pernah dialami.

Dalam upaya untuk meningkatkan kualitas organisasi, manajemen Sumber Daya Manusia menjadi hal yang penting untuk dilakukan. Sebagai faktor utama dalam pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) professionalitas dan integritas menadi perhatian utama bagi Pemerintah Kabupaten Kediri.

1) Permasalahan dan Tantangan

Namun begitu, permasalahan mengenai peningkatan professionalitas ASN di Pemerintah Kabupaten Kediri masih cukup kompleks. Adapun hasil identifikasi permasalahan adalah sebagai berikut:

1. Pelaksanaan pengembangan kompetensi yang dilaksanakan oleh perangkat daerah pelaksana urusan kepegawaian serta pendidikan dan pelatihan belum dapat menjangkau seluruh pegawai karena keterbatasan sumberdaya dan besarnya jumlah pegawai.
2. Belum memiliki database terkait informasi kediklatan yang terintegrasi sehingga belum dapat mengetahui secara akurat terkait kompetensi ASN.
3. Kurangnya pemahaman ASN terkait pentingnya peningkatan kompetensi ASN, sehingga saat kegiatan diklat, tidak mengikuti dengan baik, bahkan menolak saat diperintahkan untuk mengikuti diklat.
4. Kurangnya pemahaman pejabat struktural di beberapa SKPD terhadap pentingnya peningkatan kompetensi ASN, sehingga penerapan peningkatan kompetensi di masing-masing SKPD tidak merata.

2) Pelaksanaan Program dan Kegiatan

Dengan kompleksnya permasalahan yang menyangkut professionalisme ASN di Pemerintah Kabupaten Kediri. Namun begitu, Pemerintah Kabupaten Kediri telah menetapkan rencana Indeks Professionalitas ASN pada tahun 2022 ini sebesar 60,00. Pemerintah Kabupaten Kediri melalui Badan Kepegawaian Daerah telah menetapkan rencana program dan sasaran dalam rangka meraih IP ASN sebesar 60,00 adalah sebagai berikut:

1. Peningkatan Kapasistas Sumber Daya Aparatur Daerah dengan perubahan pola kegiatan pengembangan kompetensi, serta peningkatan kinerja melalui panjalu jayati *corporate university* (Panji CorpU).

2. Pembinaan dan Pengembangan Aparatur dengan menginventarisir peningkatan kompetensi yang telah diikuti oleh ASN.
3. Kepegawaian Daerah dengan melakukan pembinaan dan sosialisasi tentang peraturan kepegawaian terbaru.
4. Pengembangan Sumber Daya Manusia dengan melaksanakan peningkatan pemahaman ASN terkait pentingnya pemahaman akan pentingnya peningkatan profesionalisme dan integritas.

Dalam operasionalnya, upaya untuk mencapai Indeks Professionalitas ASN (IP ASN) di Pemerintah Kabupaten Kediri berhasil didapati capaian IP ASN sebesar 55,22 (angka sementara hitungan mandiri BKD Kabupaten Kediri). Hasil tersebut berada dibawah target yang telah ditetapkan yakni IP ASN sebesar 60.

3) Analisa Kinerja, Efisiensi dan Capaian RPJMD

Analisa Kinerja

Indikator	Capaian 2020	Capaian 2021	Target 2022	Capaian 2022	Persentase Capaian	Anggaran	Realisasi Anggaran	Persentase Realisasi
IP ASN	**52,11**	**54,41**	**60**	**55,22****	**92%**	**10.796.127.780,00**	**9.972.779.406,00**	**92,37%**

Analisa Efisiensi

Indikator	Persentase Capaian Kinerja	Persentase Realisasi Anggaran	Formula Perhitungan	Hasil Analisa Efisiensi	Keterangan
IP ASN	**91,5%**	**92,37%**	**92%-92,37%**	**-0,37%**	**Tidak Efisien**

Analisa Capaian RPJMD

Indikator	Target Tahun 2022	Capaian Tahun 2022	Target Akhir RPJMD	Persentase Capaian RPJMD
IP ASN	**60**	**55,22****	**71**	**77%**

**)Data sementara

4) Faktor Penunjang

Pelaksanaan ASN Day, Webinar, serta kegiatan-kegiatan kediklatan lainnya melalui Panjalu Jayati *Corporate University* telah dilaksanakan secara masif selama tahun 2022 ini. Pelaksanaan Panji CorpU tersebut diupayakan dapat meningkatkan kuantitas IP ASN di

Kabupaten Kediri. Melihat hal tersebut, *Panjalu Jayati Corporate University* dapat turut serta meningkatkan Indeks Profesionalitas ASN.

5) Faktor Penghambat

Tidak dapat dipungkiri bahwa upaya *update data* di SAPK yang menjadi basis data pengukuran Indeks Profesionalitas ASN masih mengalami berbagai macam kendala. Seperti *update* data terkait kompetensi yang masih terkendala sehingga mengakibatkan nilai indeks dimensi kompetensi sangat rendah, padahal tahun 2022 telah dilakukan pengembangan kompetensi secara masif melalui Panjalu Jayati *Corporate University*. Upaya untuk meningkatkan IP ASN masih memerlukan peningkatan disiplin pegawai, pengawasan, pencegahan, dan penegakan disiplin, serta kinerja pegawai. Dimana hal tersebut masih belum dapat berjalan dengan optimal dikarenakan luasnya wilayah kerja pegawai serta kurangnya sumber daya manusia.

6) Kesimpulan

Dengan penjelasan sebagaimana diatas, capaian Indeks Professionalisme ASN tahun 2022 mendapatkan nilai 55,22 dibawah target yang telah ditetapkan yakni 60 dengan catatan data tersebut masih sementara. Hal tersebut terjadi karena data yang resmi belum dirilis oleh Badan Kepegawaian Negara (BKN). Capaian tersebut ditunjang dengan realisasi anggaran sebesar 9.972.779.406 dari 10.796.127.780,00.

7) Rencana Tindak Lanjut

Melihat dinamika pengupayaan peningkatan professionalisme ASN, Pemerintah Kabupaten Kediri melalui Badan Kepegawaian Daerah tengah mengupayakan pencapaian target IP ASN dengan langkah-langkah yang ditetapkan. Mulai dari melakukan konsultasi dan koordinasi terkait permasalahan update data pada aplikasi SAPK, meningkatkan kuantitas kompetensi pegawai melalui pendidikan dan pelatihan, serta jalur pengembangan kompetensi lainnya, melaksanakan manajemen kinerja ASN sesuai dengan peraturan yang berlaku, meningkatkan disiplin ASN melalui pengawasan, pencegahan, dan penegakan disiplin, dan meningkatkan kualifikasi pendidikan dengan mendorong ASN untuk menempuh pendidikan lebih tinggi.

f. Transformasi Digital Penyelenggaraan Pelayanan Publik

Dalam upaya untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi organisasi, penggunaan

teknologi informasi menjadi hal yang penting. Kecepatan dan ketepatan menjadi marwah dalam pembangunan organisasi yang modern dewasa ini. Mengenai hal tersebut Pemerintah Kabupaten Kediri tengah mengupayakan digitalisasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pembangunan yang disebut transformasi digital di sektor pemerintahan.

Transformasi digital khususnya dalam hal penyelengaraan pelayanan publik pada Pemerintah Kabupaten Kediri dilaksanakan melalui sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE) yang memanfaatkan teknologi informasi dalam menyediakan layanan kepada masyarakat secara lebih cepat dan mudah. Kualitas SPBE diukur melalui indeks SPBE dimana semakin tinggi indeks mencerminkan semakin matangnya pemanfaatan TIK di suatu pemerintahan.

SPBE atau Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik adalah penyelenggaraan pemerintahan yang di mana memanfaatkan teknologi dan komunikasi untuk memaksimalkan pelayanan kepada masyakarat yang berkualitas dan terpecaya. Sesuai dengan Peraturan Presiden No. 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) atau e-government.

Semakin tingginya penggunaan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) memberikan peluang bagi pemerintah untuk melakukan inovasi pembangunan dan pelayanan yang lebih cepat, dapat diandalkan, dan terpercaya. Dengan demikian, penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan TIK dapat memberikan layanan kepada instansi pemerintah, aparatur sipil negara, pelaku bisnis, masyarakat dan pihak-pihak lainnya.

Merujuk Kementerian PANRB, SPBE memberikan peluang untuk mendorong dan mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang terbuka, partisipatif, inovatif, dan akuntabel. Selain itu, pelaksanakan SPBE juga meningkatkan kolaborasi antar instansi pemerintah, meningkatkan kualitas dan jangkauan pelayanan publik kepada masyarakat luas, dan menekan tingkat penyalahgunaan kewenangan dalam bentuk kolusi, korupsi, dan nepotisme melalui penerapan sistem pengawasan dan pengaduan masyarakat berbasis elektronik.

1) Permasalahan

Terdapat beberapa masalah dalam mewujudkan transformasi digital untuk layanan publik antara lain :

1. Masih adanya daerah/lokasi yang belum terjangkau jaringan internet atau sinyal

telekomunikasi secara optimal yang umumnya terletak di daerah pegunungan baik sisi barat maupun sisi timur

2. Digitalisasi sudah sampai ke Desa tetapi belum tertata dengan baik
3. Pemanfaatan TI yang kurang optimal di tiap OPD

2) Program Kegiatan dan Pelaksanaannya

Sesuai apa yang tertuang pada RPJMD Kabupaten Kediri, bahwa tugas Dinas Komunikasi dan Informatika adalah menjalankan Misi 2 yaitu Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik. Misi 2 tersebut diturunkan ke dalam program prioritas yaitu Peningkatan Pelayanan Publik dengan memanfaatkan TIK/SPBE.

Saat ini untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik dilakukan melalui digitalisasi layanan publik sehinga layanan dapat lebih cepat dan mudah diakses oleh masyarakat. Program digitalisasi pemerintahan merupakan tugas seluruh OPD dan Dinas Komunikasi dan Informatika sebagai leading sector yang mengampu terkait SPBE. Dinas Komunikasi dan Informatika mempunyai program dan kegiatan sebagai berikut:

1. Program Aplikasi Informatika
   a. Kegiatan Pengelolaan nama domain dan subdomain di lingkup Pemerintah Daerah
   b. Kegiatan Pengelolaan e-Government di lingkup Pemerintah Daerah atau yang dikenal dengan SPBE
2. Program Informasi dan Komunikasi Publik dengan Kegiatan Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik
3. Program Statistik Sektoral dengan Kegiatan Penyelenggaraan Statistik Sektoral dimana Dinas Komunikasi dan Informatikan bertindak sebagai Walidata yang mempunya tugas mengelola Satu Data Kabupaten Kediri
4. Program Persandian dengan Kegiatan Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah yang bertugas mengelola keamanan informasi di Pemerintah Kabupaten Kediri

Pengelolaan SPBE dilakukan melalui Program Aplikasi Informatika yang secara umum kegiatannya untuk mengelola sumber daya TIK antara lain:

1. Infrastruktur TIK

   Infrastruktur TIK terdiri atas Fasilitas dan Teknologi TIK seperti Server, Jaringan Internet, Jaringan Intranet, Konektivitas TI baik kabel atau nirkabel, perangkat jaringan dll.

2. Aplikasi TIK

   Aplikasi TIK menjalankan fungsi layanan baik layanan administrasi pemerintahan maupun layanan publik. Melalui aplikasi TIK tersebut diharapkan meningkatkan kualitas layanan publik secara cepat dan mudah dapat diakses oleh masyarakat

3. Tata Kelola TIK

   Tata Kelola TIK diperlukan untuk memastikan SPBE berjalan dengan baik dan benar sehingga diperlukan regulasi atau kebijakan dan koordinasi antar OPD dalam menjalankan SPBE mulai perencanaan sampai dengan evaluasi sehingga perbaikan SPBE dapat berkelanjutan.

4. SDM TIK

   SDM TIK merupakan penyelenggara SPBE sehingga diperlukan kualitas dan kuantitas yang memadai dalam melaksanakan layanan publik berbasis digital.

5. Ekosistem TIK pada Kota/Kabupaten Cerdas

   Kota Cerdas merupakan tempat dimana kebutuhan masyarakatnya dapat terlayani dengan mudah dan cepat. Hal ini sejalan dengan tujuan transformasi digital dalam penyelenggaraan pelayanan publik. Dengan kata lain layanan publik berbasis digital merupakan bagian dari ecosystem Kota Cerdas.

3) Analisa Kinerja dan Capaian RPJMD

Analisa Kinerja

NO	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2022	APAIAN KINERJA 2022	NGKAT CAPAIAN KINERJA	KET
	gkat realisasi anggaran	Rp 26.355.597.110	Rp 22.427.677.662	86,41%	Baik
	eks SPBE	4,04	2,61	64,60%	Baik

Analisa Capaian RPJMD

NO	INDIKATOR KINERJA	ARGET AKHIR RPJMD	PAIAN KINERJA 2022	INGKAT CAPAIAN RPJMD	KET
	eks SPBE	5	2,61	52%	

4) Benchmarking

NO	INDIKATOR KINERJA	KAB. KEDIRI	TA-RATA KAB/KOTA JAWA TIMUR	TA-RATA NASIONAL	KET
	ks SPBE 2022	2,61	2,56	2,34	Baik

(Sumber KepmenPANRB Nomor 108 Tahun 2022)

Indeks SPBE merupakan representasi hasil dari Pemantauan dan Evaluasi SPBE oleh Kementerian PANRB yang menilai tingkat kematangan penerapan SPBE pada IPPD.

Indeksi SPBE dengan nilai paling tinggi adalah nilai 5 dimana semakin matang penerapan SPBE akan mendapatkan nilai indeks SPBE yang tinggi.

NO	URAIAN	HUN 2018	HUN 2019	HUN 2020	HUN 2021	HUN 2022	KET
	ks SPBE Kabupaten Kediri	1,56	2.4	3,56	3,12	2.61	
	ah Indikator Penilaian	35	35	35	47	47	penambahan indikator baru mulai tahun 2022

Indeks SPBE Kabupaten Kediri pada tahun 2022 mengalami penurunan dari tahun lalu sebesar 0,51 point yaitu 3,12 menjadi 2,61 karena adanya tambahan beberapa indicator baru pada penilaian Monitoring dan Evaluasi SPBE. Hal ini mempengaruhi cukup signifikan pada pemerolehan nilai akhir indeks SPBE.

Pada Tahun 2022 Pemerintah Kabupaten Kediri mendapatkan nilai indeks SPBE 2,61 atau kategori nilai BAIK dengan posisi di atas rata-rata indeks SPBE Pemerintah Kabupaten/Kota di Jawa Timur dan Nasional. Hal ini menunjukkan bahwa Pemerintah Kabupaten Kediri berhasil menerapkan SPBE dengan baik. Meskipun demikian harus ditingkatkan lebih intensif mengingat capaian target akhir RPJMD saat ini masih mencapai 52%.

Pencapaian indeks SPBE sebenarnya tidak berkorelasi secara langsung dengan kualitas penyelenggaraan pelayanan publik karena indikator yang digunakan tidak sama. Meskipun demikian dengan tingkat kematangan penerapan SPBE yang tinggi diharapkan dapat meningkatkan kualitas pelayanan publik dengan lebih baik.

5) Faktor Penunjang

Berikut ini merupakan factor penunjang transformasi digital pada penyelenggaraan pelayanan publik antara lain:

1. Tersedianya infrastruktur khususnya kapasitas Bandwidth Internet yang cukup besar untuk memenuhi kebutuhan jaringan internet
2. Tersedianya SDM TIK yang mempunyai kompetensi yang bersertifikasi
3. Adanya keinginan yang tinggi dari Desa untuk menyelenggarakan layanan publik secara terintegrasi

6) Faktor Penghambat

Kendala yang harus dihadapi dan dicarikan solusi dalam transformasi digital penyelenggaraan pelayanan publik adalah sebagai berikut:

1. Kondisi topografi alam wilayah Kabupaten Kediri terdapat Pegunungan dan lembah sehingga akses internet belum diterima dengan baik
2. Adanya kekurangan jumlah ASN SDM TIK sebagai pengelola SPBE Kabupaten Kediri
3. Perkembangan TI yang sangat pesat sehingga perlu meningkatkan literasi digital secara intensif dan massif agar tidak ketinggalan dalam menghadapi perubahan yang terjadi.
4. Pemerintah Daerah tidak mempunyai kewenangan terkait penataan jaringan internet di masyarakat karena memang merupakan kewenangan dari Pemerintah Pusat

7) Kesimpulan

Pemerintah Kabupaten Kediri melalui Dinas Kominfo perlu meningkatkan lagi indeks SPBE Kabupaten Kediri melalui perbaikan berkelanjutan di setiap indikator penilaian SPBE dan meningkatkan kerja sama dan kolaborasi Tim Koordinasi SPBE Kabupaten Kediri.

Sedangkan tingkat prosentase realisasi anggaran Dinas Kominfo pada tahun 2022 termasuk kategori Baik yaitu sebesar 86.41%. Namun tingkat realisasi tersebut harus terus ditingkatkan sehingga diperlukan optimalisasi mulai dari perencanaan pelaksanaan dan pengendalian kegiatan untuk meningkatkan realisasi anggaran di tahun mendatang.

Transformasi digital pada penyelenggaraan pelayanan publik dapat dilakukan dengan menerapkan SPBE secara tepat sehingga berdampak dengan meningkatnya kecepatan dan kemudahan masyarakat mengakses layanan publik.

3. Misi 3

Pengembangan Ekonomi Kerakyatan dan Peningkatan Investasi Daerah

Gambar 4

Lingkup Misi 3



No	Tujuan	Indikator	Capaian		Target	Realisasi	Keterangan
			2020	2021	2022	2022	
1	Meningkatkan daya saing sektor	Pertumbuhan Ekonomi	-2,41	3,06	2,34	4,90	Melebihi Target

ekonomi daerah

No	Sasaran	Indikator	Capaian		Target	Realisasi	Anggaran	Realisasi Anggaran	Keterangan
			2020	2021	2022	2022			
1	Meningkatnya investasi di daerah	Pertumbuhan Realisasi Investasi	517.830	636.142	5%	28,48%	2.238.507.565,00	2.180.948.022,00	Melebihi Target
2	Meningkatnya daya beli masyarakat	Indeks Pengeluaran	916.000	927.250	1.062.451	963.750	23.436.832.568	22.395.012.691	Dibawah Target

a. Meningkatnya Investasi Daerah

Sebagian ahli ekonomi memandang investasi merupakan salah satu faktor penting yang memainkan peran vital terhadap pertumbuhan dan pembangunan ekonomi. Ketika pengusaha atau individu atau pemerintah melakukan investasi, maka akan ada sejumlah modal yang ditanam, ada sejumlah pembelian barang modal (yang tidak dikonsumsi), tetapi digunakan untuk produksi, sehingga dapat memacu produktivitas untuk menghasilkan barang dan jasa.

Menurut kajian dari Kementerian Sekretariat Negara, peningkatan investasi diyakini memberikan andil dalam mendongkrak pembangunan ekonomi suatu daerah. Dalam ekonomi makro, investasi juga berperan sebagai salah satu komponen dari pendapatan nasional, Produk Domestik Bruto (PDB) atau Gross Domestic Product (GDP). Investasi memiliki hubungan positif dengan PDB atau pendapatan nasional, jika investasi naik, maka PDB akan naik, begitu juga sebaliknya, saat investasi turun maka PDB akan ikut turun.

Dukungan investor dalam pembangunan ekonomi, ditengah keterbatasan APBD dan APBN menjadi pilihan strategis yang tepat dalam membalikkan pelambatan ekonomi. Melalui optimalisasi dukungan investasi dalam mempercepat berbagai program pembangunan ekonomi produktif. Dengan demikian, investasi dapat meningkatkan kesejahteraan rakyat dan mengantarkan Indonesia menjadi Negara Maju

Dalam rangka meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan memaksimalkan potensi ekonomi, Pemerintah Kabupaten Kediri mengupayakan realisasi investasi yang baik. Nilai

realisasi investasi di Kabupaten Kediri pada tahun 2022 direncanakan akan tumbuh sebesar 5%. Hal tersebut ditinjau dari ekspektasi pertumbuhan di sektor primer, sektor sekunder, dan sektor tersier. Peningkatan investasi di Kabupaten Kediri diharapkan dapat meningkatkan kualitas dan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Kediri.

1) Permasalahan dan Tantangan

Dalam perkembangannya, investasi di Pemerintah Kabupaten Kediri bergerak dengan isu-isu utama dalam penanaman modal. Hal tersebut telah diidentifikasi sebagai berikut:

1. Keterbatasan informasi terkait lahan dan luasan untuk investasi sektor tertentu terutama sektor industri
2. Pemanfaatan sistem informasi penanaman modal belum maksimal oleh stakeholder terkait
3. Perlunya meningkatkan promosi potensi investasi untuk mrndukung realisasi investasi
4. Optimalisasi pembinaan, pengawasan, pengendalian penanaman modal
5. Serta perlunya percepatan integrasi antara Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) dalam sistem perizinan dan penanaman modal.

2) Pelaksanaan Program dan Kegiatan

Dalam upayanya meningkatkan kinerja di bidang investasi, Pemerintah Kabupaten Kediri melalui Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) menetapkan strategi-strategi pencapaian tujuan. Strategi yang digunakan yakni pemberian fasilitas/intensif di bidang penanaman modal, pembuatan peta potensi investasi, penyelenggaraan dan promosi penanaman modal, peningkatan kualitas layanan perizinan, pengendalian dan *enganging* perusahaan, serta hal-hal lain yang menunjang peningkatan investasi daerah.

Dalam perjalanan operasionalnya di tahun 2022 ini, pertumbuhan realisasi investasi terdorong oleh Proyek Strategis Nasional (PSN) di sektor tersier Transportasi, Gudang, dan Telekomunikasi. Selama tahun 2022 ini, capaian pertumbuhan realisasi investasi meningkat sebesar 35,07% (701,40% dari target). Proyek Strategis Nasional (PSN) tersebut telah memberikan sumbangsih besar dalam realisasi investasi di Kabupaten Kediri.

Upaya-upaya untuk mendukung berjalannya pembangunan bandara di Kecamatan Tarokan tersebut telah diupayakan dengan berbagai arah kebijakan yang mendukung peningkatan realisasi investasi. Perubahan besar-besaran dalam bidang birokrasi dilakukan

oleh DPMPTSP untuk meningkatkan kualitas dan pelayanan prima. Terbukti dengan adanya proyek pembangunan bandara dan dengan nilai realisasi investasi Kabupaten Kediri yang mencapai Rp. 3,1 Triliun, DPMPTSP mendapatkan predikat Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dari Kementerian PAN & RB.

Secara umum, pembangunan Bandara di Kecamatan Tarokan Kediri memberikan sumbangsih besar terhadap pencapaian nilai realisasi investasi. Dengan hal itu juga, upaya-upaya untuk menunjang pembangunan di bidang birokrasi dan percepatan perizinan terus ditingkatkan. Selain itu, realisasi investasi di bidang-bidang lainnya seperti perdagangan juga memberikan sumbangsih cukup besar.

Dengan berbagai macam prestasi yang didapatkan seperti WBK (Wilayah Bebas Korupsi) dan Natamukti Awards, Pemerintah Kabupaten Kediri berupaya untuk meningkatkan kinerja penanaman modal dan perizinan.

Kedepannya, pertumbuhan penanaman modal di Kabupaten Kediri akan mengedepankan pada isu-isu sektor primer (pertanian, produksi aneka industri, dsb.), sektor sekunder (perdagangan dan jasa). Hal tersebut sebagai langkah antisipasi berkahirnya pembangunan Bandara di Kecamatan Tarokan yang dijadwalkan akan berakhir pada tahun 2024. Bersamaan dengan itu, pembangunan jalan tol Kediri-Nganjuk dibangun. Analisa-analisa investasi di bidang infrastruktur transportasi dianalisa akan menjadi bagian dari pertumbuhan realisasi investasi di Kabupaten Kediri dengan tetap mengedepankan sektor-sektor primer, sekunder, dan tersier.

3) Analisa Kinerja, Capaian RPJMD dan Efisiensi

Analisa Kinerja

Indikator	Capaian 2020	Capaian 2021	Target 2022	Capaian 2022	Persentase Capaian	Anggaran	Realisasi Anggaran	Persentase Realisasi
Realisasi Investasi (juta rupiah)	**661.329,00***	**2.476.069,00***	**5%**	**28,48%**	**209,40%**	**2.238.507.565**	**2.180.948.022**	**95,5%**

Analisa Efisiensi

Indikator	Persentase Capaian Kinerja	Persentase Realisasi Anggaran	Formula Perhitungan	Hasil Analisa Efisiensi	Keterangan
Realisasi Investasi(juta	**209,40%**	**95,5%**	**701,4%-95,5%**	**605,9**	**Efisien**

rupiah)				
		Analisa Capaian RPJMD		
Indikator	Target Tahun 2022	Capaian Tahun 2022	Target Akhir RPJMD	Persentase Capaian RPJMD
Realisasi Investasi(juta rupiah)	**5**	**35,07**	**9**	316,44%

*) Hasil Data RPJMD tahun 2016-2021

4) Kesimpulan

Dengan capaian yang tinggi sebesar 35,07%, Pemerintah Kabupaten Kediri melalui Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) telah bekerja dengan baik. Apalagi ditambah dengan capaian Zona Integritas (ZI) Wilayah Bebas Korupsi (WBK) pada tahun 2022. Melihat hal tersebut, perizinan dan layanan investasi akan senantiasa ditingkatkan.

5) Rencana Tindak Lanjut

Dengan didapatkannya Predikat ZI WBK (Wilayah Bebas Korupsi) dari Kementerian PANRB, Pemerintah Kabupaten Kediri melalui DPMTSP akan berusaha senantiasa menjaga predikat tersebut. Upaya menjaga predikat tersebut dalam rangka untuk mendapatkan Predikat ZI WBBM (Wilayah Birokrasi Bersih Melayani) yang memersyaratkan predikat ZI WBK (Wilayah Bebas Korupsi) selama lima tahun berturut-turut

b. Meningkatnya Daya Beli Masyarakat

Merujuk penjeleasan dari Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian daya beli masyarakat adalah seberapa tinggi tingkat kemampuan konsumen atau masyarakat luas dalam membeli serta mendapatkan barang yang mereka butuhkan. Hal tersebut dipengaruhi oleh pendapatan per kapita, struktur industri hulu ke hilir mulai dari rantai pasok, SDM, penelitian dan pengembangan, hingga akses pasar baik pasar tradisional ataupun pasar non tradisional.

Berdasarkan kemampuan tersebut, permintaan dibagi menjadi beberapa macam, yaitu:

1. Permintaan efektif: konsumen mampu dan mau membeli suatu produk.
2. Permintaan absolut: konsumen memiliki minat terhadap produk, tapi tidak mampu membelinya.

3. Permintaan potensial: Konsumen bisa saja membeli suatu produk, tapi mereka belum melakukannya.

Tidak dapat dipungkiri bahwa pelemahan daya beli masyarakat pada masa pandemic covid-19 secara umum menyebabkan penurunan ekonomi. Hal tersebut terjadi akibat turunnya kemampuan masyarakat dalam melakukan konsumsi. Penyebab dari menurunnya kemampuan daya beli adalah tingginya angka PHK dan menurunnya pertumbuhan ekonomi di Indonesia.

Kendati demikian, terdapat beberapa hal yang memengaruhi fluktuasi daya beli masyarakat sebagai berikut;

1. Perubahan Harga
2. Inflasi
3. Pendapatan Riil Masyarakat
4. Nilai Tukar Mata Uang
5. Pajak
6. Lapangan Pekerjaan
7. Ketersediaan Kredit
8. Suku Bunga

Daya beli masyarakat secara umum dapat ditinjau sebagai faktor kunci dalam perkembangan ekonomi di suatu wilayah. Secara langsung daya beli masyarakat memiliki korelasi dengan kesejahteraan masyarakat. Semakin tinggi daya beli masyarakat dapat diasumsikan pula semakin sejahtera masyarakat dengan tetap memerhatikan tingkat inflasi dan satuan komoditas. Semakin tinggi indeks pengeluaran masyarakat, semakin masyarakat dapat mengonsumsi apa yang mereka butuhkan.

Upaya Pemerintah Kabupaten Kediri dalam mengembangkan sektor perdagangan, koperasi dan usaha mikro adalah dengan acuan peningkatan daya beli masyarakat. Dalam hal ini, Pemerintah Kabupaten Kediri melalui Dinas Perdagangan dan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro telah menetapkan arah kebijakan terkait dengan meningkatnya sektor perdagangan, meningkatnya kualitas usaha mikro, meningkatnya pertumbuhan usaha mikro baru dan meningkatnya pertumbuhan Industri Kecil Mikro (IKM) dengan pendekatan strategis yakni kestabilan harga dan jumlah komoditas bahan pokok dan barang penting dalam pasar ekonomi serta peningkatan pendapatan bagi pelaku usaha mikro ataupun

industri kecil menengah di Kabupaten Kediri.

1) Permasalahan dan Tantangan

Permasalahan yang ada dalam upaya meningkatkan daya beli masyarakat berada di sektor-sektor eksternal yakni meningkatnya harga bahan baku, munculnya harga impor dengan harga murah, banyak bermunculan pasar modern yang secara langsung akan berdampak pada upaya kita untuk meningkatkan perdagangan, terutama perdagangan ekonomi kerakyatan.

Selain hal tersebut, permasalahan dan tantangan dapat diidentifikasikan sebagai berikut:

1. Sumber Daya Manusia di bidang perdagangan, bidang perindustrian, UPTD Metrologi, UPTD Pasar masih kurang dan perlunya bidang yang menangani khusus pasar.
2. Pengadaan sarana dan prasarana bidang kemetrologian dan revitalisasi pasar.
3. Peningkatan mutu barang IKM/usaha mikro agar dapat bersaing dengan produk dari luar daerah.
4. Potensi-potensi daerah yang belum tergali, diolah dan dimanfaatkan secara kreatif.
5. Terbangunnya kantor UPTD kemetrologian dan pasar di daerah yang harus di lengkapi dengan SDM/sapras lainnya.
6. Menurunnya aktifitas usaha koperasi dan usaha mikro akibat pandemic covid-19 dan adanya inflasi pada tahun 2022 sehingga berdampak pada omset usaha mikro dan koperasi;
7. Kurangnya pemahaman legalitas usaha sebagai upaya untuk memberikan identitas dan perlindungan terhadap produk usaha mikro;
8. Perlunya peningkatan kualitas/standar produk usaha mikro agar berdaya saing dan berdaya jual;
9. Kurangnya diversifikasi terhadap usaha koperasi;
10. Kurangnya SDM koperasi yang terlatih dalam penggunaan teknologi dalam peningkatan kualitas dan kinerja koperasi;
11. Perlunya peningkatan kualitas dan daya saing produk usaha mikro yang adaptif terhadap perkembangan dan tren pasar, baik untuk pangsa dalam maupun luar daerah utamanya untuk menyiapkan dengan adanya bandara di kabupaten Kediri;
12. Mendesaknya penyelesaian terhadap koperasi-koperasi bermasalah dan penguatan SDM perkoperasian;

13. Perlunya penguatan usaha mikro dan implementasi teknologi informasi dalam pengembangan usaha mikro.

Namun demikian, masih terdapat peluang-peluang yang dapat ditindaklanjuti bersama. Peluang tersebut terdiri dari permintaan produk Industri Kecil Menengah (IKM), usaha mikro dan anggota koperasi yang tinggi, tren konsumsi masyarakat yang semakin meningkat, pangsa pasar ekspor yang masih terbuka luas, serta peraturan-peraturan yang semakin memudahkan pengembangan pasar tradisional agar mampu bersaing dengan pasar modern, pemanfataan teknologi digital marketing bagi pelaku usaha mikro untuk memperluas pasar, fasilitasi legalitas usaha bagi usaha mikro yang semakin mudah .

Selain tantangan diatas, tantangan-tantangan lain secara umum dapat diidentifikasikan sebagai berikut:

1. Meningkatnya harga bahan baku yang meningkatkan biaya produksi.
2. Kompetitor produk IKM/usaha mikro semakin banyak
3. Banyaknya pasar modern dan waralaba yang bermunculan.
4. Perubahan pola hidup masyarakat yang lebih memilih belanja di pasar modern yang lebih mudah, bersih, dan nyaman.
5. Apabila pengendalian, pelayanan tera dan tera ulang tidak terlaksana,dengan baik akan menyebabkan tidak terjamin/terlindungi kepentingan umum di sektor industri dan perdagangan terkait kebenaran pengukuran UTTP.

Pengembangan upaya peningkatan daya beli masyarakat di sektor lain yakni sektor Koperasi dan Usaha Mikro melalui Dinas Koperasi dan Usaha Mikro telah menetapkan strategi upaya pembinaan dan pengawasan koperasi dan pertumbuhan usaha kecil mikro.

2) Pelaksanaan Program dan Kegiatan

Dalam upaya untuk meningkatkan daya beli masyarakat dan upaya menyongsong peningkatan kesejahteraan masyarakat, Pemerintah Kabupaten Kediri melalui Dinas Perdagangan dan Dinas Koperasi Usaha Mikro telah menetapkan beberapa program dan kegiatan. Adapun program-program peningkatan daya beli masyarakat dapat diidentifikasikan sebagai berikut:

Pelaksanaan program dan kegiatan untuk meningkatkan daya beli masyarakat melalui Dinas Perdagangan adalah sebagai berikut:

1. Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan
2. Stabilitasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting
3. Pengembangan Ekspor
4. Standarisasi dan Perlindungan Konsumen
5. Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri
6. perencanaan dan pembangunan industri
7. Pengelolaan sistem informasi industri nasional.

Pelaksanaan program dan kegiatan untuk meningkatkan daya beli masyarakat melalui Dinas Koperasi dan Usaha Mikro adalah sebagai berikut:

1. Program Pengawasan Dan Pemeriksaan Koperasi
2. Program Penilaian Kesehatan Ksp/Usp Koperasi
3. Program Pendidikan Dan Latihan Perkoperasian
4. Program Pemberdayaan Dan Perlindungan Koperasi
5. Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (Umkm)
6. Program Pengembangan UMKM

Dengan upaya tersebut, telah ditetapkan indikator Indeks Pengeluaran dengan target 1.062.451,00 pada tahun 2022. Indikator tersebut dipilih sebagai acuan dalam upaya menggambarkan keadaan sesungguhnya di lapangan terkait kemampuan dan daya beli masyarakat di Kabupaten Kediri.

Pada tahun 2022 ini, capaian Indeks Pengeluaran masyarakat Kabupaten Kediri masih belum sesuai target yang telah ditetapkan. Upaya-upaya guna meningkatkan daya beli masyarakat di Kabupaten Kediri secara umum masih belum dapat terlaksana dengan baik. Capaian Indeks Pengeluaran per kapita Kabupaten Kediri tahun 2022 adalah 11.565.000,00 dengan pengeluaran bulanan sebesar 963.750,00. Capaian tersebut masih berada dibawah target meskipun mengalami peningkatan dari tahun-tahun sebelumnya.

Upaya yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Kediri adalah dengan meningkatkan pengelolaan dan pembangunan pasar daerah. Pembangunan pasar-pasar sesuai dengan standar yang ditetapkan, pemberian bansos kepada 52 pedagang dari Pasar Ngadiluwih yang terdampak kebakaran dengan total biaya sebesar 185.000.000,00. Peningkatan upaya dengan menggenjot pelaksanaan operasi pasar murah sebanyak tujuh kali. Selain itu pula, peningkatan daya beli juga diupayakan menggunakan pendekatan-pendekatan lain. Dalam bidang industri, telah dilaksanakan pelatihan dan fasilitasi industri

kepada masyarakat yang bergerak di bidang industri.

Dalam bidang koperasi dan usaha mikro melalui peningkatan akses pasar bagi usaha mikro dan anggota koperasi utamanya melalui pemanfaatan digital marketing, diversifikasi usaha koperasi, pelatihan untuk meningkatkan kemampuan manajemen usaha dan peningkatan kualitas produk usaha mikro untuk meningkatkan daya saing produk, fasilitasi kemitraan pembiayaan melalui perbankan, pengawasan koperasi, penilaian kesehatan koperasi serta fasilitasi pemasaran melalui kegiatan pameran di dalam daerah ataupun luar daerah untuk meningkatkan pangsa pasar produk usaha mikro sebagai upaya untuk meningkatkan pendapatan usaha mikro di Kabupaten Kediri.

3) Analisa Kinerja, Efisiensi dan Capaian RPJMD

Analisa Kinerja

Indikator	Capaian 2020	Capaian 2021	Target 2022	Capaian 2022	Persentase Capaian	Anggaran	Realisasi Anggaran	Persentase Realisasi
Indeks Pengeluaran	**916.666**	**927.250**	**1.062.451**	**963.850**	**90,71%**	**39.459.420.943**	**37.750.025.473**	**95.67%**

Analisa Efisiensi

Indikator	Persentase Capaian	Persentase Realisasi Anggaran	Formula Perhitungan	Hasil Analisa Efisiensi	Keterangan
Indeks Pengeluaran	**90,71%**	**95.67%**	**90,07%-95,67%**	**-5,60%**	**Tidak Efisien**

Analisa Capaian RPJMD

Indikator	Target Tahun 2022	Capaian Tahun 2022	Target Akhir RPJMD	Persentase Capaian RPJMD
Indeks Pengeluaran	**1.062.451**	**963.850**	**1.393.267**	**69,17%**

4) Analisa Faktor Penunjang

Operasi pasar murah yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Kediri tahun 2022 sebanyak 7 kali, memberikan satu kemudahan kepada masyarakat untuk mengakses barang-barang kebutuhan pokok. Pemberian bansos kepada pedagang yang terdampak

kebakaran pasar di Pasar Ngadiluwih serta pelaksanaan operasi pasar dan pameran produk unggulan daerah secara langsung memberikan dampak pengendalian harga dan peningkatan kesejahteraan secara langsung.

Pemberian bansos bagi usaha mikro yang terdampak inflasi, fasilitasi legalitas usaha bagi usaha mikro dan koperasi, pemeriksaan dan pengawasan koperasi, peningkatan mutu produk usaha mikro melalui kegiatan pelatihan, peningkatan daya saing produk usaha mikro melalui pelatihan kemasan dan peningkatan akses pasar bagi usaha mikro dan anggota koperasi melalui kegiatan pameran dalam dan luar daerah, media cetak, media sosial, ecommerce serta pemanfaatan digital marketing

5) Analisa Faktor Penghambat

Tidak dapat dipungkiri bahwa proses pemulihan pasca Covid-19 di Kabupaten Kediri masih menjadi salah satu penghambat daya beli masyarakat. Upaya penghematan yang dilakukan oleh masyarakat menyebabkan konsumsi yang mereka gunakan terbatas pada bahan-bahan pokok. Hal yang menjadi perhatian pula adalah pengeluaran masyarakat di sektor-sektor yang memang masih dirasa berat bagi masyarakat untuk mengonsumsi.

6) Kesimpulan

Capaian Indeks Pengeluaran masyarakat Kabupaten Kediri secara simultan tumbuh dalam tiga tahun terakhir. Sebagai bagian dari pemulihan pasca pandemi Covid-19 di Kabupaten Kediri, capaian Indeks Pengeluaran sebesar 963.850 di Kabupaten Kediri belum dapat memenuhi target sebesar 1.062.451 . Pendekatan-pendekatan baru dalam upaya meningkatkan Indeks Pengeluaran di Kabupaten Kediri akan diupayakan dengan baik di tahun-tahun berikutnya dalam RPJMD tahun 2021-2026 ini.

4. Misi 4

Revitalisasi Pertanian untuk Ketahanan dan Swasembada Pangan

Gambar 5

Lingkup Misi 4



No	Tujuan	Indikator	Capaian		Target	Realisasi	Keterangan
			2020	2021	2022	2022	
1	Meningkatkan daya dukung dan kemandirian sektor pertanian dan pangan daerah	Pertumbuhan PDRB Sektor Pertanian	0,42	0,84	0,43	0,02	

No	Sasaran	Indikator	Capaian		Target	Realisasi	Anggaran	Realisasi Anggaran	Ket
			2020	2021	2022	2022			
1	Meningkatnya ketersediaan pangan dan akses pangan masyarakat	Ketersediaan pangan utama	153,60	144,58	143,22	117.48	3.033. 780.685	2.959. 635.157	Dibawah Target
2	Meningkatnya Kesejahteraan Petani	Nilai Tukar Petani	100,85	100,02	103	103,54	50.852. 697.717	48.059. 669.338	Melebihi Target

a. Meningkatkan Ketersediaan Pangan dan Akses Pangan Masyarakat

Sesuai dengan UU No. 18 tahun 2012 tentang Pangan, Ketahanan Pangan didefinisikan sebagai kondisi terpenuhinya Pangan bagi negara sampai dengan perseorangan, yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam, bergizi, merata, dan terjangkau serta tidak bertentangan dengan

agama, keyakinan, dan budaya masyarakat, untuk dapat hidup sehat, aktif, dan produktif secara berkelanjutan.

Kementerian Pertanian menyusun tiga pilar dalam ketahanan pangan tersebut adalah ketersediaan pangan (*availability*), keterjangkauan pangan (*accessibility*) baik secara fisik maupun ekonomi, dan stabilitas pangan (*stability*) yang harus tersedia dan terjangkau setiap saat dan setiap tempat. Apabila ketiga pilar ketahanan pangan terpenuhi, maka masyarakat atau rumah tangga tersebut mampu memenuhi ketahanan pangannya masing-masing.

Ketahanan pangan diperlukan sebagai upaya untuk mewujudkan kedaulatan pangan (*food soveregnity*), kemandirian pangan (*food resilience*) serta keamanan pangan (*food safety*). Merujuk Badan Urusan Logistik (BULOG) dijelaskan sebagai berikut:

1. Kedaulatan Pangan adalah hak negara dan bangsa yang secara mandiri menentukan kebijakan Pangan yang menjamin hak atas Pangan bagi rakyat dan yang memberikan hak bagi masyarakat untuk menentukan sistem Pangan yang sesuai dengan potensi sumber daya lokal.
2. Kemandirian Pangan adalah kemampuan negara dan bangsa dalam memproduksi Pangan yang beraneka ragam dari dalam negeri yang dapat menjamin pemenuhan kebutuhan pangan yang cukup sampai di tingkat perseorangan dengan memanfaatkan potensi sumber daya alam, manusia, sosial, ekonomi, dan kearifan lokal secara bermartabat.
3. Keamanan Pangan adalah kondisi dan upaya yang diperlukan untuk mencegah Pangan dari kemungkinan cemaran biologis, kimia, dan benda lain yang dapat mengganggu, merugikan, dan membahayakan kesehatan manusia serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat sehingga aman untuk dikonsumsi.

Ketahanan pangan tidak lepas dari sifat produksi komoditi pangan itu sendiri yang musiman dan berfluktuasi karena sangat mudah dipengaruhi oleh iklim/cuaca. Perilaku produksi yang sangat dipengaruhi iklim tersebut sangat mempengaruhi ketersediaan pangan. Dari sisi tataniaga, panjangnya rantai pasokan yang mengakibatkan perbedaan harga tingkat produsen dan konsumen yang cukup besar. Sedangkan dari sisi konsumsi, pangan merupakan pengeluaran terbesar bagi rumah tangga (di atas 50% dari jumlah pengeluaran).

Melihat hal tersebut, Pemerintah Kabupaten Kediri dalam rangka meningkatkan

ketersediaan pangan dan akses pangan masyarakat. Upaya ini baik secara langsung atau secara tidak langsung harus ditunjang dengan hal-hal yang ada disekitarnya. Pemerintah Kabupaten Kediri melihat pengembangan ketersediaan pangan dan akses pangan masyarakat harus dilaksanakan lebih massif, terutama yang berdampak langsung kepada tersedianya dan kemudahan akses pangan masyarakat.

1) Permasalahan dan Tantangan

Namun begitu, upaya Pemerintah Kabupaten Kediri dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat berbasis keluarga masih menemui berbagai macam hambatan. Hambatan tersebut diidentifikasi-kan sebagai berikut;

1. Rendahnya komitmen pelaku usaha menerapkan standar mutu dan keamanan pangan segar asal tumbuhan.
2. Masih beredarnya pangan tidak aman yang dikonsumsi masyarakat.
3. Pola konsumsi masyarat belum beragam, bergizi, seimbang dan aman.
4. Fluktuasi harga komoditas pangan strategis.
5. Masih adanya daerah rentan rawan pangan di Kabupaten Kediri.
6. Belum optimalnya nilai tambah produksi /produktifitas peternakan karena rendahnya kualitas, komoditas, produk, sumber daya manusia serta sarana dan prasarana peternakan dan kesehatan hewan.

2) Pelaksanaan Program dan Kegiatan

Melihat kompleksnya permasalahan terkait pangan di Kabupaten Kediri, Pemerintah Kabupaten Kediri melalui Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan telah menyusun rencana dan upaya pencapaian peningkatan ketersediaan pangan dan akses pangan masyarakat dengan upaya dibawah ini:

1. Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi untuk Kedaulatan dan Kemandirian Pangan.
2. Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat.
3. Penanganan Kerawanan Pangan.
4. Pengawasan Keamanan Pangan.

Dengan strategi yang telah ditetapkan, dalam operasionalnya capaian Ketersediaan Pangan Utama Kabupaten Kediri pada tahun 2022 ini mengalami penurunan sebesar 27,1 dari yang awalnya 144,8 menjadi 117,48. Capaian tersebut berada dibawah target yang sudah ditetapkan yakni 143,22%.

3) Analisa Kinerja, Efisiensi dan Keseuaian dengan RPJMD

Analisa Kinerja

Indikator	Capaian 2020	Capaian 2021	Target 2022	Capaian 2022	Persentase Capaian	Anggaran	Realisasi Anggaran	Persentase Realisasi
Ketersediaan Pangan Utama	**153,60**	**144,58**	**143,22**	**117,48**	**82,03%**	**3.033.780. 685,00**	**2.959.645. 157,00**	**97,56%**

Analisa Capaian RPJMD

Indikator	Capaian Tahun 2022	Target Tahun 2022	Hasil Akhir RPJMD	Persentase Capaian RPJMD
Ketersediaan Pangan Utama	**117,48**	**143,22**	**149,09**	**117,48/149,09x100=78,7%**

Analisa Efisiensi

Indikator	Persentase Capaian	Persentase Realisasi Anggaran	Formula Perhitungan	Hasil Analisa Efisiensi	Keterangan
Ketersediaan Pangan Utama	**82,03%**	**97,56**	**82,03%-97,56%**	**18,86%**	**Tidak Efisien**

4) Benchmarking

Perbandingan Capaian Ketersediaan Pangan Utama Tahun 2022

No	Keterangan	Capaian KPU
1	Kabupaten Kediri	117,48
2	Provinsi Jawa Timur	135,84*
3	Nasional	116,47*

*) Data Proyeksi

Ketersediaan pangan utama Kabupaten Kediri masih di bawah capaian Provinsi Jawa Timur. Ini dikarenakan Kabupaten Kediri bukan merupakan daerah sentra produksi padi di Jawa Timur. Jawa Timur merupakan penyumbang produksi beras terbesar di Indonesia seperti daerah sentra produksi padi di Ngawi, Lamongan, Bojonegoro, Jember, Banyuwangi, Tuban, Madiun, Nganjuk, Ponorogo dan Gresik. Adapun dibandingkan dengan data capaian ketersediaan pangan nasional, ketersediaan pangan utama di Kabupaten Kediri masih lebih tinggi.

5) Faktor Pendukung

1. Pengembangan lumbung pangan masyarakat bagi Gapoktan yang bertujuan meningkatkan kapasitas kelompok dalam manajemen lumbung pangan masyarakat melalui penyediaan sarana prasarana lumbung pangan masyarakat (lumbung pangan, lantai jemur, *rice milling unit* (RMU) *bed drier,* rumah RMU, rumah *bed drier,* pembinaan dan pendampingan).
2. Pemantauan secara berkelanjutan terhadap stok dan harga pangan utama ditingkat produsen, distributor, penggilingan, dan konsumen (pasar) untuk mengetahui stabilitas harga dan stok pangan.

6) Faktor Penghambat

1. Mahalnya harga pupuk dengan ketersediaan pupuk yang terbatas memicu petani untuk beralih ke komoditas selain padi sehingga menyebabkan produksi gabah

berkurang. Perubahan iklim dan cuaca ekstrim yang sulit diprediksi juga mempengaruhi produksi gabah;

2. Permasalahan produksi juga terjadi di daerah lain sehingga ketersediaan beras menurun mengakibatkan beras masuk dari daerah lain ke Kabupaten Kediri juga berkurang;
3. Stok Bulog Nasional sampai dengan akhir musim panen berikutnya (Februari 2023) tidak sesuai target yakni sebesar 1,2 juta ton hanya terpenuhi 300 ribu ton. Ini berdampak pada penurunan stok Bulog di daerah. Meskipun capaian ketersediaan pangan utama tahun 2022 menurun dari tahun 2021, namun masih surplus sebesar 45,24 kg/kapita/tahun dibandingkan kebutuhan konsumsi beras per kapita Kabupaten Kediri sebesar 72,24 kg/kapita/ tahun. Ini menunjukan ketersediaan pangan utama Kabupaten Kediri masih sangat aman.

7) Kesimpulan

Melihat kompleksnya permasalahan yang ada, capaian Ketersediaan Pangan Utama Kabupaten Kediri pada tahun 2022 ini mengalami penurunan sebesar 27,1 dari yang awalnya 144,8 menjadi 117,48. Capaian tersebut berada dibawah target yang sudah ditetapkan yakni 143,22%. Capaian tersebut ditunjang dengan alokasi anggaran sebesar 3.033.780.685,00 dengan realisasi sebesar 2.959.645.157,00.

Meskipun capaian ketersediaan pangan utama tahun 2022 menurun dari tahun 2021, namun masih surplus sebesar 45,24 kg/kapita/tahun dibandingkan kebutuhan konsumsi beras per kapita Kabupaten Kediri sebesar 72,24 kg/kapita/ tahun. Ini menunjukan ketersediaan pangan utama Kabupaten Kediri masih sangat aman.

8) Rencana Tindak Lanjut

Untuk memajukan dan mengembangkan sektor peternakan sebagai salah satu kontributor PDRB sektor pertanian, DKPP Kabupaten Kediri berupaya meningkatkan kapasitas peternak dan kelompok ternak dalam peternakan yang berwawasan agribisnis mulai hulu sampai dengan hilir. Salah satunya dengan menyelenggarakan Sekolah Peternakan Rakyat (SPR), yakni sarana transfer ilmu pengetahuan dan teknologi untuk membangun kesadaran peternak dan mendorong tindakan kolektif. Melalui SPR, peternak berskala kecil baik individu maupun yang sudah tergabung dalam kelompok atau asosiasi didorong untuk berkonsolidasi membangun perusahaan kolektif yang dikelola secara profesional dalam satu manajemen. Ini merupakan salah satu upaya untuk menjadikan

peternak berdaulat dan memiliki posisi tawar lebih tinggi.

Adanya Pengembangan Desa Korporasi Sapi di Kecamatan Ngadiluwih, yakni program dari Kementan yang menyatukan atau mengkonsolidasikan kelompok-kelompok ternak dalam satu kelembagaan dan dengan sistim pemeliharaan ternak yang terintegrasi dari hulu hingga hilir dengan dibentuk koperasi juga akan terus didampingi dan didorong hingga mencapai tujuan yang diharapkan, yakni meningkatkan populasi dan produksi ternak dalam negeri yang bermuara pada kesejahteraan peternak.

Dari sisi ketahanan pangan, DKPP Kabupaten Kediri berupaya memastikan ketersedian pangan bagi masyarakat mencukupi melalui pemantauan di sisi produksi, cadangan pangan masyarakat serta stok yang ada di gudang distributor/penggilingan serta pemantauan harga pangan di tingkat konsumen (pasar). Koordinasi juga senantiasa dilakukan dengan Bulog terkait stok pangan di Kabupaten Kediri.

Dari sisi konsumsi pangan, konsumsi beras diupayakan menurun melalui diversifikasi pangan berbasis sumber daya lokal. Kegiatan yang dilakukan untuk penganekaragaman konsumsi pangan antara lain dengan pemberdayaan masyarakat dalam pemanfaatan pekarangan sebagai sumber pangan keluarga. Masyarakat diberikan pelatihan dan bantuan bibit tanaman sayur dan buah serta sarana produksi pertanian untuk dibudidayayakan di pekarangan.

Selain itu dilaksanakan juga sosialisasi konsumsi produk peternakan sebagai sumber protein hewani sehingga diharapkan masyarakat mengetahui pentingnya protein hewani dalam pemenuhan gizi, utamanya dalam mendukung gerakan pencegahan stunting. Dengan adanya diversifikasi pangan yang bergizi dan seimbang, diharapkan ketergantungan konsumsi beras menurun sehingga dapat mendukung stabilitas ketahanan pangan.

b. Meningkatnya Kesejahteraan Petani

Sektor pertanian mempunyai peranan yang sangat penting dalam membangun perekonomian nasional termasuk perekonomian daerah, karena sektor pertanian berfungsi sebagai penyedia bahan pangan untuk ketahanan pangan masyarakat, sebagai instrumen pengentasan kemiskinan, penyedia lapangan kerja, serta sumber pendapatan masyarakat.

Sebagai penyedia pangan serta lapangan pekerjaan, pertanian yang merupakan salah satu sektor vital dalam menghadapi perkembangan bertambahnya populasi manusia,

terutama dalam pembangunan berkelanjutan. Kondisi pertanian di Indonesia memiliki permasalahan serius antara lain terkait lahan, irigasi, benih, pupuk, alat mesin pertanian, penyuluh lapangan (sumber daya petani), tenaga kerja, hingga permasalahan tata niaga pertanian.

Menurut Kementerian Pertanian, petani adalah pelaku utama pembangunan. Dalam hal ini, petani memiliki peran yang besar terhadap penyediaan pangan yang berperan penting sebagai kebutuhan primer. Kementerian Pertanian sendiri juga mencanangkan Indonesia sebagai lumbung pangan dunia pada tahun 2045.

Merujuk kajian dari Kementerian Pertanian terdapat beberapa hal yang menjadi kunci dalam menningkatkan kesejahteraan petani dengan pendekatan kesisteman (systemic approach) dengan parameter sebagai berikut;

1. Merevisi regulasi yang menghambat
2. Membangun infrastruktur
3. Mekanisasi pertanian
4. Perbaikan teknis produksi Pendampingan dan penguatan SDM
5. Penanganan pasca panen
6. Serta pengendalian harga

Menurut Kementerian Koordinator bidang Perekonomian prinsip-prinsip untuk meningkatkan kesejahteraan petani melindungi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan melalui penetapan pengaturan tata ruang, terutama pengendalian alih fungsi lahan sawah berkelanjutan, penyediaan benih unggul yang berkualitas, penyediaan pupuk bersubsidi lebih ditingkatkan, meminimalkan impor hasil pertanian, dan harga hasil pertanian lebih ditingkatkan.

Masyarakat Kabupaten Kediri mayoritas masih bekerja di sektor agrikultur. Sekitar 17% masyarakat Kabupaten Kediri bekerja dengan waktu penuh di sektor tersebut, ditambah dengan masyarakat lain yang bekerja paruh waktu.. Migrasi profesi dari sektor pertanian akhir-akhir ini meningkat. Selain itu, tidak banyak anak muda di usia produktif yang bekerja di sektor pertanian.

Salah satu faktor kunci dalam peningkatan kesejahteraan petani adalah inovasi teknologi di bidang pertanian. Mulai dari penggunaan bibit unggul, penggunaan alat mesin pertanian, dan pemupukan. Bibit unggul merupakan bibit yang memiliki mutu terjamin sehingga dapat menjamin keberhasilan usaha tani. Alat dan mesin pertanian dapat

meningkatkan kualitas dan efisiensi dalam mengolah lahan pertanian. Pemupukan dilakukan untuk memberikan nutrisi pada tanaman guna meningkatkan produksi.

Melihat hal diatas serta menurunnya tren dalam pembangunan sektor pertanian secara langsung disebabkan oleh banyak hal. Terutama hal-hal yang menyangkut kebutuhan petani secara umum. Tingkat perekonomian dan kesejahteraan petani di Kabupaten Kediri menjadi perhatian utama bagi Pemerintah Kabupaten Kediri.

Inovasi di bidang pertanian yang menjadi program unggulan Pemerintah Kabupaten Kediri adalah DITO (Desa Inovasi Tani Organik). Bupati Kediri, Mas Dhito menyampaikan, pertanian organik memiliki nilai ekonomi jauh menguntungkan dibandingkan pertanian konvensional. Sebab, dengan tani organik biaya produksi dapat ditekan karena petani tidak lagi bergantung dengan pupuk kimia. Selain itu pula harga jual produksi tani organik lebih tinggi daripada harga jual produksi tani konvensional.

Pemerintah Kabupaten Kediri dalam rangka meningkatkan kesejahteraan petani melihat kesejahteraan petani adalah hal yang wajib untuk diperhatikan. Indikator Nilai Tukar Petani (NTP) digunakan sebagai indikator kesejahteraan, dimana perhitungan NTP dihitung dengan indeks yang diterima petani dibandingkan dengan indeks yang dikeluarkan oleh petani.

1) Permasalahan

Pemerintah Kabupaten Kediri dalam upaya meningkatkan kesejahteraan petani berbagai macam hambatan. Hambatan tersebut diidentifikasi-kan sebagai berikut;

1. Upaya pemenuhan ketersediaan pangan melalui peningkatan produksi tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan di Kabupaten Kediri, masih rentan terhadap isu pemanasan global yang berdampak terjadinya perubahan iklim dan serangan Hama penyakit tanaman serta bencana alam.
2. Terjadinya alih fungsi lahan pertanian menjadi lahan non pertanian.
3. Kandungan Bahan Organik Tanah Lahan Pertanian semakin berkurang akibat pemakaian pupuk anorganik yang terus menerus (kurang dari 3%).
4. Kepemilikan lahan oleh petani sempit, rata rata 0,3 Ha (30000m2).
5. Budidaya petani belum berorientasi pasar.
6. Rendahnya kualitas SDM Petani dalam penguasaan dan pemanfaatan teknologi pertanian.

7. Fluktuasi harga produk pertanian akibat ketersediaan bahan pangan yang tidak kontinyu sepanjang tahun, lemahnya tata niaga produk pertanian dan panjangnya rantai distribusi produk pertanian.
8. Belum optimalnya ketersediaan sarana dan prasarana on farm pertanian seperti pupuk, benih, pertisida, alat mesin pertanian (alsintan), infrastruktur pertanian (Jaringan Irigasi, Irigasi Tanah Dangkal, Embung, Pipanisasi, Jalan Usahatani dan Jalan Produksi).
9. Masih cukup tingginya biaya produksi.
10. Permodalan petani dan akses terhadap sumber modal masih lemah.
11. Belum optimalnya peningkatan nilai tambah produk pertanian bagi petani.

2) Pelaksanaan Program dan Kegiatan

Melihat kompleksnya permasalahan terkait pangan di Kabupaten Kediri, Pemerintah Kabupaten Kediri melalui Dinas Pertanian dan Perkebunan serta Dinas Perikanan telah menyusun rencana dan upaya pencapaian peningkatan dengan upaya dibawah ini:

1. Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian dengan kegiatan Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian dan Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota.
2. Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian dengan kegiatan Pengembangan Prasarana Pertanian dan Pembangunan Prasarana Pertanian.
3. Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian dengan kegiatan Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian.
4. Penyuluhan Pertanian dengan keigatan Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian.

Dengan strategi yang telah ditetapkan adalah pengembangan kawasan agropolitan, pengembangan pertanian organik bertajuk DITO (Desa Inovasi Tani Organik), pengurangan ketergantungan pupuk kimia, memperkecil kehilangan produksi akibat bencana banjir dan kekeringan, memenuhi sarana dan prasarana on-farm petani, efisiensi usahatani, peningkatan Nilai Tambah Produk pertanian, kemitraan sektor pertanian, meningkatkan penguasaan teknologi pertanian melalui pelatihan, sekolah lapang, demplot, laboratorium lapang, pemanfaatan pekarangan dan penumbuhan minat petani muda.

Dalam operasionalnya selama tahun 2022 ini, Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Kediri ditunjang dengan peningkatan kemampuan petugas dan petani dalam

antisipasi iklim dan pengaturan pola tanam dan pemilihan komoditas/varietas yang sesuai dengan kondisi iklim. Peningkatan kemampuan dan mitigasi antisipatif dari para petugas serta para petani dalam upaya menanggulangi penyakit dengan obat-obatan. Bantuan obat-obatan pertanian dan pelaksanaan gerakan pengendalian hama dan penyakit dilaksanakan secara serempak baik oleh petugas bersama-sama dengan para petani.

Upaya yang lain sebagai langkah-langkah penguatan adalah meningkatkan Indeks Pertanaman (IP) dan pemanfaatan lahan pekarangan warga dengan hidroponik. Selain untuk menambah pendapatan dari masyarakat, hal tersebut juga dapat digunakan untuk menjaga produksi tanaman sayuran dan buah-buahan. Upaya peningkatan kualitas pertanian kreatif dengan hidroponik dilaksanakan dengan sosialisasi dan pendampingan kepada masyarakat tani di Kabupaten Kediri.

Guna mendukung berjalannya strategi DITO (Desa Inovasi Tani Organik) para petugas bersama dengan para petani bahu-membahu bersama-sama mengembalikan fungsi lahan yang sebelumnya masih mengandung pupuk kimia sintesis untuk dinetralisir dengan dikembalikan kembali pada fungsi alamiahnya yang sehat dan ramah lingkungan. Hal tersebut selain digunakan untuk mengurangi ketergantungan pupuk dan pestisida, juga dapat meningkatkan nilai produksi pertanian apalagi jenis pertanian organik semakin digandrungi pasaran. Pendampingan dilaksanakan melalui desa-desa yang menjadi *pilot project* Desa Inovasi Tani Organik di Pemerintah Kabupaten Kediri.

Peningkatan ketersediaan sarana dan prasarana pertanian juga secara langsung menunjang. Terutama di bidang irigasi dan pengembangan jaringan jalan di areal persawahan. Dukungan langsung dari operasional Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang serta Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan secara optimal berhasil meningkatkan produktivitas dan mendukung ketercapaian target pertumbuhan PDRB sektor pertanian dan NTP.

Upaya ini sejalan dengan adanya prioritas pembangunan ekonomi kerakyatan di bidang pertanian dengan rincian program sebagai berikut:

1. Pembangunan Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan
2. Pengembangan Kawasan Agropolitin
3. Revitalisasi Pertanian
4. Pengembangan Pola Kemitraan Inti Plasma yang Berorientasi Pasar

5. Pengembangan Smart Pertanian melalui Inovasi teknologi, salah satunya DITO (Desa Inovasi Tani Organik)
6. Optimalisasi lahan kurang produktif.

Dengan adanya prioritas pembangunan ekonomi kerakyatan di bidang pertanian tersebut mampu mendongkrak upaya pertanian dengan upaya-upaya lain yang senantiasa dilaksanakan oleh para petugas, penyuluh, serta pegawai yang bergerak di bidang pertanian dari Pemerintah Kabupaten Kediri.

3) Analisa Kinerja, Efisiensi dan Keseuaian dengan RPJMD

Analisa Kinerja

Indikator	Capaian 2020	Capaian 2021	Target 2022	Capaian 2022	Persentase Capaian	Anggaran	Realisasi Anggaran	Persentase Realisasi
NTP	**100,85**	**100,02**	**103**	**103,5**	**100,5**	**50.852.697.717,00**	**48.059.669.388,00**	**94,5%**

Analisa Capaian RPJMD

Indikator	Capaian Tahun 2022	Target Tahun 2022	Hasil Akhir RPJMD	Persentase Capaian dan RPJMD	Keterangan
NTP	**103,4**	**103**	**105**	**103,4/105x100=98,4%**	**Diatas Jalur perencanaan**

Analisa Efisiensi

Indikator	Persentase Capaian	Persentase Realisasi Anggaran	Formula Perhitungan	Hasil Analisa Efisiensi	Keterangan
NTP	**100,5%**	**94,5%**	**100,5%-94,5%**	**6%**	**Efisien**

4) Benchmarking

Perbandingan Capaian NTP Tahun 2022

No	Keterangan	Capaian NTP
1	Kabupaten Kediri	103,4
2	Provinsi Jawa Timur	103,57
3	Nasional	126,22

Capaian NTP Kabupaten secara umum masih dibawah dari capaian NTP Provinsi Jawa Timur. Hal tersebut terjadi dikarenakan adanya implementasi-implementasi inovasi di bidang pertanian yang dilaksanakan oleh para petani di Kabupaten Kediri. Para petani banyak yang melaksanakan inovasi pertanian dalam bidang inovasi tani organik, greenhouse, serta hidroponik yang dapat meningkatkan Indeks Harga yang diterima Petani yang diperkirakan masih membebani produksi awal sebagai permodalan usaha.

Tidak dapat dipungkiri bahwa capaian NTP Kabupaten Kediri masih jauh dibandingkan dengan capaian nasional. Hal tersebut terjadi karena komposisi NTP di bidang pertanian skala nasional yang mayoritas dipegang oleh perusahaan-perusahaan perkebunan sawit di Pulau Kalimantan dan Pulau Sumatera. Tentu, Indeks Harga Konsumsi bagi para petani sawit dan pengusaha sawit dalam skala nasional memiliki peningkatan yang cukup tajam.

Secara langsung, perbandingan NTP tersebut memberikan satu asumsi baru tentang upaya inovasi dan penggunaan teknologi unggul di bidang pertanian. Karena pada kenyataannya, nilai NTP skala nasional mengalami peningkatan yang cukup tajam, terutama bagi para petani yang mengadopsi teknologi pertanian di Pulau Kalimantan, Pulau Sumatera, dan Pulau Papua.

5) Faktor-faktor Penunjang

Semakin tingginya angka penyuluh pertanian dengan kompetensi dan kualifikasi yang sesuai dan memahami kondisi pertanian di Kabupaten Kediri mampu memberikan pengertian dan pengarahan kepada para petani baik dari sisi manajemen pengelolaan pertanian melalui sapta-usaha tani ataupun sisi-sisi lainnya seperti pertanian organik serta tani kreatif lainnya.

Optimalnya penggunaan angka obat-obatan dalam upaya pengendalian hama juga turut serta menjadi faktor utama tercapainya NTP. Distribusi pupuk yang optimal juga turut serta menjadi faktor penunjang pencapaian target NTP.

Dari aspek lain, munculnya pertanian kreatif seperti greenhouse, tani organik, serta pertanian-pertanian lainnya juga menjadikan mampu memberikan nilai tambah bagi para petani. Pemanfaatan lahan-lahan pekarangan dengan hidroponik selain sebagai upaya menjaga produksi tanaman pangan juga dapat digunakan untuk meningkatkan nilai para petani.

Perkembangan tani organik yang dikembangkan menyebabkan menurunnya ketergantungan petani pada obat-obatan hama dan pupuk kimia sintesis. Hal tersebut juga menyebabkan para petani tidak perlu mengeluarkan modal yang cukup besar, namun dapat menggunakan barang-barang ramah lingkungan yang mudah diproduksi di sekitar kita.

Sarana dan Prasarana yang semakin ditingkatkan dengan upaya revitalisasi talud dan pengembangan irigasi di sektor lainnya menyebabkan pengairan sawah semakin baik. Pembangunan infrastruktur pertania seperti jaringan irigasi tersier (RJUT) dan jalan usaha tani (JUT) yang dilakukan dilakukan oleh Dinas Pertanian dan Perkebunan memberikan dampak signifikan terhadap penurunan faktor produksi, terutama pada beban operasional panen. Pendekatan lain seperti sarana dan prasarana alsintan juga memiliki dampak yang signifikan dalam mendorong peningkatan pertanian di Kabupaten Kediri.

6) Faktor-faktor Penghambat

Masih tingginya anomali iklim dari musim kemarau menjadi musim penghujan memberikan ketidakpastian pada beberapa aspek baik itu jenis tanaman, ketersediaan air irigasi, serta memudahkan perkembang-biakan hama-hama dan penyakit tanaman. Tumbuh dan berkembangnya OPT (Organisme Pengganggu Tanaman) juga turut andil dalam menghambat pencapaian target yang telah ditentukan.

Angka alih fungsi lahan dari pertanian menuju lahan industri ataupun hunian juga masih menjadi permasalahan. Menurunnya angka kawasan pertanian buah-buahan mangga di kawasan Kecamatan Banyakan, Kecamatan Grogol, dan Kecamatan Tarokan dikarenakan pembangunan bandara menjadi permasalahan tersendiri. Selain itu, peralihan lahan pertanian atas nama pribadi yang tinggi juga menyebabkan turunnya produktivitas pertanian.

Hal lain yang perlu menjadi perhatian adalah menurunnya kualitas lahan di Kabupaten Kediri diakibatkan karena akumulasi penggunaan pupuk berlebihan yang berakibat pada degradasi kesuburan tanah. Hal tersebut secara umum dapat menghambat proses pertanian karena tanah yang terdegradasi akan membutuhkan pupuk dan faktor-faktor penyubur lainnya dalam jumlah yang lebih besar. Hal tersebut tentu berakibat pada besarnya angka produksi yang dikeluarkan oleh para petani.

Meskipun sarana dan prasarana sudah banyak disediakan di banyak tempat, namun di beberapa tempat sarana dan prasarana masih belum tersedia. Hal tersebut tentu mengakibatkan dampak biaya produksi yang tinggi, terutama biaya irigasi dan panen. Selain itu, masih ada kelompok tani yang belum mendapat bantuan alsintan pertanian modern.

7) Kesimpulan

Capaian Nilai Tukar Petani sebesar 103,54 yang mampu berjalan diatas target 103 tentu dapat tercapai karena banyaknya kontribusi dari berbagai pihak terutama para pelaku ekonomi di bidang pertanian. Koordinasi dan kontribusi yang intensif dengan para petugas dan penyuluh ini menyebabkan pertumbuhan Nilai Tukar Petani (NTP) di Kabupaten Kediri meningkat sebesar 5,6 menjadi 105,4.

Hal tersebut sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan serta dukungan dari faktor-faktor pendukung yang secara simultan memberikan topangan terhadap meningkatnya PDRB sektor pertanian serta Nilai Tukar Petani (NTP) di Kabupaten Kediri.

8) Rencana Tindak Lanjut

Melihat hal tersebut, Pemerintah Kabupaten Kediri melalui Dinas Pertanian dan Perkebunan serta OPD terkait akan terus berupaya untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas produksi hasil pertanian holtikultura dengan berbagai macam alterantif pembangunan sektor pertanian. Pendekatan-pendekatan peningkatan nilai ekonomis pertanian masih menjadi perhatian utama bagi Dinas Pertanian dan Perkebunan sesuai dengan perencanaan yang telah ditentukan diawal. Utamanya melihat peningkatan target NTP menjadi 104 pada tahun 2023.

c. Urusan Meningkatkan Kesejahteraan Petani Sektor Perikanan (Pembudidaya Ikan)

Pembangunan di bidang perikanan bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan petani di sektor perikanan. Parameter ukuran kesejahteraan petani adalah nilai tukar petani. Pengukuran ini dilakukan untuk mengetahui apakah pendapatan dari kegiatan usaha yang dilakukan yaitu perikanan budidaya bisa mencukupi seluruh kebutuhan rumah tangga setiap petani perikanan. Istilah yang lazim digunakan untuk petani sektor perikanan adalah pembudidaya ikan. Berdasarkan data, angka produksi perikanan budidaya di Kabupaten Kediri lambat laun semakin meningkat. Peningkatan produksi terjadi baik pada budidaya ikan konsumsi ataupun ikan hias. Budidaya ikan yang dimaksud yaitu memelihara ikan secara komersial di kolam, tangki, dengan pembatas atau pelindung, bisa juga di kolam sawah. Saat ini ikan yang paling banyak dibudidayakan antara lain lele, nila, patin, koi, cupang dan lain-lain.

Berdasarkan jumlah produksinya, Kabupaten Kediri merupakan salah satu dari segi tiga emas budidaya ikan hias khususnya komet serta lumbung perikanan Jawa Timur untuk benih seperti benih lele, nila dan lain-lain. Dengan tingginya angka produksi perikanan, Pemerintah Kabupaten Kediri melalui Dinas Perikanan telah menetapkan sasaran meningkatnya kesejahteraan pembudidaya ikan dengan indikator nilai tukar pembudidaya ikan. Hal ini digunakan untuk mendeteksi apakah peningkatan produksi perikanan budidaya berdampak pada peningkatan kesejahteraan pembudidaya ikan itu sendiri. Indikator NTP

Perikanan tersebut dapat digunakan untuk menganalisa tingkat kesejahteraan pembudidaya ikan. Hasil pengukuran menunjukkan bahwa tingkat kesejateraan pembudidaya ikan meningkat dibanding tahun – tahun sebelumnya. Hal ini tampak nyata dari geliat usaha perikanan yang semakin marak di Kabupaten Kediri.

1) Permasalahan dan Tantangan

Pemerintah Kabupaten Kediri melalui Dinas Perikanan telah mengidentifikasi permasalahan-permasalahan sebagai berikut:

1. Keterbatasan induk ikan yang berkualitas (lele, nila, gurami, patin, dan ikan hias)
2. Belum optimalnya penanganan penyakit ikan
3. Masih terbatasnya kemampuan SDM pelaku usaha perikanan terkait manajemen usaha sehingga hasil produksi belum optimal
4. Pengetahuan penanganan panen yang baik belum dipahami secara luas oleh pembudidaya dan pemasar perikanan sehingga kualitas ikan yang diproduksi belum optimal
5. Belum optimalnya promosi produk perikanan baik offline maupun online sehingga jangkauan pemasaran terbatas yang berdampak pada pendapatan rumah tangga perikanan (RTP) yang belum optimal
6. Belum optimalnya kelembagaan pokdakan maupun poklahsar dalam melakukan kerjasama antar kelompok dan diluar kelompok dalam hal penyediaan pakan, penjualan produksi maupun permodalan
7. Keterbatasan pengetahuan terkait keamanan pangan bagi pengolah perikanan
8. Terbatasnya pengetahuan para pengolah produk perikanan terkait packaging yang benar dan menarik
9. Belum banyak pengolah perikanan yang memiliki sertifikasi keamanan pangan
10. Rendahnya tingkat konsumsi ikan

2) Pelaksanaan Program dan Kegiatan

Dalam mengatasi permasalahan tersebut, Pemerintah Kabupaten Kediri melalui Dinas Perikanan telah merencanakan program dan kegiatan sebagai berikut;

1. Pengelolaan perikanan budidaya dengan kegiatan pemberdayaan pembudi daya ikan kecil dan pengelolaan pembudidayaan ikan.

2. Pengawasan sumberdaya kelautan dan perikanan dengan kegiatan pengawasan sumber daya perikanan di wilayah sungai, danau, waduk, rawa, dan genangan air lainnya yang dapat diusahakan dalam kabupaten/kota
3. Pengolahan dan pemasaran hasil perikanan yang diimplementasikan melalui kegiatan penyediaan dan penyaluran bahan baku industri pengolahan ikan dalam 1 (satu) daerah kabupaten/ kota.

Pemerintah Kabupaten Kediri telah menetapkan indikator Nilai Tukar Petani Perikanan sebagai alat ukur keberhasilan program dan kegiatan tersebut. Pada tahun 2022 ini capaian NTP Perikanan mencapai 97,62 melebihi target yang telah ditetapkan yakni 95. Capaian tersebut ditunjang dengan realisasi anggaran sebesar 8.946.980.596,00 dari alokasi anggaran sebesar 9.081.485.516,00.

3) Analisa Faktor Pendukung

Upaya yang dilakukan dalam rangka meningkatkan produksi perikanan budidaya antara lain melaksanakan kegiatan pembinaan untuk kelompok pembudidaya ikan dengan mengadakan sosialisasi CPIB (cara pembenihan ikan yang baik), CBIB (cara budidaya ikan yang baik) dan CPPIB (cara pembuatan pakan ikan yang baik) serta pendampingan pengajuan sertifikat CPIB, CBIB dan CPPIB; pemberian bantuan/hibah kepada masyarakat (kelompok pembudidaya ikan/pokdakan) berupa benih, induk, pakan dan saprodi (peralatan budidaya ikan); sosialisasi dalam rangka penumbuhan pembudidaya ikan baru; pemantauan kesehatan ikan dan lingkungan melalui pemantauan kualitas air, pemantauan obat-obatan dan pemantauan kualitas pakan serta layanan cepat SIMOLI CEKAT (Inovasi Mobil Keliling Cek Kualitas Air Budidaya Air Tawar); sertifikasi tanah dalam rangka memfasilitasi akses permodalan pembudidaya ikan; penguatan kelembagaan melalui kegiatan *workshop* kelembagaan perikanan dan penilaian kelas kelompok budidaya ikan; upaya perluasan pemasaran melalui kontak bisnis juga kegiatan pelatihan tentang teknologi budidaya dan pembenihan ikan.

Selanjutnya, alternatif penanggulangan yang telah dilakukan dalam peningkatan kinerja pengawasan sumberdaya perikanan yaitu sosialisasi peraturan daerah perlindungan sumber daya ikan di perairan umum Kabupaten Kediri kepada masyarakat. Berikutnya, solusi yang dilakukan untuk meningkatkan konsumsi asal ikan di masyarakat dalam rangka mendukung gerakan pencegahan *stunting* yaitu pelatihan pengolahan berbahan dasar ikan (lele dan patin) terhadap poklahsar dan masyarakat; mengadakan bazar online produk -

produk olahan berbahan dasar ikan; mengadakan kegiatan *Makin Kece Sekali* (Makan Ikan Kediri Cerdas Stunting Tak Ada lagi) serta lomba cipta menu dalam rangka memasyarakatkan makan ikan. Lebih lanjut, dalam rangka meningkatkan jangkauan pasar dan standarisasi produk olahan perikanan dilakukan pemberian bantuan/hibah kepada masyarakat (kelompok pengolah perikanan) berupa peralatan produksi pengolahan ikan; serta pendampingan sertifikasi SKP, BPOM dan halal.

4) Analisa Faktor Penghambat

Kondisi perairan umum yang sudah overfishing (kelebihan penangkapan) sehingga diperlukan restocking (penebaran benih ikan kembali) dan pengawasan penangkapan di perairan umum. Tetapi, penyelesaian permasalahan ini perlu melibatkan koordinasi antar wilayah juga dengan Propinsi Jawa Timur karena semua sungai yang melintas di Kabupaten Kediri juga melintasi beberapa kabupaten/ kota yang lain. Disamping itu sungai merupakan kewenangan Propinsi Jawa Timur.

5) Analisa Kinerja, Efisiensi dan Keseuaian dengan RPJMD

Indikator	Capaian 2020	Capaian 2021	Target 2022	Capaian 2022	Persentase Capaian	Anggaran	Realisasi Anggaran	Persentase Realisasi
NTP Perikanan	**N/A***	**N/A***	**95**	**97,62**	**102,76**	**9.081. 485.516**	**8.946. 980.596**	**98,52%**

Indikator	Persentase Capaian	Persentase Realisasi Anggaran	Formula Perhitungan	Hasil Analisa Efisiensi	Keterangan
NTP Perikanan	**102,76%**	**98,52%**	**102,76%-98,52%**	**4,26%**	**Efisien**

Indikator	Target Tahun 2022	Capaian Tahun 2022	Target Akhir RPJMD	Persentase Capaian RPJMD
NTP Perikanan	**95**	**97,62**	**97**	**100,6%**

6) Benchmarking

Perbandingan Capaian NTP Perikanan Tahun 2022

No	Keterangan	Capaian NTP Perikanan
1	Kabupaten Kediri	97,62
2	Provinsi Jawa Timur	101, 96**
3	Nasional	104, 91**

*Data BPS

Secara umum, capaian NTP Perikanan Pemerintah Kabupaten Kediri tahun 2022 dibawah capaian Provinsi Jawa Timur dan capaian Nasional. Dalam capaian NTP Perikanan Provinsi Jawa Timur dan Nasional terdapat dimensi pengukuran pembudidaya laut yang turut serta mendongkrak capaian NTP Perikanan. Sedangkan NTP Perikanan di Kabupaten Kediri tidak terdapat dimensi pengukuran pembudidaya laut, hanya mengukur perikanan budidaya air tawar karena Kabupaten Kediri tidak memiliki wilayah laut.

7) Kesimpulan

Capaian NTP Perikanan pada tahun 2022 ini mencapai 97,62 melebihi target yang telah ditetapkan yakni 95. Hal ini cukup menggembirakan ditengah kondisi yang belum sepenuhnya pulih dari pandemi. Capaian tersebut ditunjang dengan realisasi anggaran sebesar 8.946.980.596,00 dari alokasi anggaran sebesar 9.081.485.516,00.

8) Rencana Tindak Lanjut

Secara umum, Pemerintah Kabupaten Kediri melalui Dinas Perikanan akan tetap menyesuaikan dengan RPJMD, terutama melihat semakin meningkatnya target NTP Perikanan setiap tahunnya. Berdasarkan uraian di atas dapat diketahui bahwa masih terdapat beberapa kendala dalam proses pencapaian target yang telah ditetapkan. Langkah-langkah tindak lanjut yang perlu dilakukan sebagai berikut :

1. Melakukan upaya perbanyakan induk ikan yang berkualitas
2. Meningkatkan kemampuan pembudidaya melalui pelatihan dan bimbingan teknis

3. Terus menggalakkan upaya promosi produk perikanan baik offline maupun online
4. Membentuk asosiasi untuk mempermudah kerjasama antar kelompok dan diluar kelompok dalam hal penyediaan pakan, penjualan produksi maupun permodalan
5. Melaksanakan bimtek mutu dan keamanan pangan bagi kelompok pengolah dan pemasar perikanan (poklahsar)
6. Mengusulkan kepada DKP Jawa Timur agar mendapat fasilitasi sertifikasi keamanan pangan
7. Menggalakkan *Makin Kece Sekali* (Makan Ikan Kediri Cerdas Stunting Tak Ada Lagi)
8. Melaksanakan kegiatan *cooking class* olahan perikanan
9. Lebih menggalakkan kegiatan yang berwawasan agribisnis dengan penguatan kelembagaan pembudidaya ikan sekaligus juga dapat meningkatkan kesadaran pembudidaya ikan untuk meningkatkan efisiensi usaha perikanan
10. Memfasilitasi kelompok dengan Perbankan (Bank Jatim, BRI, Bank Daerah) untuk memperoleh modal dan penguatan modal kelompok
11. Melanjutkan kegiatan yang berkesinambungan dari tahun ke tahun sesuai dengan rencana strategis yang telah ditetapkan

5. Misi 5

Peningkatan Infrastruktur dan Konektivitas antar Wilayah

Gambar 6

Lingkup Misi 5



No	Tujuan	Indikator	Capaian		Target	Realisasi	Keterangan
			2020	2021	2022	2022	
1	Menurunkan kesenjangan pembangunan antar wilayah	Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur	66,19	66,69	66.90	66,82	Dibawah Target

No	Sasaran	Indikator	Capaian		Target	Realisasi	Anggaran	Realisasi Anggaran	Ket
			2020	2021	2022	2022			
1	Meningkatnya sarana infrastruktur daerah	Proporsi Panjang jaringan jalan Kabupaten dalam kondisi baik	86,94	88,63	88,17%	87,99%	109.526. 588.022	100.032 .108.039	Dibawah Target
		Persentase jaringan irigasi dalam kondisi baik	73,24	76,61	77,12%	74,68%	19.185. 220.174	17.273. 256.795	Dibawah Target
		Cakupan penyelesaian Peraturan Tata Ruang	**	**	62,5%	50%	2.235. 084.400	1.572. 044.821	Dibawah Target
		Cakupan desa atau kelurahan yang telah mendapatkan layanan air minum	83,22%	84,89%	78,28%	85,23%	6.282. 966.300	5.941. 065.156	Melebihi Target
		Persentase	**	15,22%	16,48%	29,95%	13.312.	13.306.	Melebihi

		Rumah Layak Huni					796.450	280.110	Target
2	Meningkatnya Pelayanan Transportasi Daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap unit pelayanan perhubungan	83,82	84,15	65	86	18.406. 480.705	18.035. 307.042	Melebihi Target

a. Urusan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Infrastruktur atau prasarana adalah seluruh struktur dan juga fasilitas dasar, baik itu fisik maupun sosial seperti bangunan, pasokan listrik, irigasi, jalan, jembatan dan lain sebagainya. Infrastruktur fisik dan sosial dapat didefinisikan sebagai kebutuhan dasar fisik pengorganisasian sistem struktur yang diperlukan untuk jaminan ekonomi sektor publik dan sektor privat, sebagai layanan dan fasilitas yang diperlukan agar perekonomian dapat berjalan dengan optimal.

Istilah ini umumnya merujuk kepada hal infrastruktur teknis atau fisik yang mendukung jaringan struktur seperti fasilitas antara lain dapat berupa jalan, jembatan, irigasi dan infrastruktur lain yang menjadi tanggung-jawab Pemerintah Kabupaten/Kota. Peningkatan Infrastuktur ini juga mempengaruhi produksi, inflasi, dan investasi.

Menurut Kementerian PUPR infrastruktur memegang peranan penting sebagai salah satu roda penggerak pertumbuhan ekonomi. Oleh karena demikian pembangunan sektor ini menjadi fondasi dari pembangunan ekonomi selanjutnya. Sebagaimana dalam beberapa dekade terakhir ditengarai pembangunan ekonomi Indonesia tertinggal akibat lemahnya pembangunan infrastruktur.

Merujuk kajian dari Kementerian PUPR dijelaskan terdapat empat prinsip pembangunan infrastruktur yakni:

1. mengadopsi kondisi lingkungan & budaya lokal.
2. memperhatikan daya dukung lingkungan & pelestarian (preservasi) sumber daya.
3. optimalisasi Sumberdaya Manusia & Sumberdaya Alam setempat untuk menjaga keanekaragaman hayati (biodiversity).

4. optimalisasi partisipasi masyarakat serta mendorong adaptasi inovasi teknologi.

Kementerian PUPR menjelaskan bahwa pembangunan infrastruktur juga berperan untuk menjamin kelancaran distribusi pangan, bahan pokok, dan bahan-bahan ekonomis lainnya melalui pembangunan jalan, pembangunan jembatan, dan pengairan (irigasi).

Upaya Pemerintah Kabupaten Kediri dalam meningkatkan sarana infrastuktur. Upaya ini baik secara langsung atau secara tidak langsung harus ditunjang dengan hal-hal yang ada disekitarnya. Pemerintah Kabupaten Kediri melihat peningkatan sarana infrastruktur daerah adalah hal yang wajib untuk diperhatikan.

1) Permasalahan dan Tantangan

Terdapat dua hal yang menjadi dasar infrastruktur yang menunjang perekonomian di Kabupaten Kediri. Infrastruktur prasarana jalan dan jembatan, serta infrastruktur prasarana irigasi yang menunjang kebutuhan irigasi pertanian. Secara umum permasalahan Pemerintah Kabupaten Kediri dalam meningkatkan sarana infrastruktur daerah telah diidentifikasikan sebagai berikut:

1. Tingginya tingkat laju sedimentasi di sungai akibat erosi lahan budidaya telah menyebabkan kapasitas alir sungai menjadi berkurang yang menimbulkan potensi terjadinya banjir karena menurunnya volume tampungan sungai.
2. Maraknya kegiatan penambangan di ruang sungai telah menyebabkan degradasi dasar sungai, terganggunya morfologi sungai, longsornya tebing sungai yang mengancam sentra-sentra produksi pangan, kawasan permukiman dan fasilitas umum terbangun.
3. Belum optimalnya peran serta masyarakat dan masih lemahnya kesadaran masyarakat dalam upaya kepedulian lingkungan tempat tinggal mereka, hal ini ditunjukkan dengan sangat banyaknya badan sungai yang digunakan sebagai tempat dan buangan sampah serta masih tingginya air limbah rumah tangga yang belum ditreatment yang langsung dibuang mengalir ke sungai.
4. Belum optimalnya pengguna jalan dalam pemanfaatan jalan yaitu dengan melewati jalan Kabupaten melebihi tonase jalan yang yang telah ditetapkan, yang bisa memungkinkan memperpanjang jalan yang rusak. Untuk menanggulangi masalah tersebut dilakukan dengan pemeliharaan rutin dan berkala jalan, serta survey kondisi jalan.

5. Masih terbatasnya jalan trotoar dan belum ada jalur sepeda. Upaya yang dilakukan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kediri adalah dengan melakukan Survey Lalu Lintas Harian Rata-rata (LHR) yang bisa bisa menjadi dasar kajian kelayakan pada pengembangan jalan dan Infrastruktur pendukungnya.
6. Peraturan Tata Ruang yang sering mengalami Perubahan, yang pada Tahun ini khususnya Rencana Tata Ruang Wilayah belum bisa disosialisasikan karena masih dalam Proses pembahasan di DPRD Kabupaten Kediri, kedepan setelah disetujui DPRD adalah adanya Aplikasi SIMTARU yang bisa diakses oleh semua masyarakat.
7. Belum ada Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Tata Ruang.
8. Kurangnya sinkronisasi dan basis data tata ruang.

2) Pelaksanaan Program dan Kegiatan

Melihat kompleksnya permasalahan terkait infrastruktur di Kabupaten Kediri, Pemerintah Kabupaten Kediri melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang telah menyusun rencana dan upaya pencapaian peningkatan dengan upaya dibawah ini:

1. Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA) dengan kegiatan Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS), Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya dibawah 1000 Ha.
2. Penyelenggaraan Jalan dengan kegiatan Penyelenggaraan Jalan Kabupaten.
3. Penataan Ruang dengan kegiatan Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten dan Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan, Pemanfaatan, dan Pengendalian Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota.

Dengan strategi yang telah ditetapkan adalah pembangunan jalan beserta sarana pelengkap untuk mewujudkan konektivitas antar wilayah dan meningkatkan produktifitas masyarakat, pembangunan infrastruktur sumber daya air dalam menunjan pertanian, serta pemanfaatan ruang sesuai dengan peruntukannya dengan RDTR sebagai panduan Perda RTRW.

Capaian pada tahun 2022 ini secara umum masih berada dibawah target tahun 2022. Seperti proporsi jaringan jalan yang baik mencapai 87,99 % masih berada dibawah target yakni 88,17%. Hal lainnya seperti persentase panjang jaringan irigasi dalam kondisi baik

dengan capaian 74,68% masih berada dibawah target yakni 77,12%. Cakupan penyelesaian Peraturan Tata Ruang tahun 2022 ini selesai dengan capaian 50% dibawah target yang telah ditetapkan yakni 62,5%.

Dengan penjelasan diatas, perkembangan urusan pekerjaan umum dan tata ruang Pemerintah Kabupaten Kediri belum dapat memenuhi target. Namun demikian, usaha yang maksimal Dinas PUPR dengan OPD terkait pada tahun 2022 masih ditemui cukup banyak kendala dan hambatan. Terutama yang berdampak langsung terhadap upaya pencapaian target urusan pekerjaan umum dan penataan ruang di Kabupaten Kediri.

3) Analisa Kinerja Efisiensi dan Capaian RPJMD

Indikator	Capaian 2020	Capaian 2021	Target 2022	Capaian 2022	Persentase Capaian	Anggaran	Realisasi Anggaran	Persentase Realisasi
Proporsi Panjang Jaringan Jalan dalam Kondisi Baik	**86,94**	**88,63**	**88,17%**	**87,99%**	**99,79%**	**82.712.842.305,00**	**74.839.984.392,00**	**90,48%**
Persentase Jaringan Irigasi dalam Kondisi Baik	**73,24**	**76,61**	**77,12%**	**74,68%**	**96,83%**	**19.185.220.174,00**	**17.273.256.795,00**	**90,03%**
Cakupan Penyelesaian Tata Ruang	**-**	**-**	**62,50%**	**50%**	**80,00%**	**2.235.084.400,00**	**1.572.044.821,00**	**70,33%**

Indikator	Persentase Capaian	Persentase Realisasi Anggaran	Formula Perhitungan	Hasil Analisa Efisiensi	Keterangan
Persentase Jaringan Irigasi dalam Kondisi Baik	**96,83%**	**90,03%**	**96,83-90,03**	**6,8**	**Efisien**
Proposi Panjang Jalan dalam Kondisi Baik	**99,79%**	**90,48%**	**99,79-90,48**	**9,31**	**Efisien**
Cakupan Penyelesaian Peraturan Tata Ruang	**80,00%**	**70,33%**	**80,00-70,33**	**9,67**	**Efisien**

Indikator	Capaian Tahun 2022	Target Tahun 2022	Hasil Akhir RPJMD	Persentase Capaian dan RPJMD	Keterangan
Proporsi Panjang Jaringan Jalan dalam Kondisi Baik	**99,79%**	**90,48%**	**99,79-90,48**	**9,31**	**Dibawah Jalur Perencanaan**
Persentase Jaringan Irigasi dalam Kondisi Baik	**96,83%**	**90,03%**	**96,83-90,03**	**6,8**	**Dibawah Jalur Perencanaan**
Cakupan Penyelesaian Peraturan Tata Ruang	**50%**	**62,5%**	**71,42%**	**50/71,42x100=70,01**	**Dibawah Jalur Perencanaan**

4) Analisa Faktor Penunjang

Pekerjaan umum yang dilaksanakan pada tahun 2022 ini berfokus pada aspek-aspek lokasi yang memiliki perhatian tinggi masyarakat dan penunjang Proyek Strategis Nasional. Seperti contohnya Pembangunan jalan akses Bandara antara lain : Ruas jalan Banyakan-Tiron, ruas jalan Grogol-Tiron , pembangunan jembatan penghubung Kediri-Tulungagung di Kecamatan Mojo, pembebasan lahan untuk jembatan (eks Jembatan Mrican) serta tempat-tempat lainnya yang terfokus pada lokasi-lokasi yang mendapat perhatian masyarakat.

Sebagaimana hal tersebut, Pemerintah Kabupaten Kediri senantiasa berupaya untuk melaksanakan pekerjaan sesuai dengan rencana yang ditetapkan sejak awal. Komitmen yang tinggi menyebabkan proses-proses pelaksanaan berjalan dengan optimal.

5) Analisa Faktor Penghambat

Faktor cuaca yang tidak menentu dengan intensitas curah hujan yang meningkat pada tahun 2022 ini menyebabkan pelaksanaan kegiatan pekerjaan umum di Kabupaten Kediri menjadi terhambat. Guna menjaga kualitas fisik dari pembangunan jalan, jembatan dan talud, pekerjaan harus dihentikan ketika hujan turun. Namun demikian, intensitas curah hujan yang tinggi menyebabkan pelaksanaan kegiatan tidak dapat dilaksanakan tepat waktu sesuai perencanaan.

Perkembangan pelaksanaan perencanaan dalam pekerjaan umum dan penataan ruang di Kabupaten Kediri harus menunggu beberapa hal yang menjadi persyaratan pelaksanaan pembangunan. Seperti adanya progress Penyelesaian Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Banyakan-Grogol memerlukan waktu yang cukup lama. Hal

tersebut terjadi dikarenakan adanya Perubahan peraturan penyusunan RDTR dan substansi yang melibatkan banyak sektor.

Penyesuaian-penyesuaian lanjutan terkait Lahan Sawah Dilindungi (LSD) baik dari segi aturan dan regulasi yang terbaru, terutama regulasi dari pemerintah pusat. Selain itu, sinkronisasi data pertanahan dengan Kementerian ATR/BPN sedang menunggu rapat koordinasi lintas sektoral dari Kementerian ATR/BPN terhadap RTRW Kabupaten Kediri.

6) Kesimpulan

Kinerja DPUPR pada Tahun 2022 ini telah menunjukkan perkembangan yang cukup baik. Pengerjaan peningkatan kualitas di berbagai tempat menyebabkan upaya Pemerintah Kabupaten Kediri dalam upaya mencapai target yang telah ditetapkan masih belum dapat tercapai. Namun demikian, upaya untuk meningkatkan kualitas jalan, jembatan, dan irigasi di Kabupaten Kediri telah terlaksana dengan baik terutama dengan berkurangnya keluhan masyarakat mengenai terutama pada kerusakan infrastruktur jalan , jembatan dan irigasi.

7) Rencana Tindak Lanjut

Melihat perkembangan kinerja pekerjaan umum dan penataan ruang yang terkendala dalam urusan penyusunan regulasi maupun cuaca. Melihat hal tersebut, tentu perkembangan kedepannya selain tetap berpegang pada perencanaan juga mengupayakan untuk mengurangi resiko pelaksanaan baik dari sisi cuaca ataupun dalam penyusunan regulasi yang memakan waktu relatif lama.

b. Urusan Perumahan dan Kawasan Pemukiman

Sesuai dengan Undang-undang No. 1 tahun 2011 tentang Perumahan dan Permukiman:

1. Rumah adalah bangunan gedung yang berfungsi sebagai tempat tinggal yang layak huni, sarana pembinaan keluarga, cerminan harkat dan martabat penghuninya, serta aset bagi pemiliknya.
2. Perumahan adalah kumpulan rumah sebagai bagian dari permukiman, baik perkotaan maupun perdesaan, yang dilengkapi dengan prasarana, sarana, dan utilitas umum sebagai hasil upaya pemenuhan rumah yang layak huni.

3. Prasarana adalah kelengkapan dasar fisik lingkungan hunian yang memenuhi standar tertentu untuk kebutuhan bertempat tinggal yang layak, sehat, aman, dan nyaman.
4. Sarana adalah fasilitas dalam lingkungan hunian yang berfungsi untuk mendukung penyelenggaraan dan pengembangan kehidupan sosial, budaya, dan ekonomi.

Kementerian PUPR melalui Direktorat Jenderal Cipta Karya telah menjelaskan bahwa pembangunan perumahan membutuhkan kerja sama yang baik antara pemerintah pusat, pemerintah daerah serta sektor swasta. Penyediaan perumahan yang aman, terjangkau, dan layak bagi kesehatan serta kesejahteraan untuk seluruh elemen masyarakat merupakan agenda penting pemerintah Indonesia.

Hal tersebut sejalan dengan *Sustainable Development Goals* (SDGs) ke-11 yaitu membangun kota dan permukiman yang inklusif, aman, tangguh, dan berkelanjutan. Selain itu, beriringan pula dengan *The New Urban Agenda* yang menyebutkan *inclusive housing* sebagai salah satu elemen dalam membangun kota berkelanjutan.

Perumahan membutuhkan prasarana lingkungan yaitu kelengkapan dasar fisik lingkungan, misalnya penyediaan air minum, pembuangan sampah, listrik, telepon, jalan, yang memungkinkan lingkungan pemukiman berfungsi sebagaimana mestinya. Sarana lingkungan lainnya yaitu fasilitas penunjang yang berfungsi untuk penyelenggaraan serta pengembangan kehidupan ekonomi, sosial dan budaya, seperti fasilitas taman bermain, olah raga, pendidikan, pertokoan, sarana perhubungan, keamanan, serta fasilitas umum lainnya.

Prasarana lingkungan pemukiman adalah kelengkapan dasar fisik lingkungan yang memungkinkan lingkungan pemukiman dapat berfungsi sebagaimana mestinya. Prasarana utama meliputi jaringan jalan, jaringan pembuangan air limbah dan sampah, jaringan pematusan air hujan, jaringan pengadaan air bersih, jaringan listrik, telepon, gas, dan sebagainya.

Upaya Pemerintah Kabupaten Kediri dalam meningkatkan kualitas perumahan di Kabupaten Kediri. Upaya ini baik secara langsung atau secara tidak langsung harus ditunjang dengan hal-hal yang ada disekitarnya. Pemerintah Kabupaten Kediri melihat peningkatan kualitas perumahan dan kawasan pemukiman menjadi hal yang wajib untuk diperhatikan.

1) Pelaksanaan Program dan Kegiatan

Terdapat beberapa hal dasar infrastruktur yang menunjang kenyamanan pemukiman di Kabupaten Kediri. Infrastruktur penunjang perumahan dan kawasan pemukiman, serta infrastruktur prasarana lainnya yang menunjang kebutuhan kawasan pemukiman. Secara umum permasalahan Pemerintah Kabupaten Kediri dalam meningkatkan kualitas perumahan dan kawasan pemukiman daerah telah diidentifikasikan sebagai berikut:

1. Perlunya monitoring berbagai pihak dalam perwujudan pembangunan dapat berjalan sesuai dengan arahan dan keterpaduan antar stakeholders;
2. Belum optimalnya sinergi antara perumusan dan pelaksanaan kebijakan pembangunan perumahan dan permukiman;
3. Belum optimalnya integrasi pengembangan perumahan dan kawasan permukiman dengan pembangunan prasarana, sarana dan utilitas (PSU) perumahan dan permukiman;
4. Belum optimalnya penanganan Rumah tidak layak huni dan terjangkau;
5. Menurunnya kualitas permukiman sehingga timbul kawasan kumuh di perkotaan;
6. Belum optimalnya jumlah rumah tangga yang belum memiliki akses layanan sumber air minum layak dan berkelanjutan;
7. Belum optimalnya jumlah rumah tangga yang belum memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak dan berkelanjutan;
8. Perlunya peningkatan Pengelolaan Sumber Daya Air, serta Pemerataan terhadap Akses Layanan Air Minum dan Sanitasi Layak;
9. Perlunya peningkatan kelurahan/desa yang memiliki Sanitasi Total Berbasis Masyarakat;
10. Perlunya peningkatan kelurahan/desa yang melakukan gerakan Stop Buang Air Besar Sembarangan;
11. Belum adanya data dasar bidang perumahan dan permukiman serta pertanahan;
12. Rendahnya database pertanahan;
13. Terjadinya Konflik Pertanahan;
14. Belum optimalnya pembangunan dan pemeliharaan Penerangan Jalan Umum (PJU).

Selain hal diatas, diidentifikasikan pula masalah-masalah strategis yang berpotensi menghambat pelaksanaan program dan kegiatan:

1. Degradasi kualitas lingkungan (sanitasi dan air) pada kawasan dengan kondisi rumah tidak layak huni dapat menjadi isu utama menuju Kediri Bebas Kumuh;
2. Kurangnya pemahaman masyarakat terkait pengelolaan air minum;
3. Belum terbangunnya sistem informasi sarana dan prasarana dasar permukiman danpengelolaan air minum; dan
4. Belum terbangunnya sistem informasi atau database pertanahan.

2) Pelaksanaan Program dan Kegaiatan

Dengan kompleksnya permasalahan diatas, Pemerintah Kabupaten Kediri melalui Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman telah merencanakan beberapa program dan kegiatan dalam upaya meningkatkan kualitas perumahan di Kabupaten Kediri.

1. Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum
2. Kawasan Permukiman
3. Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional
4. Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah
5. Penataan Bangunan Gedung
6. Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)
7. Penyelesaian Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan
8. Redistribusi Tanah, dan Ganti Kerugian Program Tanah Kelebihan Maksimum

Melihat dari hal tersebut, indikator yang ditetapkan adalah Cakupan Desa/Kelurahan yang telah mendapatkan layanan air minum dan persentase rumah layak huni. Capaian pada tahun 2022 ini, Cakupan Desa/Kelurahan yang telah mendapatkan layanan air minum adalah 85,23% melebihi target yang telah ditetapkan yakni 78,28%. Capaian persentase rumah layak huni pada tahun 2022 ini adalah 29,95 melebihi target yang telah ditetapkan yakni 16,48%.

3) Faktor Pendukung

Tidak dapat dipungkiri bahwa faktor-faktor pendukung dari pelaksanaan program kegiatan tersebut adalah Adanya dukungan dan sinkronisasi yang baik antara stakeholder pengguna air minum sehingga target sasaran bisa tercapai. Luasnya wilayah Kabupaten Kediri sehingga masih ada desa-desa yang belum tertangani. Selain itu pula, Adanya dukungan dan sinkronisasi yang baik antara stakeholder pengguna air minum sehingga target sasaran bisa tercapai.

4) Faktor Penghambat

Tidak dapat dipungkiri bahwa permaslahan yang masih didapati oleh Pemerintah Kabupaten Kediri ada pada lokasi geografis. Luasnya wilayah Kabupaten Kediri sehingga masih ada desa-desa yang belum tertangani, baik persentase perumahan layak huni dan cakupan layanan air minum masih belum dapat menjangkau daerah-daerah yang berada di tempat-tempat yang tersebar.

5) Analisa Kinerja Efisiensi dan Capaian RPJMD

Indikator	Capaian 2020	Capaian 2021	Target 2022	Capaian 2022	Persentase Capaian	Anggaran	Realisasi Anggaran	Persentase Realisasi
Cakupan Desa/Kelurahan yang telah mendapatkan layanan air minum	**83,22%**	**84,89%**	**78,28%**	**85,23%**	**108,87%**	**6.282. 966.300,00**	**5.941. 065.156,00**	**94,56%**
Persentase Rumah Layak Huni	**-**	**15,22%**	**16,48%**	**29,95%**	**181,72%**	**13.312. 796.450,00**	**13.306. 280.100,00**	**99,95%**

Indikator	Persentase Capaian	Persentase Realisasi Anggaran	Formula Perhitungan	Hasil Analisa Efisiensi	Keterangan
Cakupan Desa/Kelurahan yang telah mendapatkan layanan air minum	**108,87%**	**94,56%**	**108,87%-94,56%**	**14,31**	**Efisien**
Persentase Rumah Layak Huni	**181,72%**	**99,95%**	**181,72%-99,95%**	**81,77**	**Efisien**

Indikator	Capaian Tahun 2022	Target Tahun 2022	Hasil Akhir RPJMD	Persentase Capaian RPJMD
Cakupan Desa/Kelurahan yang telah	**85,23%**	**78,28%**	**93,15**	**91%**

mendapatkan layanan air minum				
Persentase Rumah Layak Huni	**29,95%**	**16,48%**	**82,51**	**36%**

6) Kesimpulan

Melihat dari hal diatas capaian pada tahun 2022 ini, Cakupan Desa/Kelurahan yang telah mendapatkan layanan air minum adalah 85,23% melebihi target yang telah ditetapkan yakni 78,28% dengan realisasi anggaran 5.941.065.156,00 dari anggaran yang telah ditetapkan 6.282.966.300,00. Capaian persentase rumah layak huni pada tahun 2022 ini adalah 29,95 melebihi target yang telah ditetapkan yakni 16,48% dari realisasi anggaran 13.306.280.110,00 dari anggaran sebesar 13.312.796.450,00.

7) Rencana Tindak Lanjut

Melihat keseuian pelaksanaan program dan kegiatan Pemerintah Kabupaten Kediri yang masih berjalan di lajur yang sesuai dengan perencanaan, dengan demikian pelaksanaan pembangunan Sistem Pelayanan Air Minum (SPAM) dan perbaikan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) akan semakin dimasifkan di tahun mendatang. Apalagi melihat target pembangunan dua target indikator tersebut yang semakin meningkat.

d. Meningkatnya Pelayanan Transportasi Daerah

Transportasi telah menjadi kebutuhan dasar masyarakat oleh karenanya kesinambungan ketersediaan pelayanan jasa transportasi dalam memenuhi kebutuhan aktivitas produksi, konsumsi dan distribusi harus mendapat perhatian secara berkelanjutan.

Menurut Kementerian Perhubungan, transportasi pribadi maupun transportasi umum sudah menjadi kebutuhan utama bagi masyarakat. Perkembangan transportasi yang cepat ini seyogyanya beriringan dengan peningkatan pelayanan transportasi. Hal ini membuat masyarakat desa mengalami kesulitan dalam mengakses layanan-layanan transportasi.

Transportasi dewasa ini menjadi hal yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan sehari-hari, ekspektasi dan tuntutan masyarakat untuk menyelenggarakan pelayanan transportasi daerah semakin tinggi. Tuntutan terkait pengembangan dan peningkatan kualitas pelayanan transportasi daerah di Kabupaten Kediri semakin tinggi.

Upaya Pemerintah Kabupaten Kediri dalam meningkatkan sarana infrastuktur. Upaya ini baik secara langsung atau secara tidak langsung harus ditunjang dengan hal-hal yang ada disekitarnya. Pemerintah Kabupaten Kediri melihat peningkatan sarana infrastruktur daerah adalah hal yang wajib untuk diperhatikan.

1) Permasalahan dan Tantangan

Terdapat dua hal yang menjadi dasar infrastruktur yang menunjang perekonomian di Kabupaten Kediri. Infrastruktur prasarana jalan dan jembatan, serta infrastruktur prasarana irigasi yang menunjang kebutuhan irigasi pertanian. Secara umum permasalahan Pemerintah Kabupaten Kediri dalam meningkatkan sarana infrastruktur daerah telah diidentifikasikan sebagai berikut:

1. Kabupaten Kediri belum memiliki area / kawasan tertib lalu lintas yang sesuai dengan kualifikasi Penghargaan Wahana Tata Nugraha, dan belum ada taman lalu lintas.
2. Minat Masyarakat menggunakan angkutan umum menurun.
3. Potensi pasir yang masih besar di wilayah Kab Kediri dan ketidakdisiplinan sopir angkutan pasir khususnya dari arah Blitar.
4. Jumlah sarana dan prasarana perparkiran masih kurang.
5. Belum memiliki SDM yang berlatar belakang IT dari SDM tenaga teknis bidang Perhubungan.
6. Penanganan masalah dampak lingkungan dari sektor Transportasi belum optimal.
7. Belum memadainya sarana prasarana di perlintasan sebidang.

2) Pelaksanaan Program dan Kegiatan

Melihat kompleksnya permasalahan terkait infrastruktur di Kabupaten Kediri, Pemerintah Kabupaten Kediri melalui Dinas Perhubungan telah menyusun rencana dan upaya pencapaian peningkatan dengan upaya dibawah ini:

1. Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dengan kegiatan Penetapan Rencana INduk Jaringan LLAJ, Penyediaan Perlengkapan Jalan, Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir, Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor, pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu lintas untuk manajemen.

Dengan strategi yang telah ditetapkan adalah pembangunan jalan beserta sarana pelengkap untuk menyusun kajian-kajian terkait penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan, menerapkan dan mengavaluasi rencana aksi, menyediakan sarana dan prasarana

LLAJ sesuai standar keselamtan, meningkatkan kualitas SDM, dan meningkatkan pelayanan publik di bidang perhubungan berbasis komputerisasi.

Dalam pelaksanaan operasionalnya peningkatan saran dan prasarana di UPTD Pengujian kendaraan bermotor (PKB) menjadi lebih nyaman. Selain itu, peningkatan kualitas layanan dan peningkatan kapasistas pegawai telah dilaksanakan dengan baik. Berdasarkan dengan hal tersebut, Dinas Perhubungan berhasil mendapatkan nilai Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Unit Layanan Perhubungan mencapai 86. Selain itu, pengembangan pelayanan secara daring (dalam jaringan) telah dilaksanakan dengan baik. Jauh lebih tinggi daripada target yang telah ditetapkan yakni 65.

3) Analisa Kinerja, Efisiensi, dan Capaian RPJMD

Analisa Kinerja

Indikator	Capaian 2020	Capaian 2021	Target 2022	Capaian 2022	Persentase Capaian	Anggaran	Realisasi Anggaran	Persentase Realisasi
IKM	**83,82**	**84,15%**	**65**	**86**	**132,30%**	**18.406.480.705,00**	**18.035.307.042,00**	**97,98%**

Analisa Efisiensi

Indikator	Persentase Capaian	Persentase Realisasi Anggaran	Formula Perhitungan	Hasil Analisa Efisiensi	Keterangan
IKM	**132,31%**	**99,52%**	**132,31%-99,52%**	**32,79%**	**Efisien**

Capaian Tahun 2022 dibandingkan Hasil Akhir RPJMD

Indikator	Capaian Tahun 2022	Target Tahun 2022	Hasil Akhir RPJMD	Persentase Capaian RPJMD
IKM	**86**	**65**	**85**	**100**

4) Analisa Faktor Pendukung

Peningkatan Saran Prasarana Pelayanan di UPTD PKB dengan pemberian AC, kursi dan beberapa perabotan penunjang lainnya ditambah dengan sistem pengujian yang lebih baik. Capaian kinerja sasaran Dinas Perhubungan Kabupaten Kediri pada tahun 2022 sebesar 100% dari target 65% yang didukung oleh kegiatan Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk jaringan jalan Kabupaten/Kota.

Hal ini terlihat kondisi pelayanan ruas jalan yang baik yang memenuhi persyaratan sebagai berikut;

1. Minimal kondisi jalan berada dalam kondisi cukup baik (VCR= 0,7-0,8)
2. Minimal kondisi hambatan samping pada level rendah;
3. Pemasangan sarana prasarana/rambu-rambu LLAJ di ruas jalan sudah memenuhi kebutuhan yang telah ditentukan.

5) Analisa Faktor Penghambat

Secara umum, seluruh kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan rencana. Hanya saja perbedaan harga antara harga real dengan satuan harga dalam SIPD menyebabkan penyerapan anggaran masih belum dapat berjalan optimal.

6) **Kesimpulan**

Capaian IKM layanan perhubungan telah mencapai 85. Melebihi target yang telah ditetapkan yakni 65. Hal tersebut tentu akan senantiasa ditingkatkan secara simultan untuk lebih baik lagi kedepannya. Dengan melihat capaian akhir RPJMD dengan Indeks Kepuasan Masyarakat layanan perhubungan sebesar 86.

7) Rencana Tindak Lanjut

Melihat ketercapaian target diatas, Pemerintah Kabupaten Kediri melalui Dinas Perhubungan masih merasa perlu untuk menyusun strategi penyerapan anggaran dan pelaksaaan Keterbukaan Informasi Publik, melakukan monitoring dan evaluasi terhadap penyerapan anggaran, perlu adanya penyusunan peraturan terkait pelaksanaan pelayanan public, meningkatkan pengelolaan SDM melalui peningkatan kapasitas pegawai, mensosialisasikan WBS di bidang layanan perhubungan kepada masyarakat, melakukan reviu SOP secara berkala, menindaklanjuti hasil SKM, meningkatkan pelayanan yang berintegritas.

6. Misi 6

Optimalisasi Kepariwisataaan Berbasis Kearifan Lokal

Gambar 7

Lingkup Misi 6



No	Tujuan	Indikator	Capaian		Target	Realisasi	Keterangan
			2020	2021	2022	2022	
1	Meningkatkan daya saing pariwisata daerah	Pertumbuhan PDRB sektor penyediaan akomodasi dan makan minum	0	2,35%	1,41	12,40%	Melebihi Target

No	Sasaran	Indikator	Capaian		Target	Realisasi	Anggaran	Realisasi Anggaran	Keterangan
			2020	2021	2022	2022			
1	Meningkatnya pendapatan daerah dari sektor pariwisata	Pertumbuhan PAD Pariwisata	0%	25,43%	1%	94,59%	2.000. 000.000	2.898. 646.000	Melebihi Target

*Data tahun 2020-2021 kosong disebabkan IDM adalah Indikator Baru dalam RPJMD tahun 2021-2026

a. Optimalisasi Pariwisata Berbasis Seni Budaya Lokal

Adanya pariwisata dengan kearifan lokal tidak hanya menarik wisatawan karena destinasinya saja. Melainkan juga dengan kearifan budaya lokal yang dapat membangkitkan ekonomi sekaligus membuka lapangan kerja. Sebenarnya, Indonesia sudah lama mengembangkan seni budaya dengan kearifan lokal dalam berbagai event dan festival yang dapat menarik wisatawan.

Merujuk Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian dijelaskan bahwa optimalisasi pariwisata sejalan dengan tujuan pembangunan kepariwisataan, Pemerintah mengembangkan desa wisata yang bertujuan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, kesejahteraan rakyat, menghapus kemiskinan, mengatasi pengangguran, melestarikan alam, lingkungan dan sumber daya, serta memajukan kebudayaan.

Meninjau penjelasan dari Kementerian Sekretariat Negara peran strategis pariwisata dalam perekonomian diprediksi akan semakin meningkat pada masa-masa mendatang, karena pariwisata mampu mentransformasi diri ke dalam kelompok industri terbesar dunia (*The World's Largest Industry*), pariwisata akan memainkan peran sentral dalam meningkatkan pendapatan daerah, devisa negara, persentase PDRB dan penciptaan lapangan kerja. Pariwisata dijelaskan sebagai lokomotif perkembangan perekonomian pasca Covid-19 di berbagai tempat di seluruh dunia.

Selain hal diatas, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif juga menjelaskan tentang empat pilar fokus yang perkembangan pariwisata dan ekonomi kreatif. Adapun empat pilar tersebut adalah;

1. Pengelolaan bisnis pariwisata yang berkelanjutan dengan kenyamanan wisatawan,
2. Partisipasi ekonomi masyarakat berkelanjutan jangka panjang,
3. Keberlanjutan budaya yang harus selalu dikembangkan, diadaptasi dengan teknologi dan dijaga,
4. Serta aspek dampak pariwisata terhadap lingkungan.

Tingginya antusias masyarakat akan wisata yang berkualitas menjadi perhatian bagi Pemerintah Kabupaten Kediri. Antusias yang tinggi di masa-masa modern ini akibat munculnya sosial media, menarik perhatian banyak pihak untuk datang dan berwisata pada tempat-tempat tersebut. Oleh karena demikian, Pemerintah Kabupaten Kediri berupaya agar antusiasme masyarakat tersebut tidak menghilang namun dapat dimanfaatkan dengan baik, terutama dapat dimanfaatkan oleh masyarakat di Kabupaten Kediri.

1) Permasalah dan Tantangan

Dalam upaya mengoptimalkan pariwisata berbasis seni budaya lokal di Kabupaten Kediri, Pemerintah Kabupaten Kediri melalui Dinas Pariwisata dan Kebudayaan telah mengidentifikasikan permaslahan dan tantangan sebagai berikut:

1. Masih rendahnya kompetensi SDM kepariwisataan yang ditandai dengan masih minimnya tenaga kerja bersertifikat.
2. Tata kelola daya tarik wisata belum optimal, terutama pada bidang perencanaan, pelaksanaan, monitoring evaluasi, dan upaya perbaikan.
3. Belum diterapkannya digitalisasi pada pengelolaaan obyek wisata dan masih rendahnya kesadaran insan-insan pariwisata terhadap pelestarian lingkungan.
4. Sarana dan prasarana di obyek-obyek wisata perlu ditingkatkan untuk memenuhi kenyamanan dan kepuasan wisatawan.
5. Perlu terciptanya konektivitas antar daya tarik wisata, sebab belum ada transportasi wisata antar Daya Tarik Wisata.
6. Masih minimnya return tourist adalah wisatawan akan terkesan sehingga ingin datang dan datang lagi di Kabupaten Kediri.
7. Perlunya mempromosikan pertumbuhan berkelanjutan, inklusif dan berkelanjutan ekonomi, kesempatan kerja penuh dan produktif dan pekerjaan yang layak untuk semua.
8. Perlunya peningkatan kerjasama kepariwisataan dan kebudayaan untuk peluang investasi yang aman dan kondusif.
9. Masih belum lenyapnya virus Covid-19 di Indonesia yang sewaktu-waktu bias timbul kembali menjadi pandemi dan regulasi PPKM dengan tertutupnya objek wisata.

Kendati dengan permasalahan yang ada diatas tersebut, Pemerintah Kabupaten Kediri melihat ada banyak sekali peluang-peluang yang harus dimanfaatkan, terutama dapat meningkatkan peran pembangunan berbasis kepariwisataan yang memiliki dampak ekonomi, sosial, dan budaya kepada masyarakat sebagai berikut:

1. Meningkatnya angka pertumbuhan leisure (konsumsi berbasis wisata) yang juga menambah potensi pasar pariwisata di Kabupaten Kediri.
2. Besarnya potensi seni budaya daerah dan luasnya daerah pemasaran merupakan peluang untuk berkembangnya kesenian daerah Kabupaten Kediri.
3. Tingginya peran serta masyarakat dalam membangun pariwisata di Kabupaten Kediri.
4. Peningkatan konsep eduwisata di Kampung Inggris, Kecamatan Pare.
5. Besarnya komitmen pimpinan dalam membangun pariwisata berbasis seni budaya di Kabupaten Kediri.

2) Pelaksanaan Program dan Kegiatan

Melihat kompleksnya permasalahan terkait infrastruktur di Kabupaten Kediri, Pemerintah Kabupaten Kediri melalui Dinas Pariwisata dan Kebudayaan telah menyusun rencana dan upaya pencapaian peningkatan dengan upaya dibawah ini:

1. Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata
2. Pemasaran Pariwisata
3. Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
4. Pengembangan Kebudayaan
5. Pengembangan Kesenian Tradisional
6. Pembinaan Sejarah
7. Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya.
8. Pengelolaan Permuseuman.

Dengan penjelasan sebagaimana hal diatas, Pemerintah Kabupaten Kediri melalui Dinas Pariwisata dan Kebudayaan telah menetapkan indikator sasaran yakni pertumbuhan PAD Pariwisata dan cakupan event budaya skala kabupaten. Capaian PAD Pariwisata Tahun 2022 adalah 94,59% melampaui target yang telah ditetapkan yakni 1%. Hal tersebut ditunjang dengan alokasi anggaran sebesar 2.000.000.000,00 dengan realisasi sebesar 2.898.646.000,00.

3) Analisa Kinerja, Efisiensi, dan Capaian RPJMD

Analisa Kinerja

Indikator	Capaian 2020	Capaian 2021	Target 2022	Capaian 2022	Persentase Capaian	Anggaran	Realisasi Anggaran	Persentase Realisasi
PAD Pariwisata	**0%**	**25,43%**	**1%**	**94,59%**	**9459,00%**	**2.000.000.000**	**2.898.646.000**	**144,93%**

Analisa Efisiensi

Indikator	Persentase Capaian	Persentase Realisasi Anggaran	Formula Perhitungan	Hasil Analisa Efisiensi	Keterangan
PAD Pariwisata	**9459,00%**	**144,93%**	**9459,00%-144,93%**	**9.314%**	**Efisien**

Capaian Tahun 2022 dibandingkan Hasil Akhir RPJMD

Indikator	Target Tahun 2022	Capaian Tahun 2022	Target Akhir RPJMD	Persentase Capaian dan RPJMD
PAD Pariwisata	**1%**	**94,59%**	**9%**	**1.051%**

4) Analisa Faktor Pendukung

Fasilitas penunjang kenyamanan wisatawan di objek-objek wisata daerah semakin menarik perhatian para wisatawan, hal tersebut secara langsung meningkatkan kenyamanan wisatawan di objek-objek wisata tersebut. Selain itu pula, diakhirinya status darurat Covid-19 dan dibukanya objek wisata Simpang Lima Gumul (SLG), Gunung Kelud, dan Gunung Wilis secara langsung menambah kunjungan wisata.

5) Analisa Faktor Penghambat

Secara umum, seluruh kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan rencana. Namun status darurat Covid-19 bisa diberlakukan kembali jika virus Covid-19 tidak terkendali, sehingga kunjungan wisata yang direncanakan akan mengalami penurunan yang tinggi.

6) **Kesimpulan**

Capaian pertumbuhan PAD Pariwisata mencapai 94,59%, melebihi target yang telah ditetapkan yakni 1%. Hal tersebut ditunjang dengan alokasi anggaran sebesar 2.000.000.000,00 dengan realisasi aggaran sebesar 2.898.646.000,00.

Dengan capaian tersebut tentu akan senantiasa ditingkatkan secara simultan untuk lebih baik lagi kedepannya. Dengan melihat capaian akhir RPJMD dengan melihat target akhir pertumbuhan PAD Pariwisata mencapai 9%. Kendati demikian, pertumbuhan pada beberapa tahun kedepan akan mengalami kenormalan sama halnya seperti pra-Covid-19.

7) Rencana Tindak Lanjut

Melihat ketercapaian target diatas, Pemerintah Kabupaten Kediri melalui Dinas Pariwisata dan Kebudayaan masih merasa perlu untuk meningkatkan peran pariwisata di Kabupaten Kediri, terutama dengan semakin meningkatnya target pertumbuhan pada tahun depan, yang mana memiliki peningkatan yang cukup optimal.

7. Misi 7

Optimalisasi Tata Kelola Lingkungan Hidup, Sumberdaya Alam dan Mitigasi Bencana

Gambar 8

Lingkup Misi 7



No	Tujuan	Indikator	Capaian		Target	Realisasi	Keterangan
			2020	2021	2022	2022	
1	Meningkatkan kualitas lingkungan hidup dan kelestarian sumber daya alam	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Kabupaten	*	*	53	64.79	Melebihi Target

No	Sasaran	Indikator	Capaian		Target	Realisasi	Anggaran	Realisasi Anggaran	Keterangan
			2020	2021	2022	2022			
1	Meningkatnya kualitas lingkungan	IKA	63,10	62,8	62,77	62,22	24.595. 969.625	23.613. 748.225	Dibawah Target
		IKU	77,3	76,6	77,5	80,94			Melebihi Target
		IKL	37,4	37,3	37,42	39,34			Melebihi Target
2	Meningkatnya sinergitas antar pemerintah, masyarakat dan swasta dalam penanggulangan bencana	Indeks Resiko Bencana	131,5	121, 4	75	112,47	7.708. 567.250	6.103. 422.660	Melebihi Target

*Data tahun 2020-2021 kosong disebabkan IDM adalah Indikator Baru dalam RPJMD tahun 2021-2026

a. Meningkatnya Kualitas lingkungan

Sesuai dengan Undang-Undang No.23 Tahun 1997, lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang memengaruhi kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain.

Merujuk Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, lingkungan yang lestari penting untuk keberlangsungan hidup manusia dan generasi selanjutnya. Agar tetap mendapatkan hidup layak, salah satu yang harus diupayakan generasi kini yakni merawat lingkungan dalam kaitannya dengan perubahan iklim. Utamanya dalam upaya pengendalian perubahan iklim. Untuk urusan penanganan isu perubahan iklim, tergambar salah satunya pada inisiasi pemerintah.

Menurut Perserikatan Bangsa-Bangsa, lingkungan keberlanjutan adalah kondisi lingkungan ideal yang dapat menunjang pembangunan berkelanjutan. Dalam perkembagannya, tersebut tidak dapat dilaksanakan oleh satu institusi saja, hal tersebut melibatkan hukum internasional dan nasional, perencanaan kota dan transportasi, gaya hidup lokal dan individual, serta konsumerisme etis. Cara hidup yang lestari dapat dilakukan dengan menyesuaikan gaya hidup individu dengan melestarikan sumber daya alam.

Keinginan masyarakat Kabupaten Kediri untuk menghasilkan kualitas lingkungan yang baik terus menerus diupayakan. Hal tersebut selain digunakan untuk kenyamanan masyarakat, digunakan pula untuk menunjang indikator-indikator yang lain seperti usia harapan hidup, produktivitas pertanian, kualitas air minum dsb. Oleh karena demikian, Pemerintah Kabupaten Kediri mengupayakan peningkatan kualitas lingkungan di Kabupaten Kediri.

1) Permasalahan dan Tantangan

Dalam upaya meningkatkan kualitas lingkungan di Kabupaten Kediri, Pemerintah Kabupaten Kediri melalui Dinas Lingkungan Hidup telah mengidentifikasikan permaslahan dan tantangan peningkatan kualitas lingkungan sebagai berikut:

1. Masih adanya masyarakat yang membuang limbah domestik dan Perusahaan yang membuang limbah kedalam badan sungai, hal tersebut belum dapat ditindaklanjuti dikarenakan belum adanya pejabat pengawas lingkungan hidup daerah.
2. Jumlah kendaraan dan peningkatan genset perusahaan yang semakin tinggi dan meningkatkan jumlah emisi udara.
3. Penerapan sanksi administrasi belum dapat dilaksanakan secara optimal karena adanya opsi pembinaan bagi perusahaan.
4. Masyarakat masih kurang peduli apabila terjadi pencemaran lingkungan di sekitarnya sehingga tidak melapor, hal tersebut juga dikarenakan belum adanya pegawai pengawas lingkungan hidup yang dapat secara *proaktif* memantau kualitas dan pencemaran lingkungan di masyarakat.
5. Belum optimalnya integrasi data terhadap RTRW, Analisis Dampak Lingkungan (AMDAL), Andalalin, IMB (Izin Mendirikan Bangunan), TDUP, dsb.
6. Selama 10 tahun Kabupaten Kediri belum mendapatkan piagam Adipura diakibatkan kurangnya kolaborasi antar *stakeholder*, dimana selama ini pemahaman yang berkembang adalah Adipura menjadi tanggung-jawab Dinas Lingkungan Hidup saja.
7. Hal yang sama juga terjadi pada piagam Adiwiyata, dimana masih tingginya pemahaman dari tenaga kependidikan yang melihat adiwiyata sebagai program tambahan yang merepotkan dan mengganggu rutinitas belajar-mengajar.
8. Pengelolaan taman kota dibebankan pada Dinas Lingkungan Hidup dengan personil yang terbatas. Perlunya kesadaran masyarakat akan kelestarian dan kebersihan taman lingkungan adalah tanggung-jawab bersama.
9. Masih tumpang-tindihnya kewenangan SOP dan Proses Bisnis dalam penebangan pohon, terutama dari institusi eksternal seperti PLN, PT Telkom, dsb. Padahal, angka permohonan penebangan pohon semakin meningkat akhir-akhir ini.
10. Belum optimalnya sistem pengelolaan sampah dikarenakan belum optimalnya OPD kewilayahan dalam melakukan pembinaan dan pengelolaan bersama.
11. Laboratorium Lingkungan Hidup yang masih belum dapat digunakan secara optimal baik dari SDM maupun kelaikan peralatan

2) Pelaksanaan Program dan Kegiatan

Dalam upaya melaksanakan peningkatan kualitas lingkungan di Kabupaten Kediri, Pemerintah Kabupaten Kediri melalui Dinas Lingkungan Hidup tengah merencanakan program dan kegiatan sebagai berikut:

1. Pengendalian Pencemaran dan/atau kerusakan Lingkungan Hidup.
2. Pengendalian Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) Dan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (Limbah B3).
3. Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH).
4. Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup.
5. Pengelolaan Persampahan.
6. Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI).

Dalam pelaksanaannya, Pemerintah Kabupaten Kediri melalui Dinas Lingkungan Hidup mendapatkan nilai Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) sebesar 64,72 lebih tinggi dari target yang sudah ditetapkan yakni 53. Disamping itu, capaian Indeks Kualitas Air juga mendapatkan capaian 62,22 atau dibawah target yang sudah ditetapkan yakni 66,77, capaian Indeks Kualitas Udara mendapatkan 80,94 melampaui target yang telah ditetapkan yakni 77,5, capaian Indeks Kualitas Lahan sebesar 39,94 melampaui target yang telah ditetapkan yakni 37,45. Capaian tersebut ditunjang dengan realisasi anggaran 23.613.748.225 dari anggaran yang ditetapkan sebesar 24.595.969.625,00.

3) Faktor Penunjang

Secara umum, faktor-faktor penunjang pengupayaan peningkatan lingkungan hidup di Kabupaten Kediri adalah dengan kuatnya kolaborasi dan sinergi antar sektor, baik itu sektor pemerintahan, sektor swasta, lapisan masyarakat, sekolahan, serta sektor-sektor lainnya yang mendukung pengupayaan peningkatan kualitas lingkungan di Kabupaten Kediri. Selain itu, kuatnya dukungan masyarakat terutama dari lapisan LSM pecinta alam dan lingkungan dalam ikut serta mendukung melalui kegiatan-kegiatan penghijauan, menanam pohon di pekarangan, dsb.

Upaya perbaikan kualitas udara dan peningkatan vegetasi melalui kegiatan penanaman pohon kakija, selain itu pula peningkatan Ruang Terbuka Hijau Kawasan Perkotaan (RTHKP) dan pengawasan konservasi sera pengawasan dan penataan industri

yang dilaksanakan dengan optimal pada tahun 2022 ini. Hal tersebut menunjang meningkatnya kenaikan kualitas udara dengan peningkatan vegetasi baik di kawasan perkotaan melalui kegiatan penanaman kakija, peningkatan RTHKP dan kegiatan konservasi.

4) Faktor Penghambat

Secara umum pula, hambatan-hambatan dalam pelaksanaan pengupayaan peningkatan lingkungan hidup di Kabupaten Kediri terbatas pada kurangnya kesepahaman dan perbedaan persepsi dalam pelaksanaan kegiatan. Namun demikian, permasalahan-permasalahan tersebut dapat ditindaklanjuti dengan baik dan dapat melanjutkan kinerja sesuai dengan apa yang direncanakan. Penurunan hasil Indeks Kualitas Air (IKA) dikarenakan adanya keterbatasan pengawasan terhadap industri, terutama industri kecil.

5) Analisa Kinerja Efisiensi dan Capaian RPJMD

Indikator	Capaian 2020	Capaian 2021	Target 2022	Capaian 2022	Persentase Capaian	Anggaran	Realisasi Anggaran	Persentase Realisasi
IKA	**62,67**	**62,77**	**62.77**	**62.22**	**99.12%**	**24.595.969.625,00**	**23.613.748.225,00**	**96%**
IKU	**77,38**	**76,68**	**77.50**	**80.94**	**104.43%**			
IKL	**37,42**	**37,34**	**37.42**	**39.34**	**105.13%**			

Indikator	Persentase Capaian	Persentase Realisasi Anggaran	Formula Perhitungan	Hasil Analisa Efisiensi	Keterangan
IKA	**99.1%**	**96%**	**99.1%-96%**	**3,1**	**Efisien**
IKU	**104.43%**	**96%**	**99.1%-96%**	**8,6**	**Efisien**
IKL	**105.13%**	**96%**	**105.1%-96%**	**9,1**	**Efisien**

Indikator	Target Tahun 2022	Capaian Tahun 2022	Target Akhir RPJMD	Persentase Capaian RPJMD
IKA	**62.77**	**62.22**	**62.97**	**98%**

IKU	**77.5**	**80.94**	**77.68**	**104%**
IKL	**37.42**	**39.34**	**37.42**	**105%**

6) Benchmarking

Perbandingan Capaian Indikator Kualitas Lingkungan Tahun 2022

No	Keterangan	Capaian IKA	Capaian IKU	Capaian IKL
1	Kabupaten Kediri	62,22	80,94	39,34
2	Provinsi Jawa Timur	Belum ekspose	Belum ekspose	Belum ekspose
3	Nasional	53,88	88,06	60,72

Pemerintah Provinsi Jawa Timur belum melakukan ekspose Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) tahun 2022. Formula perhitungan IKLH nasional berbeda dengan Kabupaten/Kota karena ditunjang dengan adanya Indeks Kualias Air Laut (IKAL) dan Indeks Kualitas Lahan Gambut. Hal tersebut tentu tidak dapat diukur di Kabupaten Kediri. Data capaian Indeks Kualitas Lingkungan Hidup nasional dilaksanakan berdasarakan ekspose yang dilakukan oleh Kementerian Lingkungan Hidup Kehutanan melalui Direktorat Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan.

7) Kesimpulan

Capaian nilai Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) sebesar 64,72 lebih tinggi dari target yang sudah ditetapkan yakni 53. Disamping itu, capaian Indeks Kualitas Air juga mendapatkan capaian 62,22 atau dibawah target yang sudah ditetapkan yakni 66,77, capaian Indeks Kualitas Udara mendapatkan 80,94 melampaui target yang telah ditetapkan yakni 77,5, capaian Indeks Kualitas Lahan sebesar 39,94 melampaui target yang telah ditetapkan yakni 37,45. Capaian tersebut ditunjang dengan realisasi anggaran 23.613.748.225 dari anggaran yang ditetapkan sebesar 24.595.969.625,00.

8) Rencana Tindak Lanjut

Meninjau dari kompleksnya permasalahannya diatas, tindak lanjut yang akan dilakukan adalah dengan meningkatkan koordinasi, sinergi, dan kolaborasi antar pemangku kepentingan, terutama yang berkepentingan dan terlibat dalam upaya peningkatan kualtias lingkungan di Kabupaten Kediri. Sosialisasi terkait pengelolaan lingkungan kepada industri kecil, peningkatan kepedulian lingkungan melalui sosialisasi dan bimtek pengelolaan sampah serta peningkatan kesadaran budaya ramah lingkungan kepada masyarakat. Upaya lain yang akan ditingkatkan adalah dengan meningkatkan kualitas dan kuantitas RTH (Ruang Terbuka Hijau) kawasan perkotaan.

b. Meningkatnya sinergitas antar pemerintah, masyarakat dan swasta dalam penanggulangan bencana

Sesuai dengan UU No.24 tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, Kegiatan Penanggulangan Bencana pada dasarnya adalah serangkaian kegiatan baik sebelum, saat dan sesudah terjadi bencana yang dilakukan untuk mencegah, mengurangi, menghindari dan memulihkan diri dari dampak bencana.

Merujuk data kajian BNPB, kebencanaan harus ditangani secara serius sejak terjadinya gempabumi dan disusul tsunami yang menerjang Aceh dan sekitarnya pada 2004 dan lainnya seperti Gunung Kelud tahun 2014. Kebencanaan merupakan pembahasan yang sangat komprehensif dan multi dimensi. Menyikapi kebencanaan yang frekuensinya terus meningkat setiap tahun, pemikiran terhadap penanggulangan bencana harus dipahami dan diimplementasikan oleh semua pihak.

Dari sisi legislasi, Pemerintah Indonesia telah mengesahkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana. Produk hukum di bawahnya antara lain Peraturan Pemerintah , Peraturan Presiden, Peraturan Kepala Kepala Badan, serta peraturan daerah. (Lebih detail lihat Produk Hukum).

Kelembagaan dapat ditinjau dari sisi formal dan non formal. Secara formal, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) merupakan focal point lembaga pemerintah di tingkat pusat. Sementara itu, focal point penanggulangan bencana di tingkat provinsi dan kabupaten/kota adalah Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD).

Dari sisi non formal, forum-forum baik di tingkat nasional dan lokal dibentuk untuk

memperkuat penyelenggaran penanggulangan bencana di Indonesia. Di tingkat nasional, terbentuk Platform Nasional (Planas) yang terdiri unsur masyarakat sipil, dunia usaha, perguruan tinggi, media dan lembaga internasional.

Penanggulangan bencana tidak dapat dilaksanakan tanpa adanya sinergitas antar unsur-unsur masyarakat dalam wilayah tersebut. Tidak dapat dipungkiri bahwa perkembangan kebencanaan di Kabupaten Kediri saat ini sedang menjadi perhatian masyarakat, baik di tingkat daerah ataupun di tingkat nasional. Hal tersebut terjadi karena Kabupaten Kediri memiliki tingkat rawan bencana yang cukup tinggi, mulai dari bencana gunung meletus, tanah longsor, serta bencana-bencana lainnya.

1) Permasalahan dan Tantangan

Perkembangan penanggulangan bencana di Kabupaten Kediri menjadi perlu untuk ditingkatkan. Apalagi dengan lokus Kabupaten Kediri yang masuk dalam kawasan rawan bencana.

1. Pentingnya peran penggiat bencana, komunitas, kelompok sosial, organisasi masyarakat, lembaga usaha dan LSM dalam penanggulangan bencana sebagaimana mekanisme koordinasi antara para pemangku kepentingan (stakeholders) dalam bentuk forum.
2. Jangkauan wilayah rawan bencana yang luas juga merupakan ancaman. Bisa dikarenakan jalan yang rusak, sumber informasi yang belum terjamin kebenarannya, kurangnya koordinasi dan sarana untuk menjangkau wilayah tersebut belum memadai.
3. Perlunya sosialisasi paradigma baru agar menjelma menjadi kebijakan, peraturan dan prosedur tetap (Protap) kebencanaan sampai ketingkat pemerintah paling bawah dalam hal ini adalah pemerintahan desa.
4. Koordinasi dengan pihak-pihak terkait saat proses rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana dimana dalam pelaksanaannya masih banyak ditemui kendala.

2) Pelaksanaan Program dan Kegiatan

Dengan kompleksnya permasalahan dalam pengupayaan perwujudan kemandirian desa untuk kesejahteraan masyarakat, Pemerintah Kabupaten Kediri melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah telah menetapkan rencana pelaksanaan program dan kegiatan dengan identifikasi sebagai berikut;

1. Penanggulangan Bencana dengan kegaitan pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota,
2. Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana,
3. Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana,
4. Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana.

Dari penjelasan tersebut, Pemerintah Kabupaten Kediri melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) telah menetapkan Indeks Resiko Bencana (IRB) sebagai indikator sasaran meningkatnya sinergitas antar pemerintah, masyarakat dan swasta dalam penanggulangan bencana. Semakin kecil nilai Indeks Resiko Bencana (IRB) semakin baik pelaksanaan penanggulangan bencana tersebut.

Melihat pada hal tersebut, capaian Indeks Resiko Bencana (IRB) tahun 2022 adalah 112,47 melampaui target yang telah ditetapkan yakni 124,76. Hal tersebut ditunjang dengan alokasi anggaran sebesar 7.708.567.250,00 dengan realisasi anggaran sebesar 6.103.422.660,00.

3) Analisa Kinerja, Capaian RPJMD, dan Efisiensi

Indikator	Capaian 2020	Capaian 2021	Target 2022	Capaian 2022	Persentase Capaian Kinerja	Anggaran	Realisasi Anggaran	Persentase Realisasi Anggaran
Indeks Resiko Bencana	**131,50**	**124,76**	**121,46**	**112,47**	**108,99%**	**7.708.567.250**	**6.103.422.660**	**79,18%**

Indikator	Capaian Tahun 2022	Target Tahun 2022	Hasil Akhir RPJMD	Persentase Capaian dan RPJMD
Indeks Resiko Bencana	**124,76**	**121,46**	**116,32**	**116,32-(121,46-116,32)/116,32x100=95%**

Indikator	Persentase Capaian	Persentase Realisasi Anggaran	Formula Perhitungan	Hasil Analisa Efisiensi	Keterangan
Indeks Resiko Bencana	**108,99%**	**79,18**	**100-79,18**	**29,72**	**Efisien**

4) **Benchmarking**

Perbandingan Capaian IRB Tahun 2022

No	Keterangan	Capaian IRB
1	Kabupaten Kediri	112,59
2	Kabupaten Blitar	134,86
3	Provinsi Jawa Timur	134,86
4	Nasional	126,22

5) Analisa Faktor Pendukung

Secara umum, pelaksanaan upaya meningkatkan sinergitas antar pemerintah, masyarakat dan swasta dalam penanggulangan bencana tidak mengalami banyak hambatan. Dalam perkembangannya, komitmen dan sinergi antar pemerintah, masyarakat, dan swasta dalam melaksanaan kegiatan berjalan dengan optimal. Simulasi bencana yang dilakukan di kawasan-kawasan bencana di Kabupaten Kediri berjalan dengan baik.

6) Analisa Faktor Penghambat

Hambatan pelaksanaan upaya meningkatkan sinergitas antar pemerintah, masyarakat dan swasta dalam penanggulangan bencana tidak dipungkiri terjadi. Kendati demikian, hambatan-hambatan tersebut tidak signifikan sehingga dapat ditindaklanjuti dengan baik.

7) Kesimpulan

Capaian Indeks Resiko Bencana (IRB) telah melewati target yang telah ditentukan. Target penurunan IRB menjadi 124,46 berhasil dilampaui dengan capaian IRB sebesar 112,47. Capaian tersebut ditunjang dari berbagai macam dimensi dalam upaya menurunkan resiko bencana di Kabupaten Kediri.

8) Rencana Tindak Lanjut

Melihat dari kondisi diatas, tindak lanjut yang akan dilakukan adalah meningkatkan koordinasi dengan pemangku kepentingan terkait. Melakukan koordinasi kebencanaan baik

pada instansi Kabupaten/Kota tetangga, Provinsi dan Nasional ataupun kepada lembaga kebencanaan di tingkat lembaga masyarakat dan organisasi masyarakat yang memiliki kepentingan terkait penanggulangan kebencanaan.

8. Misi 8

Pengembangan Seni Budaya, Olahraga dan Kreativitas Pemuda

Gambar 9

Lingkup Misi 8



No	Tujuan	Indikator	Capaian		Target	Realisasi	Keterangan
			2020	2021	2022	2022	
1	Meningkatkan potensi seni dan budaya generasi muda untuk pembangunan daerah	Tingkat Pelestarian Potensi Seni Budaya Daerah	80,85%	87%	82%	37,65%	Dibawah Target
		Indeks Kapasitas Lembaga Kepemudaan dan Olahraga	*	66,67%	79,00%	73,96%	Dibawah Target

No	Sasaran	Indikator	Capaian		Target	Realisasi	Anggaran	Realisasi Anggaran	Keterangan
			2020	2021	2022	2022			
1	Meningkatnya pelestarian seni budaya daerah	Cakupan event budaya skala kabupaten	*	*	6%	25,57%	22.340. 620.421	20.882. 141.525	Melebihi Target
2	Meningkatnya daya dukung generasi muda bagi daerah	Persentase prestasi bidang kepemudaan dan olahraga yang dicapai	*	*	80%	58,26%	2.231. 421.200	1.489. 710.000	Dibawah Target

*Data tahun 2020-2021 kosong disebabkan IDM adalah Indikator Baru dalam RPJMD tahun 2021-2026

a. Meningkatnya Pelestarian Seni Budaya Daerah

Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/ Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif,

melihat momentum kebangkitan ekonomi dan mengedepankan pelestarian tradisi lokal serta lingkungan. Fungsi dari pelestarian budaya lokal adalah sebagai identitas lokal.

Selain itu pula, Kemenparekraf mendorong pengembangan pariwisata dan ekonomi kreatif (parekraf) berbasis budaya dan kearifan lokal untuk membangkitkan perekonomian di sektor parekraf pascapandemi. Karena pada kenyataannya, perekonomian dari sektor kepariwisataan kini tengah menjadi potensi terutama dalam kondisi pasca pandemi Covid-19.

Pengembangan pariwisata bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah semata, namun juga dukungan dan sinergi berbagai pihak yakni pemerintah, pengusaha, pengelola objek wisata, masyarakat, media hingga kampus. Sinergi harus terus diperkuat mengingat keberhasilan dalam pembangunan dan pengembangan pariwisata, selalu diperlukan dukungan dan sinergi berbagai pihak.

1) Permasalahan dan Tantangan

Beberapa permasalahan dan tantangan yang dapat diidentifikasikan adalah sebagai berikut:

1. Kurang optimalnya tata kelola organisasi berbasis seni dan budaya.
2. Minimnya event paguyuban seni dan budaya yang modern sebagai sarana promosi dan sounding budaya di Kabupaten Kediri.

2) Pelaksanaan Program dan Kegiatan

Pemerintah Kabupaten Kediri melalui Dinas Pariwisata dan Kebudayaan telah menetapkan beberapa program untuk menunjang peningkatan pelestarian seni budaya daerah sebagai berikut;

1. Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
2. Pengembangan Kebudayaan
3. Pengembangan Kesenian Tradisional

Pemerintah Kabupaten Kediri telah menetapkan Cakupan event budaya skala kabupaten sebagai indikator. Dalam pelaksanaannya pada Tahun 2022, capaian indikator tersebut pada tahun 2022 ini sebesar 25,57% melampaui target yang telah ditetapkan yakni 6%. Hal tersebut ditunjang dengan alokasi anggaran sebesar 22.340.620.421 dengan realisasi sebesar 20.882.141.525.

3) Analisa Kinerja, Efisiensi, dan Capaian RPJMD

Analisa Capaian dan Efisiensi

Indikator	Capaian 2020	Capaian 2021	Target 2022	Capaian 2022	Persentase Capaian	Anggaran	Realisasi Anggaran	Persentase Realisasi
Cakupan event budaya skala kabupaten	*****	**56,67%**	**6%**	**25,57%**	**426,16%**	**22.340.620.421,00**	**20.882.141.525,00**	**93,47%**

Indikator	Persentase Capaian	Persentase Realisasi Anggaran	Formula Perhitungan	Hasil Analisa Efisiensi	Keterangan
Cakupan event budaya skala kabupaten	**426,16%**	**93,47%**	**72,83%-93,47%**	**332,69%**	**Efisien**

Indikator	Target Tahun 2022	Capaian Tahun 2022	Target Akhir RPJMD	Persentase Capaian RPJMD
Cakupan event budaya skala kabupaten	**6%**	**25,57%**	**10%**	**255,7%**

4) Faktor Penunjang

Perkembangan kepariwisataan di Kabupaten Kediri secara umum ditunjang dengan kondisi *post-pandemi*. Kondisi tersebut memberikan *surplus* wisatawan karena pada saat merebaknya Pandemi Covid-19 masyarakat tidak dapat pergi berwisata. Selain itu pula, tidak diperkenankannya penyelenggaraan *event* yang berpotensi mengundang massa dalam jumlah banyak. Melihat hal tersebut, kondisi pasca pandemi ini dengan berbagai macam kelonggaran telah meningkatkan penyelenggaran *event* seni budaya skala kabupaten.

5) Faktor Penghambat

Secara umum, tidak ada faktor penghambat yang signifikan. Dengan kondisi *post pandemic* ini penyelenggaraan cakupan *event* budaya skala kabupaten dapat tercapai dan terlampaui.

6) Kesimpulan

Capaian cakupan event budaya skala kabupaten sebagai indikator. Dalam pelaksanaannya pada Tahun 2022, capaian indikator tersebut pada tahun 2022 ini sebesar 25,57% melampaui target yang telah ditetapkan yakni 6%. Hal tersebut ditunjang juga dengan alokasi anggaran sebesar 22.340.620.421 dengan realisasi sebesar 20.882.141.525.

7) Rencana Tindak Lanjut

Dengan hal tersebut diatas, Pemerintah Kabupaten Kediri melalui Dinas Pariwisata dan Kebudayaan akan tetap melaksanakan kinerja sesuai dengan Renstra dan RPJMD, melihat semakin tingginya target yang ada pada tahun-tahun berikutnya.

b. Meningkatnya Daya Dukung Generasi Muda Bagi Daerah

Dalam rangka meningkatkan peran pemuda dan menyongsong bonus demografi Kabupaten Kediri, para pemuda harus memiliki dampak dan daya dukung terhadap pembangunan daerah. Hal tersebut berusaha diupayakan agar fenomena bonus demografi di Indonesia utamanya di Kabupaten Kediri dapat terlaksana dengan baik, dimana para pemuda menjadi produktif dan bukannya membebani pembangunan.

Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan menjelaskan terdapatnya tiga lapisan yang digunakan untuk mendukung pembangunan pemuda, yakni:

1. Lapisan Pengembangan individu, yang di petakan dalam domain pendidikan dan domain kesehatan dan kesejahteraan. Pada lapisan ini Pembanguanan pemuda memastikan terpenuhinya layanan dasar pada pemuda untuk memastikan produktivitasnya.
2. Lapisan Pengembangan Penghidupan dan Kesejahteraan, dimana pemuda diharapkan mendapat akses terhadap pekerjaan yang lebih baik sehingga terpenuhi penghidupan yang sejahtera. Pada lapisan pengembangan penghidupan dan kesejahteraan dipetakan dalam domain lapangan dan kesempatan kerja.
3. Lapisan partisipasi dalam bidang kehidupan, pemuda diharapkan dapat berpartisipasi dalam berbagai bidang kehidupan.

1) Pelaksanaan Program dan Kegiatan

Pemerintah Kabupaten Kediri telah menetapkan Persentase Prestasi bidang Kepemudaan dan Olahraga yang Dicapai berhasil mendapatkan 58,26% berada dibawah target yang telah ditetapkan yakni 80%. Kendati demikian, pelaksanaan program dan kegiatan peningkatan kapasitas pemuda dapat dilaksanakan dengan baik.

2) Faktor Penunjang

Intensifnya koordinasi dan kolaborasi antar pihak, terutama pada pihak-pihak yang berkepentingan terkait pembangunan kepemudaan dan olahraga. Selain itu pula, dukungan yang penuh dari Bupati Kediri dalam upaya meningkatkan kualitas atlet Kabupaten Kediri dengan apresiasi atlet Porprov juga turut serta berhasil meningkatkan kualitas kepemudaan dan keolahragaan di Kabupaten Kediri. Selain itu pula, apresiasi Bupati Kediri terhadap atlet Kabupaten Kediri yang berhasil membawa medali, dapat menjadi anggota Satuan Polisi Pamong Praja. Bupati Kediri juga berhasil menarik kembali atlit-atlit yang berasal dari Kabupaten Kediri untuk berlomba menggunakan nama Kabupaten Kediri.

Pelatihan kewirausahaan bagi Pemuda agar mandiri dan berdaya saing juga turut serta mendongkrak keberdayaan pemuda. Revitalisasi peran Karang Taruna yang berdaya saing telah diupayakan untuk meningkatkan peran pemuda dalam tiga lapisan pembangunan pemuda yakni pembangunan kebutuhan dasar, pembangunan pemberdayaan pemuda, pembangunan peran dan kontribusi para pemuda di Kabupaten Kediri.

3) Faktor Penghambat

Secara umum, faktor-faktor yang menjadi penghambat pelaksanaan pengupayaan daya dukung kepemudaan bagi daerah terdapat pada hal-hal teknis dalam hal koordinasi, kolaborasi, dan sinergi. Kendati demikian, hambatan-hambatan teknis tersebut sudah ditindaklanjuti dan dapat dilaksanakan dengan baik.

4) Analisa Kinerja, Efisiensi, dan Capaian RPJMD

Analisa Capaian dan Efisiensi

Indikator	Capaian 2020	Capaian 2021	Target 2022	Capaian 2022	Persentase Capaian	Anggaran	Realisasi Anggaran	Persentase Realisasi

Persentase Prestasi bidang Kepemudaan dan Olahraga yang Dicapai	*	**30,00%**	**80,00%**	**58,26%**	**72,83%**	**2.231.421.200,00**	**1.489.710.000,00**	**66,76%**

Indikator	Persentase Capaian	Persentase Realisasi Anggaran	Formula Perhitungan	Hasil Analisa Efisiensi	Keterangan
Persentase Prestasi bidang Kepemudaan dan Olahraga yang Dicapai	**72,83%**	**66,76%**	**72,83%-66,76%**	**6,07%**	**Efisien**

Indikator	Target Tahun 2022	Capaian Tahun 2022	Hasil Akhir RPJMD	Persentase Capaian dan RPJMD
Persentase Prestasi bidang Kepemudaan dan Olahraga yang Dicapai	**80,00%**	**58,26%**	**100%**	**58,26%**

5) Kesimpulan

Pemerintah Kabupaten Kediri telah menetapkan Persentase Prestasi bidang Kepemudaan dan Olahraga yang Dicapai berhasil mendapatkan 58,26% berada dibawah target yang telah ditetapkan yakni 80%. Kendati demikian, pelaksanaan program dan kegiatan peningkatan kapasitas pemuda dapat dilaksanakan dengan baik. Dengan realisasi anggaran sebesar 1.489.710.000,00 dari anggaran 2.231.421.200,00 yang telah ditetapkan.

6) Rencana Tindak Lanjut

Dengan melihat kompleksnya permasalahan kepemudaan di Kabupaten Kediri, Penyelenggaran event/kejuaraan olahraga pelajar yang kompetitif dan selektif; Pemberian jaminan kesejahteraan bagi atlet pelajar yang berprestasi di tingkat Provinsi dan Nasional; dan Penambahan kuota peserta pelatihan kewirausahaan bagi Pemuda.

9. Misi 9

Perwujudan Kemandirian Desa untuk Kesejahteraan Masyarakat

Gambar 10

Lingkup Misi 9



No	Tujuan	Indikator	Capaian		Target	Realisasi	Keterangan
			2020	2021	2022	2022	
1	Mendorong Daya Saing Ekonomi Masyarakat dan Desa	Rata-rata Indeks Desa Membangun Tingkat Kabupaten	*	*	0,71	0,73	Melebihi Target

No	Sasaran	Indikator	Capaian		Target	Realisasi	Anggaran	Realisasi Anggaran	Keterangan
			2020	2021	2022	2022			
1	Meningkatnya Kemandirian Masyarakat dan Desa	Persentase Desa Mandiri dan Desa Maju didasarkan pada IDM	*	*	40,82	63,56	39.649.082.782	28.278.401.534	Melebihi Target

*Data tahun 2020-2021 kosong disebabkan IDM adalah Indikator Baru dalam RPJMD tahun 2021-2026

a. Mendorong Daya Saing Ekonomi Masyarakat dan Desa

Sesuai dengan UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa Pasal 78 (1) desa memiliki tujuan dalam rangka pembangunan desa yaitu peningkatan pelayanan dasar, pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur dan lingkungan, pengembangan ekonomi pertanian berskala produktif, pengembangan dan pemanfaatan teknologi tepat guna, dan peningkatan kualitas ketertiban dan ketenteraman masyarakat desa.

Kementerian Desa dan PTT meninjau bahwa implementasi UU Desa secara umum telah berhasil dilaksanakan. Hal tersebut terbukti dengan penggunaan tiga persen Dana Desa untuk operasional pemerintahan desa dan juga hingga penggunaan dana desa untuk ketahanan pangan agar dapat menjawab tantangan ancaman krisis pangan global.

Selain daripada amanat regulasi diatas, peran desa dalam meningkatkan kesejahteraan menjadi sangat penting. meningkatnya angka urbanisasi, pergeseran penduduk dari kawasan perdesaan menuju kawasan perkotaan. Fenomena tersebut tidak hanya terjadi di Kabupaten Kediri saja, banyak tempat kini sedang mengalami hal tersebut.

1) Permasalahan dan Tantangan

Cukup banyak faktor yang menyebabkan desa semakin ditinggalkan oleh masyarakatnya. Pembangunan yang kurang masif serta minimnya akses terhadap peluang ekonomi menyebabkan banyak masyarakat desa yang harus meninggalkan desa untuk pergi mencari penghidupan yang lebih baik di kota. Kondisi tersebut menjadi perhatian penuh bagi Pemerintah Kabupaten Kediri. Terdiri atas 343 desa yang sedang mengalami permasalahan-permasalahan yang sama.

Perkembangan pembangunan perdesaan di Kabupaten Kediri secara umum terhambat atas masalah-masalah sebagaimana diidentifikasi dibawah ini:

1. Pergeseran paradigma dan kebijakan pembangunan, yakni dari pembangunan menuju pemberdayaan. Tepatnya pembangunan (desa) terpadu pada tahun 1970-an, bergeser menjadi pembangunan masyarakat (desa) pada tahun 1980-an dan awal 1990-an, kemudian bergeser lagi menjadi pemberdayaan masyarakat (desa) mulai akhir 1990-an dan saat ini menjadi pemberdayaan masyarakat dan desa, sehingga diperlukan peningkatan kapasitas SDM dan lembaga kemasyarakatan;
2. Era globalisasi atau pasar bebas, membutuhkan peningkatan kemampuan masyarakat dalam pengelolaan kelembagaan ekonomi masyarakat yang dapat meningkatkan usaha, posisi tawar dan daya saingnya;
3. Lahirnya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014, melahirkan banyak regulasi yang perlu ditindaklanjuti secara operasional.

2) Pelaksanaan Program dan Kegiatan

Dengan kompleksnya permasalahan diatas, Pemerintah Kabupaten Kediri melalui Dinas Pemberdayaan dan Pemerintahan Desa telah merencakan upaya-upaya yang telah diidentifikasikan sebagai berikut:

1. Administrasi Pemerintahan Desa dengan kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa.
2. Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat, dan Masyarakat Hukum Adat dengan kegiatan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang bergerak di bidang pemberdayaan desa dan lembaga adat tingkat daerah provinsi serta pemberdayaan masyarakat hukum adat yang masyarakat pelakunya hukum adat yang sama dalam daerah kabupaten/kota.
3. Penataan Desa.

Indikator yang digunakan dalam upaya mednorong daya saing ekonomi masyarakat dan desa adalah rata-rata Indeks Desa Membangun Tingkat Kabupaten serta upaya meningkatkan kemnadirian masyarakat dan desa dengan indikator Persenatse Desa Mandiri dan Desa Maju didasarkan IDM.

Menurut Badan Pusat Statistik, Desa Mandiri (Desa Sembada) adalah desa yang memiliki nilai Indeks Pembangunan Desa (IPD) lebih dari 81. Karakteristik dari desa mandiri adalah memiliki ketahanan sosial dengan mayoritas warganya yang sejahtera, ketahanan ekonomi bekelanjutan, serta ketahanan ekologis yang mumpuni. Untuk Desa Maju (Desa Pra-Sembada) adalah desa yang memiliki nilai Indeks Pembangunan Desa (IPD) dibawah 81 namun diatas 70. Karakteristik dari Desa Maju adalah dimana desa tersebut memiliki ketahanan sosial, kekuatan ekonomi, serta ketahanan ekologis yang mumpuni.

Dengan program dan kegiatan yang telah diupayakan oleh Pemerintah Kabupaten Kediri, pada tahun 2022 ini capaian tujuan serta capaian sasaran Persentase Desa Mandiri dan Desa Maju Didasarkan dari IDM telah melewati target yang telah ditetapkan. Target yang telah ditetapkan untuk rata-rata IDM adalah 0,71 dengan realisasi 0,73 dengan Persentase desa Mandiri dan desa maju dari IDM adalah 40,82 dengan realisasi 63,56.

3) Faktor-faktor Pendukung

Tidak dapat dipungkiri bahwa besarnya capaian IDM di Kabupaten Kediri terjadi karena kuatnya koordinasi dan pengembangan masyarakat di kawasan pedesaan. Koordinasi antar Pemerintah Desa dengan Dinas PMPD sangat intensif. Perkembangan desa yang mandiri dan desa maju semakin tinggi di Kabupaten Kediri.

Hal yang mendasari meningkatnya nilai Desa Maju dan Desa Mandiri di Kabupaten Kediri adalah kuatnya sikap kegotong-royongan. Selain itu, meningkatnya nilai realisasi investasi di Kabupaten Kediri juga turut menunjang partisipasi angkatan kerja yang simultan mendukung tercapainya desa maju dan desa mandiri di Kabupaten Kediri.

Tidak dapat dipungkiri pula kesadaran masyarakat akan pentingnya pendidikan, kesehatan, dan perekonomian semakin tinggi. Semakin meningkatnya perkembangan ini menyebabkan nilai IDM meningkat. Pertumbuhan yang endogen dari masyarakat ini semakin lama semakin meningkat.

4) Faktor Penghambat

Secara umum, hambatan dalam pelaksanaan IDM di Kabupaten Kediri sama seperti hambatan-hambatan lainnya. Seperti kendala-kendala dalam hal komunikasi dan koordinasi yang secara langsung dapat ditindaklanjuti dengan baik oleh Pemerintah Kabupaten Kediri melalui Dinas PMPD dengan OPD terkait.

Analisa Capaian dan Efisiensi

Indikator	Capaian Tahun 2022	Target Tahun 2022	Hasil Akhir RPJMD	Persentase Capaian dan RPJMD	Keterangan
Rata-rata Desa Membangun dan Desa Maju	**63,56**	**40,82**	**68,80**	**63,56/69,8x100=91,3%**	**Sesuai Lajur Perencanaan**

Indikator	Capaian Tahun 2022	Target Tahun 2022	Hasil Akhir RPJMD	Persentase Capaian RPJMD
Rata-rata Desa Membangun dan Desa Maju	**63,56**	**40,82**	**68,80**	**91,3%**

Indikator	Persentase Capaian	Persentase Realisasi Anggaran	Formula Perhitungan	Hasil Analisa Efisiensi	Keterangan
Rata-rata Desa Membangun dan Desa Maju	**155%**	**96,5%**	**155%-96,5%**	**58,5%**	**Efisiensi Tinggi**

5) *Benchmarking*

Perbandingan Capaian Tahun 2022

No	Keterangan	Capaian IDM	Capaian SDGs Desa
1	Kabupaten Kediri	63,56%	44,83
2	Provinsi Jawa Timur	69%	44,78
3	Nasional	35%	No Data

Dari data yang didapati dari Keputusan Menteri Desa dan PDTT didapati bahwa capaian Desa Maju dan Desa Mandiri di Kabupaten Kediri masih berada dibawah rata-rata capaian Jawa Timur. Namun begitu, capaian tersebut masih berada diatas perolehan nasional. Tidak dapat dipungkiri bahwa kondisi desa metropolitan dikawasan Gerbangkertosusila (Gresik, Bangkalan, Mojokerto, Surabaya, Sidoarjo, Lamongan, Pasuruan) telah memberikan dampak yang besar bagi perolehan Desa Mandiri dan Desa Maju di Provinsi Jawa Timur. Namun demikian, Pemerintah Kabupaten Kediri akan berupaya untuk memerbaiki kondisi perdesaan yang baik kedepannya.

Dalam rangka menjaga upaya peningkatan kualitas komunitas dalam pembangunan di kawasan perdesaan, Kementerian Desa PDTT telah mencanangkan konsep *Sustainable Development Goals* Desa. Dengan pembangunan berkelanjutan di kawasan perdesaan, diharapkan kawasan perdesaan dapat bergerak ke arah yang lebih baik dan progresif terutama dalam upaya pembangunan. Capaian SDGs Desa Kabupaten Kediri lebih baik dari capaian SDGs Desa Jawa Timur, meskipun tidak signifikan.

Sebagai upaya *benchmark* dan perhatian, pengembangan kawasan perdesaan di negara-negara lain telah mengubah peran serta lembaga desa yang awalnya administratif menjadi pemicu lahirnya bentuk-bentuk perekonomian baru. Sebagai contoh konsep *Saemaul Undong* dari Korea Selatan, Komite Pembangunan Desa dari Malaysia, serta konsep-konsep pembangunan desa lainnya yang akan menjadi perhatian bagi Pemerintah Kabupaten Kediri.

Dari dua pembangunan kawasan perdesaan diatas, terdapat setidaknya tiga faktor kunci dalam pengembangan kawasan perdesaan. Pertama adalah adanya *masterplan* dan panduan dari pemerintah, kedua adanya peran aktif masyarakat, serta yang ketiga adalah adanya kader-kader penggerak yang berintegritas dan

bertanggung-jawab. Serta hal yang paling penting dari semuanya adalah tata kelola yang bermutu dan akuntabel, mulai dari perencaaan, pelaksanaan, pengelolaan, evaluasi, hingga perbaikan.

Sebagai upaya awal, Pemerintah Kabupaten Kediri telah melaksanakan upaya revitalisasi karang taruna di Kecamatan Ngadiluwih. Jika di Korea Selatan dan Malaysia kader-kader pembangunan desa bertugas untuk mengupayakan pengembangan masyarakat dari sisi perekonomian dan budaya. Jika karang taruna ini akan mencoba mengambil pendekatan dari sisi budaya. Baik itu budaya modern, budaya mengembangkan diri, serta budaya-budaya lain yang memiliki dampak positif dalam upaya mengembangkan kawasan perdesaan.

Budaya perdesaan memiliki kompleksivitas yang tinggi, terutama menyangkut kebiasan kesehatan, upaya mengembangkan bisnis dan ekonomi, serta ketentraman dikawasan perdesaan. Dengan kader-kader karang taruna yang dibina dan dikuatkan tersebut, upaya pembangunan budaya dikawasan perdesaan akan terjalin dengan baik.

6) Kesimpulan

Upaya Pemerintah Kabupaten Kediri dalam meningkatkan kapasistas dan kapabilitas desa akan terus dikembangkan dan dilanjutkan. Perkembangan peningkatan kesejahteraan melalui potensi-potensi perekonomian dari desa akan tetap dikembangkan. Baik menggunakan pengembangan endogen ataupun pengembangan eksternal, akan senantiasa dipelajari dan dikembangkan difasilitasi serta didampingi. Upaya Pemerintah Kabupaten Kediri untuk meningkatkan pembangunan desa memerlukan koordinasi baik dengan OPD terkait, *stakeholder* terkait, serta masyarakat secara umum.

7) Rencana Tindak Lanjut

Melihat perkembangan capaian IDM (Indeks Desa Membangun) di Kabupaten Kediri yang cukup baik, Pemerintah Kabupaten Kediri masih merasa perlu berbagai macam upaya untuk meningkatkan potensi-potensi dari kawasan perdesaan untuk meningkatkan predikat desa-desa yang ada di masyarakat. Oleh karena demikian, Pemerintah Kabupaten Kediri perlu berkonsultasi dan berkoordinasi dengan *stakeholder* terkait baik Dinas PMPD Jawa Timur ataupun Kementerian Desa PDTT untuk menyelaraskan perencanaan dan pembangunan.

3.3.2 Capaian Kinerja Keluaran Kegiatan dan Masalah yang Dihadapi serta Solusi Pemecahannya

a. Urusan Wajib Pelayanan Dasar

1. URUSAN PENDIDIKAN

PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9
DINAS PENDIDIKAN	**Meningkatkan layanan pendidikan yang merata, murah dan bermutu**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Cakupan penunjang urusan pemerintahan daerah yang terlayani**	**100,00**	**100,00**			
		PERENCANAAN, PENGANGGARAN DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH	Persentase terlayaninya penyusunan perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja PD	100,00	100,00			
		ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT	Persentase terlayaninya	100,00	100,00			

		DAERAH	penyusunan administrasi keuangan PD					
		ADMINISTRASI BARANG MILIK DAERAH PADA PERANGKAT DAERAH	Persentase terlayaninya penyusunan administrasi barang milik daerah pada PD	100,00	100,00			
		ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH	Persentase terlayaninya penyusunan administrasi kepegawaian PD	100,00	100,00			
		ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH	Persentase terlayaninya administrasi umum PD	100,00	100,00			
		PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	Persentase terlayaninya pengadaan barang milik daerah penunjang urusan	100,00	100,00			

			Pemerintah Daerah					
		PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase terlayaninya penyediaan jasa penunjang urusan Pemerintahan Daerah	100,00	100,00			
		PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase terlayaninya pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan Pemerintahan Daerah	100,00	100,00			
		PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	**Persentase Satuan Pendidikan SD yang terakreditasi A**	**25,00**	**18,49**	**Rendahnya pemenuhan sarana dan prasarana sekolah dan pemerataan kebutuhan guru dan tenaga kependidikan**	**Prioritas usulan DAK Fisik dan pengangkatan PPPK**	

			Persentase Satuan Pendidikan SMP yang terakreditasi A	**45,00**	**36,54**	**Rendahnya pemenuhan sarana dan prasarana sekolah dan pemerataan kebutuhan guru dan tenaga kependidikan**	**Prioritas usulan DAK Fisik dan pengangkatan PPPK**	
			Persentase Siswa dengan nilai Kompetensi Literasi yang memenuhi Kompetensi Minimum	**50,00**	**63,70**			
			Persentase Siswa dengan nilai Kompetensi Numerasi yang memenuhi Kompetensi Minimum	**27,00**	**39,29**			

			Persentase Satuan PAUD yang terakreditasi	**10,00**	**73,02**			
			Cakupan pelayanan pendidikan Nonformal/kesetaraan	**45,00**	**75,25**			
			Persentase LKP/PKBM yang terakreditasi	**30,00**	**38,71**			
		PENGELOLAAN PENDIDIKAN SEKOLAH DASAR	AL SD	99,80	99,32	Anak putus sekolah SD dikarenakan kurangnya perhatian orangtua dan pergaulan bebas (hamil, anak jalanan)	Optimalisasi Pendidikan Kesetaraan berbasis Kemandirian	
			APuS SD	0,01	0,01			
			AT SD-SMP	97,00	99,82			

		PENGELOLAAN PENDIDIKAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA	AL SMP	99,95	98,40	Anak putus sekolah SD dikarenakan kurangnya perhatian orangtua dan pergaulan bebas (hamil, anak jalanan)	Optimalisasi Pendidikan Kesetaraan berbasis Kemandirian	
			APuS SMP	0,30	0,18			
		PENGELOLAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)	APK PAUD Formal	99,00	105,68			
		PENGELOLAAN PENDIDIKAN NONFORMAL/KESETARAAN	Jumlah PKBM yang melaksanakan Asesmen Nasional mandiri	45,00	90,32			
		PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM	**Persentase penerapan kurikulum muatan lokal di sekolah**	**100,00**	**100,00**			

		PENETAPAN KURIKULUM MUATAN LOKAL PENDIDIKAN DASAR	Persentase penerapan kurikulum yang berlaku pada satuan pendidikan	100,00	100,00			
		PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	**Rasio guru satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan terhadap murid**	**17**	**16,33**			
		PEMERATAAN KUANTITAS DAN KUALITAS PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN BAGI SATUAN PENDIDIKAN DASAR, PAUD DAN PENDIDIKAN NONFORMAL/KESETARAAN	Persentase PTK sesuai kriteria dan bersertifikasi pendidik	47,00	52,72			
		PROGRAM	**Persentase izin**	**100,00**	**100,00**			

		PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN	**Pendidikan Dasar, PAUD dan Pendidikan Non Formal yang diselenggarakan Masyarakat**					
		PENERBITAN IZIN PENDIDIKAN DASAR YANG DISELENGGARAKAN OLEH MASYARAKAT	Persentase layanan ijin operasional Pendidikan Dasar yang diselenggarakan oleh masyarakat yang diterbitkan	100,00	100,00			
		PENERBITAN IZIN PAUD DAN PENDIDIKAN NONFORMAL YANG DISELENGGARAKAN OLEH MASYARAKAT	Persentase layanan ijin operasional PAUD yang diselenggarakan oleh masyarakat yang diterbitkan	100,00	100,00			

Analisis Kesesuaian antara Kinerja Program dan Kegiatan yang sudah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2022

Perangkat Daerah	Uraian Program	Jumlah Indikator Kinerja Program	Rata-rata Tingkat Ketercapaian Indikator Kinerja Program (%)	Jumlah Indikator Kinerja Kegiatan	Rata-rata Tingkat Ketercapaian Indikator Kinerja Kegiatan (%)	Tingkat Kesesuaian Kinerja Program dan Kegiatan (%)
1	2	3	4	5	6	7 (4/6)
DINAS PENDIDIKAN	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1	100,00%	8	100,00%	100,00%
	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	7	207,79%	7	90,64%	229,25%
	PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM	1	100,00%	1	100,00%	100,00%
	PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	1	96,06%	1	112,17%	85,64%
	PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN	1	100,00%	2	100,00%	100,00%

2. URUSAN KESEHATAN

Analisis Kesesuaian antara Kinerja Program dan Kegiatan yang sudah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2022

Perangkat Daerah	Uraian Program	Jumlah Indikator Kinerja Program	Rata-rata Tingkat Ketercapaian Indikator KinerjaProgram (%)	Jumlah Indikator Kinerja Kegiatan	Rata-rata Tingkat Ketercapaian Indikator Kinerja Kegiatan (%)	Tingkat Kesesuaian Kinerja Program dan Kegiatan (%)
1	2	3	4	5	6	7 (4/6)
DINAS KESEHATAN	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	**1**	100%	7	100%	100%
	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	7	90	17	90	100%
	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	1	100	3	90,00	111%
	Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman	2	100	4	95	105%
	Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	1	90	4	95	95%

Capaian Program dan kegiatan urusan pemerintahan

PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9
DINAS KESEHATAN	Meningkatnya akses dan kualitas pelayanan kesehatan	***Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota***	**Cakupan penunjang urusan pemerintahan**	**100%**	**100**			
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase pelaksanaan kegiatan perencanaan, penganggaran, dan evaluasi Kinerja Perangkat	100%	100	Tidak Ada permasalahan		

			Daerah					
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Cakupan pelaksanaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100	100	Tidak Ada permasalahan		
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Cakupan pelaksanaan kegiatan administrasi kepegawaian perangkat daerah	100%	100	Tidak Ada permasalahan		
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan pelaksanaan kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%	100	Tidak Ada permasalahan		

		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan pelaksanaan kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	100	Tidak Ada permasalahan		
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan pelaksanaan kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	100	Tidak Ada permasalahan		
		Peningkatan Pelayanan BLUD	Persentase Puskesmas melaksanakan kegiatan	100%	100	Tidak Ada permasalahan		

			penunjang pelayanan BLUD					
		Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Cakupan Fasilitasi Pelayanan UKP dan UKM	85%	85%	Pelayanan Kesehatan UKP dan UKM dilakukan dengan Optimal	Mengintegrasikan layanan kesehatan Pertama dan Rujukan	Upaya meningkatkan akses dan pelayanan kesehatan yang bermutu di Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) dan Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjut (FKRTL) baik milik pemerintah Kabupaten Kediri maupun milik swasta
			Persentase Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP)	*100%*	100%	Tidak Ada Permasalahan	Semua Puskesmas sudah terakreditasi pada tahun 2020	

			terakreditasi					
			Indeks Keluarga Sehat	*0,17*	0,201	Intervensi lanjut untuk mengukur indeks keluarga sehat terus dilakukan	Kondisi kesehatan masyarakat yang diukur menggunakan 12 indikator PIS PK tetap dilaksanakan dengan melibatkan lintas program dan lintas sektor	

			Persentase pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	85%	95,10%	Target capaian sudah melebihi 100%	Capaian kinerja kegiatan Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat sebesar 95,1% melebihi target sebesar 85%. Pencapaian kinerja kegiatan dilihat dari realisasi penyerapan anggaran kegiatan yang meliputi pembayaran klaim pelayanan pasien Jamkesda	Sesuai dengan Permendagri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 pada romawi (v) dalam rangka menjamin keberlangsungan dan ketersediaan pembiayaan atas jaminan layanan kesehatan, pada (poin vi) bahwa Pemerintah Daerah tidak diperkenankan mengelola sendiri

							sebanyak 1.325 kasus serta pembayaran iuran dan bantuan iuran peserta Penerima Bantuan Iuran Daerah (PBID) sebanyak 84.584 jiwa atau capaian UHC sebesar 78,74%	(sebagian atau seluruhnya) Jaminan Kesehatan Daerahnya dengan manfaat yang sama dengan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), termasuk mengelola sebagian Jaminan Kesehatan Daerahnya dengan skema ganda.
								Menindaklanjuti hal tersebut saat ini sedang dilaksanakan perubahan Peraturan Bupati Nomor 56 Tahun 2021 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan

								Pembiayaan Pelayanan Kesehatan bagi Masyarakat Miskin di Kabupaten Kediri menjadi Peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan Pembiayan Pelayanan Kesehatan bagi Masyarakat di Luar Cakupan Jaminan Kesehatan Nasional.
								Pencapaian Universal Health Coverage (UHC) Kabupaten Kediri pada Tahun 2020 sebesar 71,18%, Tahun 2021 sebesar

								72,77% dan pada akhir Tahun 2022 sebesar 78,74% (mengalami kenaikan sebesar 6,03%), sehingga masih ada sebesar 21,26% masyarakat Kabupaten Kediri belum mempunyai jaminan pelayanan kesehatan baik dari PBI-APBN, PBI-APBD, PBPU (PNS dan swasta), PPU, dan BP;

								Dalam rangka percepatan pencapain UHC tersebut, Kabupaten Kediri sudah mempunyai Keputusan Bupati Nomor : HK.04/398/418.08/2022 tentang Pembentukan Tim Percepatan Pencapaian Universal Health Coverage (UHC) Program Jaminan Kesehatan Nasional Kabupaten Kediri.

			Persentase Fasilitas Kesehatan Tingkat Lanjutan (FKTL) terakreditasi	*79%*	79%	belum semua Rumah sakit yang ada di Kabupaten Kediri terakreditasi	dilakukan pendampingan oleh Dinas Kesehatan baik pada Rumah Sakit Pemerintah tapi juga RS swasta untuk dapat dinilai dalam akreditasi RS	Pemenuhan sarana, prasarana, alat kesehatan dan SDM kesehatan yang berkualitas pada fasilitas kesehatan milik pemerintah daerah agar sesuai dengan standar
								Supervisi dan pembinaan mutu pelayanan kepada fasiltas pelayanan kesehatan milik swasta baik FKTP (klinik pratama,

								utama) maupun FKRTL (Rumah Sakit) dalam hal pemenuhan standar sarana, prasarana, alat kesehatan dan SDM kesehatannya
								Peningkatan kapasitas SDM kesehatan fasiilitas pelayanan kesehatan swasta dengan menyelenggarakan *workshop* atau pertemuan-pertemuan.
			Persentase Nakestrad dan Hattra yang memiliki izin	*17%*	17%	Belum semua Nakes dan penyehat tradisional yang emmiliki ijin	dilakukan pendataan dan himbauan bagi nakes dan hattra yang melakukan	

							praktek pengobatan traduisional untuk mengurus ijin operasional	
			Persentase Kecamatan STBM	*2%*	3%	jumlah kecamatan STBM masih rendah karena kecamatan STBM dapat dinyatakan sebagai kecamatan STBM jika semua desa yang ada dalam wilayah kerjanya sudah lolos dalam penilaian Desa STBM	melakukan pembinaan dan pendampingan serta pemberdayaan masyarakat untuk dapat mencapai target STBM	

			Jumlah jenis pelayanan spesialis di puskesmas rawat inap	*2 Puskesmas*	0	Puskesmas rawat inap di kabupaten Kediri tidak ada yang melakukan pelayanan spesialis	Puskesmas tidak bolah melakukan praktek spesialis secara mandiri di pelayanan tetapi diperkenankan untuk melakukan pelayanan dengan konsultasi spesialis	
		Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota sesuai kebutuhan	100%	100%			

		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan layanan kesehatan UKM dan UKP Rujukan tingkat daerah (Cakupan kunjungan rawat jalan dan rawat inap)	85%	85%	Untuk mempercepat proses palayanan kesehatan rujukan perlu dilakukan sistem Rujukan dari Puskesmas ke Rumah sakit sehingga pelayanan dapat dilakukan dengan lebih cepat	Mengembangkan sistem informasi Rujukan antara puskesmas dan Rumah Sakit	Berdasarkan Surat Edaran Nomor : HK.02.02/I/1161/2022 tentang Implementasi Penggunaan Aplikasi Sistem Rujukan Terintegrasi (SISRUTE) dalam Penyelenggaraan Rujukan Pelayanan Kesehatan Perorangan, Dinas Kesehatan sudah melaksanakan sosialisasi penggunakan SISRUTE kepada rumah sakit dan Puskesmas. Semua Puskesmas dan Rumah Sakit sudah melaksanakan

								registrasi dan pendaftaran akun SISRUTE. Untuk implementasi sampai dengan saat ini, belum semua rujukan dilaksanakan melalui SISRUTE dikarenakan kendala masalah jaringan yang kurang stabil dan petugas yang masih kurang paham IT.
								SISRUTE merupakan teknologi informasi berbasis internet yang dapat menghubungkan data pasien dari tingkat layanan lebih rendah ke tingkat layanan lebih tinggi atau sederajat (horisontal maupun

								vertikal) dengan tujuan untuk mempermudah dan mempercepat proses rujukan pasien.
			Persentase Puskesmas Dengan Kelulusan Akreditasi Paripurna	13%	13%	Puskesmas pada tahun 2022 belum melakukan reakreditasi ulang, karena kondisi pandemi yang tidak memungkinkan untuk dilakukan survey pada puskesmas	mengusulkan penilaian akreditasi ulang untuk Puskesmas pada tahun 2023 sehingga diharapkan dapat meningkatkan jumlah puskesmas dengan status akreditasi paripurna	
			Persentase tenaga kesehatan tradisional yang	100%	100%	Tenaga Kesehatan yang melakukan praktek	Melakukan pendataan ulang tenaga kesehatan tradisonal untuk	

			dibina			pengobatan tradisional telah dilakukan pembinaan	dapat dilakukan pembinaan	
			Persentase penyehat tradisional yang dibina	27%	27%	Semua Penyehat tradisional yang sudah memiliki ijin sudah dilakukan pembinaan	Untuk penyehat tradisonal yang belum terdaftar diupayakan untuk dilakukan pendataan dan pembinaan	
			Persentase desa yang terbentuk Asman TOGA	22%	24%	Telah dilakukan pembentukan asman TOGA di masing- masing desa	Untuk Desa yang belum mempunyai asman Toga akan terus diupayakan untuk memiliki Asman Toga	

			Persentase puskesmas yang melaksanakan pembinaan yankestrad	100%	100%	Tidak Ada Permasalahan	Dari Dari target 100% Tenaga Kesehatan Tradisional & penyehat tradisional (Hatra) yang dibina yang dibina pada tahun 2022 terealisasi 6 tenaga Kesehatan Tradisional 1361 penyehat tradisional/Hattra yang ada jadi realisasi dalam persentase 100% sehingga capaian yang	

							didapatkan adalah 100 %. Data terakhir tahun 2022 menunjukkan jumlah penyehat tradisional ada 1361 orang dengan rincian 1290 orang adalah penyehat tradisional dengan metode ketrampilan pijat tradisional Indonesia, 13 orang dengan jenis ketrampilan bekam kering, 19 orang dengan	

							metode ramuan Indonesia, 5 orang dengan ketrampilan olah pikir, 8 orang dengan ketrampilan energi spiritual, 6 orang dengan ketrampilan SPA, 5 orang dengan ketrampilan akupresure, 15 orang pijat refleksi.	

			Persentase akses sanitasi layak	40%	85%	Belum optimalnya pemanfaatan dan sarana sanitasi yang ada sekarang	tetap mengoptimalkan penyuluhan dan perubahan perilaku masyarakat untuk sadar terhadap sanitasi sehat sambil mengupayakan penyediaan fasilitas sanitasi yang layak bagi masyarakat dengan bekerja sama dengan lintas sektor	

		Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi	Tingkat ketersediaan sistem informasi kesehatan	100%	100%	Telah tersedia sistem informasi Kesehatan di 37 Puskesmas yang terintegrasi dengan Dinas Kesehatan, tetapi pemanfaatanya belum optimal	Mengoptimalakn epnggunakan sistem informasi yang telah ada dalam melakukan pelayanan di Puskesmas	
		Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C dan D serta Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang diterbitkan					

			Persentase Klinik Pratama yg terakreditasi	49%	41,57	Klinik pratama belum terakreditasi	Persentase Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) terakreditasi sampai dengan Tahun 2022 tidak mencapai target 49% yaitu hanya dengan capaian sebesar 41,57%, dengan rincian 37 Puskesmas telah terakreditasi dan 52 Klinik Pratama belum terakreditasi. Hal ini disebabkan selama Tahun	

							2022 kegiatan survey akreditasi tidak terlaksana karena belum adanya regulasi Kementerian yang terbaru tentang akreditasi FKTP.	

			Persentase RS yang terakreditasi paripurna	27,27%	45,45%	Belum semua Rumah sakit yang ada di wilayah kerja Kabupaten Kediri terakreditasi paripurna	Persentase rumah sakit yang terakreditasi paripurna sesuai standart capaian sudah melebihi target yaitu 166,67 % dari target 100 % dengan jumlah rumah sakit yang sudah terakreditasi sebanyak 11 rumah sakit. Sampai dengan akhir tahun 2022 jumlah rumah sakit yang terakreditasi paripurna	

							sebanyak 5 rumah sakit yaitu RSUD Kabupaten Kediri, RS Toeloengredjo, RS Muhammadiyah Siti Khodijah, RS Toelonegredjo dan RSUD Simpang Lima Gumul. Terdapat peningkatan status akreditasi dari 2 rumah sakit di Kabupaten Kediri yaitu RSUD Simpang Lima Gumul yang	

							sebelumnya terakreditasi Utama meningkat menjadi paripurna dan dan RS Aura Syifa yang sebelumnya terakreditasi Perdana sekarang meningkat menjadi paripurna. Sedangkan 3 rumah sakit lainnya mampu mempertahankan status akreditasi	

							paripurna yaitu RSUD Kabupaten Kediri, RS Toeloengredjo dan RS Muhammadiyah Siti Khodijah.	

			Persentase Klinik Utama yang terakreditasi	0%	0	Belum ada klinik utama yang terakreditasi	Klinik utama di Kabupaten berjumlah 3 klinik yaitu klinik utama Sehati (spesialisasi jantung), klinik utama Griya Medika (spesialisasi kulit dan kelamin) dan klinik utama Medika Utama (spesialisasi jantung). Ketaiga klinik tersebut diberikan pembinaan dan pendampingan dalam mempersiapkan akreditasi tahun	

							2025 dan 2026	
			Persentase lab Madya yang terakreditasi	0%	0	Belum ada lab madya yang terakreditasi	Laboratorium madya di Kabupaten Kediri berjumlah 1 (satu) yaitu Laboratorium Brata Medika yang direncanakan untuk akreditasi di tahun 2026. Dalam mempersiapkan	

							akreditasi tersebut sudah dilakukan pembinaan dan pendampingan.	
		PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	**Persentase kecukupan rasio dan kompetensi tenaga kesehatan**	***100%***	**100%**			
		Pemberian izin praktek tenaga kesehatan di kabupaten / kota	Jumlah ijin praktik yang diterbitkan setelah memenuhi persyaratan	100%	100	Tenaga kesehatan sudah diberikan ijin praktek sesuai dengan kompetsensinya	Terus melakukan pendataan dan pembinaan terhadap nakes yang ada dalam wilayah kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Kediri	

		Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	Tersedianya perencanaan SDM Kesehatan di Fasiliatas Kesehatan Pemerintah	100%	100	Tersusunya anjab ABK di Dinas Kesehatan Kab. Kediri	Dilakukan pemutakhiran data secara terus menerus untuk memperbarui kebutuhan SDM Kesehatan	
		Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Perentase ASN yang dikembangkan kompetensinya	10%	10	capaian kinerja sudah mencapai 100%	Meningkatkan kompetensi SDM baik tenaga kesehatan maupun non kesehatan di fasilitas kesehatan milik pemerintah daerah melalui diklat, seminar, OJT dan lainnya.	
		Program Sediaan Farmasi, Alat	***PROSENTASE PEMBERIAN***	***75%***	**75**			

		Kesehatan Dan Makanan Minuman	***REKOMENDASI APOTEK, TO, TK. AKLES DAN OPTIKAL, UMOT***					
			PROSENTASE PRODUK MAKANAN MINUMAN TERTENTU YANG BERSERTIFIKAT P-IRT	75%	75	capaian kinerja sudah mencapai 100%	meningkatkan pembinaan terhadap PIRT untuk segara dapat melakukan pengurusan sertifikat	
		Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optical, UMOT	JUMLAH REKOMENDASI APOTEK, TO, TK. AKLES DAN OPTIKAL, UMOT YANG DITERBITKAN	20	20	capaian kinerja sudah mencapai 100%	dilakukan pendataan dan pemutakhiran data terhadap parkatek apotek dan toko obat	
			Presentase Apotek, Toko	25%	25	capaian kinerja sudah mencapai	dilakukan pendataan dan	

			Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) yang dibina dan diawasi			100%	pemutakhiran data terhadap parkatek apotek dan toko obat	
		Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	JUMLAH SERTIFIKAT P-IRT YANG DITERBITKAN	120	115	Jumlah Sertifikat yang diterbitkan	meningkatkan pembinaan terhadap PIRT untuk segara dapat melakukan pengurusan sertifikat	
		Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi	PROSENTASE PEMERIKSAAN PRODUKSI MAKANAN	3%	2	capaian kinerja mencapai 95 %	meningkatkan pembinaan terhadap PIRT untuk segara	

		dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga	MINUMAN INDUSTRI RUMAH TANGGA				dapat melakukan pengurusan sertifikat	
		Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	***Persentase UKBM Purnama Mandiri (Posyandu balita, poskestren, poskesdes, SBH, desa siaga)***	***65,03%***	65			
		Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	frekuensi kegiatan tim pokjanal tk. Kabupaten, kecamatan dan desa dalam satu tahun	**2 kali dalam 1 tahun**	2 Kali	Dilaksanakan sesuai dengan rencana	Kegiatan ini tetap dilaksanakan dalam satu tahun untuk mendapatkan dukungan lintas sektor	

		Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	jumlah media KIE yang digunakan dalam satu tahun	**5**	6	Dilaksanakan sesuai dengan rencana	Jumlah media KIE yang digunakan dalam satu tahun sebanyak 5 media hasil yang diperoleh sebanyak 6 media, hasil capaian yang diperoleh 120 %. Media ini sangat berfungsi untuk meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang kesehatan.	
		Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah	Tingkat partisipasi kesehatan masyarakat skala desa	**100%**	100	Tidak Ada Masalah	Tingkat partisipasi kesehatan masyarakat skala desa sebesar 100 %, dengan hasil capaian 100 %	

		Kabupaten/Kota	Cakupan promosi kesehatan tingkat desa	100%	100	Tidak Ada Masalah	Target cakupan promosi kesehatan tingkat desa sebesar 100 %, dengan hasil capaian 100 %	
			Cakupan kelompok kesehatan masyarakat yang dibina	100%	100	Tidak Ada Masalah	Target cakupan kelompok kesehatan masyarakat yang dibina sebesar 100 %, dengan hasil capaian 100 %	
			Persentase Posyandu Purnama Mandiri (PURI)	87,36%	95,65	Status Posyandu Purnama Mandiri	Prosentase Posyandu Purnama Mandiri target sebesar 88 % capaian sebesar 95,65 %, hasil capaian kinerja yang diperoleh 108,69	

							%. Hal ini dipengaruhi telah bukanya posyandu secara keseluruhan.	
			Persentase poskesdes purnama mandiri (PURI)	15,22%	25	Sudah tercapai	Prosentase Poskesdes Purnama Mandiri capaian sebesar 16 % dengan realisasi sebesar 25 %, hasil capaian kinerja yang diperoleh 156,25 %. Telah mencapai target, tetapi masih perlu pembinaan guna penguatan kelembagaan yang ada.	

			persentase poskestren purnama mandiri (PURI)	30,43%	13	Poskestren PURI masih rendah	Prosentase Poskestren Purnama Mandiri sebesar 39 % dengan capaian sebesar 13 %, hasil capaian kinerja yang diperoleh 33,33 %. Tidak tercapainya target strata Poskestren disebabkan santri yang telah dilatih lulus pendidikan dan kurangnya regenerasi santri yang baru, petugas kurang kontinue dalam pembinaan ke pondok, metode	

							penyampaian pesan kurang menarik, sarana dan prasarana yang tersedia belum mencukupi serta kurangnya dukungan di lingkungan masyarakat pondok.	

			persentase saka Bhakti Husada (SBH) purnama Mandiri (PURI)	14,71%	10	SBH dengan status PURI belum tercapai	Prosentase Saka Bhakti Husada (SBH) Purnama Mandiri capaian sebesar 15 % dengan realisasi sebesar 10 %, hasil capaian yang diperoleh 66,67 %. Hal ini dipengaruhi dari minat remaja dalam hal kegiatan kepramukaan mulai berkurang, kurangnya pembinaan dan refreshing bagi adik pramuka, metode pembinaan perlu ada perubahan (inovasi) mengikuti	

							remaja milenial, sarana dan prasarana yang tersedia belum mencukupi serta kurangnya dukungan di lingkungan institusi pendidikan.	
			persentase desa-kelurahan siaga aktif	15,22%	23,84	Desa Siaga Aktif Sudah tefcapai	Prosentase Desa Siaga aktif (Purnama Mandiri) capaian sebesar 16 % dengan realisasi sebesar 23,84 %, hasil capaian yang diperoleh 149 %	Sesuai dengan Surat Edaran Sekretaris Daerah yang ditujukan kepada Kepala Desa se-Kab. Kediri, nomor 900/5047/418,24/2021 tanggal 17 November 2021

							telah mencapai target, tapi masih dibutuhkan pembinaan agar kegiatan Desa Siaga aktif tetap lestari.	perihal Petunjuk Teknis Pemberian Bantuan Keuangan Khusus Untuk Pengadaan Mobil Siaga Desa Tahun Anggaran 2121, pada romawi II huruf B disampaiakan bahwa Mobil Siaga Desa adalah mobil dinas Pemerintah Desa yang diperuntukkan antara lain:
							Pemanfaatan Mobil siaga desa sebagai pendukung sarana prasarana Desa siaga aktif	a. Menjunjung kelancaran tugas tugas kedinasan
								b. Meningkatkan

								fungsi pelayanan kepada masyarakat
								c. Meningkatkan kualitas hasil kerja
								d. Menjunjung pelaksanaan program program Pemerintah Desa
								Menunujuk surat tersebut, mobil siaga desa sudah dimanfaatkan untuk mengangkut warga yang membutuhkan transportasi ke fasyankes untuk mendapatkan pelayanan kesehatan. Berdasarkan Pedoman Teknis

								Ambulans, Dirjen Fasyankes Kementerian Kesehatan tahun 2019, dijelaskan bahwa setiap kendaraan dapat dipergunakan untuk mengangkut orang sakit akan tetapi tidak setiap kendaraan tersebut dapat disebut sebagai ambulans. Suatu kendaraan dapat disebut sebagai ambulans apabila memenuhi spesifikasi teknis tertentu, memiliki alat kesehatan dan

								mampu memberikan pelayaan kesehatan terhadap orang sakit/korban/pasien.
								Dinas Kesehatan telah melaksanakan pelatihan pemanfaatan mobil siaga desa dalam kegawatdaruratan, dengan sasaran 688 orang (setiap desa mengirim 2 orang)

								pada tanggal 22 Agustus 2023 s/d 15 September 2023 di Kampus STIKES PAMENANG Pare.

3. DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Capaian Program dan Kegiatan Urusan Pemerintahan Tahun 2022 (sesuai RPJMD 2021-2026)

PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN STRATEGIS	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Pemenuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Kabupaten/ Kota	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Prosentase Pemenuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Kabupaten/Kota	85%	94,00%			Pada lembar tersendiri
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Parencanaan , Penganggaran, dan	13 dokumen	13 dokumen			

			Evaluasi Kinerja Peranngkat Daerah					
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang disusun	44 dokumen	44 dokumen			
		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Laporan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah yang disusun	5 Laporan	5 Laporan			

		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Laporan Adminstrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	34 Laporan	34 Laporan			
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Paket Pekerjaan yang diadakan dalam Adminsitrasi Umum Perangkat Daerah	76 paket	76 Paket			
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Paket Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah	36 Laporan	36 Laporan			

			an Daerah					
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jangka Waktu Pemeliharaan Barang Milik Daera	97 unit	97 unit			
	Pembangunan dan Pemeliharaan fasilitas serta sarana Irigasi, Pengairan dan sarana produksi lainnya di wilayah-wilayah	**PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)**	Panjang Jaringan Irigasi Sekunder dalam Kondisi baik	134.828,12 M	130.560 M	Ada satu pekerjaan yang putus kontrak karena penyedia jasa tidak bisa menyelesaikan pekerjaan	1. Penyedian dikenai sanksi (dafrar hitam) sesuai peraturan yang berlaku 2. Pekerjaan yang tidak terselesaikan dianggarkan pada tahun 2023.	

	sentra produksi pertanian.	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten Kota	Prosentase Terealisasinya Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten Kota	100%	100%			

		Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya dibawah 1000 Ha dalam (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Prosentase terealisasinya Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya dibawah 1000 Ha dalam (satu) Daerah Kabupaten/Kota	100%	100%			

	Pembangunan dan pemeliharaan Jalan serta Jembatan yang menghubungkan sentra Produksi dan pemasaran	**PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN**	Panjang jalan Kabupaten dalam Kondisi Baik	1079,38 M	1077, 20 M	1. Musim hujan yang berkepanjangan yang membuat permukaan jalan cepat rusak.	1.Peran serta masyarakat dalam memelihara jalan dan fasilitas penunjang misalnya muatan kendaraan yang melebihi tonase,saluran bahu jalan lebih dijaga keawetannya.	

						2. Panjang dan luas kerusakan jalan tidak sebanding dengan Anggaran .	2.Penentuan lokasi pekerjaan lebih mengutamakan tingkat ke urgent an kerusakan dan jalur lalu lintas dan kualitas pekerjaan lebih ditingkatkan	
	Pembangunan Infrstruktur di Kawasan Ekonomi Khusus (Kampung Inggris,	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	Panjang Jalan Kabupaten dalam Kondisi baik	1079,38 M	1077, 20 M	1. Musim hujan yang berkepanjangan yang membuat permukaan jalan cepat rusak.	1.Peran serta masyarakat dalam memelihara jalan dan fasilitas penunjang misalnya	

	SLG, Kawasan Bandara, PDP Margomulyo, dan Pusat-pusat pertumbuhan ekonomi)						muatan kendaraan yang melebihi tonase,saluran bahu jalan lebih dijaga keawetannya.	
						2. Panjang dan luas kerusakan jalan tidak sebanding dengan Anggaran .	2.Penentuan lokasi pekerjaan lebih mengutamakan tingkat ke urgent an kerusakan dan jalur lalu lintas dan kualitas pekerjaan lebih	

							ditingkatkan	
	Menyediakan Rencana Tata ruang yang berkelanjutan dan mempunyai daya dukung lingkungan	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG**	Jumlah Peraturan Penataan ruang yang diselesaikan	2 buah	1 buah	· Target 2 terdiri dari mempunyai Perda RTRW dan 1 Perkada RDTR (dari 4 RDTR), tahun 2022 mempunyai 1 RTRW dan 1 RDTR dalam proses lintas	Melakukan koordinasi secara intens/sering dengan Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR)	

						sektor		
						· Menunggu surat persetujuan substansi setelah dilaksanakan rapat Lintas Sektor RDTR Banyakan-Grogol		
						· Penyesuaian terhadap Peraturan Perundangan terbaru dan aturan terkait		

						Lahan Sawah yang Dilindungi (LSD)		
						· Masih diperlukan sinkronisasi dengan Kementerian ATR/BPN		
						Menunggu jadwal rapat koordinasi Lintas Sektor dari Kementerian ATR/BPN untuk RTRW Kabupaten		

		Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen RTRW DAN RRTR yang ditetapkan	4 dokumen	4 dokumen			
		Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten Kediri	7 dokumen	5 dokumen	Menyesuaikan paket pekerjaan		
		Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah	2 dokumen	2 dokumen			

			Kabaupaten/ Kota					
		Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	1 dokumen	1 dokumen			

Analisis Kesesuaian antara Kinerja Program dan Kegiatan yang sudah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2022

Perangkat Daerah	Uraian Program	Jumlah Indikator Kinerja Program	Rata-rata Tingkat Ketercapaian Indikator Kinerja Program (%)	Jumlah Indikator Kinerja Kegiatan	Rata-rata Tingkat Ketercapaian Indikator Kinerja Kegiatan (%)	Tingkat Kesesuaian Kinerja Program dan Kegiatan (%)
1	2	3	4	5	6	7 (4/6)
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1	94,06%	7	87,52%	107,47%
	Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	1	87,69%	2	85,71%	102,31%
	Penyelenggaraan Jalan	1	91,25%	1	91,25%	100,00%
	Penyelenggaraan Tata Ruang	1	70,33%	4	71,03%	99,01%

4. DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

Capaian Program dan kegiatan urusan pemerintahan

PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9
DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	Pengembangan dan Pemeliharaan Sumber Daya Air Baku dan Air Bersih untuk Mendukung Kebutuhan Masyarakat	**PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM**	**Persentase Rumah Tangga/KK Mendapat Akses Air Melalaui SPAM**	78,28%	100%			
		Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah	Persentase Rumah Tangga/KK Mendapat Akses Air Melalaui SPAM	78,28%	100%	Wilayah Kabupaten Kediri yang luas membuat pembangunan	Jumlah pembangunan jaringan SPAM harus terus ditingkatkan	

		Kabupaten/Kota				SPAM belum maksimal untuk seluruh desa	setiap tahunnya	
	Penguatan Sistem Sanitasi Lingkungan Wilayah Kabupaten Kediri	**PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL**	**Presentase Pengelolaan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS**	33,33%	100%			
		Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota	Presentase Pengelolaan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS	33,33%	100%	Keterbasan Anggaran sehingga pembangunan bertahap	Jumlah pembangunan lebih ditingkatkan lagi setiap tahunnya	
		PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN	**Presentase Terpenuhinya Pembangunan/Penyediaan Sistem**	3,86%	100%			

		SISTEM AIR LIMBAH	**Pengolahan Air Limbah Domestik**					
		Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	Presentase Terpenuhinya Pembangunan/Penyediaan Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik	3,86%	100%	Anggaran yang terbatas sehingga pembangunan tidak dapat dilakukan maksimal	Menambah lagi pembangunan SPALD untuk tahun berikutnya	
	Meningkatkan kualitas bangunan gedung dan layak fungsi	**PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG**	**PresentaseTerpenuhinya Bangunan Gedung yang Memiliki IMB dan Bersertifikat Layak Fungsi**	100%	100%			
		Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin	PresentaseTerpenuhinya Bangunan Gedung yang Memiliki IMB dan Bersertifikat Layak Fungsi	100%	100%	Masih banyak bangunan gedung yang perlu direhab	Meningkatkan kualitas bangunan gedung sehingga lebih	

		Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung					bertahan untuk jangka panjang	
	Meningkatkan Penataan Perumahan dan Kawasan Permukiman yang Sehat dan Berkelanjutan	**PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN**	**Cakupan Perbaikan Rumah di Kawasan Kumuh**	100%	100%			
		Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10	Cakupan Perbaikan Rumah di Kawasan Kumuh	100%	100%	Rendahnya kesadaran masyarakat dalam mencegah tumbuh dan	Meningkatkan lagi kesadaran masyarakat dalam mencegah tumbuhnya dan	

		(Sepuluh) Ha				berkembangnya permukiman kumuh	berkembangnya permukiman kumuh	
		Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha	Tercapainya Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh Dengan Luas Di Bawah 10 Ha	100%	100%	Keterbatasan anggaran sehingga pelaksanaan kegiatan harus bertahap	Memanfaatkan sumber dana lain diluar APBD sehingga lebih maksimal	
	Pembangunan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Lingkungan Permukiman	**PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA, DAN UTILITAS UMUM (PSU)**	**Persentase Peningkatan Sarana, Prasarana, dan Utilitas Umum Perumahan**	100%	100%			
		Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	Persentase Peningkatan Sarana, Prasarana, dan Utilitas Umum Perumahan	100%	100%	Penyelenggaraan PSU perumahan belum	Memilih skala prioritas agar lebih maksimal dalam	

						maksimal dan dilakukan secara bertahap	penyelenggaraan PSU perumahan	
	Penunjang urusan pelaksanaan program kegiatan di lingkungan SKPD	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Terpenuhinya penyusunan dokumen perencanaan dan penyusunan laporan capaian kinerja**	100%	100%			
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terpenuhinya penyusunan dokumen perencanaan dan penyusunan laporan capaian kinerja	100%	100%	Tidak Ditemukan Permasalahan		
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terpenuhinya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100%	100%	Tidak Ditemukan Permasalahan		

		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Terpenuhinya Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	100%	100%	Tidak Ditemukan Permasalahan		
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terpenuhinya Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%	100%	Tidak Ditemukan Permasalahan		
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terpenuhinya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%	100%	Tidak Ditemukan Permasalahan		
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terpenuhinya Penyediaan Jasa Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%	100%	Tidak Ditemukan Permasalahan		
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah	Terpenuhinya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan	100%	100%	Tidak Ditemukan Permasalahan		

		Daerah	Daerah					
	Pembangunan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Lingkungan Permukiman	**PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN**	**Prosentase Penyelesaian ganti kerugian tanah**	100%	100%			
		Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Prosentase Penyelesaian ganti kerugian tanah	100%	100%			

	Pembangunan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Lingkungan Permukiman	**PROGRAM REDISTRIBUSI TANAH, SERTA GANTI KERUGIAN PROGRAM TANAH KELEBIHAN MAKSIMUM DAN TANAH ABSENTEE**	**Persentase Penyelesaian Redistribusi tanah yang telah ditetapkan**	100%	100%			
		Penetapan Subjek dan Objek Redistribusi Tanah serta Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Penyelesaian Redistribusi tanah yang telah ditetapkan	100%	100%			

Analisis Kesesuaian antara Kinerja Program dan Kegiatan yang sudah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja

Perangkat Daerah	Uraian Program	Jumlah Indikator Kinerja Program	Rata-rata Tingkat Ketercapaian Indikator KinerjaProgram (%)	Jumlah Indikator Kinerja Kegiatan	Rata-rata Tingkat Ketercapaian Indikator Kinerja Kegiatan (%)	Tingkat Kesesuaian Kinerja Program dan Kegiatan (%)
1	2	3	4	5	6	7 (4/6)
DINAS PERUMAHAN DAN KAWSAN PERMUKIMAN	**PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM**	1	100%	1	100%	100%
	PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL	1	100%	1	100%	100%
	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN	1	100%	1	100%	100%

	SISTEM AIR LIMBAH					
	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	1	100%	1	100%	100%
	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	1	100%	2	100%	100%
	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA, DAN UTILITAS UMUM (PSU)	1	100%	1	100%	100%
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA	1	100%	7	100%	100%
	PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN	1	100%	1	100%	100,00%

	PROGRAM REDISTRIBUSI TANAH, SERTA GANTI KERUGIAN PROGRAM TANAH KELEBIHAN MAKSIMUM DAN TANAH ABSENTEE	1	100%	1	100%	100%

5. SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

Capaian Program dan kegiatan urusan pemerintahan

PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	Penguatan kelembagaan peran masyarakat di skala lingkungan dalam kegiatan trantibum	**PROGRAM**: Penunjang Urusan Pemerintah daerah Kabupaten/Kota	Persentase indikator program yang tercapai	100%	100%			
	Fasilitasi kegiatan Masyarakat	**KEGIATAN:**		100%	100%			

Monitoring masyarakat secara berkala	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Anggaran Perangkat Daerah	4	4			
	Adminstrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan pertanggungjawaban keuangan	3	3			
	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah laporan pertanggungjawaban penatausahaan barang	1	1			
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah dokumen ketatausahaan dan kepegawaian	1	1			
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Barang dan Jasa	3	3			
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2	2			

	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	jumlah laporan aset tetap yang terpelihara	3	3			
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah peralatan dan mesin lainya	1	1			
	PROGRAM: Peningkatan Ketentraman dan ketertiban Umum	1. Prosentase gangguan ketentraman dan ketertiban umum yang ditangani	100%	100%			
		2. Ratio Satlinmas yang sudah terlatih	100%	100%			
		3. Ratio Anggota Pol PP per 10.000 penduduk	1 : 0,6	1 : 0,38			
	KEGIATAN:						
	Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) daerah Kabupaten/Kota	Jumlah penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban yang ditangani	100%	100%	Kurangnya pemahaman anggota satpol PP khususnya bidang Penegakan Perda akan aturan perda	Pembinaan Teknis dan Diklat peningkatan Kapasitas SDA Satpol PP	Melakukan pencegahan dan penegakan hukum sesuai dengan kewenangan daerah

					dan peraturan perundang-undangan lainnya		
					Kurangnya koordinasi dan sinergitas anta SKPD pengampu Perda/Perkada	Koordinasi dan sinergi yg intensif dalam pembagian tugas sesuai SOP	
	KEGIATAN						
	Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Walikota	Jumlah kegiatan penegakan perda	288	511	Tingkat kepatuhan dan ketaatan terhadap Perda dan Perkada masih rendah	Memperseringg patroli dan himbauan kepada masyarakat	Melakukan pencegahan dan penegakan hukum sesuai dengan kewenangan daerah

						Kecenderungan meningkatnya pelanggaran Perda dan Perkada	Koordinasi dengan pemangku wilayah (Kec/Desa)	
						Tingkat pengetahuan SDM terhadap aturan/regulasi masih kurang	Bimtek/Diklat bagi personel	
						Adanya aturan baru dari pusat yang belum ditindaklanjuti dengan Perda/Perkada	Koordinasi dengan SKPD terkait terkait pembuatan Perda/Perkada tindaklanjut	

	PROGRAM: Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	Prosentase kejadian kebakaran yang direspon kurang dari 15 menit	100%	30%			
	KEGIATAN						
	Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam daerah Kabupaten/Kota	Terlayaninya penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	100%	100%	1. Kurangnya sarana dan prasarana , berupa unit mobil pemadam kebakaran, mobil evakuasi sehingga menghambat dalam proses penanganan kebakaran maupun permintaan evakuasi	1. Menambah jumlah sarana dan prasarana berupa unit mobil damkar dan mobil evakuasi	

						yang mengancam jiwa manusia		
						2. Kurangnya tenaga pemadam kebakaran dan penyelamatan yang terlatih .	2. Melakukan kegiatan TOT pemadaman kebakaran dan penyelamatan	
						3. Kurangnya jumlah tenaga pemadam kebakaran untuk melayani jangkauan wilayah Kab.kediri yang luas	3. Mengirim ASN damkar untuk mengikuti diklat pemadaman kebakaran dan penyelamatan	

						4. Kurangnya fasilitas umum dan industri yang menyediakan sarana proteksi kebakaran	4. Menambah jumlah tenaga pemadam kebakaran lewat PPPK atau CPNS	
							5. Menghimbau kepada pengelola fasum dan industri yang berpotensi kebakaran untuk menyediakan sarana proteksi kebakaran ,	

		Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran	Tercapainya Pemberdayaan Masyarakat Dalam Upaya Pencegahan Kebakaran	24	24	1. Kurangnya anggaran untuk giat sosialisasi dan pelatihan penanganan kebakaran di masyarakat	1. Mengadvokasi kepada DPMD agar dapatnya disediakan dana untuk mitigasi bencana di masing masing desa yang dapat digunakan untuk pelatihan dan sosialisasi kebakaran.	

						2. Pemberdayaan Masyarakat serta partispasinya yang masih rendah dalam pencegahan dan penaggulangan kebakaran	2. Mendorong setiap desa untuk membentuk relawan kebakaran yang dibiayai dari dana desa , guna membantu petugas pemadam kebakaran dalam pencegahan dan penanggulangan kebakaran .	

Analisis Kesesuaian antara Kinerja Program dan Kegiatan yang sudah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2022

Perangkat Daerah	Uraian Program	Jumlah Indikator Kinerja Program	Rata-rata Tingkat Ketercapaian Indikator KinerjaProgram (%)	Jumlah Indikator Kinerja Kegiatan	Rata-rata Tingkat Ketercapaian Indikator Kinerja Kegiatan (%)	Tingkat Kesesuaian Kinerja Program dan Kegiatan (%)
1	2	3	4	5	6	7 (4/6)
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	PROGRAM: Penunjang Urusan Pemerintah daerah Kabupaten/Kota	1	100%	8	100%	100%
	PROGRAM: Peningkatan Ketentraman dan ketertiban Umum	3	100%	2	100%	100%
	PROGRAM: Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	1	30%	2	100%	30%

6. BPBD

Capaian Program dan kegiatan urusan pemerintahan

PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9
BPBD	Peningkatan kesepahaman mengenai pengurangan risiko bencana ada di semua elemen	**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah K abupaten/Kota**	**Persentase (%) terselenggaranya a program penunjang**	**100%**	**100%**			
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	***persentase (%) Jumlah ASN yang mendapatkan gaji dan tunjangan, HR bagi tenaga kontrak dan pengelola keuangan***	***100%***	***100%***			

		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	***persentase (%) terlaksananya kegiatan administrasi barang***	***100%***	***100%***			
		Administrasi Umum Perangkat Daerah Keuangan SKPD	***persentase (%) terlaksananya kegiatan administrasi umum***	***100%***	***100%***			
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	***persentase (%) terlaksananya kegiatan penunjang perkantoran***	***100%***	***100%***			
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	***persentase (%) terlaksananya kegiatan pemeliharaan aset kantor***	***100%***	***100%***			

		PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	***Persentase Capaian PB dalam pemenuhan indikator Indeks Ketahanan Daerah (IKD)***	***100%***	***83,75%***	Belum semua OPD melaksanakan pemenuhan indikator indeks ketahanan daerah (IKD)	Sosialisasi terkait OPD pengampu indikator dari IKD	
		Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	***Persentase (%) pelayanan informasi rawan bencana***	100%	100%			
		Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana	***Persentase (%) pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana***	***100%***	***80%***			
		Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	***Persentase (%) pelayanan penyelematan dan evakuasi korban bencana***	***100%***	***100%***			

		Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	***Presentase (%) penataan sistem dasar PB***	***100%***	***55%***	sebagian kegiatan tidak terserap yng bersifat sosialisasi karena		

Analisis Kesesuaian antara Kinerja Program dan Kegiatan yang sudah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2022

Perangkat Daerah	Uraian Program	Jumlah Indikator Kinerja Program	Rata-rata Tingkat Ketercapaian Indikator KinerjaProgram (%)	Jumlah Indikator Kinerja Kegiatan	Rata-rata Tingkat Ketercapaian Indikator Kinerja Kegiatan (%)	Tingkat Kesesuaian Kinerja Program dan Kegiatan (%)
1	2	3	4	5	6	7 (4/6)
BPBD	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH**	1	100,00%	5	100%	100%
BPBD	**PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA**	1	80,00%	4	84%	90%

7. DINAS SOSIAL

Capaian Program dan kegiatan urusan pemerintahan

PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9
DINAS SOSIAL	1. Pemberian bantuan bagi masyarakat miskin dan rentan serta terdampak krisis	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Prosentase pemenuhan penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**100%**	**100%**	-	-	-

	(contohnya Pandemi);							
	2. Pemberdayaan keluarga miskin melalui pelatihan life skill dan economic skill;	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kerja Perangkat Daerah	8 Dok	8 Dok	-	-	-
	3. Pengembangan program usaha bersama berbasis keluarga;	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	4 Dok	4 Dok	-	-	-
	4. Penanganan masyarakat Penyandang Masalah Kesejahteraan	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Prosentase Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat	100%	100%	-	-	-

	Sosial (PMKS);		Daerah					
	5. Penguatan kesiapsiagaan terhadap korban sosial dan bencana.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Prosentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Disediakan	100%	100%	-	-	-
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah (BMD) Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dipelihara	54 unit	58 unit	-	-	-
		PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Prosentase Pemberdayaan Kelembagaan dan PSKS	**100%**	**100%**	-	-	-

		Pemberdayaan Sosial Komunitas Adat Terpencil (KAT)	Prosentase Pemberdayaan Sosial Komunitas Adat Terpecil (KAT)	100%	0%	tidak adanya Komunitas Adat Terpencil di wilayah Kabupaten Kediri	-	-
		Pengumpulan Sumbangan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah peserta sosialisasi pengumpulan sumbangan dalam Daerah Kabupaten/Kota	90 orang	-	Kendala waktu pelaksanaan kegiatan	dilaksanakan pada semester I	-
		Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	Prosentase pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	100%	68%	sub kegiatan Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Sosial (LK3) tidak dapat	Harus dibuat SK Pengurusan LK3 yang baru	-

						dilaksanakan karena SK Pengurusan LK3 susunan anggota terdiri dari ASN		
		PROGRAM PENANGANAN WARGA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN	Prosentase Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak kekerasan					

		Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan asal	Jumlah Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan	100 orang	30 orang	dikarenakan tidak adanya pekerja migran yang dipulangkan, sebanyak 30 orang pekerja migran bermasalah yang ada di wilayah Kabupaten Kediri diberikan bantuan paket permakanan		
		PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Prosentase PMKS yang mendapat program Rehabilitasi Sosial	**100%**		-	-	-

		Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Prosentase Penyandang PMKS lainnya bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	100%	227,79%	Meningkatnya Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial yang tertangani	-	-
		Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) lainnyabBukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	Prosentase PMKS lainnya bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	100%	338,90%	Meningkatnya Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial yang tertangani	-	-
		PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Prosentase Program Pelaksanaan perlindungan dan Jaminan Sosial	**100%**	**124,14%**	-	-	-

		Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Prosentase pelaksanaan pengelolaan data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	100%	124,14%	kegiatan pelatihan keterampilan kepada KPM dampak Bandara di wilayah Kecamatan Banyakan, Grogol dan Kecamatan Tarokan		-
		PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Prosentase program Penanggulangan Bencana	**100%**	**100%**	-	-	-
		Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota	Prosentase pelaksanaan penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota	100%	100%	desa rawan bencana	edukasi dan sosialisasi kampung siaga baru	-

		Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	Jumlah Kampung Siaga Bencana yang mendapatkan pembinaan	2 KSB	2 KSB	Peningkatan kapabilitas Taruna Siaga	edukasi dan sosialisasi kampung siaga baru	-
		PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	Prosentase pengelolaan Taman Makam Pahlawan	**100%**	**100%**	-	-	-
		Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Prosentase pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	100%	100%	Belum terpenuhinya secara maksimal	Pengadaan dan pemeliharaan	-

Analisis Kesesuaian antara Kinerja Program dan Kegiatan yang sudah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2022

Perangkat Daerah	Uraian Program	Jumlah Indikator Kinerja Program	Rata-rata Tingkat Ketercapaian Indikator Kinerja Program (%)	Jumlah Indikator Kinerja Kegiatan	Rata-rata Tingkat Ketercapaian Indikator Kinerja Kegiatan (%)	Tingkat Kesesuaian Kinerja Program dan Kegiatan (%)
1	2	3	4	5	6	7 (4/6)
DINAS SOSIAL	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	1 indikator	100%	5 indikator	100%	100%
	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	1 indikator	100%	3 indikator	100%	100%
	PROGRAM PENANGANAN WARGA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN	1 indikator	30%	1 indikator	30%	100%
	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	1 indikator	556,69%	2 indikator	556,69%	100%
	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	1 indikator	124,14%	1 indikator	124,14%	100%
	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	1 indikator	100%	1 indikator	100%	100%
	PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	1 indikator	100%	1 indikator	100%	100%

b. Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar

1. DINAS TENAGA KERJA

Capaian Program dan kegiatan urusan pemerintahan

PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET		REALISASI		PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD
1	2	3	4	5		6		7	8	9
DINAS TENAGA KERJA	**Peningkatan kapasitas tenaga kerja lokal yang unggul**	**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah kabupaten/Kota**	**Tertib Administrasi layanan pemerintahan**	**100%**	**100%**	**100%**	100%			
	Fasilitasi pelatihan kerja sesuai dengan kebutuhan pasar dan	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen Perencanaan dan anggaran Perangkat Daerah	7 Dokumen	7 Dokumen	7 Dokumen	100%			
	mendukung ekonomi daerah	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	laporan pertanggung jawaban keuangan	8 laporan	8 laporan	8 laporan	100%			

	Fasilitasi pemasaran dan bursa tenaga kerja	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Dokumen penyelesaian kebutuhan Administrasi Barang Milih Daerah	3 laporan	3 laporan	3 laporan	100%			
	Perlindungan ketenagkerjaan	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen ketatausahaan dan kepegawaian	6 laporan	6 laporan	6 laporan	100%			
	Fasilitasi sertifikasi tenaga kerja	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah laporan penyediaan barang dan jasa	6 laporan	6 laporan	6 laporan	100%			
	Penyediaan Job Training	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Barang milik daerah yang diadakan	7 Unit	7 Unit	7 Unit	100%			
	Standarisasi sarana dan prasarana balai latihan kerja	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	2 laporan	2 laporan	2 laporan	100%			
	Fasilitasi pendampingan dan konsultasi ketenagakerjaan	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	laporan aset tetap yang terpelihara	5 Laporan	5 Laporan	5 Laporan	100%			

		Program Perencanaan Tenaga Kerja	**Persentase kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu ke rencana tenaga kerja**	100%	100%	100%	100%			
		Penyusanan Rencana Tenaga Kerja (RTK)	Dokumen / analisis / kajian yang dihasilkan	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100%			
		Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	**Persentase Tenaga Kerja Yang Mendapatkan Pelatihan Berbasis Kompetensi**	12,5		20,0	160%	Kurangnya kualitas SDM / Pencari kerja dalam menghadapi globalisasi diperlukan tenaga ahli yang bersertifikat kompetensi	Diberikan Program pelatihan-pelatihan dan Uji Kompetensi sesuai kebutuhan pasar kerja dan Kerjasama dengan BLK-LN dalam meningkatkan kualitas SDM Pencari Kerja dengan Sertifikasi yang telah diakui dunia Internasional	
		Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	Pencari kerja yang bersertifikat kompetensi	15 Orang		15 Orang	100%			
		Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	LPKS keseluruhan di kab/kota	55 Lembaga		56 Lembaga	102%			

		Perizinan dan Pendaftaran Lembaga Pelatihan Kerja	LPKS keseluruhan yang mempunyai izin	55 Lembaga		56 Lembaga	102%			
		Konsultasi Produktivitas pada perusahaan kecil	Perusahaan yang telah memahami tentang Produktivitas tenaga kerja	20 perusahaan		25 perusahaan	125%			
		Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah kabupaten/Kota	tenaga kerja yg telah mengikuti pelatihan peningkatan kompetensi di perusahaan	30 Orang		30 Orang	100%			
		Program Penempatan Tenaga Kerja	**Persentase Tenaga kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme Layanan Antar Kerja dalam wilayah kabupaten/kota**	88,00%		97,91%	111,26 %	Lowongan Kerja tidak sebanding dengan jumlah pencari kerja dan Keahlian yang dipunyai para pencari kerja tidak sesuai dengan lowongan kerja yang ada sehingga para pencari kerja tidak bisa terserap.	Adanya program pelatihan-pelatihan kepada para pencari kerja agar mereka mempunyai keterampilan khusus untuk mendapatkan pekerjaan atau membuka lapangan pekerjaan baru, dan juga memberikan informasi lowongan pekerjaan (mengadakan job fair) agar para pencari kerja dan karyawan yang kena PHK	

									mendapatkan pekerjaan baru.	
		Pelayanan Antarkerja di Daerah Kabupaten/Kota	tenaga kerja lokal yang difasilitasi dan didampingi dalam pekerjaannya	4.100 Orang		6.636 Orang	162%			
		Penerbitan Izin lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta (LPTKS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota	LPTKS yang mempunyai izin	2 Lembaga		2 Lembaga	100%			
		Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	tenaga kerja yang ditempatkan dalam dan luar negeri	6000 orang		6636 orang	111%	Masih banyaknya TKI yang bergerak pada sektor informal	Mengadakan pelatihan-pelatihan keterampilan kepada calon tenaga kerja Indonesia, dengan bekal keterampilan diharapkan calon tenaga kerja diterima di beberapa	

									perusahaan, baik Perusahaan dalam negeri maupun luar negeri. Dengan bekal keterampilan juga membekali calon tenaga kerja Indonesia kita untuk bersaing dengan tenaga kerja asing.	
		Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota	Pekerja Migran Indonesia (TKI) Purna dan keluarganya yang diberdayakan	60 Orang		60 Orang	100%			
		Penerbitan Perpanjangan IMTA yang lokasi dalam 1 (satu) Daerah kabupaten/Kota	Perpanjangan IMTA yang diterbitkan	2 Orang		2 Orang	100%	Masuknya tenaga kerja Asing di wilayah Kabupaten Kediri.	Membatasi Tenaga Kerja Asing yang diperbolehkan di wilayah Kabapten Kediri sebagaimana Perundang-undangan yang berlaku.	
		Program Hubungan Industrial	**Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak**	11%		14%	127%	Belum terciptanya hubungan harmonis antara pekerja dan pengusaha	Berupaya untuk memberikan penyuluhan dan pembinaan terkait peraturan perundang undangan ketenagakkerjaan secara berkala	

		Pengesahaan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang hanya Beroperasi dalam 1 (satu) Daerah kabupaten/Kota	perusahaan yang mempuyai sarana hubungan industrial	85 perusahaan		85 perusahaan	100%	Tentang isu seperti kenaikan UMK membuat para investor tidak jadi untuk membuka lapangan usaha dan juga banyak Perusahaan yang mengurangi jumlah karyawannya (PHK) dan hal tersebut Perusahaan yang bermasalah dengan karyawannya.	Mengajukan perusahaan-perusahaan untuk memiliki Lembaga Bipartit dan Lembaga Tripartit sebagai sarana dan wadah untuk menjembatani dan mencari solusi permasalahan antara perusahaan dan karyawannya.	
		Pencegahan dan penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan penutupan Perusahaan di Daerah kabupaten/Kota	Penurunan kasus perselisihan hubungan industrial	5 Kasus		11 Kasus	220%	kurang adanya Perlindungan Tenaga Kerja dalam dan luar negeri	Mengadakan sosialisasi-sosialisasi kepada pekerja / pencari kerja untuk dapatnya bekerja di sektor formal lebih terjamin dari sisi perlindungan ketenagakerjaannya dan apabila ada pemasalahan Hububungan industrial untuk mengadukan pada mediator HI yang ada di Disnaker.	

Analisis Kesesuaian antara Kinerja Program dan Kegiatan yang sudah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2022

Perangkat Daerah	Uraian Program	Jumlah Indikator Kinerja Program	Rata-rata Tingkat Ketercapaian Indikator KinerjaProgram (%)	Jumlah Indikator Kinerja Kegiatan	Rata-rata Tingkat Ketercapaian Indikator Kinerja Kegiatan (%)	Tingkat Kesesuaian Kinerja Program dan Kegiatan (%)
1	2	3	4	5	6	7 (4/6)
DINAS TENAGA KERJA	**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah kabupaten/Kota**	**1**	100%	**8**	100%	100%
	Program Perencanaan Tenaga Kerja	**1**	100%	**1**	100%	100%
	Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	**1**	160%	**5**	106%	151%
	Program Penempatan Tenaga Kerja	**1**	111,26%	**5**	115%	97%
	Program Hubungan Industrial	**1**	127%	**2**	160%	79%

2. DINAS P2KBP3A

Capaian Program dan kegiatan urusan pemerintahan

PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9
DINAS P2KBP3A	1. Menurunkan angka tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak	**PROGRAM PENGARUS UTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN**	Persentase OPD yang responsif gender	100%	100%			
	2. Meningkatkan kualitas hidup perempuan dan anak	Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah OPD yang mendapatkan Advokasi Kebijakan dan Pendampingan	63 OPD	63 opd	Semua OPD telah mendapatkan Bimtek PPRG dan dalam proses penyusunan	Perlu diadakan pembinaan secara berkelanjutan. Dan diusulkan apabila asistensi anggaran setiap OPD diwajibkan	

							untuk menyertakan Penyusunan PPRG	
	3. Mendorong peningkatan peran serta kesetaraan gender dalam pembangunan	Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen sosialisasi peningkatan partisipasi perempuan	1 dokumen	1 dokumen	Pembinaan dilakukan 1 tahun 1 kali. Dari evaluasi, masih diperlukan pembinaan secara kontinu	Perlu adanya penambahan frekwensi pelatihan	
	4. Pemberdayaan perempuan di setiap kegiatan pembangunan	**PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN**	Persentase kasus kekerasan terhadap perempuan yang tangani	100%	100%			DP2KBP3A melakukan pendampingan dan penjangkauan kepada korban kekerasan

			oleh P2TP2A					terhadap perempuan dan anak termasuk kekerasan yang terjadi dalam rumah tangga
	5. Perlindungan perempuan dan anak dari kasus kekerasan	Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen kebijakan perlindungan perempuan	1 dokumen	1 dokumen	masih ada laporan kasus KDRT	dilakukan sosialisasi terkait pencegahan KDRT	memberikan sosialisasi kepada warga kabupaten kediri tentang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak
	6. Penyediaan pusat pendampingan dan konsultasi bagi perempuan dan anak	Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Layanan rujukan lanjutan bagi perempuan korban kekerasan	12 bulan	12 bulan	pelayanan visum korban kekerasan belum 24 jam	dilakukan rapat koordinasi Tim P2TP2A bersama lintas sektor	

		PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	Peresentase Kegiatan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak yang dilaksanakan di tingkat desa	85%	100%			DP2KBP3A pada pertemuan PUSPA (Partisipasi Publik untuk Kesejahteraan Perempuan dan Anak), GOW (Gabungan Organisasi Wanita), P2TP2A (Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak), Satgas PPA, Rakor Penyuluh KB dan berbagai kesempatan selalu melakukan edukasi tentang Perlindungan Perempuan dan Anak termasuk

								pencegahan terjadinya kekerasan terhadap Perempuan dan Anak.
		Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pelaksanaan event	3 event	3 event	keterbatasan SDM	upaya untuk bekerja sama dengan pihak ketiga dari unsur potensi Kabupaten Kediri	
		Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen rekomendasi jejaring layanan perlindungan perempuan	1 dokumen	1 dokumen	Kegiatan sudah bisa dilaksanakan dan sesuai hasil evaluasi diperlukan kegiatan yang kontinu	Perlu adanya penambahan frekwensi kegiatan	

		PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	Persentase kasus kekerasan terhadap anak yang diselesaikan oleh P2TP2A	82%	82%			Sosialisasi dan edukasi juga telah dilaksanakann kepada masyarakat baik melaui forum anak, PKK dan Kelompk remaja kecamatan maupun sekolah tahun 2023 sosialisasi dan edukasi akan dilaksanakan secara lebih masif
		Pencegahan Kekerasan terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen kebijakan perlindungan anak	1 dokumen	1 dokumen	masih adanya kasus yang belum terlaporkan ke Tim P2TP2A	dilakukan sosialisasi terkait pencegahan kekerasan terhadap anak	Pembinaan kepada kelompok remaja, Kelompok PIK Remaja dan Forum anak melalui sosialisasi dan edukasi
		Penyediaan Layanan	Jumlah	1	1 dokumen	belum adanya	dititipkan di	

		bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	dokumen evaluasi pelaksanaan pemenuhan hak anak	dokumen		shelter /rumah aman untuk korban	shelter milik dinsos provinsi jatim yang ada di Kediri	
		Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah	1 dokumen	1 dokumen	belum semua desa terbentuk Forum Anak desa dan Satgas PPA desa	dilakukan sosialisasi kepada desa untuk membentuk Forum Anak desa dan Satgas PPA desa	

			Kabupaten					

Analisis Kesesuaian antara Kinerja Program dan Kegiatan yang sudah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2022

Perangkat Daerah	Uraian Program	Jumlah Indikator Kinerja Program	Rata-rata Tingkat Ketercapaian Indikator KinerjaProgram (%)	Jumlah Indikator Kinerja Kegiatan	Rata-rata Tingkat Ketercapaian Indikator Kinerja Kegiatan (%)	Tingkat Kesesuaian Kinerja Program dan Kegiatan (%)
1	2	3	4	5	6	7 (4/6)
DINAS P2KBP3A	**PROGRAM PENGARUS UTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN**	1	100%	2	100%	100%
	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	1	100%	2	95%	105%
	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	1	125%	2	100%	125%

	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	1	100%	3	100%	100%

3. DKPP

Capaian Program dan kegiatan urusan pemerintahan

PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9
DKPP		**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA**	**Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintahan daerah**	**100%**	**100%**			
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja yang disusun tepat	100%	100%			

			waktu					
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Cakupan pelaksanaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100%	100%			
		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Cakupan pelaksanaan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	100%	100%			
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Cakupan pelaksanaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100%	100%			

		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%	100%			
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Cakupan pelaksanaan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%	100%			
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan pelaksanaan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan	100%	100%			

			Daerah					
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan pelaksanaan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	100%			
		PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN DAN KEMANDIRIAN PANGAN	**Cakupan pemanfaatan infrastruktur dan pendukung kemandirian pangan**	**100%**	**100%**	Mahalnya harga pupuk dengan ketersediaan pupuk yang terbatas memicu petani untuk beralih ke komoditas selain padi sehingga menyebabkan produksi gabah berkurang.	Memastikan ketersedian pangan bagi masyarakat mencukupi melalui pemantauan di sisi produksi, cadangan pangan masyarakat serta stok yang ada di gudang distributor/ penggilingan serta	
		Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan	Jumlah rumusan kebijakan ketahanan	1 rumusan	1 rumusan			

		sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	pangan yang ditetapkan			Perubahan iklim dan cuaca ekstrim yang sulit diprediksi juga mempengaruhi produksi gabah; Permasalahan produksi juga terjadi di daerah lain sehingga ketersediaan beras menurun mengakibatkan beras masuk dari daerah lain ke Kabupaten Kediri juga berkurang; Stok Bulog Nasional sampai dengan akhir musim panen berikutnya (Februari 2023) tidak sesuai target yakni sebesar	pemantauan harga pangan di tingkat konsumen (pasar). Koordinasi juga senantiasa dilakukan dengan Bulog terkait stok.	
		PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	**Koefisien variasi harga pangan utama**	**9%**	**9%**			
			Skor Pola Pangan Harapan	**94,6**	**92**			
			Jumlah cadangan pangan masyarakat	**100 ton**	**216,04 ton**			
		Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/ Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	Jumlah penyaluran pangan pokok ke Toko Tani Indonesia	5 ton	5,6 ton			

		Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota	Jumlah lumbung pangan yang dikelola masyarakat	24 unit	25 unit	1,2 juta ton hanya terpenuhi 300 ribu ton. Ini berdampak pada penurunan stok Bulog di daerah		
		Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat dalam Rangka Pemenuhan Konsumsi Pangan B2SA	7 unit	7 unit	Pola konsumsi masyarakat masih cenderung berbahan beras dan tepung terigu	Dari sisi konsumsi pangan, konsumsi akan beras diupayakan menurun melalui diversifikasi pangan berbasis sumber daya lokal. Kegiatan yang dilakukan untuk penganekaragaman konsumsi pangan antara lain dengan pemberdayaan masyarakat dalam pemanfaatan	Dalam kurun waktu tahun 2022 , DKPP mendorong terwujudnya ketahanan pangan di tingkat rumah tangga dengan melaksanakan kegiatan pemanfaatan lahan pekarangan yang kurang produktif melalui

							pekarangan sebagai sumber pangan keluarga dan sumber pendapatan keluarga. Masyarakat diberikan pelatihan dan bantuan bibit tanaman sayur dan buah serta sarana produksi pertanian untuk dibudidayakan di pekarangan. Selain itu dilaksanakan juga sosialisasi konsumsi produk peternakan sebagai sumber protein hewani sehingga diharapkan	Pekarangan Pangan Lestari (P2L). Kegiatan ini bertujuan untuk memberdayakan masyarakat mulai tingkat rumah tangga untuk menyediakan sumber pangan dan gizi bagi keluarga melalui pemanfaatan pekarangan. Bentuk kegiatan berupa sosialisasi dan pelatihan serta pemberian bantuan

							masyarakat mengetahui pentingnya protein hewani dalam pemenuhan gizi. Dengan adanya diversifikasi pangan yang bergizi dan seimbang, diharapkan ketergantungan konsumsi beras menurun sehingga dapat mendukung stabilitas ketahanan pangan.	bibit/benih tanaman sayur dan sarana produksi pertanian pekarangan kepada 260 orang kader PKK desa, ibu rumah tangga dan kelompok wanita tani di 13 lokasi. Dengan pelaksanaan kegiatan P2L yang berkelanjutan diharapkan dapat menjadi sumber pendapatan keluarga serta

								mendukung upaya Pemerintah Kabupaten Kediri dalam penanganan stunting.
		PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	**Jumlah penanganan desa rentan pangan**	2 desa	2 desa			
		Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah event penanganan desa rentan rawan pangan	2 unit	2 unit			

			yang dilaksanakan					
		PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	**Persentase keamanan pangan segar**	**73%**	**78,57%**			
		Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah pelaku usaha pangan segar yang diberikan pengawasan keamanan pangan	280 orang	280 orang	Masih ditemukan produk pangan segar asal tumbuhan (PSAT) yang mengandung residu pestisida berlebih	Pembinaan dan pelatihan keamanan pangan segar terus dilakukan; Fasilitasi sertifikasi keamanan PSAT da ijin edar PSAT-PDUK dalam rangka meningkatkan daya saing produk	
		PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	**Jumlah SPR yang terbentuk**	**5 SPR**	**5 SPR**	Sistem usaha peternakan yang masih bersifat tradisional belum bisa menjamin kesejahteraaan	Untuk memajukan dan mengembangkan sektor peternakan sebagai salah satu kontributor PDRB	Dalam rangka upaya pengendalian inflasi dampak dari kenaikan harga BBM
		Pengawasan Penggunaan Sarana	Cakupan Pengawasan	100%	100%			

		Pertanian	Penggunaan Sarana Pertanian			peternak. Kegiatan beternak lebih dianggap sebagai tabungan sementara jangka pendek dan tidak berkelanjutan.Selain itu mahalnya harga pakan	sektor pertanian, DKPP Kabupaten Kediri berupaya meningkatkan kapasitas peternak dan kelompok ternak dalam peternakan yang berwawasan	khususnya di sektor peternakan, pada tahun 2022 telah disalurkan bantuan stimulus untuk mendorong usaha
		Peningkatan Mutu dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Cakupan Peningkatan Mutu dan Peredaran Benih/ Bibit Ternak	100%	100%			

		Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak, dan Hijauan Pakan Ternak dalam Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/ Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak	100%	100%	pabrikan terutama untuk ayam petelur seringkali tidak sebanding dengan harga jual telur sehingga potensi kerugian cukup besar. Usaha peternakan yang tradisional, kurang menerapkan intervensi teknologi dan belum berwawasan agribisnis dipandang kurang menarik bagi generasi milenial sebagai salah satu pilihan mata pencaharian. Usaha peternakan	agribisnis mulai hulu sampai dengan hilir. Salah satunya dengan menyelenggarakan Sekolah Peternakan Rakyat (SPR), yakni sarana transfer ilmu pengetahuan dan teknologi untuk membangun kesadaran peternak dan mendorong tindakan kolektif. Melalui SPR, peternak berskala kecil baik individu maupun yang sudah tergabung dalam kelompok atau asosiasi didorong untuk	peternakan bagi 1.794 peternak unggas skala kecil agar tetap bertahan di tengah kenaikan harga pakan yang sangat memepengaruhi produksi peternakan unggas. Selanjutnya terus dilaksanakan kegiatan peningkatan kemampuan peternak dalam meningkatkan produksi peternakan

						dianggap kurang menguntungkan dan kurang menjanjikan kesejahteraan.	berkonsolidasi membangun perusahaan kolektif yang dikelola secara profesional dalam satu manajemen. Ini merupakan salah satu upaya untuk menjadikan peternak berdaulat dan memiliki posisi tawar lebih tinggi. Adanya Pengembangan Desa Korporasi Sapi di Kecamatan Ngadiluwih, yakni program dari Kementan yang menyatukan atau mengkonsolidasika	secara berkelanjutan melalui pelatihan peningkatan produksi peternakan ruminansia dan non ruminansia serta pelatihan pengembangan agribisnis peternakan (pengolahan hasil peternakan) yang melibatkan kelompok muda sebagai peserta yang bertujuan mendorong motivasi peternak muda dalam

							n kelompok-kelompok ternak dalam satu kelembagaan dan dengan sistim pemeliharaan ternak yang terintegrasi dari hulu hingga hilir dengan dibentuk koperasi juga akan terus didampingi dan didorong hingga mencapai tujuan yang diharapkan, yakni meningkatkan populasi dan produksi ternak dalam negeri yang bermuara pada kesejahteraan	mengembangkan usaha peternakan yang modern dan berteknologi. Pelatihan ini sekaligus juga memberikan gambaran analisis usaha peternakan sehingga menarik minat pemuda untuk memilih beternak sebagai sumber pendapatan yang menjanjikan. Dalam rangka upaya peningkatan

							peternak. Dalam rangka pengendalian inflasi dampak kenaikan harga BBM, diberikan bantuan stimulus bagi peternak unggas agar mampu mempertahankan dan melanjutkan usaha peternakan. Sedangkan untuk kelompok ternak yang telah berbadan hukum, diberikan hibah uang untuk pengembangan peternakan.	usaha peternakan, tahun 2022 telah dilaksanakan hibah uang untuk pengembangan peternakan bagi 124 kelompok ternak produktif serta bantuan hibah peralatan pemrosesan pakan ternak dan hibah pengolahan limbah sebagai sumber energi alternatif (biogas). Selain itu terus dilaksanakannya kegiatan

								peningkatan kemampuan peternak dalam meningkatkan produksi peternakan secara berkelanjutan melalui pelatihan peningkatan produksi peternakan ruminansia dan non ruminansia serta pelatihan pengembangan agribisnis peternakan yang bertujuan mendorong berkembangnya usaha

								peternakan dengan wawasan bisnis yang mampu menghasilkan produk peternakan yang berdaya saing. Tahun 2022 telah dilaksanakan pelatihan untuk pengembangan Sekolah Peternakan Rakyat (SPR) sebanyak 3 (tiga) kawasan peternakan sapi potong yakni di Plosoklaten, Mojo dan

								Kandat. Sekolah Peternakan Rakyat (SPR) dilaksanakan untuk meningkatkan skala usaha peternakan dari yang bersifat tradisional menjadi usaha peternakan yang modern dan memanfaatkan perkembangan teknologi sehingga diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan peternak.

		PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	**Cakupan pemanfaatan prasarana peternakan dan kesehatan hewan yang tersedia**	**100%**	**100%**			
		Pembangunan Prasarana Pertanian	Jumlah prasarana pertanian yang dibangun	3 unit	3 unit	Pengadaan airblast freezer RPH gagal realisasi karena rekanan wanprestasi	Mengusulkan penganggaran pengadaan airblast freezer RPH pada Perubahan Perbup APBD 2023	
		Pengembangan Lahan Penggembalaan Umum	Jumlah kelompok ternak yang mendapatkan pelatihan/ pembinaan pengembangan ternak	2 kelompok	2 kelompok			

		PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	**Persentase kasus kesehatan hewan dan kesmavet yang ditangani**	**100%**	**100%**			
			Jumlah unit usaha produk hewan yang tersertifikasi NKV	**5 unit**	**8 unit**			
		Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah kasus penyakit hewan menular pada ternak yang terdeteksi	2.737 kasus	2.737 kasus	Sektor peternakan yang sempat dihantam wabah Penyakit Mulut dan Kuku pada tahun 2022 menyebabkan kerugian bagi peternak dan mempengaruhi perekonomian	Memberikan bantuan stimulus bagi peternak sapi yang kehilangan ternak akibat PMK sebagai motivasi peternak sapi untuk tetap beternak sebagai sumber pendapatan.	

						peternak.	Pelayanan kesehatan hewan terutama penanganan PMK terus dilakukan melalui penyediaan obat-obatan, pemberian vaksinasi dan penyemprotan desinfektan bagi usaha peternakan. Kegiatan ini diiringi dengan peningkatan pengetahuan dan kemampuan peternak dalam pemeliharaan kesehatan hewan melalui bimtek dan sosialisasi kepada	

							masyarakat. *Surveillance* penyakit hewan juga terus dilakukan untuk mendeteksi kasus penyakit hewan menular.	
		Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase Produk Asal Hewan yang lolos uji mikroba	70%	75%	Masih beredarnya produk asal hewan yang tidak memenuhi kaidah ASUH (Aman, Sehat, Utuh dan Halal)	Sosialisasi produk asal hewan yang ASUH; Meningkatkan pelayanan Rumah Potong Hewan sebagai tempat pemotongan yang menjamin mutu dan kualitas produk	
		Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah ternak yang mendapatkan pelayanan kesehatan	2600 ternak	2600 ternak			

			hewan terpadu					
		Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner	Jumlah pelaku usaha Produk Asal Hewan yang mendapatkan pembinaan Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesmavet	150 orang	150 orang			
		Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesejahteraan Hewan	Cakupan Penerapan Persyaratan Teknis Kesejahteraan Hewan	70%	75%	Masih ditemukan pemotongan hewan yang tidak memperhatikan kesejahteraan hewan	Sosialisasi dan pelatihan pemotongan hewan bagi jagal terus dilakukan	
		PROGRAM PERIZINAN USAHA	**Jumlah usaha pengolahan**	**6 unit**	**6 unit**			

		PERTANIAN	**hasil peternakan yang terfasilitasi sertifikat ijin edar**					
			Persentase toko obat hewan yang berizin	**72%**	**75%**			
		Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan penerapan hasil pembinaan/ pelatihan usaha peternakan dan usaha hasil peternakan	**70%**	**75%**	Peserta pelatihan usaha hasil peternakan sebagian telah menerapkan hasil pelatihan yang didapat namun masih merasa kesulitan mendapatkan sertifikat izin edar produk	Peningkatan wawasan dan kemampuan pelaku usaha hasil peternakan terus ditingkatkan dengan pelatihan yang diselenggarakan. Fasilitasi pada pelaku usaha olahan hasil peternakan dalam	

							pengurusan izin edar produk juga terus dilaksanakan.	
		Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah pelaku usaha obat hewan tingkat pengecer yang mendapatkan izin usaha	**5 unit**	**5 unit**	Masih ditemukan toko obat hewan yang belum berizin karena terkendala belum ada Penanggungjawab Toko Obat Hewan (PJTOH)	Pembinaan dan pengawasan toko obat hewan terus dilakukan diiringi pelaksanaan pelatihan dan sosialisasi bagi PJTOH	

Analisis Kesesuaian antara Kinerja Program dan Kegiatan yang sudah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2022

Perangkat Daerah	Uraian Program	Jumlah Indikator Kinerja Program	Rata-rata Tingkat Ketercapaian Indikator Kinerja Program (%)	Jumlah Indikator Kinerja Kegiatan	Rata-rata Tingkat Ketercapaian Indikator Kinerja Kegiatan (%)	Tingkat Kesesuaian Kinerja Program dan Kegiatan (%)
1	2	3	4	5	6	7 (4/6)
DKPP	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA**	1	100,00%	8	100,00%	100,00%
	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN DAN KEMANDIRIAN PANGAN	1	100,00%	1	100,00%	100,00%
	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	3	137,76%	3	105,39%	130,72%
	PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	1	100,00%	1	100,00%	100,00%
	PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	1	107,63%	1	100,00%	107,63%
	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	1	100,00%	3	100,00%	100,00%

	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	1	100,00%	2	100,00%	100,00%
	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	2	130,00%	5	128,57%	101,11%
	PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN	2	102,08%	2	103,57%	98,56%
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA		**13**	**108,61%**	**26**	**104,17%**	**104,26%**

4. Dinas Lingkungan Hidup

Capaian Program dan kegiatan urusan pemerintahan

PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Dinas Lingkungan Hidup		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Cakupan penyediaan administrasi penunjang urusan	100%	100 %			

		KABUPATEN/KOTA	pemerintahan daerah					
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dok. Perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja yang disusun	9 dokumen	11 dokumen			
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen pelaksanaan administrasi keuangan	68 Dokumen	68 Dokumen			
		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Administrasi BMD	16 dokumen	16 dokumen			

		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah kegiatan peningkatan kapasitas pegawai	2 kegiatan	1 kegiatan	adanya kegiatan yang tidak dilaksanakan dan anggaran digeser untuk kegiatan prioritas lainnya	memprioritaskan kegiatan yang penting	
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen administrasi umum perangkat daerah	68 dokumen	68 dokumen			
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah BMD yang disediakan	24 unit	24 unit			
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Dokumen penyediaan jasa penunjang urusan	47 dokumen	49 dokumen			

			pemerintah					
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah BMD yang dipelihara	51 unit	51 unit			
		PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	Tingkat ketersediaan kajian pengelolaan lingkungan hidup	67%	67%			
		Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	1 dokumen	1 dokumen			

			(RPPLH) yang disusun atau di review					
		Penyelengaraan Kajian Lingkungan Hidup strategis (KLHS) Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen KLHS dan KRP yang disusun	1 dokumen	0	penyusunan KLHS RDTR berkaitan dengan Dinas PUPR pada tahun 2022 tidak jadi menyusun RDTR, karena disusun pada 2023		
		PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Prosentase hasil pemantauan kualitas lingkungan yang memenuhi	76,19%	87,48%			

			baku mutu					
		Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Jumlah laporan uji kualitas lingkungan (air, udara dan biomassa) yang tersusun	3 laporan	3 laporan			
		Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Jumlah kegiatan penanggulangan pencemaran	4 kali	4 kali			ok
		Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	jumlah kegiatan pemulihan pencemaran yang dilaksanakan	1 kegiatan	3 kegiatan			

		PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	Persentase Ruang Terbuka Hijau kawasan perkotaan(%)	0,04%	0,035%	perhitungan RTH yang dilaksanakan Dinas Lingkungan Hidup yang diampu Bidang Pertamanan masih pada luasan taman-taman kota yang dikelola. . adanya updating data luasan RTHKP pada tahun2022	Untuk kedepannya akan dilaksanakan kegiatan inventarisasi luasan RTH sehingga akan didapatkan luasan RTH keseluruhan di Kabupaten Kediri	

		Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota	luas taman/jalur hijau/taman kehati yang dikelola (ha)	15,9 Ha	14,745078 Ha	perhitungan RTH yang dilaksanakan Dinas Lingkungan Hidup yang diampu Bidang Pertamanan masih pada luasan taman-taman kota yang dikelola. . adanya updating data luasan RTHKP pada tahun2022	Untuk kedepannya akan dilaksanakan kegiatan inventarisasi luasan RTH sehingga akan didapatkan luasan RTH keseluruhan di Kabupaten Kediri	
		PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN	Jumlah kegiatan/usaha yang dibina terkait Pengelolaan Limbah B3	174 usaha/kegiatan	178 usaha/kegiatan			

		BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)						
		Penyimpanan Sementara Limbah B3	jumlah pengelola LB3 difasilitasi	40 usaha/kegiatan	44 usaha/kegiatan			
		Pengumpulan Limbah B3 dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	jumlah pengumpul LB3 difasilitasi	20 usaha/kegiatan		tidak ada usaha pengumpulan LB3 di wil kab kediri selama tahun 2021	sesuai peraturan PP22 kewenangan kab/kota hanya koordinasi dengan provinsi terkait usaha pengumpulan limbah B3, dan selama 2021 tidak ada usaha/kegiatan yang	

							mengajukan perijinan untuk melaksanakan kegiatan pengumpulan limbah B3	
		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	Persentase Usaha dan/atau Kegiatan berizin Lingkungan dan PPLH yang dibina	67%	88,00%			

		Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah usaha dan/atau kegiatan yang dibina dan/atau diawasi	82 usaha	73 lembaga	Keterbatasan pejabat pengawas LH daerah untuk terjun ke lapangan	Perusahaaan diminta mengirim laporan pengelolaan lingkungan secara rutin	
		PROGRAM PENGAKUAN KEBERADAAN MASYARAKAT HUKUM ADAT (MHA), KEARIFAN LOKAL DAN HAK MHA YANG TERKAIT DENGAN PPLH	Persentase MHA dan kearifan lokal terkait PPLH yang dibina	0	0			

		Pengakuan MHA, kearifan lokal, pengetahuan tradisional, dan hak MHA yang terkait dengan PPLH	jumlah kearifan lokal yang diakui	10 kelompok	0	Belum dapat dialksanakan inventarisasi kearifan lokal PPLH karena keterbatasan informasi sejarah	inventarisasi potensi kerarifan lokal yang bergerak di bidang pengelolaan LH	
		PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Persentase Lembaga Kemasyarakatan yang mendapat penyuluhan LH	15,90%	15,90%			

		Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	jumlah lembaga kemasyarakatan yang dibina	40 Lembaga	100%			
		PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Jumlah Event Penghargaan Lingkungan Hidup yang diadakan atau diikuti dalam 1 tahun	2 kali	2 kali			
		Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	jumlah penghargaan yg diberikan	2 kali	3 kali			

		PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase Penanganan pengaduan / kasus pencemaran lingkungan yang dapat diselesaikan	82,50%	100,00%			
		Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota	Persentase pengaduan pencemaran dan sengketa lingkungan yang ditindaklanjuti	100%	100%			

		PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Prosentase sampah yang dikelola	41,75%	20,73%	persentase sampah terkelola menjadi turun dan tidak memenuhi target disebabkan kenaikan jumlah timbulan sampah Kab Kediri yang naik, koefisien (timbulan sampah per orang per hari) yang semula sebesar 0.32 kg/orang/hari naik menjadi 0.5 kg/orang/hari, serta adanya kenaikan jumlah	menggunakan standara koefisien sesuai permen LHK dan penggunaan satu data	

						penduduk kab Kediri.		
		Pengelolaan Sampah	Jumlah sampah yang dikelola (ton/th)	77854,5	62214,5 ton	secara umum sampah terkelola naik dari tahun sebelumnya, tetapi belum ada penambahan	menggiatkan upaya pengurangan sampah mulaidari sumbernya melaui	

						wilayah layanan. Penanganan sampah naik dari pengelolaan residu sampah dari desa-desa yang sudah mempunyai fasilitas pengelolaan sampah, sebagian fasilitas pengelolaan sampah tersebut sudah terbangun tetapi belum beroperasi	pembinaan dansosialisasi	

Analisis Kesesuaian antara Kinerja Program dan Kegiatan yang sudah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2022

Perangkat Daerah	Uraian Program	Jumlah Indikator Kinerja Program	Rata-rata Tingkat Ketercapaian Indikator KinerjaProgram (%)	Jumlah Indikator Kinerja Kegiatan	Rata-rata Tingkat Ketercapaian Indikator Kinerja Kegiatan (%)	Tingkat Kesesuaian Kinerja Program dan Kegiatan (%)
1	2	3	4	5	6	7 (4/6)
DINAS LINGKUNGAN HIDUP	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1	100%	8	93,75	106,67%
	PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	1	101%	2	100	100,50%
	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	1	115%	3	100	114,82%
	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	1	87,5%	1	92,74	94,35%

	PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	1	102,3%	2	55	186,00%
	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	1	132,0%	1	89,000	148,31%
	PROGRAM PENGAKUAN KEBERADAAN MASYARAKAT HUKUM ADAT (MHA), KEARIFAN LOKAL DAN HAK MHA YANG TERKAIT DENGAN PPLH	1	0%	1	0	0,00%
	PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	1	100%	1	90	111,11%

	PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	1	100%	1	100	100,00%
	PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	1	121%	1	100	121,21%
	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	1	49,7%	1	79,91	62,14%

5. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Capaian Program dan kegiatan urusan pemerintahan

PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Meningkatkan kualitas pelayanan administrasi kependuduka	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH**	Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintahan	100%	100,00%	Terbatasnya blangko KTP Elektronik yang disediakan oleh Dirjen Dukcapil	Pengajuan Hibah Dana ke Dirjen Dukcapil untuk pengadaan blangko KTP	Nihil

	n	**KABUPATEN/KOTA**	daerah kabupaten/kota				Elektronik	
		Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang disusun	9 dokumen	9 dokumen			
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen pelaksanaan administrasi keuangan	25 dokumen	25 dokumen			
		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Cakupan pelaksanaan administrasi Barang Milik Daerah pada	100%	100%			

			Perangkat Daerah					
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah kegiatan peningkatan kapasitas pegawai	4 kegiatan	4 kegiatan			
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan pelaksanaan administrasi umum	100%	100%			
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan pelaksanaan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah	100%	100%			
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan pelaksanaan Penyediaan	100%	100%			

			Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah laporan aset tetapp yang terpelihara	5 laporan	5 laporan			
		PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	Kepemilikan dokumen kependudukan	100%	100%			
		Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Cakupan perekaman dan pencetakan KTP Elektronik	97,5%	97,13%			
			Cakupan Kepemilikan KK	85%	95,9%			
			Cakupan kepemilikan KIA	50%	40,63%			
		Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk	Jumlah laporan penyelenggaraan pendaftaran	1 Laporan	1 Laporan			

			penduduk					
		PROGRAM PENCATATAN SIPIL	Meningkatnya kualitas dan kuantitas layanan pencatatan sipil	100%	100%			
		Pelayanan Pencatatan Sipil	Persentase anak usia 0 - 18 tahun yang memiliki Akta Kelahiran	97,5%	94,38%			
			Kematian yang dilaporkan dan dibuatkan akta kematian	100%	100%			
			Perkawinan yang dilaporkan dan diberikan akta perkawinan	100%	100%			
			Perceraian yang dilaporkan dan	100%	100%			

			dibuatkan akta perceraian					
		Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	Tertib Administrasi Pencatatan Sipil	100%	100%			
		PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	Peningkatan kualitas pelayanan administrasi kependudukan	100%	100%			
		Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Data	Tersedianya data kependudukan dan dimanfaatkan oleh lembaga pengguna	2 data	2 data			
		Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah jaringan sistem informasi administrasi kependudukan	343 desa + 26 kec	343 desa + 26 kec			

		PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN	Tersusunnya buku profil kependudukan	1 dokumen	1 dokumen			
		Penyusunan Profil Kependudukan	Jumlah Buku Profil Perkembangan Penduduk	1 dokumen	1 dokumen			

Analisis Kesesuaian antara Kinerja Program dan Kegiatan yang sudah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2022

Perangkat Daerah	Uraian Program	Jumlah Indikator Kinerja Program	Rata-rata Tingkat Ketercapaian Indikator KinerjaProgram (%)	Jumlah Indikator Kinerja Kegiatan	Rata-rata Tingkat Ketercapaian Indikator Kinerja Kegiatan (%)	Tingkat Kesesuaian Kinerja Program dan Kegiatan (%)
1	2	3	4	5	6	7 (4/6)
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1	100%	8	100%	100%
	PROGRAM PENDAFTARAN	1	100%	4	83%	120%

	PENDUDUK					
	PROGRAM PENCATATAN SIPIL	1	100%	5	99%	101%
	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	1	100%	2	100%	100%
	PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN	1	100%	1	100%	100%

6. DPMPD

Capaian Program dan Kegiatan Urusan Pemerintahan

PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9
DPMPD	Meningkatkan kemandirian	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan layanan administrasi	100%	100%			BUMDesa merupakan

	masyarakat dan desa	Kabupaten/Kota	perkantoran					sokoguru perekonomian di desa sesuai Undang-Undang Desa nomor 6 Tahun 2014 dimana diamanatkan BUM Desa dibentuk oleh Pemerintah Desa untuk mendayagunakan segala potensi ekonomi, kelembagaan perekonomian, serta potensi sumber daya alam dan sumber daya manusia dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa. Di kabupaten
		Kegiatan Perencanaan,penganggaran,dan evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan dan anggaran Perangkat Daerah	3 laporan	3 laporan			
		Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan Pertanggungjawaban keuangan	12 laporan	12 laporan			
		Kegiatan Administrasi barang milik daerah pada SKPD	Cakupan layanan administrasi barang milik daerah	1 kegiatan	1 kegiatan			
		Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan layanan Administrasi Umum	1 tahun	1 tahun			

								kediri telah dilaksanakan kegiatan pelatihan pengelolaan keuangan BUMDes yang bekerjasama dengan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dengan penerapan Sistem Informasi Akuntansi BUMDes (SIA BUMDES) pada Tahun Anggaran 2022 bagi semua BUMDes di Kabupaten Kediri sehingga diharapkan pengelolaan keuangan

								BUMDes dapat dilaksanakan secara lebih akuntabel dan pengawasan dapat dilakukan dengan lebih efektif.
		Program Penataan Desa	Persentase desa yang proses penetapan dalam penataan desa	100%	100%			Di Kabupaten Kediri keberadaan BUMDesa sudah diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 7 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Desa dan Peraturan Bupati Kabupaten Kediri Nomor 22 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan
		Kegiatan Penyelenggaraan Penataan Desa	Jumlah desa yang difasilitasi dalam penataan desa	40 desa	40 desa			
		Program Peningkatan Kerjasama Desa	Persentase kerjasama antara desa yang terfasilitasi	100%	100%			
		Kegiatan Fasilitasi kerja sama antar desa	Jumlah kerjasama desa yang dilakukan antar desa dan pihak ketiga	1 fasilitasi kerja sama	1 fasilitasi kerja sama			

							Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 7 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Desa. Keberadaan BUMDes memang sangat diharapkan dapat menjadi pendorong tumbuh kembangnya perekonomian di desa. Namun hingga saat ini ada BUMDesa yang masih belum sesuai harapan dan baru ada beberapa BUMDes yang sudah dapat memberikan kontribusi baik langsung maupun
		Program Administrasi Pemerintahan Desa	Persentase desa yang difasilitasi	100%	100%		
		Kegiatan Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan administrasi pemerintahan desa	Jumlah desa yang dibina dalam menjalankan manajemen pemerintahan desa	343 desa	343 desa		

								tidak langsung bagi perekonomian desa. Langkah yang sudah diambil oleh DPMPD adalah melaksanakan pembinaan dan pelatihan yang bersifat administratif (pengelolaan keuangan) dan teknis (pelatihan usaha dan pemasaran) di tahun anggaran 2022. Ke depan kami mengharapkan dapat melaksanakan kegiatan yang lebih dapat

								mengakselerasi pengembangan BUMDes dengan melaksanakan kegiatan yang bersifat teknis dan kolaboratif serta mendorong kesadaran pengelola BUMDes dalam membaca peluang usaha dan pemenuhan kebutuhan masyarakat sehingga dapat meminimalisir kemungkinan kegagalan usaha.
		Program Pemberdayaan Lembaga kemasyarakatan,lembaga adat dan masyarakat hukum adat	Persentase lembaga kemasyarakatan desa dan lembaga adat desa yang	100%	100%			

			dibina					
		Kegiatan Pemberdayaan lembaga kemasyarakatan yang bergerak di bidang pemerintahan desa dan lembaga adat tingkat daerah kab/kota serat pemberdayaan masyarakat hukum adat yang masyarakat pelakunya hukum adat yang sama dalam daerah kabupaten/kota	Jumlah lembaga kemasyarakatan desa dan lembaga adat desa yang difasilitasi	343 desa	343 desa			

Analisis Kesesuaian antara Kinerja Program dan Kegiatan yang sudah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2022

Perangkat Daerah	Uraian Program	Jumlah Indikator Kinerja Program	Rata-rata Tingkat Ketercapaian Indikator KinerjaProgram (%)	Jumlah Indikator Kinerja Kegiatan	Rata-rata Tingkat Ketercapaian Indikator Kinerja Kegiatan (%)	Tingkat Kesesuaian Kinerja Program dan Kegiatan (%)
1	2	3	4	5	6	7 (4/6)
DPMPD	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	1	100%	4	100%	100%

	Program Penataan Desa	1	100%	1	100%	100%
	Program Peningkatan Kerjasama Desa	1	100%	1	100%	100%
	Program Administrasi Pemerintahan Desa	1	100%	1	100%	100%
	Program Pemberdayaan Lembaga kemasyarakatan,lembaga adat dan masyarakat hukum adat	1	100%	1	100%	100%

7. DP2KBP3A

Capaian Program dan kegiatan urusan pemerintahan

PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9
DP2KBP3A	1. Penyebarluasan program Bangga	**PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK**	**Persentase desa/ kelurahan yang memiliki**	100%	100%	Pemanfaatan GDPK belum maksimal	Advokasi pada SKPD untuk memanfaatkan GDPK secara	

	Kencana sampai ke desa		**data mikro keluarga**				maksimal oleh Bappeda	
	2. Fasilitasi pendampingan tenaga penyuluh di kegiatan masyarakat	Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk	Jenis implementasi sinkronsasi kebijakan pengendalian kuantitas penduduk	2 jenis	2 jenis	Sebagian Sekolah yang dibentuk SSK belum melaksanakan secara maksimal	Peningkatan koordinasi dengan sekolah yang telah dibentuk SSK	
	3. Penyediaan Alat dan Obat Kontrasepsi bagi calon akseptor KB	Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen evaluasi Program KKBPK	1 dokumen	1 dokumen			

	4. Penyediaan layanan konseling keluarga	**PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)**	Persentase Unmeet need	10,70%	12,02%	1. kurangnya kesadaran PUS untuk berKB 2.masih terdapat masyarakat yang menolak program KB dikarenakan adat/kepercayaan 3. adanya kekhawatiran dari sebagian masyarakat akan dampak negatif dari alat kontrasepsi 4. Adanya perubahan system pencatatan dan pelaporan yang mengakibatkan data belum semuanya	1. melakukan KIE kepada masyarakat khususnya PUS yang tidak menginginkan anak 2. melakukan peningkatan akses pelayanan KB 3. advokasi dan KIE kepada tokoh masyarakat yang berpengaruh 4. melakulan verifikasi dan validasi terhadap data yang telah masuk	

						tercover		
		Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB sesuai Kearifan Budaya Lokal	Jenis kegiatan advokasi dan KIE yang mendukung program KKBPK	5 jenis	5 jenis			
		Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	Persentase tenaga penyuluh KB yang mendapatkan	90%	100%			

			pembinaan					
		Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	Jenis pelayanan dan pendistribusian alkon	5 jenis	5 jenis			
		Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	Jumlah kampung KB yang di bina	82 Kampung KB	82 Kampung KB			

		PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	**Cakupan keluarga sasaran menjadi anggota kelompok kegiatan (BKB, BKR, BKL)**	BKB 31,93%; BKR 27,1%; BKL 34,87%	BKB 30,09%; BKR 24,05%; BKL 33,42%	1. Kurangnya sosialisasi untuk menumbuhkan minat keluarga sasaran kelompok kegiatan untuk mengikutinya 2. SDM yang masih kurang	1. Melaksanakan KIE pada sasaran untuk menjadi anggota kelomopok kegiatan 2. melatih kader-kader kelompok kegiatan untuk meningkatkan pengetahuannya 3. Melakukan proyek percontohan kelompok kegiatan	
			Persentase perkawinan perempuan usia < 20 tahun	16,75%	15,61%			
		Pelaksanaan Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan	Jumlah kelompok sasaran pembangunan	6 sasaran	6 sasaran			

		dan Kesejahteraan Keluarga	keluarga melalui pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga					
		Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Jumlah pembina dan kelompok PIK yang dibina	90 kelompok	90 kelompok			
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	**Cakupan penunjang urusan pemerintah daerah**	80%	100%			

		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jenis dokumen perangkat daerah yang diselesaikan	2 jenis	2 jenis			
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	layanan administrasi keuangan perangkat daerah	12 bulan	2 bulan			
		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Layanan penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah	12 bulan	12 bulan			
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Layanan admininstrasi umum perangakat daerah	12 bulan	12 bulan			
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan	Layanan jasa penunjang	12 bulan	12 bulan			

		Pemerintahan Daerah	pemerintah daerah yang diselesaikan					
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Layanan barang milik daerah yang terpelihara	12 bulan	12 bulan			

Analisis Kesesuaian antara Kinerja Program dan Kegiatan yang sudah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2022

Perangkat Daerah	Uraian Program	Jumlah Indikator Kinerja Program	Rata-rata Tingkat Ketercapaian Indikator Kinerja Program (%)	Jumlah Indikator Kinerja Kegiatan	Rata-rata Tingkat Ketercapaian Indikator Kinerja Kegiatan (%)	Tingkat Kesesuaian Kinerja Program dan Kegiatan (%)
1	2	3	4	5	6	7 (4/6)
DINAS P2KBP3A	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	1	100%	2	100%	100%
	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	1	87,66%	4	102,77%	85%

	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	2	100,29%	2	100%	100%
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	1	125,00%	5	100%	125%

8. Dinas Perhubungan

Capaian Program dan kegiatan urusan pemerintahan tahun anggaran 2022

PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Dinas Perhubungan Kab. Kediri	Meningkatnya Pelayanan Transportasi Daerah	**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintahan daerah	100%	97,98%	97,98	Adanya perbedaan harga satuan barang di SIPD lebih besar dengan realisasi di lapangan sehingga terjadi sisa pengadaan/sisa belanja atau sisa perhitungan kontrak serta sisa gaji dan tunjangan	Menyusun strategi penyerapan anggaran dan pelaksanaan keterbukaan informasi publik serta pelaksanaan pelayanan publik sesuai dengan Undang-undang	

							Adanya pengunduran penerima bantuan sosial sehingga terjadi sisa anggaran bantuan sosial	Melakukan monitoring dan evalausi terhadap penyerapan anggaran dan sistem pengaduan yang dimiliki	
							Adanya sisa belanja bagi hasil pihak ketiga karena sesuai dengan realisasi PAD parkir berlanggaran atau realisasi PAD dengan penutupan anggaran tidak sama	Meningkatkan kualitas pengelola SDM melalui peningkatan kapasitas pegawai berdasarkan kompetensi serta menyusun rencana pendidikan dan pelatihan	

								secara berkelanjutan	
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	jumlah dokumen perencanaan,penganggaran, dan evaluasi yang tepat waktu	10 dok	10 dok	100,00			
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	jumlah pemenuhan administrasi keuangan perangkat daerah	12 bulan	12 bulan	100,00			
		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	jumlah pemenuhan administrasi barang milik daerah	24 lap	24 lap	100,00			
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah pemenuhan administrasi kepegawaian perangkat daerah	12 bulan	12 bulan	100,00			

		Administrasi Umum Perangkat Daerah	jumlah pemenuhan kebutuhan administrasi umum perangkat daerah	12 bulan	12 bulan	100,00			
		Pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	jumlh pengadaan barang milik daerah	14 unit	14 unit	100,00			
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	jumlah pemenuhan jasa pendukung urusan pemerintah daerah	12 bulan	12 bulan	100,00			
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	jumlah jenis pemenuhan pemeliharaan barang milik daerah	3 jenis	3 jenis	100,00			
		Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan	Persentase peningkatan ketertiban dan keselamatan LLAJ	86,25%	79,66%	92,36			
			Persentase ketersediaan kajian penyelenggaraan dan Pengembangan	20%	20,00%	100,00			

			Bidang Perhubungan						
			Persentase ketersediaan perlengkapan jalan	11,37%	14,68%	129,11			
			Persentase angkutan jalan yang memenuhi standart keselamatan	97%	95,50%	98,45			
		Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kediri	Jumlah dokumen kajian	1 dok	1 dok	100,00			
		Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	jumlah perlengkapan jalan yang tersedia	147 unit	202 unit	137,41			
		Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir	jumlah kegiatan koordinasi dan sinkronisasi perparkiran	4 keg	4 keg	100,00			
		Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	jumlah pemenuhan kebutuhan PKB :	3 paket	3 paket	100,00			
		Pelaksanaan Manajemen dan	jumlah kegiatan pelaksanaan manajemen	10 Keg	10 keg	100,00			

		Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	rekayasa lalu lintas						
		Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/Kota	jumlah kegiatan Andal Lalin	5 keg	5 keg	100,00			
		Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan	Jumlah kegiatan penertiban lalu lintas & pengendalian lalu intas yang dilaksanakan	54 keg	37 keg	68,52			
		Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	jumlah kegiatan pengendalian dan pengawasan pelayanan angkutan orang/barang	45 Keg	96 Keg	213,33			

Analisis Kesesuaian antara Kinerja Program dan Kegiatan yang sudah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2022

Perangkat Daerah	Uraian Program	Jumlah Indikator Kinerja Program	Rata-rata Tingkat Ketercapaian Indikator Kinerja Program (%)	Jumlah Indikator Kinerja Kegiatan	Rata-rata Tingkat Ketercapaian Indikator Kinerja Kegiatan (%)	Tingkat Kesesuaian Kinerja Program dan Kegiatan (%)
1	2	3	4	5	6	7 (4/6)
DINAS PERHUBUNGAN	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1	100%	8	100%	100%
	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan	4	82,12%	8	114,91%	71,46%

9. Dinas Komunikasi dan Informatika

Capaian Program dan kegiatan urusan pemerintahan

PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9

Dinas Komunikasi dan Informatika		**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintahan daerah**	**100%**	**100%**			
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah	4 jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	4 jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah			
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan administrasi keuangan perangkat	20 dokumen	20 dokumen			

			daerah					
		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah laporan administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah	2 dokumen	2 dokumen			
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	30 dokumen	30 dokumen	Barang diskontinyu sehingga tidak bida dibelanjakan	Menyarankan ke BPKAD untuk usulan SSH berikutnya agar tidak mengunci di merek barang agar fleksibel dalam pembelanjaan	

		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penyediaan jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan	12 bulan	12 bulan			
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah (BMD) Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dipelihara	30 unit	30 unit			

	(1)Penguatan komunikasi informasi publik melalui media sosial, media tatap muka, dan radio. **(2)Pengembangan komunikasi tematik melalui program NGOPI (Ngobrol Persoalan dan Solusi).** **(3)Kerjasama dan penguatan jejaring komunikasi media masa, komunitas, dan kelompok informasi**	**PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK**	**Cakupan layanan informasi dan komunikasi publik**	**100%**	**100%**	Minimnya data informasi publik sesuai dengan ketentuan peraturan keterbukaan informasi publik yang disediakan dan dipublikasikan	meningkatkan peran aktif Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Publik (PPID) dalam mengelola, mendokumentasikan, menyediakan, dan menyampaikan berbagai informasi yang dibutuhkan masyarakat	

	masyarakat. (4)Peningkatan komunikasi dan informasi publik NGOPI (Ngobrol Persoalan dan Solusi). (5)Mendorong intensitas komunikasi pemberi pelayanan kepada pengguna layanan untuk selalu melakukan perbaikan layanan guna meningkatkan Indeks Kepuasan Masyarakat							

						Belum adanya klasifikasi informasi publik dan penetapan Daftar Informasi Publik Belum maksimalnya pengelolaan informasi publik terutama dalam penyimpanan, penyediaan dan pendokumentasian informasi publik, baik secara manual maupun digital. PPID Kabupaten Kediri belum memiliki ruang arsip PPID	Membangun sinergitas diantara pejabat PPID Kabupaten Kediri yaitu PPID Utama dan PPID Pembantu Menguatkan layanan informasi publik di Kabupaten Kediri	

						Standar Operasional Prosedur Keterbukaan Informasi Publik yang belum update sesuai dengan ketentuan yang berlaku, diantaranya SOP Pengelolaan Permohonan Informasi, SOP Pengelolaan Keberatan atas Informasi, SOP Penanganan Sengketa Informasi Publik, SOP Uji Konsekuensi Informasi Publik,		

						SOP Penyusunan Daftar Informasi Publik		
						Belum maksimalnya peran aktif PPID Masih kurangnya koordinasi PPID Utama dan PPID Pembantu Kabupaten Kediri		

		Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah informasi yang terkelola	850 konten	2377 konten	Minimnya data informasi publik sesuai dengan ketentuan peraturan keterbukaan informasi publik yang disediakan dan dipublikasikan Belum adanya klasifikasi informasi publik dan penetapan Daftar Informasi Publik	meningkatkan peran aktif Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Publik (PPID) dalam mengelola, mendokumentasikan, menyediakan, dan menyampaikan berbagai informasi yang dibutuhkan masyarakat Membangun sinergitas diantara pejabat PPID Kabupaten Kediri yaitu PPID Utama dan PPID Pembantu	

						Belum maksimalnya pengelolaan informasi publik terutama dalam penyimpanan, penyediaan dan pendokumentasian informasi publik, baik secara manual maupun digital. PPID Kabupaten Kediri belum memiliki ruang arsip PPID	Menguatkan layanan informasi publik di Kabupaten Kediri	

						Standar Operasional Prosedur Keterbukaan Informasi Publik yang belum update sesuai dengan ketentuan yang berlaku, diantaranya SOP Pengelolaan Permohonan Informasi, SOP Pengelolaan Keberatan atas Informasi, SOP Penanganan Sengketa Informasi Publik, SOP Uji Konsekuensi Informasi Publik,	

						SOP Penyusunan Daftar Informasi Publik	
						Belum maksimalnya peran aktif PPID Masih kurangnya koordinasi PPID Utama dan PPID Pembantu Kabupaten Kediri	

	(6)Penyiapan roadmap dan masterplan digitalisasi birokrasi, informasi, dan layanan publik. (7)Pengembangan e-government. (8)Penerapan Tata naskah dinas elektronik. (9) Pengembangan smart-pertanian melalui program desa inovasi tani organik (DITO). (10)Pengembangan ekonomi digital (e-commerce). (11)Penyediaan	**PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA**	**Cakupan layanan jaringan intra Pemerintah Daerah**	**100%**	**100%**	Dinas lain tidak berkonsultasi dengan Dinas kominfo dalam pembuatan aplikasi sehingga banyak terjadi ketidaksesuaian kebutuhan spesifikasi aplikasi dengan server	diharapkan ke depan perencanaan pembuatan aplikasi dikonsultasikan dengan dinas kominfo sejak awal penganggaran	

	infrastruktur pendukung layanan teknologi informatika. (12)Pengembangan aplikasi pendukung layanan publik, informasi, promosi potensi daerah, pariwisata, dan aktivitas penunjang masyarakat lainnya. (13)Peningkatan kualitas dan kuantitas inovasi pelayanan publik. (14) Inovasi pelayanan publik								

	jemput bola. **(15)Peningkatan tertib administrasi arsip dan pelayanan publik.** **(16)Penyediaan mall pelayanan di kecamtan atau desa.** **(17)Penyediaan mobil siaga.**						Server ada yang rusak, tempat server terbatas, listrik back up kurang berfungsi semestinya, kapasitas UPS terbatas.	Memperbesar Kapasitas UPS dengan membeli tambahan UPS, memperluas ruangan, peremajaan server, menambahrak server.	

						Kurangnya koordinasi dalam pengelolaan website, banyak aplikasi yang tidak dikelola OPD, sebagian aplikasi dibobol hacker	membentuk tim pengelola website, meminta OPD untuk mengelola aplikasinya dengan baik, memperbaiki keamanan aplikasi, meningkatkan kompetensi SDM tenaga IT	
						Banyak pedoman pengelolaan TI yang belum disusun, lemah dalam dokumentasi TI	Menyusun SK dan Perbup, mendokumentasikan kegiatan pengelolaan TI	
						Jaringan mati saat jam kerja karena pemadaman listrik dan perangkat	Memperbaiki perangkat jaringan dan peremajaan perangkat jaringan	

						jaringan tua		
		Pengelolaan Nama Domain yang telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Nama Domain dan Sub Domain di lingkup Pemerintah daerah yang terkelola	150 domain/sub domain	150domain/sub domain	Dinas lain tidak berkonsultasi dengan Dinas kominfo dalam pembuatan aplikasi sehingga banyak terjadi ketidaksesuaian kebutuhan spesifikasi aplikasi dengan server	diharapkan ke depan perencanaan pembuatan aplikasi dikonsultasikan dengan dinas kominfo sejak awal penganggaran	

		Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah sistem informasi pemerintah darah yang terkelola	170 sistem informasi	170 sisten informasi	Server ada yang rusak, tempat server terbatas, listrik back up kurang berfungsi semestinya, kapasitas UPS terbatas.	Memperbesar Kapasitas UPS dengan membeli tambahan UPS, memperluas ruangan, peremajaan server, menambahrak server.	

						Kurangnya koordinasi dalam pengelolaan website, banyak aplikasi yang tidak dikelola OPD, sebagian aplikasi dibobol hacker	membentuk tim pengelola website, meminta OPD untuk mengelola aplikasinya dengan baik, memperbaiki keamanan aplikasi, meningkatkan kompetensi SDM tenaga IT	
						Banyak pedoman pengelolaan TI yang belum disusun, lemah dalam dokumentasi TI	Menyusun SK dan Perbup, mendokumentasikan kegiatan pengelolaan TI	
						Jaringan mati saat jam kerja karena	Memperbaiki perangkat jaringan dan peremajaan	

						pemadaman listrik dan perangkat jaringan tua	perangkat jaringan	

Analisis Kesesuaian antara Kinerja Program dan Kegiatan yang sudah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2022

Perangkat Daerah	Uraian Program	Jumlah Indikator Kinerja Program	Rata-rata Tingkat Ketercapaian Indikator KinerjaProgram (%)	Jumlah Indikator Kinerja Kegiatan	Rata-rata Tingkat Ketercapaian Indikator Kinerja Kegiatan (%)	Tingkat Kesesuaian Kinerja Program dan Kegiatan (%)
1	2	3	4	5	6	7 (4/6)
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	1	100%	6	100%	100%
	PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	1	100%	1	100%	100%
	PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA	1	100%	1	100%	100%

10. Dinas Koperasi dan Usaha Mikro

Capaian Program dan kegiatan urusan pemerintahan

PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	Pemberdayaan peningkatan produktivitas, nilai tambah, akses pasar, akses pembiayaan, penguatan kelembagaan, penataan manajemen, standarisasi dan restrukturisasi	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**cakupan penyediaan administrasi penunjang urusan pemerintahan daerah Kabupaten/Kota**	**100%**	**98,38%**	**-**	**-**	

	UKM dan Koperasi							
	Pembinaan dan pengembangan usaha bagi wirusahawan baru	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Kegiatan Perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	5 laporan	5 laporan	-	-	
	Peningkatan Akses pasar UMKM dan koperasi ke daerah daerah yang potensial	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	waktu penyediaan administrasi keuangan perangkat daerah	12 bulan	12 bulan	-	-	
	Fasilitasi Kemitraan Usaha dengan perusahaan	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	waktu penyediaan administrasi barang milik daerah perangkat daerah	12 bulan	12 bulan	-	-	

	besar dan stakeholder potensial lainnya							
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	waktu penyediaan administrasi kepegawaian perangkat daerah	12 bulan	12 bulan	-	-	
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	waktu penyediaan administrasi umum perangkat daerah	12 bulan	12 bulan	-	-	
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	jumlah barang milik daerah yang di adakan untuk menunjang urusan pemerintah daerah	66 unit	66 unit	-	-	
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	waktu penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	12 bulan	12 bulan	-	-	

		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	jumlah barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang di pelihara	47 unit	47 unit	-	-	
		PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	**Tingkat pengawasanKoperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi**	**10,50%**	**15,87%**	**-**	**-**	
		Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang diawasi	150 kop	232 kop	Perlu nya sosialisasi dan peningkatan kapasitas koperasi agar dapat memenuhi ke 5 aspek pemeringkatan koperasi	Melakukan pendampingan terhadap koperasi yang berdasarkan hasil pemeringkatan yang masih perlu di tingkatkan nilainya dari ke 5 aspek penilaian	Melakukan pendataan dan profiling terhadap Koperasi dan UMKM di Kabupaten Kediri sebagai basis data dalam implementasi program

								peningkatan kinerja koperasi dan pemberdayaan UMKM. Pendataan dan profiling yang terupdate juga dibutuhkan dalam mengidentifikasi potensi dan produk unggulan UMKM pada setiap desa atau kecamatan
		PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI	**Persentase Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam yang cukup sehat**	**1,67%**	**16,29%**	**-**	**-**	

		Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaanya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	jumlah koperasi yang di nilai kesehatannya	120 kop	135 kop	Masih adanya koperasi yang belum dapat memenuhi kriteria penilaian kesehatan koperasi secara optimal	Melakukan pendampingan terhadap koperasi yang belum mendapatkan nilai optimal terhadap hasil pengawasan penilaian kesehatan serta pengawasan terhadap usaha simpan pinjam koperasi	
		PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	**Persentase SDM Koperasi terlatih**	**0,13%**	**0,35%**	**-**	**-**	
		Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi	jumlah kegiatan pendidikan dan latihan perkoperasian	12 kegiatan	12 kegiatan	Peserta pelatihan tidak dapat memahami	Pemberian materi secara hardcopy agar dapat di	

		Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota				materi yang di berikan.	pelajari sendiri.	
		Pendidikan dan Pelatihan SDM Usaha Mikro dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah peserta pendidikan dan pelatihan SDM usaha mikro	2 Kegiatan	4 Kegiatan	usaha mikro anggota koperasi masih perlu di tingkatkan pemahamannya terkait dasar-dasar koperasi	melakukan penguatan dasar-dasar koperasi terhadap usaha mikro anggota koperasi melalui bimtek	
		PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	**Persentase Partisipasi Koperasi Aktif**	**19,06%**	**20,14%**	**-**	**-**	

		Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	jumlah kegiatan untuk memberdayakan koperasi dan memberikan perlindungan	12 kegiatan	12 kegiatan	perlunya identifikasi kebutuhan pemberdayaan koperasi	Pengidentifikasian kebutuhan pemberdayaan koperasi secara lebih detail.	Salah satu Misi Bupati adalah mengembangkan Koperasi sebagai sokoguru pembangunan ekonomi kerakyatan. Akan tetapi dilihat dari realisasi program pada tahun 2021 hanya 54,79%. Tentu ini tidak mencerminkan keseriusan pemberdayaan Koperasi. Di Kabupaten Kediri masih

								banyak sekali Koperasi yang tidak aktif. Untuk itu Upaya pertumbuhan usaha mikro menjadi usaha kecil/ menengah perlu ditingkatkan

		PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	**Persentase Partisipasi Usaha Mikro**	**13,86%**	**15,68%**	**-**	**-**	
		Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku	jumlah usaha mikro yang di berdayakan melalui fasilitasi perizinan,sosialisasi perijinan, pengembangan produk dan SDM UMKM dan stimulus modal usaha	4468 orang	2425 orang	kegiatan fasilitasi NIB secara serentak belum bisa di laksanakan di karenakan adanya one prestasi dari rekanan	melakukan penganggaran kembali pelaksanaan fasilitasi NIB secara serentak pada tahun 2023	

		Kepentingan				Pelaksanaan kegiatan dengan sasaran start up (pemula)	Penumbuhan produk unggulan untuk olahan komiditi nanas dan rosella dengan sasaran generasi milenial dan untuk tahun 2023 akan bekerjasama dengan karang taruna untuk penumbuhan wirausaha baru dari start up (pemula)	Dalam rangka mewujudkan misi Bupati yaitu pengembangan ekonomi kerakyatan dan peningkatan investasi daerah, maka ke depan harus diwujudkan dalam bentuk kebijakan, yang utamanya memberi perhatian khusus kepada para pelaku start up (pelaku usaha pemula) di bidang

								inovasi, baik konvensional maupun digital yang berada di kabupaten Kediri. Para pelaku usaha tersebut harus didukung penuh agar menjadi trigger ekonomi dan peningkatan lapangan pekerjaan

						peserta pelatihan tidak aktif dalam memanfaatkan materi pelatihan untuk peningkatan usahanya secara keseluruhan	melaksanakan pendampingan pasca pelatihan, melakukan identifikasi peserta pelatihan secara lebih komprehensif dan melakukan identifikasi kebutuhan peserta terhadap kegiatan pelatihan sehingga materi pelatihan sesuai dengan kebutuhan peserta	Perlu adanya peningkatan kuantitas maupun kualitas terhadap program-program yang mendorong kemajuan pelaku usaha UMKM khususnya dalam rangka program pemulihan ekonomi nasional
		PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	**Persentase Usaha Mikro yang meningkat**	**5,66%**	**8,35%**	**-**	**-**	

			omsetnya					
		Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil	jumlah usaha mikro yang mendapatkan pengembangan pemasaran	570 orang	791 orang	Peserta pelatihan tidak familiar dengan penggunaan gadget untuk kegiatan pemasaran online.	Pemberian materi pelatihan yang sesuai (tanpa harus gadget tinggi) cukup menggunakan ponsel android.	Bantuan-bantuan yang dapat diberikan oleh Pemerintah Kabupaten Kediri terhadap para pelaku usaha UMKM dapat berupa bantuan alat produksi, peningkatan promosi, serta bantuan modal, serta secara rutin
						usaha mikro terdampak inflasi	stimulus bantuan modal usaha untuk 8.000 usaha mikro	

								melakukan monitoring dan pendampinga n terhadap pelaku usaha UMKM di Kabupaten Kediri

Analisis Kesesuaian antara Kinerja Program dan Kegiatan yang sudah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2022

Perangkat Daerah	**Uraian Program**	**Jumlah Indikator Kinerja Program**	**Rata-rata Tingkat Ketercapaian Indikator KinerjaProgram (%)**	**Jumlah Indikator Kinerja Kegiatan**	**Rata-rata Tingkat Ketercapaian Indikator Kinerja Kegiatan (%)**	**Tingkat Kesesuaian Kinerja Program dan Kegiatan (%)**
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7 (4/6)**
Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	PROGRAM PENUNJANG URUSAN	1	98,38%	8	100,00%	98,38%

	PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					
	PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	1	151,14%	1	124,67%	121,23%
	PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI	1	104,00%	1	101,50%	102,46%
	PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	1	269,23%	2	150,00%	179,49%
	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	1	105,72%	1	100%	105,72%
	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH,	1	113,13%	1	54,27%	208,46%

	USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)					
	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	1	147,53%	1	138,77%	106,31%

11. DPMPTSP

Capaian Program dan kegiatan urusan pemerintahan

PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	**KEBIJAKAN**	**PROGRAM/KEGIATAN**	**INDIKATOR**	**TARGET**	**REALISASI**	**PERMASALAHAN**	**UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN**	**TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD**
1	2	3	4	5	6	7	8	9
DPMPTSP		**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase pemenuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**100%**	**100%**	**-**	**-**	

		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	10 Laporan	10 Laporan	-	-	
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan administrasi keuangan perangkat daerah	3 dokumen	3 dokumen	-	-	
		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah laporan administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah	2 laporan	2 laporan	-	-	

		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%	100%	-	-	
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penyediaan jasa Penunjang Urusan Pemerintaah Daerah yang Disediakan	100%	100%	-	-	
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah (BMD) Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Dipelihara	5 unit	5 unit	-	-	

		PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	**Persentase Pelaku usaha yang diberikan insentif/fasilitas di bidang penanaman modal**	**25%**	**25%**	**-**	**-**	

		Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen yang disusun atas penetapan pemberian fasilitas/insentif di bidang penanaman modal	2 dokumen	2 dokumen	perlunya peningkatan pertumbuhan ekonomi dan penguatan daya saing daerah	Dalam rangka upaya fasilitasi/kemudahan investasi pada tahun 2022, DPMPTSP telah menyusun naskah akademis Perda Penanaman Modal yang diharapkankan selesai pada tahun 2023 (progres: sudah diajukan ke Bagian Hukum). Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Daerah ini meliputi: (1)	Minat investor untuk berinvestasi di Kabupaten Kediri mengalami peningkatan semenjak keberadaan bandara di Kabupaten Kediri dan adanya rencana pembangunan jalan Tol Nganjuk-Kediri-Tulungagung. Untuk merespon hal

							kebijakan dasara penanaman modal (2) kelembagaan dan kewenangan penyelenggaraan penanaman modal di Daerah (3) perencanaan penanaman modal (4) pengembangan potensi dan peluang penanaman modal di daerah (5) pelayanan penanaman modal (6) data dan sistem informasi penanaman	tersebut, maka Pemkab Kediri perlu memfasilitasi kemudahan berinvestasi dengan tetap memperhatikan kondisi sosial masyarakat dan kelestarian lingkungan hidup secara berkelanjutan.

							modal (7) pemberdayaan usaha (8) hak, kewajiban dan tanggung jawab penanam modal (9) pengendalian pelaksanaan penanaman modal (10) insentif dan kemudahan penanaman modal (11) promosi penanaman modal (12) ketentuan dan sanksi	

		Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen RUPM, Peta potensi dan peluang usaha yang disusun	1 dokumen	1 Dokumen	Perlunya kolaborasi dengan skpd teknis pada kegiatan kemitraan agar pernyataan minat yang telah ditandatangani dapat berkelanjutan	fasilitasi UMKM terkait permasalahan perizinan/ kemudahan perizinan	
		PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	**Prosentase pelaksanaan strategi dan kegiatan promosi yang dilaksanakan**	**100%**	**100%**	**-**	**-**	
		Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah media promosi, market inteligent, publikasi dan	5 kegiatan	5 kegiatan	-	-	

			kegiatan promosi yang dilakukan					
		PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	**Prosentase pelayanan perizinan dan non perizinan secara terpadu satu pintu**	**90%**	**100%**	**-**	**-**	
		Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	Prosentase ijin dan pemenuhan komitmen terbit dan selesai	76%	100%	perlunya mendekatkan pelayanan perizinan ke masyarakat dan memberikan kepastian hukum (SK izin) atas usaha yang dilakukan	1. Pada Tahun 2022, Pelayanan perizinan keliling telah dijadwalkan di 24 kecamatan Kabupaten Kediri 2. Tahun 2022 menggiatkan kembali fasilitasi pendampingan pelayanan	Minat investor untuk berinvestasi di Kabupaten Kediri mengalami peningkatan semenjak keberadaan bandara di

							penerbitan NIB (perizinan berusaha) sesuai amanat Peraturan Pemerintah dan Perka BKPM	Kabupaten Kediri dan adanya rencana pembangunan jalan Tol Nganjuk-Kediri-Tulungagung. Untuk merespon hal tersebut, maka Pemkab Kediri perlu memfasilitasi kemudahan berinvestasi dengan tetap memperhatikan kondisi sosial masyarakat

								dan kelestarian lingkungan hidup secara berkelanjutan.
		PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	**Persentase Kegiatan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang dilaksanakan**	**81%**	**159,88%**	**-**	**-**	

		Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah perusahaan yang dilaksanakan pengendalian	329 perusahaan	526 perusahaan	perlunya memberikan pengetahuan penanaman modal dan potensi peluang investasi yang dapat dikembangkan pengusaha lokal sehingga memperluas investasi yang ada di Kabupaten Kediri	1. Pada Tahun 2022, DPMPTSP Kabupaten Kediri telah menyelenggarakan sosialisasi perizinan kepada 100 pengusaha lokal di Kabupaten Kediri. Dalam sosialisasi tersebut ada muatan terkait potensi dan peluang investasi Kabupaten Kediri. Dengan adanya sosialisasi tersebut diharapkan dapat	Pemkab Kediri harus memprioritaskan investor local dan warga sekitar terkait keberadaan bandara dan rencana pembangunan jalan Tol Nganjuk-Kediri-Tulungagung untuk menghindari persoalan yang dapat terjadi di kemudian hari. Pemberian

							memberikan pengetahuan dan memperluas investasi yang ada dengan mengembangkan potensi yang ada. 2. Telah dilakukan fasilitasi dan gathering mengatasi permasalahan dalam rangka mengawal keberadaan investor lokal yang ada	prioritas kepada investor local dan warga sekitar tersebut merupakan salah satu upaya yang dapat meningkatkan kesejahteraan warga Kabupaten Kediri.
		PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	**Prosentase pengelolaan data dan sistem**	**100%**	**100%**	**-**	**-**	

			informasi penanaman modal					
		Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jenis Penyajian Data dan Informasi perizinan	4 Jenis (buku, website , sosialisasi perizinan, publikasi)	4 jenis	-	-	

Analisis Kesesuaian antara Kinerja Program dan Kegiatan yang sudah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2022

Perangkat Daerah	Uraian Program	Jumlah Indikator Kinerja Program	Rata-rata Tingkat Ketercapaian Indikator KinerjaProgram (%)	Jumlah Indikator Kinerja Kegiatan	Rata-rata Tingkat Ketercapaian Indikator Kinerja Kegiatan (%)	Tingkat Kesesuaian Kinerja Program dan Kegiatan (%)
1	2	3	4	5	6	7 (4/6)
DPMPTSP	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1	100,00%	6	100%	100%

	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	1	100%	2	100%	100%
	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	1	100%	1	100%	100%
	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	1	111,11%	1	100,00%	111%
	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	1	159,88%	1	100,00%	160%
	PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	1	100%	1	100%	100%

12. URUSAN KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA

Capaian Program dan kegiatan urusan pemerintahan

PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9
DINAS PENDIDIKAN	Meningkatnya pembinaan organisasi kepemudaan dan atlet	**PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN**	Persentase pemuda yang dibina/dilatih	51	55,36			

	pelajar berprestasi	PENYADARAN, PEMBERDAYAAN, DAN PENGEMBANGAN PEMUDA DAN KEPEMUDAAN TERHADAP PEMUDA PELOPOR KABUPATEN/KOTA, WIRAUSAHA MUDA PEMULA DAN PEMUDA KADER KABUPATEN/KOTA	Persentase terselenggaranya penyadaran, pemberdayaan dan pengembangan pemuda dan kepemudaan tingkat Kab/Kota	100	100			
		PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	Persentase atlat pelajar yang dibina/dilatih	60	61,02			
		PENYELENGGARAAN KEJUARAAN OLAHRAGA TINGKAT	Persentase terselenggaranya kejuaraan	100	100			

		DAERAH KABUPATEN/KOTA	olahraga tingkat daerah Kab/Kota					
		PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN OLAHRAGA PRESTASI TINGKAT DAERAH PROVINSI	Persentase terselenggaranya pembinaan dan pengembangan olahraga prestasi tingkat daerah Provinsi	100	100			
		PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN OLAHRAGA REKREASI	Persentase terselenggaranya pembinaan dan pengembangan olahraga rekreasi	100	100			

Analisis Kesesuaian antara Kinerja Program dan Kegiatan yang sudah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2022

Perangkat Daerah	**Uraian Program**	**Jumlah Indikator Kinerja Program**	**Rata-rata Tingkat Ketercapaian Indikator Kinerja Program (%)**	**Jumlah Indikator Kinerja Kegiatan**	**Rata-rata Tingkat Ketercapaian Indikator Kinerja Kegiatan (%)**	**Tingkat Kesesuaian Kinerja Program dan Kegiatan (%)**
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7 (4/6)**
DINAS PENDIDIKAN	**PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN**	1	108,55%	1	100,00%	108,55%
	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	1	101,70%	3	100,00%	101,70%

13. URUSAN STATISTIK

Analisis Kesesuaian antara Kinerja Program dan Kegiatan yang sudah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2022

Perangkat Daerah	Uraian Program	Jumlah Indikator Kinerja Program	Rata-rata Tingkat Ketercapaian Indikator KinerjaProgram (%)	Jumlah Indikator Kinerja Kegiatan	Rata-rata Tingkat Ketercapaian Indikator Kinerja Kegiatan (%)	Tingkat Kesesuaian Kinerja Program dan Kegiatan (%)
1	2	3	4	5	6	7 (4/6)

DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	**PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL**	1	100%	1	100,00%	100%

Capaian Program dan kegiatan urusan pemerintahan

PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Dinas Komunikasi dan Informatika	**(1)Menyediakan pelayanan cerdas menggunakan teknologi informasi berbasis big data, artificial intelligence, robotics, cloud computing sehingga**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL**	**Ketersediaan Statistik Sektoral di lingkup Daerah**	**Ada**	**Ada**	**Belum tersosialisasinya Portal Satu Data karena waktu mepet karena baru dianggarkan setelah PAPBD**	**Portal Satu Data akan disosialisasikan tahun depan**	

	masyarakat bisa melayani dirinya sendiri dari rumah. (2) Pengembangan, pengintegrasian, dan pemanfaatan interoperabiltas sistem informasi dalam satu big data.							
		Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah penyelenggaraan statistik sektoral di lingkup Daerah	1 paket data statistik sektoral	1 paket data statistik sektoral	Belum tersosialisasinya Portal Satu Data karena waktu mepet karena baru dianggarkan setelah PAPBD	Portal Satu Data akan disosialisasikan tahun depan	

14. URUSAN PERSANDIAN

Analisis Kesesuaian antara Kinerja Program dan Kegiatan yang sudah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2021

Perangkat Daerah	Uraian Program	Jumlah Indikator Kinerja Program	Rata-rata Tingkat Ketercapaian Indikator KinerjaProgram (%)	Jumlah Indikator Kinerja Kegiatan	Rata-rata Tingkat Ketercapaian Indikator Kinerja Kegiatan (%)	Tingkat Kesesuaian Kinerja Program dan Kegiatan (%)
1	2	3	4	5	6	7 (4/6)
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI**	1	100%	1	100,00%	100%

Capaian Program dan kegiatan urusan pemerintahan

PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Dinas Komunikasi dan Informatika	**Penguatan jejaring komunikasi persandian daerah.**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI**	**Cakupan Keamanan persandian dan TI**	**100%**	**100%**	**Keterbatasan pengetahuan tentang keamanan informasi**	**Peningkatan kompetensi SDM tentang keamanan informasi melalui bimtek tenaga IT**	
		Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah informasi sandi dan sistem informasi yang aman	1 paket	1 paket	Keterbatasan pengetahuan tentang keamanan informasi	Peningkatan kompetensi SDM tentang keamanan informasi melalui bimtek tenaga IT	

15. DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN BIDANG PERPUSTAKAAN

Capaian Program dan kegiatan urusan pemerintah

PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9
DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN	Peningkatan Masyarakat Kabupaten Kediri Gemar Membaca	Program Pembinaan Perpustakaan		37,79%	108.48%	-	-	
		1. Pengelolaan Perpustakaan Daerah Kabupaten/Kota	Tingkat Kepuasan Pemustaka	90%	116.97%	-	-	
		a. Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik	**Output :** Jumlah layanan perpustakaan elektronik yang dikembangkan dengan manjemen layanan TIK berbasis ISO 20000 (ITSM : Information Technology Service Management	1 Layanan	1 Layanan (100%)	Belum Berbasis ISO 20000	Pengusulan Berbasis ISO 20000	
		b. Pengembangan perpustakaan di tingkat daerah Kabupaten/Kota	**Output :** Jumlah perpustakaan yang dikembangkan di tingkat daerah Kabupaten yang dikembangkan di tingkat daerah Kabupaten	1 Perpustakaan	1 Perpustakaan (100%)	Belum berstandar nasional perpustakaan	Penambahan luas gedung dan penambahan koleksi	

			c. Pembinaan perpustakaan pada satuan pendidikan dasar di seluruh wilayah Kabupaten/Kota sesuai dengan standar nasional perpustakaan	**Output :** Jumlah perpustakaan pada satuan pendidikan dasar yang dibina	100 Perpustakaan	119 Perpustakaan (141,6%)	Fasilitas dan buku bacaan di perpustakaan yang dibina minim dan alat penunjang transportasi kurang	Disarankan untuk pengadaan buku dengan menggunakan dana BOS dan bergantian kendaraan dengan bidang lain	
			d. Peningkatan kapasitas tenaga perpustakaan dan pustakawan tingkat daerah Kabupaten/Kota	**Output :** Jumlah tenaga pengelola perpustakaan yang dibina	200 Orang	200 Orang (100%)	Pengelola perpustakaan sering kali merangkap sebagai guru tidak fokus ke perpustakaan, jumlah peserta workshop peningkatan kapasitas tenaga perpustakaan dan pustakawan masih terbatas	Perlunya penambahan peserta pada workshop peningkatan kapasitas tenaga perpustakaan dan pustakawan tingkat daerah Kabupaten/Kota	

			e. Pengembangan layanan perpustakaan rujukan tingkat Kabupaten/Kota	**Output :** Jumlah pengembangan perpustakaan rujukan/percontohan	1 Perpustakaan	1 Perpustakaan (100%)	Jumlah perpustakaan rujukan masih minim, perpustakaan rujukan yang ditunjuk masih belum siap	Memberikan bimbingan untuk pengelola perpustakaan, melakukan asesmen untuk perpustakaan rujukan	
			f. Pengembangan bahan pustaka	**Output :** Jumlah buku yang dibeli	605 Eksemplar	734 Eksemplar (147,1%)	Perlu menambah koleksi pada anak-anak untuk mendukung KLA	Pengadaan buku bacaan untuk anak-anak guna menunjang program Kabupaten Layak Anak	
			g. Pengelolaan dan pengembangan bahan pustaka	**Output :** Jumlah bahan perpustakaan yang dilakukan pengelolaan dan pengembangan untuk mewujudkan keberagaman koleksi perpustakaan	605 Eksemplar	734 Eksemplar (147,1%)	Manajemen data perpustakaan belum online, dan buku belum terbarcode	Input data perpustakaan di aplikasi Inlislite dan memberi barcode buku	
			h. Penyusunan data dan informasi perpustakaan, tenaga perpustakaan	**Output :** Jumlah survey yang dilaksanakan (Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat dan Indeks Minat Baca Masyarakat)	1 Dokumen	1 Dokumen (100%)	Kesulitan dalam mengumpulkan data perpustakaan yang ada di Kabupaten Kediri	Mengunjungi ke perpustakaan tersebut untuk mengumpulkan data dan pengisian data	

			dan pustakawan tingkat daerah Kabupaten/Kota					melalui online	
		2.	Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah kegiatan pemasyarakatan gemar membaca di masyarakat	5 kali	100%	-	-	
			a. Sosialisasi budaya baca dan literasi pada satuan pendidikan dasar dan pendidikan khusus serta masyarakat	**Output :** Lomba story Telling dan pelayanan perpustakaan keliling	3 Lokus	3 Lokus (100%)	Minat untuk mengikuti lomba kurang dan keterbatasan mobil perpustakaan keliling sedangkan permintaan dari sekolah untuk dikunjungi banyak.	Sosialisasi kepada masyarakat melalui online dan dinas yang terkait serta pengadaan mobil perpustakaan keliling	
			b. Pembangunan dan pemeliharaan sarana perpustakaan di tempat-tempat umum yang	**Output :** Jumlah pembuatan pojok baca di tempat umum	1 Perpustakaan	1 Perpustakaan (100%)	Kurangnya lokasi strategis yang digunakan untuk pojok baca	Menempatkan pojok baca pada tempat keramaian umum yang menjadi destinasi wisata masyarakat	

			menjadi kewenangan daerah Kabupaten/Kota						
			c. Pengembangan literasi berbasis inklusi sosial	**Output :** Jumlah kegiatan literasi berbasis inklusi sosial yang diadakan	1 Perpustakaan	1 Perpustakaan (100%)	Perlu penambahan kegiatan dan peserta literasi berbasis inklusi sosial	Mengajukan penambahan kegiatan dan peserta literasi berbasis inklusi sosial	

Analisis Kesesuaian antara Kinerja Program dan Kegiatan yang sudah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2022

Perangkat Daerah	Uraian Program	Jumlah Indikator Kinerja Program	Rata-rata Tingkat Ketercapaian Indikator Kinerja Program (%)	Jumlah Indikator Kinerja Kegiatan	Rata-rata Tingkat Ketercapaian Indikator Kinerja Kegiatan (%)	Tingkat Kesesuaian Kinerja Program dan Kegiatan (%)
1	2	3	4	5	6	7 (4/6)
DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN	Program Pembinaan Perpustakaan	1	100,00%	2	100,00%	100,00%

c. Urusan Wajib Pilihan

1. URUSAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

Capaian Program dan kegiatan urusan pemerintahan

PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Dinas Perikanan	1) Pengembangan Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Urusan Perikanan)	**1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/ kota**	**100%**	**100%**			
	2) Pengembangan Kawasan Agropolitan (Ngawasondat, Pakancupung,	1) Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi perangkat daerah yang tersusun	9	9			

	Palempuri, Segobatam)							
	3) Revitalisasi Pertanian (Urusan Perikanan)	2) Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase barang/jasa yang tersedia/terpeliharaa	100%	100%			
		3) Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase barang/jasa yang tersedia/terpeliharaa	100%	100%			
		4) Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase barang/jasa yang tersedia	100%	100%			
		5) Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase barang/jasa yang tersedia	100%	100%			

		6) Kegiatan Pemeliharaan barang milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase barang/jasa yang tersedia/terpelihara	100%	100%			
		2. Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	**Jumlah Produksi perikanan budidaya**					
			Pembesaran (ton)	**23.021**	**23.094,15**			
			Ikan Hias (ribu ekor)	**351.932**	**352.599,8**			
			Benih (juta ekor)	**21.015,046**	**21.114,356**			
		1) Kegiatan Pemberdayaan Pembudi daya ikan kecil	Jumlah peserta pembinaan dan pendampingan pelaku usaha perikanan yang dilakukan	620	620	Peserta bimbingan teknis yang hadir tidak lengkap	Konfirmasi keikutsertaan lebih awal	

		2) Kegiatan Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	Jumlah kelompok penerima hibah sarana prasarana perikanan	50	50	Kelompok penerima hibah tidak tepat sasaran	Dilakukan evaluasi, verifikasi dan monitoring terhadap penerima hibah	
		3. Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan	**Cakupan wilayah pengawasan sumber daya ikan di perairan umum darat**	**100%**	**100%**			
		1) Kegiatan Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan Dalam Kabupaten/Kota	Jumlah lokasi penebaran benih di perairan umum darat	3 lokasi	3 lokasi	Masyarakat kurang peduli dengan kelestarian lingkungan di perairan umum darat	Sosialisasi pelestarian lingkungan	

		4. Program Pengelolaan dan Pemasaran Hasil Perikanan	**Jumlah Konsumsi Asal Ikan (kg/kapita/tahun)**	**31,57**	**33,72**			
		1) Kegiatan Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah peserta pembinaan dan pendampingan yang dilakukan	1438	1438	Peserta kesulitan mengolah ikan Peserta tidak suka makan ikan	Penyajian materi tentang tips pengolahan ikan yang praktis Sosialisasi manfaat makan ikan dan diversifikasi olahan ikan	

Analisis Kesesuaian antara Kinerja Program dan Kegiatan yang sudah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2022

Perangkat Daerah	Uraian Program	Jumlah Indikator Kinerja	Rata-rata Tingkat Ketercapaian Indikator KinerjaProgram (%)	Jumlah Indikator Kinerja	Rata-rata Tingkat Ketercapaian	Tingkat Kesesuaian Kinerja Program

		Program		Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan (%)	dan Kegiatan (%)
1	2	3	4	5	6	7 (4/6)
DINAS PERIKANAN	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	1	100%	6	100%	100,00%
	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	3	100,32%	2	100%	100,32%
	Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan	1	100%	1	100%	100,00%
	Program Pengelolaan dan Pemasaran Hasil Perikanan	1	106,81%	1	100%	106,81%

2. DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN

Capaian Program dan kegiatan urusan pemerintahan

PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9
DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN	Identifikasi obyek wisata yang memiliki keunggulan karakter lokal belum dan sedang berkembang; Perbaikan sarana pendukung aksesibilitas interkonekvitias antar obyek wisata yang bisa ditempuh dalam trip	**Program PENGEMBANGAN DESTINASI PARIWISATA**	**Prosentase peningkatan destinasi wisata**	**60%**	**75,51%**			
		Kegiatan Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	Jumlah obyek dan daya tarik wisata di Kab. Kediri	*84 unit*	90 unit	Kualitas/ Mutu	Pendampingan/pembinaan peningkatan kwalitas/mutu industri pariwisata	
		Kegiatan Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/ Kota	Prosentase destinasi pariwisata yang ditingkatkan	*50%*	*63,00%*	Pemahaman regulasi tentang industri pariwisata	pendampingan/sosialisasi regulasi kepariwisataan	Penyusunan regulasi industri kepariwisataan

	sehari (kerjasama dengan PUPR)							
	Pengembangan Desa Wisata pintar (smart DeWi) berbasis karakter lokal didukung promosi ecommerce (kerjasama dengan Kominfo); dan Promosi potensi seni budaya lokal berbasis masyarakat	**Program PEMASARAN PARIWISATA**	**Prosentase peningkatan jumlah kunjungan wisata**	**0%**	**0%**	Obyek Wisata masih buka tutup sesuai aturan PPKM dengan perbandingan tahun dasar kunjungan sejumlah 4.603.673 orang artinya belum ada peningkatan	Aplikasi Peduli Lindungi sebagai syarat berwisata aman pada masa pandemi dan promosi wisata melalui teknologi digital, media sosial, medmass, virtual tour dll	Pemasaran Pariwisata disajikan dalam konten menarik melaui foto, video, virtual tour, pameran virtual yang dipasarkan secara global melalui media digital (website, aplikasi android, e-commerce, medsos, medmass) selain itu promosi aktif ke konsumen via Direct Promotion dan
		Kegiatan Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri, Daya Tarik Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah kunjungan wisata	*168.332 orang*	*244.081 orang*			

								fasilitasi beberapa even yang diselenggaran komunitas masyarakat
	Pengembangan DEWI (Desa Wisata) dan optimalisasi destinasi wisata	**Program PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF**	**Prosentase peningkatan tenaga kerja kepariwisataan yg bersertifikat**	10%	25%			
		Kegiatan Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	Jumlah tenaga kerja pariwisata dan ekonomi kreatif bersertifikat	*40 orang*	*90 orang*	Kurang pemahaman para pelaku usaha pariwisata akan pentingnya sertifikasi kompetensi TK nya	Tetap menjalin komunikasi, koordinasi terkait kepariwisata an dan propsek ke depannya	Pembinaan dan pendamping an pada desa wisata, berupa Pelatihan, Sosialisasi seperti: pelatihan pemandu wisata bagi desa wisata, dan

								pelatih an tata kelola desa wisata
		Program PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	**Persentase pemenuhan pe nunjang urusan pemerintahan daerah**	90%	92,61%			
		Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan, pe nganggaran dan evaluasi kinerja yang disusun	*14 laporan*	*14 laporan*			
		Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Cakupan adminitrasi keuangan satker yang dilakukan	*100%*	*100%*			

		Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah	Waktu yg dibutuhkan dalam administrasi barang milik daerah pada PD	*12 bulan*	*12 bulan*			
		Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah pegawai yang mengikuti peningkatan kapasitas aparatur	*18 orang*	*15 orang*			
		Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan administrasi umum yang dilakukan	*90%*	*99,4%*			
		Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah pengadaan barang mi lik daerah penunjang urusan pemerintah yang	*12 unit*	*38 unit*			

			disediakan					
		Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Waktu yg dibutuhkan dalam penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	*37 bulan*	*37 bulan*			
		Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah barang milik daerah yang dipelihara satker	*72 unit*	*95 unit*			

Analisis Kesesuaian antara Kinerja Program dan Kegiatan yang sudah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2022

Perangkat Daerah	Uraian Program	Jumlah Indikator Kinerja Program	Rata-rata Tingkat Ketercapaian Indikator Kinerja Program (%)	Jumlah Indikator Kinerja Kegiatan	Rata-rata Tingkat Ketercapaian Indikator Kinerja Kegiatan (%)	Tingkat Kesesuaian Kinerja Program dan Kegiatan (%)
1	2	3	4	5	6	7 (4/6)
DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN	Program PENGEMBANGAN DESTINASI PARIWISATA	1	125,85%	2	115,44%	109,02%
	Program PEMASARAN PARIWISATA	1	0%	1	427,04%	0%
	Program PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	1	170%	1	100%	170%
	Program PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	1	92,61%	8	137%	68%

3. Dinas Pertanian dan Perkebunan

Analisis Kesesuaian antara Kinerja Program dan Kegiatan yang sudah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2022

Perangkat Daerah	Uraian Program	Jumlah Indikator Kinerja Program	Rata-rata Tingkat Ketercapaian Indikator Kinerja Program (%)	Jumlah Indikator Kinerja Kegiatan	Rata-rata Tingkat Ketercapaian Indikator Kinerja Kegiatan (%)	Tingkat Kesesuaian Kinerja Program dan Kegiatan (%)
1	2	3	4	5	6	7 (4/6)
Dinas Pertanian dan Perkebunan	**Program PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH**	1	94,7%	8	98%	97%
	Program PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	3	99,69%	2	97%	103%
	Program PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	1	100%	2	90%	111%

	Program PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA	1	100%	1	94%	106%
	Program PENYULUHAN PERTANIAN	1	100%	1	96%	104%

Capaian Program dan kegiatan urusan pemerintahan

PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Dinas Pertanian dan Perkebunan	Pengembangan kawasan Agropolitan	Program PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Tertib administrasi layanan pemerintahan	96%	97,6%	-		

	Pengembangan pertanian organik (Desa Inovasi Tani Organik/ DITO)	Kegiatan Perencanaan Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersusunnya dokumen perencanaan dan evaluasi	5 dokumen	5 dokumen	-		
	Pengurangan ketergantungan terhadap pupuk kimia	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terlaksana administrasi keuangan	12 bulan	12 bulan	-		
	Mengamankan produksi tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan melalui pengendalian hama penyakit, penanggulangan dampak bencana alam banjir dan	Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat daerah	Terlaksana administrasi barang	12 bulan	12 bulan	-		

	kekeringan serta memperkecil losses							

	Memenuhi sarana dan prasarana on farm untuk petani mulai dari ketersediaan pupuk, benih/ bibit, pestisida, alat mesin pertanian, infrastruktur pertanian (jaringan irigasi tersier, irigasi tanah dangkal, embung, pipanisasi, jalan usaha tani dan jalan produksi)	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Terlaksana administrasi kepegawaian	12 bulan	12 bulan	-		
	Efisiensi usahatani	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat	Terlaksana administrasi	12 bulan	12 bulan	-		

		Daerah	umum					
	Peningkatan nilai tambah produk pertanian	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tersedia sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya	1 Paket	1 Paket	-		
	Kemitraan sektor pertanian	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tersedia jasa penunjang perkantoran	12 bulan	12 bulan	-		
	Meningkatkan penguasaan teknologi pertanian melalui pelatihan - pelatihan, sekolah lapang, demplot dan	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan	Terlaksana pemeliharaan barang milik daerah	12 bulan	12 bulan	-		

	sosialisasi serta laboratorium lapang							
	Pemanfaatan pekarangan dan penumbuhan minat petani muda	**Program PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN**	Persentase gapoktan/ poktan yang dilakukan monitoring dalam pemanfaatan sarana pertanian	100	97,00			-
			Persentase pemanfaatan benih/ bibit unggul pertanian	85%	83,85%			

		Kegiatan Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	Terlaksana pengawasan penggunaan sarana pertanian	12 bulan	12 bulan	semakin terbatasnya jumlah SDM/ petugas di lapangan karena pensiun	Meningkatkan kualitas SDM/ petugas di lapangan yang ada melalui pelatihan - pelatihan, seminar, workshop, demplot	
		Kegiatan Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/ Kota	Jumlah komoditas tanaman yang terkelola	13 komoditas	13 komoditas	Pengaruh harga komoditas di pasaran.	Pengaturan pola tanam sesuai permintaan pasar dan mengatasi *market glut* (harga jatuh saat panen raya) dengan cara membuka pasar, pengembangan komoditas dengan varietas	

							lain yang punya pangsa pasar berbeda, menumbuhkan industri olahan, sehingga produk segar di pasaran terjaga dalam jumlah yang cukup/ tidak berlebihan, sehingga harga pasar stabil dan dengan produk olahan akan menghasilkan nilai tambah bagi petani.	

		Program PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Persentase prasarana pertanian dengan kondisi baik (JUT, saluran irigasi tingkat usaha tani, irigasi tanah dangkal dan BPP	72%	72%			
		Kegiatan Pengembangan Prasarana Pertanian	jumlah poktan/gapoktan yang melakukan optimalisasi pemanfaatan prasarana pertanian	1340 poktan	1340 poktan	Kurangnya kesadaran poktan/ gapoktan untuk mengoptimalisasi pemanfaatandan merawat prasarana yang sudah ada	melaksanakan sosialisasi terus - menerus kepada poktan/ gapoktan untuk memanfaatkan dan merawat prasarana yang ada dan didampingi oleh petugas lapang	

		Kegiatan Pembangunan Prasarana Pertanian	Jumlah prasarana pertanian yang terbangun/ terhab	45 Unit	45 Unit	terbatasnya anggaran untuk membangun atau merehab semua infrastruktur pertanian (JIT, JUT, Dam Parit, embung dll) dan BPP	dengan menetapkan skala prioritas sesuai dengan anggaran yang tersedia	
		Program PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA	Cakupan pencegahan dan penanggulangan bencana pertanian (serangan OPT)	98%	98%			
		Kegiatan Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/ Kota	Jumlah kelompoktani yang mendapat bantuan obat - obatan/ pestisida	105 kelompoktani	95 kelompoktani	terbatasnya anggaran untuk mengendalikan serangan OPT di seluruh kelompoktani di Kab. Kediri	menentukan skala prioritas, wilayah yang paling membutuhkan terlebih dahulu,	

							melaksanakan gerakan pengendalian bersama - sama antar petugas lapang dengan petani, pelatihan	
		Program PENYULUHAN PERTANIAN	cakupan bina kelompoktani	100%	100%			
		Kegiatan Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	jumlah kelompoktani yang mendapat penyuluhan	1554 kelompoktani	1554 kelompoktani	keterbatasan anggaran dan SDM/ petugas lapang dan BPP	menentukan skala prioritas khususnya kelompoktani yang aktif untuk mendapatkan penyuluhan, pelatihan dan memanfaatkan teknologi agar menarik minat para petani muda/ millenial untuk bergerak di bidang pertanian, meningkatkan SDM petani dan petugas	

							melalui pelatihan, sekolah lapang, demplot dan lain - lain. Pada tahun 2022 juga telah dibangun 14 BPP yang baru di 14 kecamatan yang belum punya kantor BPP agar penyuluhan dan pendamping petani bisa berjalan lebih efektif, masih kurang 3 BPP/ kecamatan yang belum punya kantor BPP yaitu BPP Tarokan, Kayen Kidul dan Puncu yang rencananya akan dibangun di Tahun 2023.	

4. URUSAN PERDAGANGAN

Capaian Program dan kegiatan urusan pemerintahan tahun 2022

PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASASI PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9
DINAS PERDAGANGAN	Pengembangan sarana dan prasarana serta fasilitas perdagangan yang semakin tersebar dan merata di wilayah Kabupaten Kediri	**Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan**	Persentase Pasar yang memenuhi standar	100%	50%			
		KegiatanPembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah standarisasi pasar	2 pasar	1 pasar	Salah satu target pembangunan Pasar ngadiluwih belum dapat terealisasi karena masih dalam tahap perencanaan TPPS	Memaksimalkan proses pekerjaan konstruksi dan pemantapan jadwal waktu pelaksanaan	

	Meningkatkan ketersediaan barang kebutuhan pokok dan barang penting di seluruh wilayah Kabupaten Kediri	**Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting**	Persentase Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	100%	100%			
		Kegiatan Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah dokumen Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	12 dokumen	12 dokumen	Kurangnya kesadaran pelaku usaha dalam mematuhi peraturan terkait peraturan pendirian toko modern, kurangnya koordinasi instansi teknis terkait	Diperlukan perencanaan kegiatan yang lebih baik	
		Kegiatan Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan	Jumlah pemantauan bahan pokok dan Operasi pasar sembako bersubsidi	10 kali	10 kali	kurangnya pemahaman/persamaan persepsi petugas simarko	diperlukan evaluasi dan bimbingan bagi petugas	

		Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota				dalam metode survey	survey harga agar mengahasilkan data yang lebih valid	
	Menyelenggarakan Promosi Dagang melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan Kabupaten Kediri	**Program Pengembangan Ekspor**	Persentase Produk Ekspor Unggulan	100%	20%			
		Kegiatan Penyelenggaraan Promosi Dagang melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pelaku Usaha Ekspor yang memiliki produk unggulan	5 pelaku usaha	1 pelaku usaha	Produk UKM belum mampu mencukupi permintaan akan kualitas dan kuantitas eksport, Dari hasil kegiatan pelaksanaan pameran hanya ada 1 pelaku UKM yang mampu ekspor yaitu kerajinan serabut	Adanya perhatian kepada pelaku usaha agar dapat meningkatkan kapasitas produksi dan kualitasnya yang berstandar eksport	

						kelapa		
	Peningkatan pelaksanaan metrologi legal berupa tera, tera ulang, dan pengawasan	**Program Standardisasi Dan Perlindungan Konsumen**	Persentase Pelaku Usaha yang melaksanakan Uji Metrologi Legal	100%	100%			
		Kegiatan Pelaksanaan Metrologi Legal berupa, Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan	Jumlah Pelaku Usaha yang melaksanakan uji metrologi legal	900 pelaku usaha	2609 pelaku usaha	Belum terpenuhinya SDM Kemetrologian di bidang pengawasan	Di cukupinya SDM dibidang Pengawasan	
	Peningkatan penggunaan produk dalam negeri	**Program Penggunaan Dan Pemasaran Produk Dalam Negeri**	Persentase Kegiatan Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	100%	60%			

		Kegiatan Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	Jumlah promosi dan Pemasaran produk Dalam Negeri yang dilaksanakan	5 kali	3 kali	Produk UKM yang tidak bisa meraih peluang ekspor karena kalah bersaing dengan produk sejenis dengan daerah lain	Perlunya pelatihan untuk meningkatkan mutu dan kualitas sehingga dapat bersaing dengan produk daerah lain	

Analisis Kesesuaian antara Kinerja Program dan Kegiatan yang sudah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2022

Perangkat Daerah	Uraian Program	Jumlah Indikator Kinerja Program	Rata-rata Tingkat Ketercapaian Indikator KinerjaProgram (%)	Jumlah Indikator Kinerja Kegiatan	Rata-rata Tingkat Ketercapaian Indikator Kinerja Kegiatan (%)	Tingkat Kesesuaian Kinerja Program dan Kegiatan (%)
1	2	3	4	5	6	7 (4/6)
DINAS PERDAGANGAN	Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	1	50%	1	50%	100%
	Program Stabilisasi Harga Barang	1	100%	1	100%	100%

	Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting					
	Program pengembangan ekspor	1	20%	1	20%	100%
	Program Standardisasi Dan Perlindungan Konsumen	1	100%	1	289%	100%
	Program Penggunaan Dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	1	60%	1	60%	100%

5. URUSAN PERINDUSTRIAN

Capaian Program dan kegiatan urusan pemerintahan tahun 2022

PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASASI PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9
DINAS PERDAGANGAN	Roadmap pengembangan potensi sektor industri Kabupaten	**Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri**	Pertumbuhan industri yang terstandarisasi	15%	80%			

	Kediri	Kegiatan Penyusunan, Penerapan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Jumlah industri yang terstandarisasi	20 IKM	16 IKM	masih lemahnya pemasaran produk produk unggulan ; belum ada bimtek untuk proses Belanja PDN untuk memaksimalkan nilai PDN ; lemahnya kemauan IKM Gula Merah untuk pemenuhan administrasi perusahaan	perlu adanya pendampingan yang lebih intensif untuk pemasaran produk produk unggulan kabupaten kediri ;perlu diadakan bimtek untuk memaksimalkan belanja PDN ; dan pendampingan IKM untuk peningkatan administrasi dan legalitas IKM	

	Pembinaan dan pelatihan bagi pelaku Industri Kecil berbasis komoditas masyarakat					Hasil Standardisasi mutu IKM belum semuanya dipahami oleh IKM di Kabupaten Kediri	Perlunya peningkatan pembinaan dan pendampingan bagi IKM terutama yang belum memenuhi persyaratan standardisasi mutu produk	
	Fasilitasi kemitraan usaha industri kecil dengan berbagai pihak lainnya	**Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional**	Cakupan layanan sistem informasi industri nasional	15%	15%			

		Kegiatan Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI	12 kali	12 kali	masih banyak IKM yang belum mempunyai akun SIINas dan melakukan pelaporan ; sulitnya masuk ke IKM untuk kegiatan kegiatan pendataan karena kecurigaan kepada orang asing sehingga ada beberapa IKM yang tidak mau di data	perlunya pendampingan kepada IKM untuk mempunyai akun SIINas dan melakukan pelaporan ; perlunya pendekatan kepada IKM agar lebih terbuka jika ada kegiatan kegiatan pemerintah yang masuk ke mereka	

Analisis Kesesuaian antara Kinerja Program dan Kegiatan yang sudah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2022

Perangkat Daerah	Uraian Program	Jumlah Indikator Kinerja Program	Rata-rata Tingkat Ketercapaian Indikator KinerjaProgram (%)	Jumlah Indikator Kinerja Kegiatan	Rata-rata Tingkat Ketercapaian Indikator Kinerja Kegiatan (%)	Tingkat Kesesuaian Kinerja Program dan Kegiatan (%)
1	2	3	4	5	6	7 (4/6)
DINAS PERDAGANGAN	Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri	1	100%	1	100%	100%
	Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional	1	100%	1	100%	100%

6. URUSAN TRANSMIGRASI

Analisis Kesesuaian antara Kinerja Program dan Kegiatan yang sudah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2022

Perangkat Daerah	Uraian Program	Jumlah Indikator Kinerja Program	Rata-rata Tingkat Ketercapaian Indikator KinerjaProgram (%)	Jumlah Indikator Kinerja Kegiatan	Rata-rata Tingkat Ketercapaian Indikator Kinerja Kegiatan (%)	Tingkat Kesesuaian Kinerja Program dan Kegiatan (%)
1	2	3	4	5	6	7 (4/6)
DINAS TENAGA KERJA	**Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi**	**1**	100%	**1**	100%	100%

Capaian Program dan kegiatan urusan pemerintahan

PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	REALISASI		PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
1	2	3	4	5	6		7	8	9
DINAS TENAGA KERJA	Peningkatan kapasitas tenaga kerja lokal yang unggul	**Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi**		10%	10%	100%	Terbatasnya lokasi daerah tujuan yang disiapkan oleh Pemerintah Pusat	Meningkatkan kerjasama dengan pemerintah daerah yang memiliki lokasi transmigrasi sehingga pilihan daerah Transmigrasi bisa lebih banyak dan bisa sesuai	

								dengan minat calon transmigran.	
	Fasilitasi pendampingan dan konsultasi ketenagakerjaan	**Penataan Persebaran Penduduk yang berasal dari 1 (Satu) Daerah kabupaten/Kota**	Transmigrasi keseluruhan yang telah diberangkatkan (5th)	10 KK	10 KK	100%	Minat peserta transmigrasi tidak sesuai dengan lokasi yang tersedia.	Sosialisasi ke desa-desa oleh petugas teknis transmigrasi tentang ketransmigrasian dan mengadakan penjajakan ke daerah penempatan.	

d. Urusan Penunjang

1. Bagian Hukum

Capaian Program dan kegiatan urusan pemerintahan

PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Bagian Hukum	**Reformasi Birokrasi area Peraturan**	**Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota**	**Presentase pemenuhan penunjang urusan**	**100%**	**74,83%**			

	Perundang-undangan		**pemerintahan daerah**					
		1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan, Penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang tersusun	100%	65%	Harga mamin untuk lembur pada anggaran yang direncanakan lebih besar dari harga mamin yang dibayarkan dan banyak pekerjaan yang selesai dikerjakan di jam kerja, sehingga tidak terlalu sering lembur, sehingga penyerapan mamin untuk lembur kurang maksimal	Perlu melakukan evaluasi terhadap anggaran, melakukan perencanaan yang lebih matang dan menyusun strategi penyerapan anggaran	
		2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase terbayarnya gaji, tunjangan dan honorarium ASN	100%	88%	Adanya perubahan ketentuan terkait honor Pejabat Penata Keuangan sehingga kurang terserap maksimal (Berdasarkan	Melakukan Penyesuaian perencanaan dan penganggaran	

						Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2022 tentang Standar Harga Satuan Regional)		
		3. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Penatausahaan Barang Milik Daerah yang terlaksana	100%	43%	Adanya perubahan ketentuan terkait honor pengurus barang dan kegiatan pengadaan barang/jasa baru dimulai bulan juli 2022 sehingga honor Pejabat Pengadaan barang/jasa tidak terserap maksimal (Berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2022 tentang Standar Harga Satuan Regional)	Melakukan Penyesuaian perencanaan dan penganggaran	

		4. Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase tersedianya barang/jasa	100%	70%	1. Adanya perubahan ketentuan terkait honor petugas arsip sehingga penyerapan kurang maksimal (Berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2022 tentang Standar Harga Satuan Regional) 2. Prediksi jumlah perjalanan dinas lebih banyak daripada yang bisa dilaksanakan, perjalanan dinas banyak terserap di 3 (tiga) bulan terakhir Tahun Anggaran 2022 sehingga penyerapan kurang maksimal	Penyesuaian perencanaan dan penganggaran	

		5. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase tersedianya jasa penunjang	100%	90%	Peralatan dan perlengkapan kantor banyak dalam keadaan baik, sehingga pemeliharaan Barang Milik Daerah tidak bisa terserap 100%	Melakukan pengecekan Barang Milik Daerah secara berkala	
		6. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase terpeliharanya Barang Milik Daerah	100%	93%			
		Program Pemerintahan dan kesejahteraan Rakyat	**Persentase Kegiatan Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat**	100%	65,84%			

					1. Sub Bagian Bantuan hukum Penanganan perkara hukum Tahun Anggaran 2022 pada Subag. Bantuan Hukum terdapat belanja jasa konsultasi hukum pihak ke 3 penanganan perkara yang berjumlah 3 (tiga) paket, hanya bisa merealisasi 1 paket kegiatan yaitu terkait perkara **Gugatan warga Negara (Citizen Lawsuit) warga Desa Pehwetan Kec. Papar Kab. Kediri.**	Penyerapan anggaran untuk penanganan perkara hanya bisa dilakukan apabila ada gugatan yang masuk. Ada tidaknya gugatan yang masuk perkara tidak dapat diprediksi	

		1. Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	Persentase Kegiatan fasilitasi dan koordinasi hukum	100%	65,84%	**2. Sub Bagian Dokumentasi dan Informasi Hukum** Dimulainya penyampaian dokumen produk hukum secara digital melalui website JDIH yang sudah proses perbaikan dan penyempurnaan, maka anggaran untuk penyampaian produk hukum secara cetak kurang maksimal dikarenakan JDIH dikelola secara digitalisasi maka untuk penyerapan penyampaian produk hukum secara manual/cetak fisik tidak optimal.	Perlu melakukan evaluasi terhadap pendokumentasian dan peyebarluasan informasi hukum dan melakukan kegiatan sesuai perencanaan	

					3. Sub Bagian Perundang-undangan Terkait pembentukan Peraturan Daerah, dari jumlah usulan dalam Perubahan PROPEMPERDA yaitu sejumlah 22 usulan, pada tahun 2022 Peraturan Daerah yang telah terselesaikan dan telah diundangkan sejumlah 3 Peraturan Daerah.	Perlu koordinasi dengan pihak pihak yang terkait dalam penyusunan Perda	

Analisis Kesesuaian antara Kinerja Program dan Kegiatan yang sudah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2022

Perangkat Daerah	Uraian Program	Jumlah Indikator Kinerja Program	Rata-rata Tingkat Ketercapaian Indikator KinerjaProgram (%)	Jumlah Indikator Kinerja Kegiatan	Rata-rata Tingkat Ketercapaian Indikator Kinerja Kegiatan (%)	Tingkat Kesesuaian Kinerja Program dan Kegiatan (%)
1	2	3	4	5	6	7 (4/6)
BAGIAN	Program Penunjang Urusan	1	98%	6	100%	98%

HUKUM	Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota					
	Program Pemerintahan dan kesejahteraan Rakyat	1	83%	1	100%	83%

2. BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT

Capaian Program dan Kegiatan Urusan Pemerintahan

PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
1	2	3	4	5	6		7	8	9
BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT		**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH KAB./KOTA**	% PEMENUHAN PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	90%	90%	90%			

		ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH	JUMLAH LAPORAN ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH	8 DOKUMEN	8 DOKUMEN	100%			
		ADMINISTRASI BARANG MILIK DAERAH PADA PERANGKAT DAERAH	JUMLAH LAPORAN ADMINISTRASI BARANG MILIK DAERAH PADA PERANGKAT DAERAH	7 DOKUMEN	7 DOKUMEN	100%			
		ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH	% PELAKSANAAN ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT	100%	100%	100%			

			DAERAH						
		PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	% PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH YANG DISEDIAKAN	100%	50%	50%			
		PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	JUMLAH BARANG MILIK DAERAH (BMD) PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH YANG	18 UNIT	18 UNIT	100%			

			DIPELIHARA						
		PROGRAM KEBIJAKAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	% PEMENUHAN PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESRA	90%	90%	90%			
	REKOMENDASI TERKAIT KETERSEDIAAN SARANA/PRASARANA PENUNJANG TEMPAT IBADAH MELALUI PEMBERIAN BANTUAN HIBAH	PELAKSANAAN KEBIJAKAN KESEHTERAAN RAKYAT	NILAI E-SAKIP	90%	90%	90%	BANYAKNYA PENERIMA HIBAH YANG BELUM MENGAJUKAN PROPOSAL /TIDAK DAPAT MELENGKAPI BERKAS SAMPAI BATAS	MEMBERIKAN INFORMASI DAN MENGHUBUNGI PENERIMA BANTUAN DAN BERKOORDINASI DENGAN KANTOR KEMENAG. KAB. KEDIRI	MENGHIMBAU CALON PENERIMA HIBAH AGAR SEGERA MENGAJUKAN PROPOSAL HIBAH/ MELENGKAPI BERKAS.

							WAKTU YANG DITENTUKAN		

Analisis Kesesuaian antara Kinerja Program dan Kegiatan yang sudah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2022

Perangkat Daerah	Uraian Program	Jumlah Indikator Kinerja Program	Rata-rata Tingkat Ketercapaian Indikator Kinerja Program (%)	Jumlah Indikator Kinerja Kegiatan	Rata-rata Tingkat Ketercapaian Indikator Kinerja Kegiatan (%)	Tingkat Kesesuaian Kinerja Program dan Kegiatan (%)
1	2	3	4	5	6	7 (4/6)
BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT						
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH KAB./KOTA	1	90%	5	90%	100%

	PROGRAM KEBIJAKAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	1	90%	1	90%	100%

3. Sekretariat DPRD

Capaian Program dan kegiatan urusan pemerintahan

PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*
Sekretariat DPRD	**Peningkatan koordinasi kelembagaan antar**	**Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota**	**Presentase pemenuhan penunjang urusan pemerintahan daerah**	**80%**	**100%**			
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan, Penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang tersusun	100%	100%			

	eksekutif dan legislatif	*Administrasi Keuangan Perangkat Daerah*	Persentase terbayarnya gaji, tunjangan dan honorarium ASN	100%	100%			
		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Prosentase Penatausahaan BMD yang terlaksana	100%	100%			
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Prosentase terlaksanannya Pendidikan dan Pelatihan bagi pegawai	100%	100%			
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Prosentase tersedianya barang/jasa	100%	100%			
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Prosentase tersedianya jasa penunjang	100%	100%			
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Prosentase terpeliharanya BMD	100%	100%			
		Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	Prosentase terfasilitasinya hak keuangan dan kesejahteraan DPRD	100%	100%			
		Layanan Administrasi DPRD	Prosentase terfasilitasinya Administrasi DPRD	100%	100%	Kajian/Naskah Akademik belum selesai	Evaluasi dan monitoring *time schedule* kegiatan	

		Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	**Persentase fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD**	**100%**	**100%**			
		Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	Jumlah terfasilitasinya pembahasan pembentukan ProPemPerDa dan Raperda	4 kegiatan	4 kegiatan	Bahan/materi pembahasan belum siap	Meningkatkan koordinasi dan Sinkronisasi dengan SKPD terkait	
		Pembahasan Kebijakan Anggaran	Jumlah terfasilitasinya Pembahasan kebijakan anggaran	4 kegiatan	4 kegiatan	Kegiatan DPRD yang padat	Sinkronisasi jadwal kegiatan	
		Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	Jumlah terfasilitasinya Rekomendasi DPRD terhadap LKPJ Kepala Daerah	1 kegiatan	1 kegiatan			
		Peningkatan Kapasitas DPRD	Jumlah terfasilitasinya peningkatan kapasitas DPRD	1 kegiatan	1 kegiatan	Pelaksanaan Bimtek tidak dapat dijadwalkan, karena menunggu undangan	Sinkronisasi jadwal kegiatan	

						dari penyelenggara		
		Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	Jumlah terfasilitasinya penyerapan dan penghimpunan aspirasi masyarakat	3 kegiatan	3 kegiatan	Reses dapat dilaksanakan dalam bentuk pertemuan dan/atau kunjungan ke konstituen	Meningkatkan koordinasi/konsultasi dengan Anggota DPRD terkait perencanaan kegiatan Reses	
		Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD	Jumlah terfasilitasinya pelaksanaan dan pengawasan kode etik DPRD	1 kegiatan	1 kegiatan	Kegiatan DPRD yang padat	Sinkronisasi jadwal kegiatan	
		Pembahasan Kerja Sama Daerah	Jumlah terfasilitasi pembahasan kerja sama daerah	1 kegiatan	1 kegiatan	Kegiatan DPRD yang padat	Sinkronisasi jadwal kegiatan	

		Fasilitasi Tugas DPRD	Jumlah terfasilitasi tugas-tugas DPRD	3 kegiatan	3 kegiatan	Kegiatan DPRD yang padat	Sinkronisasi jadwal kegiatan	

Analisis Kesesuaian antara Kinerja Program dan Kegiatan yang sudah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2022

Perangkat Daerah	Uraian Program	Jumlah Indikator Kinerja Program	Rata-rata Tingkat Ketercapaian Indikator Kinerja Program (%)	Jumlah Indikator Kinerja Kegiatan	Rata-rata Tingkat Ketercapaian Indikator Kinerja Kegiatan (%)	Tingkat Kesesuaian Kinerja Program dan Kegiatan (%)
1	2	3	4	5	6	7 (4/6)
SEKRETARIAT DPRD	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	1	100%	9	100%	100%
	Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	1	100%	8	100%	100%

4. BALITBANGDA

Capaian Program dan kegiatan urusan pemerintahan

PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9
BALITBANGDA								
	Penelitian dan Pengembangan							
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Prosentase pemenuhan Administrasi Perkantoran	100%	100%			
	1	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi	3 dokumen	3 dokumen			

	2	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	cakupan waktu penyediaan administrasi keuangan	12 bulan	12 bulan			
	3	**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	cakupan waktu penyediaan administrasi barang milik daerah	12 bulan	12 bulan			
	4	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	cakupan waktu penyediaan administrasi umum perangkat daerah	12 bulan	12 bulan			
	5	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	cakupan waktu penyediaan Jasa	12 bulan	12 bulan			

			penunjang umum					
	6	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	cakupan waktu pemeliharaan darang milik daerah	12 bulan	12 bulan			
		Program Penelitian Dan Pengembangan Daerah	**Prosentase kajian yang dilaksanakan**	**100%**	**100%**			
	7	**Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan**	Jumlah kajian yang dilaksanakan	8 kajian	8 kajian			
	8	**Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan**	Jumlah kajian yang dilaksanakan	4 kajian	4 kajian			

	9	**Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan**	Jumlah kajian yang dilaksanakan	8 kajian	8 kajian			
	10	**Pengembangan Inovasi dan Teknologi**	Jumlah laporan yang dilaksanakan	4 laporan	4 laporan			

Analisis Kesesuaian antara Kinerja Program dan Kegiatan yang sudah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2022

Perangkat Daerah	Uraian Program	Jumlah Indikator Kinerja Program	Rata-rata Tingkat Ketercapaian Indikator KinerjaProgram (%)	Jumlah Indikator Kinerja Kegiatan	Rata-rata Tingkat Ketercapaian Indikator Kinerja Kegiatan (%)	Tingkat Kesesuaian Kinerja Program dan Kegiatan (%)
1	2	3	4	5	6	7 (4/6)
BALITBANGDA	Program Penelitian Dan Pengembangan Daerah	1	100%	4	100%	100%

5. BAPENDA

Capaian Program dan kegiatan urusan pemerintahan

PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9
BAPENDA								
	perbaikan layanan guna peningkatan indeks kepuasan masyarakat	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten kota	100%	100%	bapenda telah melaksanakan digitalisasi pelayanan pajak daerah untuk mempermudah wajib pajak daerah dalam melakukan kewajiban perpajakanya, namun masih banyak wajib pajak yang belum sepenuhnya memahami proses digitalisasi tersebut	dilakukan upaya sosialisasi pajak daerah secara berkala	

		Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	8 dokumen	8 dokumen			
		Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Waktu penyediaan administrasi Keuangan Perangkat Daerah	12 Bulan	12 Bulan			
		Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	waktu penyediaan administrasi umum perangkat daerah	12 bulan	12 bulan			
		Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1 paket	1 paket			
		Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	waktu Penyediaan Jasa Penunjang Urusan	12 bulan	12 bulan			

			Pemerintahan Daerah					
		Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	waktu Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 bulan	12 bulan			
		PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	CAKUPAN PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	2,92	26,40			
	Inovasi terkait pelayanan Perpajakan dan Retribusi Daerah	Kegiatan Pengelolaan pendapatan Daerah	Waktu pengelolaan pendapatan daerah	12 bulan	12 bulan	Perubahan UU nomor 28 tahun 2009 tentang pajak dan retribusi daerah menjadi UU nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah	a. perlu adanya update database pajak daerah yang merupakan kewenangan Pemerintah Kabupaten Kediri, sekaligus pendataan objek Pajak Kendaraan Bermotor (opsen PKB) dan Bea Balik	Pemerintah Kabupaten Kediri terus mengupayakan peningkatanan PAD melakukan inovasi diantaranya: a. Pendataan ulang potensi pajak daerah dengan menggandeng PPKBD dan Karang Taruna; b. Penguatan proses pemungutan melalui perubahan Perda terkait perubahan tarif pajak dan retribusi menyesuaikan dengan UU Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah; c. Efisiensi pemungutan pajak daerah dan

							Nama Kendaraan Bermotor (opsen BBNKB) ; b. Tahun 2023 Perda Pajak Daerah dan Retribusi Daerah selesai diundangkan, sebagai dasar pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah tahun 2024;	retribusi daerah melalui digitalisasi pembayaran serta penyempurnaan aplikasi pelayanan pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah; d. Cetak SPPT PBB-P2 dan SSPD PBB-P2 yang dilakukan serempak di seluruh desa Se-Kabupaten Kediri

						Pendapatan Daerah masih sangat bergantung pada Dana Perimbangan atau Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat, oleh sebab itu peningkatan kontribusi Pendapatan Asli Daerah terhadap Pendapatan Daerah harus terus diupayakan dengan beragam inovasi terutama pandemi Covid-19 masih menjadi ancaman serius perkembangan ekonomi lokal, nasional dan global. Kami meyakini bahwa meskipun	Dengan perubahan tarif/diversifikasi tarif pajak daerah dan retribusi daerah pengenaan ketetapan pajak/retribusi lebih tepat sasaran dan berkeadilan;	Kontribusi Pendapatan Asli Daerah terhadap Pendapatan Daerah terus ditingkatan dengan melakukan upaya-upaya diantaranya: a. Menginisiasi perubahan Perda terkait perubahan/diversifikasi tarif pajak daerah dan retribusi daerah; b. Pemerintah kabupaten kediri masih memberlakukan penghapusan sanksi/denda administratif atas keterlambatan pembayaran pajak daerah; c. Pembentukan tim optimalisasi PAD

						COVID-19 melanda, ada geliat ekonomi yang mulai tumbuh di masyarakat dari beberapa sektor yang mempengaruhi perolehan PAD. Dengan demikian, maka kebijakan dan program pemerintah harus diarahkan pada pemulihan dan peningkatan ekonomi masyarakat agar berimplikasi pada peningkatan PAD.		

						Peningkatan PAD juga perlu dibarengi dengan kebijakan maupun program yang mampu menyentuh masyarakat secara langsung dan tepat sasaran agar menumbuhkan trust bagi masyarakat. Trust merupakan modal utama kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak. Ketika masyarakat patuh, secara simultan akan mempengaruhi PAD. Hal tersebut juga perlu dibarengi	Mempermudah pelayanan pajak daerah sehingga mendorong peningkatan kepatuhan wajib pajak daerah	Kebijakan Pemerintah Kabupaten Kediri dalam meningkatkan pelayanan dan kepatuhan wajib pajak dibarengi dengan program-program: a.Penganggaran Bantuan Keuangan Khusus (BKK) Desa untuk pelayanan pajak daerah; b. Melakukan digitalisasi pelayanan pajak daerah dan retribusi daerah; c. Melakukan pembayaran non tunai bagi pajak daerah melalui bank jatim serta open channel bank jatim dan bank himbara (BNI, Mandiri, BRI)

						dengan inovasi dan akuntabilitas pengelolaan pajak serta retribusi daerah.		

						Sebagian besar Pendapatan Daerah ditopang oleh Dana Perimbangan atau Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat, oleh karena itu upaya yang serius dari pemerintah daerah untuk meningkatkan PAD harus menjadi concern utama. Meredanya kasus COVID-19, khususnya varian Omicron menjadi peluang bagi pemerintah untuk melakukan pemulihan ekonomi yang	merumuskan kebijakan pajak daerah dan retribusi daerah sehingga pengenaan ketetapan pajak/retribusi lebih tepat sasaran dan berkeadilan	Dalam rangka peningkatan PAD, Pemerintah Kabupaten Kediri mengupayakan pemberian apresiasi kepada wajib pajak dengan melaksanakan Pekan panutan PBB-P2; Pemberian Hadiah bagi wajib pajak PBB-P2; Pemberian bantuan partisipatif pada desa dan kecamatan yang lunas PBB-P2 tepat waktu; dan Menambah alat pencatatan transaksi usaha (APTU/TMD/POS) pada wajib pajak restoran dan hotel.

						bisa memberikan dampak bagi masyarakat secara umum dan PAD secara khusus		

Analisis Kesesuaian antara Kinerja Program dan Kegiatan yang sudah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2022

Perangkat Daerah	Uraian Program	Jumlah Indikator Kinerja Program	Rata-rata Tingkat Ketercapaian Indikator Kinerja Program (%)	Jumlah Indikator Kinerja Kegiatan	Rata-rata Tingkat Ketercapaian Indikator Kinerja Kegiatan (%)	Tingkat Kesesuaian Kinerja Program dan Kegiatan (%)
1	2	3	4	5	6	7 (4/6)
BAPENDA	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1	100,00%	6	100,00%	100,00%
	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	1	904,11%	1,00	100,00%	904,11%

7. BAPPEDA

Capaian Program dan kegiatan urusan pemerintahan

PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9
BAPPEDA	Penguatan Kapasitas perencanaan daerah	**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**	prosentase pemenuhan penunjang urusan pemerintahan	100%	100%	Standar harga (SSH) yang tidak sesuai dengan harga riil	mengusulkan ssh yang sesuai dengan harga pasar	
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah jenis dokumen perencanaan penganggaran dan evaluasi yang disusun	7 dokumen	7 dokumen	Standar harga (SSH) yang tidak sesuai dengan harga riil	mengusulkan ssh yang sesuai dengan harga pasar	
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah jenis laporan keuangan yang disusun	5 dokumen	5 dokumen	Standar harga (SSH) yang tidak sesuai dengan harga riil	mengusulkan ssh yang sesuai dengan harga pasar	

		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah jenis laporan administrasi BMD yang disusun	3 dokumen	3 dokumen	Ada BMD yang rusak berat dan yang diusulkan dihapus	pengusulan penghapusan barang ke BPKAD	
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah jenis kegiatan adm kepegawaian yang dilaksanakan	3 dokumen	3 dokumen	Standar harga (SSH) yang tidak sesuai dengan harga riil	mengusulkan ssh yang sesuai dengan harga pasar	
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jenis pelaksanaan administrasi umum yg dilaksanakan	4 dokumen	4 dokumen	Standar harga (SSH) yang tidak sesuai dengan harga riil	mengusulkan ssh yang sesuai dengan harga pasar	
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	BMD yang dilaksanakan pengadaan	2 paket	2 paket	Standar harga (SSH) yang tidak sesuai dengan harga riil	mengusulkan ssh yang sesuai dengan harga pasar	
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jenis layanan jasa penunjang yang	4 jenis	4 jenis	Standar harga (SSH) yang tidak sesuai dengan	mengusulkan ssh yang sesuai dengan harga	

			dilaksanakan			harga riil	pasar	
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jenis pemeliharaaan BMD yang di laksanakan	1 jenis	1 jenis	Ada BMD yang rusak berat dan yang diusulkan dihapus	pengusulan penghapusan barang ke BPKAD	
		Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Tingkat keterpaduan perencanaan pembangunan daerah	100%	100%	pembatasan kegiatan secara tatap muka/offline, Standar harga (SSH) yang tidak sesuai dengan harga riil	melakukan kegiatan via daring, mengusulkan ssh yang sesuai dengan harga pasar	
		Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Jumlah bahan kebijakan perencanaan tahunan daerah	6 dokumen	6 dokumen	pembatasan kegiatan secara tatap muka/offline, Standar harga (SSH) yang tidak sesuai dengan harga riil	melakukan kegiatan via daring, mengusulkan ssh yang sesuai dengan harga pasar	

		Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah bahan kebijakan analisis data dan informasi daerah	3 dokumen	3 dokumen	pembatasan kegiatan secara tatap muka/offline, Standar harga (SSH) yang tidak sesuai dengan harga riil	melakukan kegiatan via daring, mengusulkan ssh yang sesuai dengan harga pasar	
		Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah bahan kebijakan pengendalian, evaluasi dan pelaporan bidang perencanaan pembangunan daerah	2 dokumen	2 dokumen	pembatasan kegiatan secara tatap muka/offline, Standar harga (SSH) yang tidak sesuai dengan harga riil	melakukan kegiatan via daring, mengusulkan ssh yang sesuai dengan harga pasar	
		Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Cakupan sinkronisasi program kegiatan perangkat daerah	100%	100%	pembatasan kegiatan secara tatap muka/offline, Standar harga (SSH) yang tidak sesuai dengan	melakukan kegiatan via daring, mengusulkan ssh yang sesuai dengan harga	

						harga riil	pasar	
		Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Jumlah bahan kebijakan perencanaan bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	6 jenis	6 jenis	pembatasan kegiatan secara tatap muka/offline, Standar harga (SSH) yang tidak sesuai dengan harga riil	melakukan kegiatan via daring, mengusulkan ssh yang sesuai dengan harga pasar	
		Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	Jumlah bahan kebijakan perencanaan bidang Perekonomian dan SDA	6 jenis	6 jenis	pembatasan kegiatan secara tatap muka/offline, Standar harga (SSH) yang tidak sesuai dengan harga riil	melakukan kegiatan via daring, mengusulkan ssh yang sesuai dengan harga pasar	

		Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Jumlah bahan kebijakan perencanaan bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	6 jenis	6 jenis	pembatasan kegiatan secara tatap muka/offline, Standar harga (SSH) yang tidak sesuai dengan harga riil	melakukan kegiatan via daring, mengusulkan ssh yang sesuai dengan harga pasar	

Analisis Kesesuaian antara Kinerja Program dan Kegiatan yang sudah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2022

Perangkat Daerah	Uraian Program	Jumlah Indikator Kinerja Program	Rata-rata Tingkat Ketercapaian Indikator KinerjaProgram (%)	Jumlah Indikator Kinerja Kegiatan	Rata-rata Tingkat Ketercapaian Indikator Kinerja Kegiatan (%)	Tingkat Kesesuaian Kinerja Program dan Kegiatan (%)
1	2	3	4	5	6	7 (4/6)
BAPPEDA	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	1	100	8	100	100%
	Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah	1	100	3	100	100%
	Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	1	100	3	100	100%

8. BPKAD

CAPAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN URUSAN PENUNJANG

PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	PROGRAM/KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
1	2	3	5	6	7	8	9
BPKAD		**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**100%**	**100%**	NIHIL	-	-
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100%	100%			
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100%	95%			
		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	100%	100%			
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100%	100%			

		Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%	95%			
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%	100%			
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	100%			
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	100%			
		PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	**Tepat Waktu**	**Tepat Waktu**			
			Tepat Waktu	**Tepat Waktu**			
			Tepat Waktu	**Tepat Waktu**	NIHIL	-	-
			Tepat Waktu	**Tepat Waktu**			
			Tepat Waktu	**Tepat Waktu**			

	1. Tersusunnya Rencana Kerja Anggaran	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	100%	95%			
	2. Terlaksananya Perbendaharaan Daerah	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	100%	100%			
	3. Terlaksananya Akuntansi dan pelaporan keuangan Daerah	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	100%	98%			
	4. Terlaksananya Pengelolaan Keuangan Daerah penunjang Urusan Kewenangan	Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	100%	100%			
	5. Terlaksananya Pengelolaan data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah	Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah	100%	100%			
		PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	**100**	**100**	NIHIL	-	-

			100	**100**			
			100	**49,84**			
			100	**100**			
	1. Tersusunnya Standar Harga 2. Tersusunnya Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah 3. Tersusunnya Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah 4. Tersusunnya Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah 5. Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah	Pengelolaan Barang Milik Daerah	100%	100%			

	6. Terlaksananya Inventarisasi Barang Milik Daerah 7. Terlaksananya Pengamanan Barang Milik Daerah 8. Terlaksananya Penilaian Barang Milik Daerah 9. Terlaksananya Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah 10. Terlaksananya Optimalisasi Penggunaan,Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah						

ANALISIS KESESUAIAN ANTARA KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN YANG SUDAH DITETAPKAN DALAM PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

Perangkat Daerah	Uraian Program	Jumlah Indikator Kinerja Program	Rata-rata Tingkat Ketercapaian Indikator KinerjaProgram (%)	Jumlah Indikator Kinerja Kegiatan	Rata-rata Tingkat Ketercapaian Indikator Kinerja Kegiatan (%)	Tingkat Kesesuaian Kinerja Program dan Kegiatan (%)
1	2	3	4	5	6	7 (4/6)
BPKAD	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	1	100%	8	100%	100%
	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	5	100%	5	100%	100%
	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	4	100%	1	100%	100%

9. BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH

Capaian Program dan Kegiatan Urusan Pemerintahan Tahun 2022

PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	REALI-SASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9
BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH	MENINGKATKAN PROFESIONALITAS ASN	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Indeks Profesionalisme dimensi Kinerja dan Disiplin	29,33	29,37	Terbitnya Surat Edaran Menpan RB No. 6 tahun 2022 terkait Pengelolaan Kinerja Pegawai Aparatur Sipil Negara belum dipahami oleh seluruh PNS	Melaksanakan Sosialisasi dan Asistensi terkait Penyusunan dan Penilaian Kinerja PNS sesuai dengan peraturan yang berlaku	
		Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Pengadaan, Pemberhentian	5 dok	5 dok			

			dan Informasi Kepegawaian ASN					
		Mutasi dan Promosi ASN	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Mutasi Dan Promosi ASN	3 dok	3 dok			
		Pengembangan Kompetensi ASN	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Pengembangan Kompetensi ASN	1 dok	1 dok			
		Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja, tanda jasa dan pembinaan	5 dok	5 dok			

			disiplin ASN					
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Tertib Administrasi Layanan Pemerintahan	100%	100%			
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 dok	4 dok			
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Administrasi	3 dok	3 dok			

			Keuangan Perangkat Daerah					
		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	1 dok	1 dok			
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	7 dok	7 dok			
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Pengadaan	4 dok	4 dok			

			Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	3 dok	3 dok			
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang	3 dok	3dok			

			Urusan Pemerintahan Daerah					

Analisis Kesesuaian antara Kinerja Program dan Kegiatan yang sudah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2022

Perangkat Daerah	Uraian Program	Jumlah Indikator Kinerja Program	Rata-rata Tingkat Ketercapaian Indikator Kinerja Program (%)	Jumlah Indikator Kinerja Kegiatan	Rata-rata Tingkat Ketercapaian Indikator Kinerja Kegiatan (%)	Tingkat Kesesuaian Kinerja Program dan Kegiatan (%)
1	2	3	4	5	6	7 (4/6)
BADAN KEPEGAWAIAN DERAH	Program Kepegawaian Daerah	1	100%	4	100%	100%
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	1	100%	7	100%	100%

10. BAKESBANGPOL

Capaian Program dan kegiatan urusan pemerintahan

PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9
BAKESBANGPOL	Meningkatnya Penerapan Nilai Nasionalisme, agama, dan semangat Demokrasi Masyarakat.	**PROGAM** PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	Cakupan kelompok yang dibina tentang ideologi Pancasila dan karakter kebangsaan	90%	80%	Dampak dari Kebijakan PPKM sehingga kegiatan sosialisasi serta Paskibraka kurang berjalan Maksimal	Kegiatan dilaksanakan dengan memanfaatkan momentum serta ketentuan kebijakan PPKM dengan membentuk beberapa TIM Pelaksanaan Kegiatan secara maksimal	**(KEHIDUPAN DEMORKASI)** Forum-forum lokakarya, seminar, pelatihan dan pembinaan tentang pemahaman mengamalkan nilai-nilai Pancasila secara utuh perlu mendapat perhatian agar
		PERUMUSAN KEBIJAKAN TEKNIS DAN PEMANTAPAN PELAKSANAAN BIDANG IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	Persentase Perumusan Kebijakan Teknis dan pemantapan Pelaksanaan bidang Ideologi Pancasila dan	100%	100%			

			Karakter Kebangsaan					kesadaran masyarakat akan berdemokrasi berbangsa dan bernegara di Kabupaten Kediri bisa tumbuh dengan baik. **(KEIMANAN)** Meningkatnya kerukunan hidup antar umat beragama sehingga tercipta suasana kehidupan yang harmonis dan saling
		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI SOSIAL DAN BUDAYA	Persentase kelompok masyarakat yang dibina terkait narkoba, kerukunan beragama dan kepercayaan	70%	80%	Selain Dampak Kebijakan PPKM, beberapa kegiatan yang menunjang pencapaian Program terkendala koordinasi lintas Sektor terkait maupun adanya efisiensi / pengurangan anggaran	Program baru sesuai amanah Kepemndagri No. 90 Tahun 2019 sehingga dalam pelaknsanaan Kegiatan masih mencoba mencari model kegiatan yang sangat efisien	
		PERUMUSAN KEBIJAKAN TEKNIS DAN PEMANTAPAN PELAKSANAAN	Persentase Perumusan Kebijakan Teknis dan	100%	50%			

		BIDANG KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL DAN BUDAYA	pemantapan Pelaksanaan dibidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya					menghormati dalam semangat keberagaman
		PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITAS PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	Persentase konflik sosial Terfasilitasi	80%	100%	guna mendukung dan menyesuaikan dengan kebijakan PPKM maka salah satu kegiatan Rakor Tim Penanganan Konflik di optimalkan dari 4 menjadi 3 kali	Kegiatan dilaksanakan dengan memaksimalkan agenda-agenda yang telah direncanakan	**(KEHIDUPAN DEMORKASI)** Hubungan yang harmonis antar penyelenggara pemerintahan daerah sebagai modal utama dalam mewujudkan penyelenggara pemerintahan yang demokratis,
		PERUMUSAN KEBIJAKAN TEKNIS DAN PELAKSANAAN PEMANTAPAN KEWASPADAAN	Persentase Perumusan Kebijakan Teknis dan pemantapan	100%	100%			

		NASIONAL DAN PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial					efektif, dan efisien serta didukung oleh seluruh lapisan masyarakat
								(KEIMANAN) Pemda dapat berperan aktif dalam pengawasan berkembangnya kelompok atau gerakan radikal yang tidak sesuai dengan peraturan perudang-undangan yang berlaku serta menjalankan program

								deradikalisasi bekerjasama dengan organisasi keagamaan atau kemasyarakatan secara sistematis
		PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	Persentase partai politik yang difasilitasi	100%	100%	dampak dari kondisi kurang optimal sehingga perlu adanya pendampingan khusus bagi Parpol dalam pemanfaatan/penggunaan dana Banpol sesuai dengan Permendagri terbaru khususnya dalam mendukung Kondisi Pandemi di Tahun 2021		**(KEHIDUPAN DEMORKASI)** Perlu ditingkatkan partisipasi masyarakat dalam kehidupan berdemokrasi berbangsa dan bernegara. Pendidikan

		PERUMUSAN KEBIJAKAN TEKNIS DAN PEMANTAPAN PELAKSANAAN BIDANG PENDIDIKAN POLITIK, ETIKA BUDAYA POLITIK, PENINGKATAN DEMOKRASI , FASILITASI KELEMBAGAAN PEMERINTAH, PERWAKILAN DAN PARTAI POLITIK, PEMILIHAN UMUM/ PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH SERTA PEMANTAUAN SITUASI POLITIK	Persentase Perumusan Kebijakan Teknis dan pemantapan Pelaksanaan bidang Pendidikan Politik, Etika Politik, Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi kelembagaan Pemerintah, Perwakilan dan Partai politik, pemilihan Umum/pemiliha n umum kepala daerah serta	100%	100%			Politik lewat partai Politik perlu ditingkatkan dan Jumlah bantuan dana partai Politik (Banpol) perlu ditingkatkan jumlah nya

			pemantuan situasi politik					
		PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	Persentase Pembinaan Ormas	100%	100%	kurangnya dukungan sarana dan SDM dalam melakukan Pemantauan dan Pendataan Ormas di Wilayah Kabupaten kediri yang didukung dengan kondisi kebijakan WFH bagi personel bakesbangpol dalam menyikapi PPKM	Melakukan optimalisasi dengan optimalisasi kegiatan sosialisasi sekaligus pemantauan dan pembinaan Ormas	
		PERUMUSAN KEBIJAKAN TEKNIS DAN PEMANTAPAN PELAKSANAAN BIDANG PEMBERDAYAAN	Persentase Perumusan Kebijakan Teknis dan pemantapan Pelaksanaan	100%	85%			

		DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	dibidang pemberdayaan dan pengawasan ormas					

Analisis Kesesuaian antara Kinerja Program dan Kegiatan yang sudah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2022

Perangkat Daerah	Uraian Program	Jumlah Indikator Kinerja Program	Rata-rata Tingkat Ketercapaian Indikator Kinerja Program (%)	Jumlah Indikator Kinerja Kegiatan	Rata-rata Tingkat Ketercapaian Indikator Kinerja Kegiatan (%)	Tingkat Kesesuaian Kinerja Program dan Kegiatan (%)
1	2	3	4	5	6	7 (4/6)
BAKESBANGPOL	PROGAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	1	80%	1	100%	80%
	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI SOSIAL DAN BUDAYA	1	80%	1	80%	100%
	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITAS PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	1	100%	1	100%	100%

	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	1	100%	1	100%	100%
	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	1	100%	1	86%	116%

e. Kecamatan

01) KECAMATAN SEMEN

PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9
KECAMATAN SEMEN	Meningkatnya pelayanan masyarakat dalam mendukung terciptanya	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase indikator program yang tercapai	7 keg	7 keg	Perencanaan, penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah kurang	Melaksanakan Koordinasi perencanaan , penganggaran, dan evaluasi kinerja secara	

	suasana kehidupan yang bertolerans, harmonis, dan saling menghormati dalam semangat keberagaman didukung dengan pelayanan masyarakat yang baik.					optimal	optimal	
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja yang Tersusun	5 dok	5 dok	Jumlah Dokumen Perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja telah tersusun	Menyusun Dokumen Perencanaan, penganggaran dan evaluasi tepat waktu	
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Kegiatan Administrasi Keuangan Yang Terlaksana	12 bl	12 bl	Kegiatan Administrasi Keuangan kurang terlaksana dengan baik, dikarenakan terdapat kekosongan jabatan	Usulan pengisian jabatan yang kosong	

		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah Yang Dilaksanakan	12 bl	12 bl	Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah telah terlaksana		
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Kegiatan Administrasi Umum Yang Terlaksana	12 bl	12 bl	Kegiatan Administrasi umum telah terlaksana		
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Yang Dilaksanan	12 bl	12 bl	Jasa penunjang urusan Pemerintah Daerah telah terlaksana		
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Yang Terlaksana	12 bh	12 bh	Kegiatan pemeliharaan Barang Milik Daerah yang terlaksana		

		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	CAKUPAN PENYELENGGARAAN KEGIATAN PEMERINTAHAN TINGKAT KECAMATAN	4 keh	4 keg	Penyelenggaraan kegiatan Pemerintahan Tingkat Kecamatan Belum Optimal dikarenakan terbatasnya SDM	Usulan penambahan SDM	
		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	12 bl	12 bl	Koordinasi penyelenggaraan kegiatan Pemerintah di tingkat Kecamatan sudah berjalan baik		
		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja	Jumlah Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan	12 bl	12 bl	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan		

		Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan			oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan telah dilaksanakan		
		Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	12 bl	12 bl	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum telah dilaksanakan tanpa adanya jadwal yang	Pengaturan jadwal kegiatan Koordinasi dengan instansi vertikal dengan memperhatikan Protokol Kesehatan di masa Pandemi covid'19	

						tersusun		
		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Jumlah Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	1 keg	0 keg	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat telah terlaksana		
		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	CAKUPAN KOORDINASI PEMBERDAYAAN DESA / KELURAHAN	12 desa	12 desa	Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa telah dilaksanakan		
		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan	12 desa	12 desa	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan		

			Desa			Desa telah terlaksana		
		PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	CAKUPAN KOORDINASI KETENTRAMAN KETERTIBAN DI WILAYAH KECAMATAN	12 bl	12 bl	Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum telah dilaksanakan		
		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	12 bl	12 bl	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum telah dilaksanakan		
		PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	CAKUPAN PENYELENGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM YANG DITANGANI	12 bl	12 bl	Penyelenggaraan urusan Pemerintahan Umum yang ditangi tidak bisa berjalan optimal dikarenakan	Kegiatan dialihkan	

						PPKM		
		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	12 bl	12 bl	Anggaran tidak terserap maksimal dikarenakan merupakan pergeseran anggaran kegiatan baru (FORKOMPIMCAM) di bulan November	Merencanakan kegiatan di awal tahun	Anggaran terserap maksimal
		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	PERSENTASE PEMERINTAHAN DESA YANG DIBINA	12 desa	12 desa	Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa telah dilaksanakan		

		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	12 desa	12 desa	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa telah dilaksanakan		

Perangkat Daerah	Uraian Program	Jumlah Indikator Kinerja Program	Rata-rata Tingkat Ketercapaian Indikator Kinerja Program (%)	Jumlah Indikator Kinerja Kegiatan	Rata-rata Tingkat Ketercapaian Indikator Kinerja Kegiatan (%)	Tingkat Kesesuaian Kinerja Program dan Kegiatan (%)
1	2	3	4	5	6	7 (4/6)
KECAMATAN SEMEN	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1	95,35	7	95,79	100%
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	1	67,87	3	76,86	88%

	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	1	97,72	2	98,41	99%
	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	1	79,74	1	79,74	100%
	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	1	79,74	1	79,74	100%
	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	1	67,35	1	67,35	100%

02) KECAMATAN MOJO

PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASASI PERMASALAHAN	RE
1	2	3	4	5	6	7	8	
KECAMATAN MOJO	Penguatan Tugas-Tugas Kewilayahan	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	PERSENTASE PEMENUHAN PENUNJANG URUSAN	100%	100%			

		KABUPATEN/KOTA	PEMERINTAH DAERAH					
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja yang Tersusun	5 Dokumen	5 Dokumen	Tidak Ditemukan Permasalahan, Semua Dokumen Telah Tersusun		
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Waktu Yang Dibutuhkan Untuk Melaksanakan Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	12 bulan	12 bulan	Tidak Ditemukan Permasalahan		
		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Barang Milik Daerah Yang Tersusun	2 Laporan	2 Laporan	Tidak Ditemukan Permasalahan, Semua Laporan telah Tersususn		
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Waktu Yang Dibutuhkan Untuk Melaksanakan Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah Yang Terlaksana	12 bulan	12 bulan	Tidak Ditemukan Permasalahan		

		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah yang Terealisasi	32	32	Tidak Ditemukan Permasalahan		
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Waktu Yang Dibutuhkan Untuk Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Yang Terlaksana	12 Bulan	12 Bulan	Tidak Ditemukan Permasalahan		
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Waktu Yang Dibutuhkan Untuk Pemeliharaan Barang Milik Daerah Yang Terlaksana	12 Bulan	12 Bulan	Tidak Ditemukan Permasalahan		
		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	CAKUPAN PENYELENGGARAAN KEGIATAN PEMERINTAHAN TINGKAT KECAMATAN	100%	100%			
		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat	Jumlah Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan	6 Kegiatan	6 Kegiatan	Tidak Ditemukan Permasalahan		

		Kecamatan	Pemerintahan di Tingkat Kecamatan					
		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Jumlah Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	4 Kegiatan	4 Kegiatan	Tidak Ditemukan Permasalahan		
		Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	Jumlah Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	6 Kegiatan	6 Kegiatan	Tidak Ditemukan Permasalahan		
		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Jumlah Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan Kepada Camat	0 Kegiatan	0 Kegiatan	Di PAK		
		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN	CAKUPAN KOORDINASI PEMBERDAYAAN DESA / KELURAHAN	100%	100%			

		KELURAHAN						
		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah Kegiata Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa Yang Terlaksana	3 Kegiatan	3 Kegiatan	Tidak Ditemukan Permasalahan		
		PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	CAKUPAN KOORDINASI KETENTRAMAN KETERTIBAN DI WILAYAH KECAMATAN	100%	83%			
		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Yang Terlaksana	12 kegiatan	10 kegiatan	Tidak Ditemukan Permasalahan		
		PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	CAKUPAN PENYELENGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM YANG DITANGANI	100%	75%			

		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	8 Kegiatan	6 Kegiatan	Tidak Ditemukan Permasalahan		
		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	PERSENTASE PEMERINTAHAN DESA YANG DIBINA	100%	100%			
		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah Desa Yang Dilakukan Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	20 Desa	20 Desa	Tidak Ditemukan Permasalahan		

Perangkat Daerah	Uraian Program	Jumlah Indikator Kinerja Program	Rata-Rata Tingkat Ketercapaian Indikator KinerjaProgram (%)	Jumlah Indikator Kinerja Kegiatan	Rata-Rata Tingkat Ketercapaian Indikator Kinerja Kegiatan (%)	Tingkat Kesesuaian Kinerja Program dan Kegiatan (%)
1	2	3	4	5	6	7 (4/6)
KECAMATAN MOJO	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	1	100%	7	100%	100%

	DAERAH KABUPATEN/KOTA					
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	1	100%	4	100%	100%
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	1	100%	1	100%	100%
	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	1	83%	1	100%	83%
	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	1	75%	1	100%	75%
	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	1	100%	1	100%	100%

03) KECAMATAN KRAS

PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASASI PERMASALAHAN	TI REKOI D
1	2	3	4	5	6	7	8	
KECAMATAN KRAS	Penguatan Tugas-Tugas Kewilayahan	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	PERSENTASE PEMENUHAN PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	85%	85%	Realisasi Sesuai Target, Belum Ada Permasalah Yang Dapat Menghambat Kegiatan, Beberapa Kegiatan Yang Dilaksanakan Kurang Optimal	Untuk Kegiatan Akan Dilaksanakan Dengan Berpedoman Pada Pedum dan DPA Kecamatan	
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja yang Tersusun	5 Dokumen	5 Dokumen	Belum Ada Kendala Dalam Penyusunan Dokumen Perencanaan	Dalam Penyusunan Dokumen Perencanaan Untuk	

							Dilaksanakan Tepat Waktu	
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Yang Tersusun	60 Laporan	60 Laporan	Belum Ada Kendala Dalam Penyusunan Laporan Administrasi Keuangan	Dalam Penyusunan Laporan Administrasi Keuangan Untuk Dilaksanakan Tepat Waktu	
		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Barang Milik Daerah Yang Tersusun	4 Laporan	4 Laporan	Belum Ada Kendala Dalam Penyusunan Laporan Administrasi Keuangan	Dalam Penyusunan Laporan Administrasi Keuangan Untuk Dilaksanakan Tepat Waktu	
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah Yang	70 Kegiatan	60 Kegiatan	Belum Ada Kendala Dalam Kegiatan	Melaksanakan Kegiatan Administrasi	

			Terlaksana			Administrasi Umum	Umum Dengan Berpedoman DPA	
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah	2 Kegiatan	2 Kegiatan	Belum Ada Kendala Dalam Proses Pengadaan Barang	Melaksanakan Kegiatan Pengadaan Berpedoman Pedum Dan DPA	
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Kegiatan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Yang Terlaksana	24 Kegiatan	22 Kegiatan	Belum Ada Kendala Dalam Kegiatan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Yang Dilaksanakan	Pelaksanaan Kegiatan Berpedoman Pada Pedum Dan DPA	
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Yang Terlaksana	16 Kegiatan	11 Kegiatan	Belum Ada Kendala Dalam Kegiatan Pemeliharaan	Pelaksanaan Kegiatan Berpedoman Pada Pedum Dan	

						Barang Milik Daerah	DPA	
		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	CAKUPAN PENYELENGGARAAN KEGIATAN PEMERINTAHAN TINGKAT KECAMATAN	100%	84%	Kurang Optimalnya Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan Dikarenakan Jumlah Personil Kecamatan	Melaksanakan Kegiatan Pemerintahan Di Wilayah Kecamatan dengan Melibatkan Personil Kecamatan	
		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	6 Kegiatan	6 Kegiatan	Kurang Optimalnya Koordinasi Dengan Desa Dikarenakan Jumlah Personil Kecamatan	Membuat Jadwal Monitoring, Pembinaan Kegiatan Pemerintahan Di Wilayah Kecamatan dengan	

							Melibatkan Personil Kecamatan	
		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Jumlah Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	12 Kegiatan	9 Kegiatan	Ruangan Pelayanan Yang Kurang Memadai Karena Kondisi Lahan Kecamatan Yang Terbatas	Memaksimalkan Ruangan Yang Ada Untuk Kegiatan Pelayanan	
		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Jumlah Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan Kepada Camat	1 Kegiatan	1 Kegiatan	Belum Ada Kendala Dalam Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Pelaksanaan Kegiatan Berpedoman Pada Pedum Dan DPA	

		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	CAKUPAN KOORDINASI PEMBERDAYAAN DESA / KELURAHAN	100%	94%	Kurangnya Personil Kecamatan Dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Memaksimalkan Personil Kecamatan Yang Ada Untuk Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	
		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah Desa Yang Dikoordinasi Dalam Kegiatan Pemberdayaan Desa	16 Desa	16 Desa	Kurangnya Kegiatan Koordinasi Dengan Desa Terkait Kegiatan Pemberdayaan Desa	Membuat Jadwal Monitoring dan Koordinasi Dengan Desa Terkait Kegiatan Pemberdayaan Desa	
		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	1 Kegiatan	0 Kegiatan	Kurangnya Kegiatan Koordinasi Dengan Desa Terkait Kegiatan Pemberdayaan Lembaga	Membuat Jadwal Koordinasi Dengan Desa Terkait Kegiatan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan	

						Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Tingkat Kecamatan	
		PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	CAKUPAN KOORDINASI KETENTRAMAN KETERTIBAN DI WILAYAH KECAMATAN	100%	100%	Jumlah Personil Dari Kecamatan Yang Tidak Memadai Dalam Memantau Ketentraman dan Ketertiban Umum Dibandingkan Dengan Jumlah Desa Yang Dipantau	Melibatkan Personil Dari POLSEK dan KORAMIL Dalam Menjaga Ketentraman dan Ketertiban Umum Wilayah Kecamatan	

		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Desa Yang Dilakukan Kegiatan Koordinasi Dalam Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	16 Desa	16 Desa	Belum Ada Kendala Pelaksanaan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Membuat Jadwal Monitoring dan Koordinasi Dengan Desa Terkait Ketentraman dan Ketertiban Di Wilayah Dengan Melibatkan Personil POLSEK dan KORAMIL	
		PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	CAKUPAN PENYELENGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM YANG DITANGANI	100%	100%	Kurangnya Personil Kecamatan Dalam Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Yang Ditangani	Memaksimalkan Personil Kecamatan Yang Ada Untuk Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Yang Ditangani	

		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	9 Kegiatan	9 Kegiatan	Belum Ada Kendala Pelaksanaan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Membuat Laporan Evaluasi Secara Berkala Kegiatan Yang Telah Dilaksanakan	
		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	PERSENTASE PEMERINTAHAN DESA YANG DIBINA	100%	100%	Kurangnya Optimalnya Pelaksanaan Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Dibandingkan Dengan Jumlah Desa Yang Harus Dibina	Memaksimalkan Personil Kecamatan dan Membuat Jadwal Monitoring dan Evaluasi Pembinaan dan Pengawasan Desa Dengan Melibatkan Kasi-Kasi Terkait	

		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah Desa Yang Dilakukan Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	16 Desa	16 Desa	Belum Ada Kendala Dalam Kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Membuat Jadwal Monitoring dan Koordinasi Dengan Desa Terkait Kegiatan Pengelolaan Administrasi Keuangan Desa	

Perangkat Daerah	Uraian Program	Jumlah Indikator Kinerja Program	Rata-Rata Tingkat Ketercapaian Indikator Kinerja Program (%)	Jumlah Indikator Kinerja Kegiatan	Rata-Rata Tingkat Ketercapaian Indikator Kinerja Kegiatan (%)	Tingkat Kesesuaian Kinerja Program dan Kegiatan (%)
1	2	3	4	5	6	7 (4/6)
KECAMATAN KRAS	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	1	85%	7	92%	92%

	DAERAH KABUPATEN/KOTA					
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	1	84%	3	92%	92%
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	1	94%	2	100%	94%
	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	1	100%	1	100%	100%
	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	1	100%	1	100%	100%
	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	1	100%	1	100%	100%

04) KECAMATAN NGADILUWIH

PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDA DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9
KECAMATAN NGADILUWIH	Penguatan Tugas-Tugas Kewilayahan	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	PERSENTASE PEMENUHAN PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	100%	100%			
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja yang Tersusun	5 Dokumen	5 Dokumen	Tidak Ditemukan Permasalahan, Semua Dokumen Telah Tersusun		
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Waktu Yang Dibutuhkan Untuk Melaksanakan Kegiatan Administrasi	12 bulan	12 bulan	Tidak Ditemukan Permasalahan		

			Keuangan Perangkat Daerah					
		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Barang Milik Daerah Yang Tersusun	2 Laporan	2 Laporan	Tidak Ditemukan Permasalahan, Semua Laporan telah Tersususn		
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Waktu Yang Dibutuhkan Untuk Melaksanakan Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah Yang Terlaksana	12 bulan	12 bulan	Tidak Ditemukan Permasalahan		
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah yang Terealisasi	7 unit	7 unit	Tidak Ditemukan Permasalahan		
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Waktu Yang Dibutuhkan Untuk Penyediaan Jasa	12 Bulan	12 Bulan	Tidak Ditemukan Permasalahan		

			Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Yang Terlaksana					
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Waktu Yang Dibutuhkan Untuk Pemeliharaan Barang Milik Daerah Yang Terlaksana	12 Bulan	12 Bulan	Tidak Ditemukan Permasalahan		
		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	CAKUPAN PENYELENGGARAAN KEGIATAN PEMERINTAHAN TINGKAT KECAMATAN	100%	100%			
		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	5 Kegiatan	5 Kegiatan	Tidak Ditemukan Permasalahan		

		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Jumlah Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	3 Kegiatan	3 Kegiatan	Tidak Ditemukan Permasalahan		
		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Jumlah Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan Kepada Camat	1 Kegiatan	1 Kegiatan	Tidak Ditemukan Permasalahan		
		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	CAKUPAN KOORDINASI PEMBERDAYAAN DESA / KELURAHAN	100%	100%			
		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah Kegiata Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa Yang Terlaksana	3 Kegiatan	3 Kegiatan	Tidak Ditemukan Permasalahan		

		PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	CAKUPAN KOORDINASI KETENTRAMAN KETERTIBAN DI WILAYAH KECAMATAN	100%	100%			
		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Yang Terlaksana	6 kegiatan	6 kegiatan	Kegiatan Rapat sudah berjalan dengan normal		
		PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	CAKUPAN PENYELENGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM YANG DITANGANI	100%	100%			

		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	8 Kegiatan	8 Kegiatan	Kegiatan Rapat sudah berjalan dengan normal		
		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	PERSENTASE PEMERINTAHAN DESA YANG DIBINA	100%	100%			
		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah Desa Yang Dilakukan Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	16 Desa	16 Desa	Tidak Ditemukan Permasalahan		

Perangkat Daerah	Uraian Program	Jumlah Indikator Kinerja Program	Rata-Rata Tingkat Ketercapaian Indikator KinerjaProgram (%)	Jumlah Indikator Kinerja Kegiatan	Rata-Rata Tingkat Ketercapaian Indikator Kinerja Kegiatan (%)	Tingkat Kesesuaian Kinerja Program dan Kegiatan (%)
1	2	3	4	5	6	7 (4/6)
KECAMATAN NGADILUWIH	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1	100%	7	100%	100%
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	1	100%	4	100%	100%
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	1	100%	1	100%	100%

	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	1	100%	1	100%	100%
	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	1	100%	1	100%	100%
	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	1	100%	1	100%	100%

05) KECAMATAN NGADILUWIH

PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9
KECAMATAN KANDAT	Meningkatnya pelayanan masyarakat dalam mendukung terciptanya suasana kehidupan yang	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase indikator program yang tercapai	100%	93,50%	Karena Jabatan Banyak yang kosong dan di mutasi untuk gaji banya yang tidak terserap	segera mengisi jabatan yang kosong	agar bisa memaksimalkan penyerapan
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran,	8 Dokumen	6 Dokumen	Sisa dana kegiatan	memaksimalkan dalam kegiatan	memaksimalkan dalam kegiatan

	bertoleransi, harmonis, dan saling menghormati dalam semangat keberagaman didukung dengan pelayanan masyarakat yang baik.	Perangkat Daerah	dan Evaluasi Kinerja yang Tersusun						
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Kegiatan Administrasi Umum Yang Terlaksana	107 Kali Pelaksanaan		66 Kali Pelaksanaan	Banyaknya Jabatan Yang Kosong	segera mengisi jabatan yang kosong	Agar Bisa Memaksimalkan Penyerapan
		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah Yang Dilaksanakan	4 Kali Pelaksanaan		4 Kali Pelaksanaan			
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Kegiatan Administrasi Umum Yang Terlaksana	70 Kali Pelaksanaan		66 Kali Pelaksanaan	Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor masih	Perwatan secara berkala	Melaksanakan perawatan secara berkala

						baik		
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah	4 Kali Pelaksanaan	4 Kali Pelaksanaan			
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Yang Dilaksanan	24 Kali Pelaksanaan	17 Kali Pelaksanaan	Penggunaan listrik dan telephon sudah sesuai dengan rekening kebutuhan pemakaian	menambah daya listik karena meteran sering mati karena daya over	Agar Bisa Memaksimalkan Penyerapan
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang	Jumlah Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik	15 Kali Pelaksanaan	12 Kali Pelaksanaan	sisa dana kegiatan rehap dan pemeliharaa	Perwatan secara berkala	Melaksanakan perawatan secara

		Urusan Pemerintahan Daerah	Daerah Yang Terlaksana				n gedung dan peralatan mesin lainya		berkala
		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	CAKUPAN PENYELENGGARAAN KEGIATAN PEMERINTAHAN TINGKAT KECAMATAN	29	Kali Pelaksanaan/kegiatan	28	Kali Pelaksanaan/kegiatan	Tidak ada kegiatan keluar daerah	dengan melakukan Penyerapan Anggaran Perubahan	Agar Bisa Memaksimalkan Penyerapan
		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	12	Kali Pelaksanaan	12	Kali Pelaksanaan			
		Penyelenggaraan Urusan	Jumlah Penyelenggaraa	15	Kali Pelaksanaan	15	Kali Pelaksanaan			

		Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	n Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan					
		Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan	1 Kali Kegiatan	1 Kali Kegiatan			

			Umum					
		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Jumlah Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	1 Kali Kegiatan	0 Kali Kegiatan	Tidak ada kegiatan keluar daerah	dengan melakukan Penyerapan Anggaran Perubahan	Agar Bisa Memaksimalkan Penyerapan
		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	CAKUPAN KOORDINASI PEMBERDAYAAN DESA / KELURAHAN	7 Kali Kegiatan	7 Kali Kegiatan			
		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	7 Kali Kegiatan	7 Kali Kegiatan			

		PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	CAKUPAN KOORDINASI KETENTRAMAN KETERTIBAN DI WILAYAH KECAMATAN	1 Kali Kegiatan	1 Kali Kegiatan			
		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	1 Kali Kegiatan	1 Kali Kegiatan			
		PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	CAKUPAN PENYELENGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM YANG DITANGANI	5 Kali Kegiatan	5 Kali Kegiatan			
		Penyelenggaraa	Jumlah	5 Kali Kegiatan	5 Kali Kegiatan			

		n Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah					
		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	PERSENTASE PEMERINTAHAN DESA YANG DIBINA	100 %	100 %			
		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	24 Kali Kegiatan	24 Kali Kegiatan			

Perangkat Daerah	Uraian Program	Jumlah Indikator Kinerja Program	Rata-rata Tingkat Ketercapaian Indikator KinerjaProgram (%)	Jumlah Indikator Kinerja Kegiatan	Rata-rata Tingkat Ketercapaian Indikator Kinerja Kegiatan (%)	Tingkat Kesesuaian Kinerja Program dan Kegiatan (%)
1	2	3	4	5	6	7 (4/6)
Kecamatan Kandat	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1	75%	7	75%	100%
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	1	97%	4	97%	100%
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	1	100%	1	100%	100%
	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	1	100%	1	100%	100%

	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	1	100%	1	100%	100%
	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	1	100%	1	100%	100%

06) KECAMATAN WATES

PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9
KECAMATAN WATES	Penguatan Tugas-Tugas Kewilayahan	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	PERSENTASE PEMENUHAN PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	100%	100%			

		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja yang Tersusun	5 Dokumen	5 Dokumen	Tidak Ditemukan Permasalahan, Semua Dokumen Telah Tersusun		
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Waktu Yang Dibutuhkan Untuk Melaksanakan Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	12 bulan	12 bulan	Tidak Ditemukan Permasalahan		
		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Barang Milik Daerah Yang Tersusun	2 Laporan	2 Laporan	Tidak Ditemukan Permasalahan, Semua Laporan telah Tersususn		

		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Waktu Yang Dibutuhkan Untuk Melaksanakan Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah Yang Terlaksana	12 bulan	12 bulan	Tidak Ditemukan Permasalahan		
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah yang Terealisasi	7 unit	7 unit	Tidak Ditemukan Permasalahan		
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Waktu Yang Dibutuhkan Untuk Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Yang Terlaksana	12 Bulan	12 Bulan	Tidak Ditemukan Permasalahan		
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Waktu Yang Dibutuhkan Untuk Pemeliharaan Barang Milik Daerah Yang Terlaksana	12 Bulan	12 Bulan	Tidak Ditemukan Permasalahan		

		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	CAKUPAN PENYELENGGARAAN KEGIATAN PEMERINTAHAN TINGKAT KECAMATAN	100%	100%			
		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	5 Kegiatan	5 Kegiatan	Tidak Ditemukan Permasalahan		
		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Jumlah Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	3 Kegiatan	3 Kegiatan	Tidak Ditemukan Permasalahan		
		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada	Jumlah Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang	1 Kegiatan	1 Kegiatan	Tidak Ditemukan Permasalah		

		Camat	Dilimpahkan Kepada Camat			an		
		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	CAKUPAN KOORDINASI PEMBERDAYAAN DESA / KELURAHAN	100%	100%			
		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah Kegiata Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa Yang Terlaksana	3 Kegiatan	3 Kegiatan	Tidak Ditemukan Permasalahan		
		PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	CAKUPAN KOORDINASI KETENTRAMAN KETERTIBAN DI WILAYAH KECAMATAN	100%	100%			
		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Yang	6 kegiatan	6 kegiatan	Kegiatan Rapat sudah berjalan dengan		

			Terlaksana			normal		
		PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	CAKUPAN PENYELENGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM YANG DITANGANI	100%	100%			
		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	8 Kegiatan	8 Kegiatan	Kegiatan Rapat sudah berjalan dengan normal		
		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	PERSENTASE PEMERINTAHAN DESA YANG DIBINA	100%	100%			
		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi	Jumlah Desa Yang Dilakukan Pembinaan	18 Desa	18 Desa	Tidak Ditemukan		

		Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	dan Pengawasan Pemerintahan Desa			Permasalahan		

Perangkat Daerah	Uraian Program	Jumlah Indikator Kinerja Program	Rata-Rata Tingkat Ketercapaian Indikator KinerjaProgram (%)	Jumlah Indikator Kinerja Kegiatan	Rata-Rata Tingkat Ketercapaian Indikator Kinerja Kegiatan (%)	Tingkat Kesesuaian Kinerja Program dan Kegiatan (%)
1	2	3	4	5	6	7 (4/6)
KECAMATAN WATES	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1	100%	7	100%	100%
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN	1	100%	4	100%	100%

	PELAYANAN PUBLIK					
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	1	100%	1	100%	100%
	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	1	100%	1	100%	100%
	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	1	100%	1	100%	100%
	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	1	100%	1	100%	100%

07) KECAMATAN NGANCAR

PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9
KECAMATAN NGANCAR	Meningkatnya Kualitas tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik di Tingkat Kecamatan	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase indikator program yang tercapai	100%	97,77	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA telah terlaksana dengan baik	-	
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi	100%	100	Jumlah Dokumen Perencanaan, penganggaran dan evaluasi	-	

		Daerah	Kinerja yang Tersusun			kinerja telah tersusun		
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Kegiatan Administrasi Keuangan Yang Terlaksana	100%	97.82	Kegiatan Administrasi Keuangan terlaksana dengan baik	-	
		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah Yang Dilaksanakan	100%	100	Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah telah terlaksana	-	
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Kegiatan Administrasi Umum Yang Terlaksana	100%	99,61	Kegiatan Administrasi umum telah terlaksana	-	

		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah	100%	100	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah sesuai rencana kebutuhan	-	
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Yang Dilaksanan	100%	96,63	Jasa penunjang urusan Pemerintah Daerah telah terlaksana	-	
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan	Jumlah Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Yang Terlaksana	100%	93,05	Kegiatan pemeliharaan Barang Milik Daerah yang terlaksana	-	

		Daerah						
		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	CAKUPAN PENYELENGGARAAN KEGIATAN PEMERINTAHAN TINGKAT KECAMATAN	100%	96,12	Penyelenggaraan kegiatan Pemerintahan Tingkat Kecamatan sudah terlaksana	-	
		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	100%	84.37	Koordinasi penyelenggaraan kegiatan Pemerintah di tingkat Kecamatan sudah berjalan baik	-	

		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Jumlah Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	100%	98	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan telah dilaksanakan	-	
		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Jumlah Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	100%	100	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat telah terlaksana	-	

		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	CAKUPAN KOORDINASI PEMBERDAYAAN DESA / KELURAHAN	100%	98	Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa telah dilaksanakan	-	
		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	100%	100	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa telah terlaksana	-	
		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Desa	100%	97,99	Kegiatan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Desa telah terlaksana	-	

		PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	CAKUPAN KOORDINASI KETENTRAMAN KETERTIBAN DI WILAYAH KECAMATAN	100%	100	Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum telah dilaksanakan	-	
		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	100%	100	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum telah dilaksanakan	-	
		PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	CAKUPAN PENYELENGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM YANG DITANGANI	100%	99,96	Penyelenggaraan urusan Pemerintahan Umum telah dilaksanakan	-	

		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	100%	99,96	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah telah dilaksanakan	-	
		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	PERSENTASE PEMERINTAHAN DESA YANG DIBINA	100%	99	Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa telah dilaksanakan	-	
		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan	Jumlah Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan	100%	99	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan	-	

		Desa	Desa			Desa telah dilaksanakan		

Perangkat Daerah	Uraian Program	Jumlah Indikator Kinerja Program	Rata-rata Tingkat Ketercapaian Indikator Kinerja Program (%)	Jumlah Indikator Kinerja Kegiatan	Rata-rata Tingkat Ketercapaian Indikator Kinerja Kegiatan (%)	Tingkat Kesesuaian Kinerja Program dan Kegiatan (%)
1	2	3	4	5	6	7 (4/6)
KECAMATAN NGANCAR	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1	97,77	7	100,00	98%
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN	1	96,12	3	100,00	96%

	PUBLIK					
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	1	98,00	2	100,00	98%
	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	1	100,00	1	100,00	100%
	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	1	99,96	1	100,00	100%
	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	1	99,00	1	100,00	99%

08) KECAMATAN PUNCU

PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9
KECAMATAN PUNCU	Meningkatnya pelayanan masyarakat dalam mendukung terciptanya suasana kehidupan yang bertolerans, harmonis, dan saling menghormati dalam semangat keberagaman	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase indikator program yang tercapai	100%	94%	Tidak ditemukan permasalahan		
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja yang Tersusun	12 Dokumen	12 Dokumen	Jumlah Dokumen Perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja telah tersusun		

	didukung dengan pelayanan masyarakat yang baik.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Yang Tersusun	57 Laporan	57 Laporan	Kegiatan Administrasi Keuangan terlaksana dengan baik		
		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Barang Milik Daerah Yang Tersusun	12 Laporan	12 Laporan	Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah telah terlaksana		
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah Yang Terlaksana	70 Kegiatan	70 Kegiatan	Kegiatan Administrasi umum telah terlaksana		
		Pengadaan Barang Milik Daerah	Jumlah Pengadaan Barang Milik	2 unit	2 unit	Kegiatan Pengadaan Barang Milik		

		Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang terlaksana			Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah telah terlaksana		
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Kegiatan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Yang Terlaksana	24 Kegiatan	24 Kegiatan	Jasa penunjang urusan Pemerintah Daerah telah terlaksana		
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Yang Terlaksana	20 Kegiatan	20 Kegiatan	Kegiatan pemeliharaan Barang Milik Daerah yang terlaksana		

		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	CAKUPAN PENYELENGGARAAN KEGIATAN PEMERINTAHAN TINGKAT KECAMATAN	100%	100%	Tidak ditemukan permasalahan		
		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	12 Kegiatan	12 Kegiatan	Kegiatan Koordinasi penyelenggaraan kegiatan Pemerintah di tingkat Kecamatan sudah berjalan optimal		

		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Jumlah Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	12 Kegiatan	12 Kegiatan	Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan tidak optimal pelaksanaannya oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan telah terlaksana		
		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Jumlah Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan Kepada Camat	1 Kegiatan	1 Kegiatan	Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat telah terlaksana		

		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	CAKUPAN KOORDINASI PEMBERDAYAAN DESA / KELURAHAN	100%	100%	Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa telah dilaksanakan		
		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah Desa Yang Dikoordinasi Dalam Kegiatan Pemberdayaan Desa	8 Desa	8 Desa	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa telah terlaksana		
		PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	CAKUPAN KOORDINASI KETENTRAMAN KETERTIBAN DI WILAYAH KECAMATAN	100%	100%	Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum telah dilaksanakan		

		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Desa Yang Dilakukan Kegiatan Koordinasi Dalam Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	8 Desa	8 Desa	Kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum sudah optimal		
		PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	CAKUPAN PENYELENGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM YANG DITANGANI	100%	97%	Tidak ditemukan permasalahan		
		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan	Jumlah Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai	13 Kegiatan	13 Kegiatan	Anggaran tidak terserap maksimal dikarenakan adanya Kasi	Usulan Penambahan SDM	

		Kepala Daerah	Penugasan Kepala Daerah			yang kosong (FORKOMPIMCAM)		
		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	PERSENTASE PEMERINTAHAN DESA YANG DIBINA	100%	100%	Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa telah dilaksanakan		
		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah Desa Yang Dilakukan Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	8 Desa	8 Desa	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa sudah optimal		

Perangkat Daerah	Uraian Program	Jumlah Indikator Kinerja Program	Rata-rata Tingkat Ketercapaian Indikator Kinerja Program (%)	Jumlah Indikator Kinerja Kegiatan	Rata-rata Tingkat Ketercapaian Indikator Kinerja Kegiatan (%)	Tingkat Kesesuaian Kinerja Program dan Kegiatan (%)
1	2	3	4	5	6	7 (4/6)
KECAMATAN PUNCU	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1	94%	6	98%	95%
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	1	100%	4	100%	100%
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	1	100%	1	100%	100%

	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	1	100%	1	100%	100%
	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	1	97%	1	97%	100%
	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	1	100%	1	100%	100%

09) KECAMATAN PLOSOKLATEN

PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9
KECAMATAN	Penguatan Tugas-Tugas	PROGRAM PENUNJANG URUSAN	PERSENTASE PEMENUHAN	100%	100%			

PLOSOKLATEN	Kewilayahan	PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH					
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja yang Tersusun	17 Dokumen	17 Dokumen	Tidak Ditemukan Permasalahan, Semua Dokumen Telah Tersusun		
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Yang Tersusun	69 Laporan	69 Laporan	Tidak Ditemukan Permasalahan, Semua Laporan telah Tersususn		

		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Barang Milik Daerah Yang Tersusun	2 Laporan	2 Laporan	Tidak Ditemukan Permasalahan, Semua Laporan telah Tersususn		
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah Yang Terlaksana	451 Kegiatan	451 Kegiatan	Tidak Ditemukan Permasalahan, semua kegiatan telah terlaksana		
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah	Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah yang Terealisasi	15 Barang	15 Barang	Tidak Ditemukan Permasalahan,		

		Daerah				semua pengadaan telah terealisasi		
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Kegiatan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Yang Terlaksana	24 Kegiatan	24 Kegiatan	Tidak Ditemukan Permasalahan, semua kegiatan telah terlaksana		
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Yang Terlaksana	19 Kegiatan	19 Kegiatan	Tidak Ditemukan Permasalahan, semua kegiatan telah		

						terlaksana		
		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	CAKUPAN PENYELENGGARAAN KEGIATAN PEMERINTAHAN TINGKAT KECAMATAN	100%	100%			
		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	6 Kegiatan	6 Kegiatan	Tidak Ditemukan Permasalahan, semua kegiatan telah terlaksana		
		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja	Jumlah Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	Tidak Ditemukan Permasalahan,		

		Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan			semua kegiatan telah terlaksana		
		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Jumlah Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan Kepada Camat	1 Kegiatan	1 Kegiatan	Tidak Ditemukan Permasalahan, semua kegiatan telah terlaksana		
		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	CAKUPAN KOORDINASI PEMBERDAYAAN DESA / KELURAHAN	100%	100%			
		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah Kegiata Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	13 Kegiatan	13 Kegiatan	Tidak Ditemukan Permasala		

			Yang Terlaksana			han, semua kegiatan telah terlaksana		
		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakat Tingkat Kecamatan	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakat Tingkat Kecamatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	Tidak Ditemukan Permasalahan, semua kegiatan telah terlaksana		
		PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	CAKUPAN KOORDINASI KETENTRAMAN KETERTIBAN DI WILAYAH KECAMATAN	100%	100%			

		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Yang Terlaksana	0 kegiatan	0 kegiatan	Di PAK		
		PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	CAKUPAN PENYELENGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM YANG DITANGANI	100%	100%			
		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	12 Kegiatan	12 Kegiatan	Tidak Ditemukan Permasalahan, semua kegiatan telah		

						terlaksana		
		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	PERSENTASE PEMERINTAHAN DESA YANG DIBINA	100%	100%			
		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah Desa Yang Dilakukan Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	15 Desa	15 Desa	Tidak Ditemukan Permasalahan		

Perangkat Daerah	Uraian Program	Jumlah Indikator Kinerja Program	Rata-Rata Tingkat Ketercapaian Indikator KinerjaProgram (%)	Jumlah Indikator Kinerja Kegiatan	Rata-Rata Tingkat Ketercapaian Indikator Kinerja Kegiatan (%)	Tingkat Kesesuaian Kinerja Program dan Kegiatan (%)
1	2	3	4	5	6	7 (4/6)

KECAMATAN PLOSOKLATEN	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2	96,58%	7	96,58%	100,00%
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	1	83,50%	3	83,50%	100,00%
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	1	99,36%	2	99,36%	100,00%
	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	0	0,00%	0	0,00%	0,00%

	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	1	96,31%	1	96,31%	100,00%
	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	1	98,11%	1	98,11%	100,00%

10) KECAMATAN GURAH

PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9
KECAMATAN GURAH	Penguatan Tugas-Tugas Kewilayahan melalui peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	PERSENTASE PEMENUHAN PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	85,00%	95,92%	Perencanaan, penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah kurang optimal	Melaksanakan Koordinasi perencanaan , penganggaran, dan evaluasi kinerja secara optimal	
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja yang Tersusun	17 Dokumen	17 Dokumen	Dokumen Perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja telah	Menyusun Dokumen Perencanaan, penganggaran dan evaluasi	

						tersusun	tepat waktu	
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Kegiatan Administrasi Umum Yang Terlaksana	70 Laporan	70 Laporan	Kegiatan Administrasi Umum terlaksana dengan baik	Menyusun dokumen Administrasi Umum dengan tepat waktu	
		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah Yang Dilaksanakan	2 Laporan	2 Laporan	Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah terlaksana dengan baik		
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Kegiatan Administrasi Umum Yang Terlaksana	450 Kegiatan	450 Kegiatan	Tidak Ditemukan Permasalahan, Semua Laporan		

						telah Tersususn		
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah	6 unit barang	6 unit barang	Tidak Ditemukan Permasalahan, Semua Laporan telah Tersususn		
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Yang Dilaksanan	24 Kegiatan	24 Kegiatan	Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah telah dilaksanakan dengan baik		
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Yang Terlaksana	15 Kegiatan	15 Kegiatan	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah telah terlaksana		

						dengan baik		
		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	CAKUPAN PENYELENGGARAAN KEGIATAN PEMERINTAHAN TINGKAT KECAMATAN	100%	90,87%	Tidak Ditemukan Permasalahan, semua kegiatan telah terlaksana		
		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	6 Kegiatan	6 Kegiatan	Tidak Ditemukan Permasalahan, semua kegiatan telah terlaksana		

		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Jumlah Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	3 Kegiatan	3 Kegiatan	Tidak Ditemukan Permasalahan, semua kegiatan telah terlaksana		
		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Jumlah Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	2 Kegiatan	2 Kegiatan	Tidak Ditemukan Permasalahan, semua kegiatan telah terlaksana		
		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN	CAKUPAN KOORDINASI PEMBERDAYAAN DESA /	100%	91,58%	Tidak Ditemukan Permasalahan, semua kegiatan		

		KELURAHAN	KELURAHAN			telah terlaksana		
		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	21 kegiatan	21 kegiatan	Tidak Ditemukan Permasalahan, semua kegiatan telah terlaksana		
		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan tingkat Kecamatan	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakat Tingkat Kecamatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	Tidak Ditemukan Permasalahan, semua kegiatan telah terlaksana		

		PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	CAKUPAN KOORDINASI KETENTRAMAN KETERTIBAN DI WILAYAH KECAMATAN	100%	90,74%	Tidak Ditemukan Permasalahan, semua kegiatan telah terlaksana		
		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	1 kegiatan	1 kegiatan	Tidak Ditemukan Permasalahan, semua kegiatan telah terlaksana		
		PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	CAKUPAN PENYELENGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM YANG DITANGANI	100%	79,82%	Tidak Ditemukan Permasalahan, semua kegiatan telah terlaksana		

		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	12 kegiatan	12 kegiatan	Tidak Ditemukan Permasalahan, semua kegiatan telah terlaksana		
		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	PERSENTASE PEMERINTAHAN DESA YANG DIBINA	100%	98,55%	Tidak Ditemukan Permasalahan, semua kegiatan telah terlaksana	Pemerintahan Desa semakin baik dalam pengelolaan desa karena Pendamping Desa optimal mendampingi dan membimbing desa sehingga pengelolaan desa semakin	

							baik dan SDM desa juga makin kompoten .	
		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	21 desa	21 desa	Tidak Ditemukan Permasalahan, semua kegiatan telah terlaksana		

Perangkat Daerah	Uraian Program	Jumlah Indikator Kinerja Program	Rata-rata Tingkat Ketercapaian Indikator KinerjaProgram (%)	Jumlah Indikator Kinerja Kegiatan	Rata-rata Tingkat Ketercapaian Indikator Kinerja Kegiatan (%)	Tingkat Kesesuaian Kinerja Program dan Kegiatan (%)
1	2	3	4	5	6	7 (4/6)

KECAMATAN GURAH	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2	95,92%	7	100,00%	95,92%
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	1	90,87%	3	100,00%	90,87%
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	1	91,58%	2	100,00%	91,58%
	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	1	90,74%	1	100,00%	90,74%
	PROGRAM PENYELENGGARAAN	1	79,82%	1	100,00%	79,82%

	URUSAN PEMERINTAHAN UMUM					
	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	1	98,55%	1	100,00%	98,55%

11) KECAMATAN PAGU

PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9
KECAMATAN PAGU	Penguatan Tugas-Tugas Kewilayahan	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	PERSENTASE PEMENUHAN PENUNJANG URUSAN	100%	98%			

		DAERAH KABUPATEN/KOTA	PEMERINTAH DAERAH					
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja yang Tersusun	5 Dokumen	5 Dokumen	Tidak Ditemukan Permasalahan, Semua Dokumen Telah Tersusun		
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Waktu Yang Dibutuhkan Untuk Melaksanakan Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	12 bulan	12 bulan	Tidak Ditemukan Permasalahan		
		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Barang Milik Daerah Yang Tersusun	2 Laporan	2 Laporan	Tidak Ditemukan Permasalahan,		

						Semua Laporan telah Tersusun		
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Waktu Yang Dibutuhkan Untuk Melaksanakan Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah Yang Terlaksana	12 bulan	12 bulan	Tidak Ditemukan Permasalahan		
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah yang Terealisasi	8 unit	8 unit	Tidak Ditemukan Permasalahan		
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Waktu Yang Dibutuhkan Untuk Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Yang Terlaksana	12 Bulan	12 Bulan	Tidak Ditemukan Permasalahan		

		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Waktu Yang Dibutuhkan Untuk Pemeliharaan Barang Milik Daerah Yang Terlaksana	12 Bulan	12 Bulan	Tidak Ditemukan Permasalahan		
		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	CAKUPAN PENYELENGGARAAN KEGIATAN PEMERINTAHAN TINGKAT KECAMATAN	100%	100%			
		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	5 Kegiatan	5 Kegiatan	Tidak Ditemukan Permasalahan		
		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang	Jumlah Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja	3 Kegiatan	3 Kegiatan	Tidak Ditemukan Permasalahan		

		ada di Kecamatan	Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan					
		Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	Jumlah Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	7 Kegiatan	7 Kegiatan	Tidak Ditemukan Permasalahan		
		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Jumlah Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan Kepada Camat	0 Kegiatan	0 Kegiatan	Di PAK		
		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	CAKUPAN KOORDINASI PEMBERDAYAAN DESA / KELURAHAN	100%	100%			
		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah Kegiata Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	3 Kegiatan	3 Kegiatan	Tidak Ditemukan Permasala		

			Yang Terlaksana			han		
		PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	CAKUPAN KOORDINASI KETENTRAMAN KETERTIBAN DI WILAYAH KECAMATAN	100%	100%			
		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Yang Terlaksana	6 kegiatan	6 kegiatan	Kegiatan Rapat Koordinasi dilaksanakan	Dengan Menerapkan Protokol Kesehatan Untuk semua Peserta Rapat	
		PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN	CAKUPAN PENYELENGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM YANG	100%	35%			

		UMUM	DITANGANI					
		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	6 Kegiatan	6 Kegiatan	Kegiatan Rapat Koordinasi Dilaksanakan	Dengan Menerapkan Protokol Kesehatan untuk semua Peserta Rapat	
		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	PERSENTASE PEMERINTAHAN DESA YANG DIBINA	100%	100%			
		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah Desa Yang Dilakukan Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	13 Desa	13 Desa	Tidak Ditemukan Permasalahan		

Perangkat Daerah	Uraian Program	Jumlah Indikator Kinerja Program	Rata-Rata Tingkat Ketercapaian Indikator KinerjaProgram (%)	Jumlah Indikator Kinerja Kegiatan	Rata-Rata Tingkat Ketercapaian Indikator Kinerja Kegiatan (%)	Tingkat Kesesuaian Kinerja Program dan Kegiatan (%)
1	2	3	4	5	6	7 (4/6)
KECAMATAN PLOSOKLATEN	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1	100%	7	100%	100%
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	1	100%	4	100%	100%
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	1	100%	1	100%	100%

	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	1	83%	1	100%	83%
	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	1	66%	1	100%	66%
	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	1	100%	1	100%	100%

12) KECAMATAN GAMPENGREJO

PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9
KECAMATAN GAMPENGREJO	Penguatan Tugas-Tugas Kewilayahan	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	PERSENTASE PEMENUHAN PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	100%	95%			
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja yang Tersusun	5 Dokumen	5 Dokumen	Tidak Ditemukan Permasalahan, Semua Dokumen Telah		

						Tersusun		
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Yang Tersusun	53 laporan	53 laporan	Tidak Ditemukan Permasalahan, Semua Dokumen Laporan Telah Tersusun		
		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Barang Milik Daerah Yang Tersusun	4 Laporan	4 Laporan	Tidak Ditemukan Permasalahan, Semua Laporan telah Tersususn		

		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah Yang Terlaksana	70 Kegiatan	70 Kegiatan	Tidak Ditemukan Permasalahan, semua kegiatan dapat terlaksana		
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah	35 unit	35 unit	Tidak Ditemukan Permasalahan		
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Kegiatan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Yang Terlaksana	24 Kegiatan	24 Kegiatan	Tidak Ditemukan Permasalahan, semua kegiatan dapat		

						terlaksana		
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Yang Terlaksana	17 Kegiatan	17 Kegiatan	Tidak Ditemukan Permasalahan, semua kegiatan dapat terlaksana		
		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	CAKUPAN PENYELENGGARAAN KEGIATAN PEMERINTAHAN TINGKAT KECAMATAN	100%	100%			
		Koordinasi Penyelenggaraan	Jumlah Koordinasi Penyelenggaraan	12 Kegiatan	12 Kegiatan	Tidak Ditemukan		

		Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan			Permasalahan		
		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Jumlah Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	12 Kegiatan	12 Kegiatan	Tidak Ditemukan Permasalahan		
		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Jumlah Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan Kepada Camat	1 Kegiatan	1 Kegiatan	Tidak Ditemukan Permasalahan		
		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	CAKUPAN KOORDINASI PEMBERDAYAAN DESA / KELURAHAN	100%	100%			

		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah Desa Yang Dikoordinasi Dalam Kegiatan Pemberdayaan Desa	11 Desa	11 Desa	Tidak Ditemukan Permasalahan		
		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakat Tingkat Kecamatan	Jumlah Desa Yang Mengikuti Kegiatan Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	11 Desa	11 Desa	Tidak Ditemukan Permasalahan		
		PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	CAKUPAN KOORDINASI KETENTRAMAN KETERTIBAN DI WILAYAH KECAMATAN	100%	100%			
		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Desa Yang Dilakukan Kegiatan Koordinasi Dalam Upaya Ketentraman dan	11 Desa	11 Desa	Tidak Ditemukan Permasalahan		

			Ketertiban Umum					
		PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	CAKUPAN PENYELENGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM YANG DITANGANI	100%	100%			
		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	15 Kegiatan	15 Kegiatan	Jumlah Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah		

		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	PERSENTASE PEMERINTAHAN DESA YANG DIBINA	100%	100%			
		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah Desa Yang Dilakukan Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	11 Desa	11 Desa	Tidak Ditemukan Permasalahan		

Perangkat Daerah	Uraian Program	Jumlah Indikator Kinerja Program	Rata-Rata Tingkat Ketercapaian Indikator KinerjaProgram (%)	Jumlah Indikator Kinerja Kegiatan	Rata-Rata Tingkat Ketercapaian Indikator Kinerja Kegiatan (%)	Tingkat Kesesuaian Kinerja Program dan Kegiatan (%)
1	2	3	4	5	6	7 (4/6)
KECAMATAN GAMPENGREJO	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	1	100%	7	100%	100%

	DAERAH KABUPATEN/KOTA					
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	1	100%	3	100%	100%
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	1	100%	2	100%	100%
	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	1	100%	1	100%	100%
	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	1	100%	1	100%	100%

	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	1	100%	1	100%	100%

13) KECAMATAN GROGOL

PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9
KECAMATAN GROGOL	Meningkatnya pelayanan masyarakat dalam mendukung terciptanya suasana kehidupan yang bertoleransi, harmonis, dan saling menghormati dalam	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja yang Tersusun	100%	93,07%	Jumlah Dokumen Perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja telah tersusun	Menyusun Dokumen Perencanaan, penganggaran dan evaluasi dengan tepat dan akurat	

	semangat keberagaman didukung dengan pelayanan masyarakat yang baik.						agar dapat dilaksanakan dan sesuai dengan kebutuhan	
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Pengganggaran dan Evaluasi Kinerja yang tersusun	90 Laporan	46 Laporan	Kegiatan Amidnitrasi keuangan berjalan dengan baik	Jabatan PPTK, PPKeu dan Bendahara terisi dan melaksanakan tugas dengan baik	
		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Barang Milik Daerah Yang Tersusun	4 Laporan	4 Laporan	Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah telah terlaksana	melaksanakan register aset secara tertib dan teratur	

		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah Yang Terlaksana	70 kegiatan	50 kegiatan	Kegiatan Administrasi umum telah terlaksana	kegiatan berjalan dengan baik dan tidak ada permasalahan	
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah yang Terealisasi	Komputer, Laptop, Printer, Sound System, Almari dan Kursi Lipat	Komputer, Laptop, Printer, Sound System, Almari dan Kursi Lipat	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah sesuai rencana kebutuhan	Pengadaan dilaksanakan secara langsung dengan sistem penujukan langsung	

		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Waktu Yang Dibutuhkan Untuk Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Yang Terlaksana	24 kegiatan	20 kegiatan	Jasa penunjang urusan Pemerintah Daerah telah terlaksana		
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Waktu Yang Dibutuhkan Untuk Pemeliharaan Barang Milik Daerah Yang Terlaksana	16 kegiatan	10 kegiatan	Kegiatan pemeliharaan Barang Milik Daerah yang terlaksana	sudah dilaksanakan dengan baik dan aset yang sudah ada sudah terpelihara dengan baik	

		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	CAKUPAN PENYELENGGARAAN KEGIATAN PEMERINTAHAN TINGKAT KECAMATAN	100%	39,63%	kurangnya koordinasi menjadi hambatan terkait pelaksanaan kegiatan pemerintahan	menjalin komunikasi yang baik dan kerjasama yang baik dengan dinas terkait	
		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	12 kegiatan	2 kegiatan	kurangnya koordinasi yang baik	menjalin komunikasi yang baik dan kerjasama yang baik dengan dinas terkait	
		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja	Jumlah Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan	12 kegiatan	2 kegiatan	Koordinasi penyelenggaraan kegiatan Pemerintah di tingkat Kecamatan		

		Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan			sudah berjalan baik		
		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Jumlah Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan Kepada Camat	15 kegiatan	4 kegiatan	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan telah dilaksanakan	Untuk kegiatan kebudayaan yang dilaksanakan pada hari Jadi Kabupaten Kediri karena Pandemi kegiatan tidak dilaksanakan rentan terjadinya penularan Covid 19	

		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	CAKUPAN KOORDINASI PEMBERDAYAAN DESA / KELURAHAN	100%	61,35	kegiatan pemberdayaan lembaga kemasyarakatan tingkat kecamatan karena harus mendatangkan massa	melaksanakan kegiatan di ruangan dengan sirkulasi udara yang baik dan mengurangi jumlah peserta	
		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah Kegiata Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa Yang Terlaksana	8 kegiatan	5 kegiatan	kegiatan pemberdayaan lembaga kemasyarakatan tingkat kecamatan karena harus mendatangkan massa	melaksanakan kegiatan di ruangan dengan sirkulasi udara yang baik dan mengurangi jumlah peserta	

		PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	CAKUPAN KOORDINASI KETENTRAMAN KETERTIBAN DI WILAYAH KECAMATAN	100%	0,00%	Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa telah dilaksanakan		
		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Yang Terlaksana	9 Desa	9 Desa	belum terlaksana	koordinasi dengan desa terkaitbToda dan Tomas untuk pelaksanaan kegiatan selanjutnya	
		PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	CAKUPAN PENYELENGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM YANG	100%	74%	kurangnya koordinasi yang baik sehingga kegiatan belum terlaksana	melaksanakan koordinasi dan komunikasi yang baik dengan	

			DITANGANI			dengan maksimal	instansi terkait	
		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	9 Desa	9 Desa	kurangnya koordinasi yang baik sehingga kegiatan belum terlaksana dengan maksimal	melaksanakan koordinasi dan komunikasi yang baik dengan instansi terkait	
		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	PERSENTASE PEMERINTAHAN DESA YANG DIBINA	100%	89,30%	Penyelenggaraan urusan Pemerintahan Umum yang ditangani tidak bisa berjalan optimal dikarenakan	Kegiatan dialihkan	

						PPKM		
		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah Desa Yang Dilakukan Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	5 kegiatan	4 kegiatan	kegiatan sudah berjalan dengan baik	membuat jadwal kegiatan di awal tahun	

Perangkat Daerah	Uraian Program	Jumlah Indikator Kinerja Program	Rata-rata Tingkat Ketercapaian Indikator Kinerja Program (%)	Jumlah Indikator Kinerja Kegiatan	Rata-rata Tingkat Ketercapaian Indikator Kinerja Kegiatan (%)	Tingkat Kesesuaian Kinerja Program dan Kegiatan (%)

1	2	3	4	5	6	7 (4/6)
KECAMATAN GROGOL	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1	90,00	7	90,00	100%
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	1	39,63	4	39,63	100%
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	1	61,35	1	61,35	100%
	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	1	0,00	1	0,00	#DIV/0!
	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	1	73,74	1	73,74	100%

	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	1	89, 30	1	89,30	#VALUE!

14) KECAMATAN PAPAR

PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9
KECAMATAN PAPAR	Penguatan Tugas-Tugas Kewilayahan	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	PERSENTASE PEMENUHAN PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	100%	100%			

		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja yang Tersusun	5 Dokumen	5 Dokumen	Tidak Ditemukan Permasalahan, Semua Dokumen Telah Tersusun		
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Waktu Yang Dibutuhkan Untuk Melaksanakan Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	12 bulan	12 bulan	Tidak Ditemukan Permasalahan		
		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Barang Milik Daerah Yang Tersusun	2 Laporan	2 Laporan	Tidak Ditemukan Permasalahan, Semua Laporan telah Tersususn		

		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Waktu Yang Dibutuhkan Untuk Melaksanakan Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah Yang Terlaksana	12 bulan	12 bulan	Tidak Ditemukan Permasalahan		
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah yang Terealisasi	148 unit	148 unit	Tidak Ditemukan Permasalahan		
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Waktu Yang Dibutuhkan Untuk Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Yang Terlaksana	12 Bulan	12 Bulan	Tidak Ditemukan Permasalahan		
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Waktu Yang Dibutuhkan Untuk Pemeliharaan Barang Milik Daerah Yang Terlaksana	12 Bulan	12 Bulan	Tidak Ditemukan Permasalahan		

		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	CAKUPAN PENYELENGGARAAN KEGIATAN PEMERINTAHAN TINGKAT KECAMATAN	100%	100%			
		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	6 Kegiatan	6 Kegiatan	Tidak Ditemukan Permasalahan		
		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Jumlah Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	5 Kegiatan	5 Kegiatan	Tidak Ditemukan Permasalahan		
		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada	Jumlah Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang	0 Kegiatan	0 Kegiatan	Tidak adanya kegiatan	Adanya Perubahan Anggaran	

		Camat	Dilimpahkan Kepada Camat			Pekan Budaya Kab. Kediri	Kinerja	
		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	CAKUPAN KOORDINASI PEMBERDAYAAN DESA / KELURAHAN	100%	100%			
		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah Kegiata Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa Yang Terlaksana	3 Kegiatan	3 Kegiatan	Tidak Ditemukan Permasalahan		
		PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	CAKUPAN KOORDINASI KETENTRAMAN KETERTIBAN DI WILAYAH KECAMATAN	100%	100%			
		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan	6 kegiatan	6 kegiatan	Tidak Ditemukan Permasalahan		

			Ketertiban Umum Yang Terlaksana					
		PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	CAKUPAN PENYELENGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM YANG DITANGANI	100%	100%			
		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	12 Kegiatan	12 Kegiatan	Tidak Ditemukan Permasalahan		
		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	PERSENTASE PEMERINTAHAN DESA YANG DIBINA	100%	100%			
		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan	Jumlah Desa Yang Dilakukan Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	17 Desa	17 Desa	Tidak Ditemukan Permasalahan		

		Pemerintahan Desa						

Perangkat Daerah	Uraian Program	Jumlah Indikator Kinerja Program	Rata-Rata Tingkat Ketercapaian Indikator KinerjaProgram (%)	Jumlah Indikator Kinerja Kegiatan	Rata-Rata Tingkat Ketercapaian Indikator Kinerja Kegiatan (%)	Tingkat Kesesuaian Kinerja Program dan Kegiatan (%)
1	2	3	4	5	6	7 (4/6)
KECAMATAN PAPAR	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1	100%	7	100%	100%
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN	1	100%	3	100%	100%

	PELAYANAN PUBLIK					
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	1	100%	1	100%	100%
	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	1	100%	1	100%	100%
	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	1	100%	1	100%	100%
	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	1	100%	1	100%	100%

15) KECAMATAN PURWOASRI

PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9
KECAMATAN PURWOASRI	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik di Tingkat Kecamatan	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan tingkat kecamatan	100%	95%			
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat	6 dokumen	5 dokumen	Tidak ditemukan permasalahan, semua dokumen telah tersusun		

			Daerah					
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Administrasi Keuangan	66 kegiatan	60 kegiatan	Perencanaan dan penganggaran kurang optimal	Melaksanakan Koordinasi perencanaan dan penganggaran secara optimal	
		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Capaian Kegiatan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	100%	100%	Tidak ditemukan permasalahan, semua dokumen telah tersusun		

		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Administrasi Umum Perangkat Daerah yang Terlaksana	100%	98%	Perencanaan dan penganggaran kegiatan kurang optimal	Melaksanakan Koordinasi perencanaan dan penganggaran kegiatan secara optimal	
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah	100%	100%	Tidak ditemukan permasalahan, semua dokumen telah tersusun		
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan	Jumlah Kegiatan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang	24 kegiatan	24 kegiatan	Tidak ditemukan permasalahan, semua dokumen telah tersusun		

		Daerah	Terlaksana					
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerahyang Terlaksana	13 kegiatan	13 kegiatan	Tidak ditemukan permasalahan, semua dokumen telah tersusun		
		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	CAKUPAN PENYELENGGARAAN KEGIATAN PEMERINTAHAN TINGKAT KECAMATAN	100%	91%			

		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	6 kegiatan	5 kegiatan	Perencanaan dan penganggaran kegiatan kurang optimal	Melaksanakan Koordinasi perencanaan dan penganggaran kegiatan secara optimal	
		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Jumlah Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	12 kegiatan	10 kegiatan	Perencanaan dan penganggaran kegiatan kurang optimal	Melaksanakan Koordinasi perencanaan dan penganggaran kegiatan secara optimal	

		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Jumlah Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	1 kegiatan	1 kegiatan	Tidak ditemukan permasalahan		
		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	CAKUPAN KOORDINASI PEMBERDAYAAN DESA / KELURAHAN	100%	100%			
		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah Desa Yang Dikoordinasi dalam Kegiatan Pemberdayaan Desa	23 desa	23 desa	Tidak ditemukan permasalahan		

		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	1 kegiatan	2 kegiatan	Tidak ditemukan permasalahan		
		PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	CAKUPAN KOORDINASI KETENTRAMAN KETERTIBAN DI WILAYAH KECAMATAN	100%	100%			
		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Desa yang Dilakukan Kegiatan Koordinasi dalam Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban	23 desa	23 desa	Tidak ditemukan permasalahan		

			Umum					
		PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	CAKUPAN PENYELENGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM YANG DITANGANI	100%	100%			
		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	6 kegiatan	13 kegiatan	Tidak ditemukan permasalahan		

		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	PERSENTASE PEMERINTAHAN DESA YANG DIBINA	100%	100%			
		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah Desa yang Dilakukan Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	23 desa	23 desa	Tidak ditemukan permasalahan		

Perangkat Daerah	Uraian Program	Jumlah Indikator Kinerja Program	Rata-rata Tingkat Ketercapaian Indikator Kinerja Program (%)	Jumlah Indikator Kinerja Kegiatan	Rata-rata Tingkat Ketercapaian Indikator Kinerja Kegiatan (%)	Tingkat Kesesuaian Kinerja Program dan Kegiatan (%)
1	2	3	4	5	6	7 (4/6)

KECAMATAN PURWOASRI	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1	95,00	7	100,00	95%
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	1	91,00	3	100,00	91%
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	1	100,00	1	100,00	100%
	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	1	100,00	1	100,00	100%
	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	1	100,00	1	100,00	100%

	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	1	100,00	1	100,00	100%

16) KECAMATAN PLEMAHAN

PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9
KECAMATAN PLEMAHAN	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	PERSENTASE PEMENUHAN PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	100%	95%			

		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja yang Tersusun	5 dok	5 dok	Tidak Ditemukan Permasalahan, Semua Dokumen Telah Tersusun		
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Yang Tersusun	90 lap	85 lap	Tidak Ditemukan Permasalahan		
		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Barang Milik Daerah Yang Tersusun	6 laporan	6 laporan	Tidak Ditemukan Permasalahan, Semua Laporan telah Tersususn		
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Kegiatan Administrasi Umum Perangkat	68 keg	68 keg	Tidak Ditemukan Permasalahan		

			Yang Terlaksana					
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah	2 keg	2 keg	Tidak Ditemukan Permasalahan		
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Kegiatan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang Terlaksana	24 keg	24 keg	Tidak Ditemukan Permasalahan		
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Yang Terlaksana	13 keg	13 keg	Tidak Ditemukan Permasalahan		
		PROGRAM PENYELENGGAR	CAKUPAN PENYELENGGAR	100%	100%			

		AAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	AAN KEGIATAN PEMERINTAHAN TINGKAT KECAMATAN					
		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	5 keg	5 keg	Tidak Ditemukan Permasalahan		
		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Jumlah Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	5 keg	5 keg	Tidak Ditemukan Permasalahan		

		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Jumlah Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	1 keg	1 keg	Tidak Ditemukan Permasalahan		
		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	CAKUPAN KOORDINASI PEMBERDAYAAN DESA / KELURAHAN	100%	100%			
		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah Desa yang terkoordinasi dalam Kegiatan Pemberdayaan Desa	17 desa	17 desa	Tidak Ditemukan Permasalahan		
		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Jumlah Pemberdayaan Lembaga kemasyarakatan tingkat Kecamatan	1 keg	1 keg	Tidak Ditemukan Permasalahan		

		PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	CAKUPAN KOORDINASI KETENTRAMAN KETERTIBAN DI WILAYAH KECAMATAN	100%	100%			
		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Desa yang Dilakukan Kegiatan Koordinasi Dalam Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	17 desa	17 desa	Tidak Ditemukan Permasalahan		
		PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	CAKUPAN PENYELENGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM YANG DITANGANI	100%	100%			

		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	5 Kegiatan	5 Kegiatan	Tidak Ditemukan Permasalahan		
		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	PERSENTASE PEMERINTAHAN DESA YANG DIBINA	100%	100%			
		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah Desa Yang Dilakukan Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	17 desa	17 desa	Tidak Ditemukan Permasalahan		

Perangkat Daerah	Uraian Program	Jumlah Indikator Kinerja Program	Rata-Rata Tingkat Ketercapaian Indikator KinerjaProgram (%)	Jumlah Indikator Kinerja Kegiatan	Rata-Rata Tingkat Ketercapaian Indikator Kinerja Kegiatan (%)	Tingkat Kesesuaian Kinerja Program dan Kegiatan (%)
1	2	3	4	5	6	7 (4/6)
KECAMATAN PLEMAHAN	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1	95%	7	#DIV/0!	#DIV/0!
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	1	100%	3	100%	100%
	PROGRAM PEMBERDAYAAN	1	100%	2	100%	100%

	MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN					
	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	1	100%	1	100%	100%
	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	1	100%	1	100%	100%
	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	1	100%	1	100%	100%

17) KECAMATAN PARE

PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET		REALISASI		PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
1	2	3	4	5		6		7	8	9
KECAMATAN PARE	PENGUATAN TUGAS-TUGAS KEWILAYAHAN	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Pelayanan Yang Dilaksanakan Tepat Waktu	###		100%		Kegiatan Penunjang Urusan Pemerintahan dapat Diselesaikan Sesuai Time Schedule yang Telah Disusun	Pembagian tugas sesuai dengan kapasitas dan jumlah SDM yang tersedia	
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi	21	Dokumen	21	Dokumen	Dokumen Perencanaan Telah Tersusun sesuai Ketentuan yang Berlaku	Kualitas dan Tingkat Ketepatan Waktu Penyusunan Dokumen	

			Kinerja yang Tersusun						Lebih Ditingkatkan Lagi	
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Yang Tersusun	81	Laporan	81	Laporan	Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Telah Tersusun sesuai Target yang Ditetapkan	Kecermatan Penrhitungan Laporan Administrasi Keuangan Perlu Ditingkatkan Lagi	
		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Barang Milik Daerah Yang Tersusun	14	Laporan	14	Laporan	Laporan Administrasi Barang Milik Daerah (BMD) Telah Tersusun sesuai Target yang Ditetapkan	Menjalin Kounikasi dan Koordinasi yang baik dengan Semua Seksi dalam Penyusunan	

									Laporan BMD	
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah Yang Terlaksana	7	Kegiatan	7	Kegiatan	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah Terlaksana Sesuai Target	Kualitas Pelaksanaan Kegiatan Perlu Ditingkatkan Lagi	
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Paket Pengadaan Barang Milik Daerah	8	paket	8	paket	Perhitungan antara HPS dan Realisasi BMD masih perlu Diperbaiki agar tidak Ada SILPA Pengadaan BMD	Pemanfaatan E-Katalog Lebih Ditingkatkan lagi dalam Penyusunan Rencana BMD	
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kegiatan Jasa	12	Laporan	12	Laporan	Laporan Pelaksanaan Kegiatan Jasa Penunjang Urusan	Kerjasama yang Baik dengan semua Seksi	

		Daerah	Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Yang Terlaksana					Pemerintah Daerah Telah Tersusun Sesuai Target	supaya Dipertahankan	
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Yang Terlaksana	4	Kegiatan	4	Kegiatan	Masih banyak BMD yang belum teridentifikasi untuk dilakukan pemeliharaan	Pada Tahap Perencanaan Anggaran Harus Bekerjasama dengan Pengelola BMD	
		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Pelayanan Yang Dilaksanakan Tepat Waktu	####		####		Pelayanan Masyarakat Terlaksana Tepat Waktu	Ketersediaan Sarana dan Prasarana yang Lebih Lengkap sangat Mendukung	

									Tercapainya Pelayanan Tepat Waktu	
		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	2	Kegiatan	2	Kegiatan	Kegiatan Sudah Berjalan Sesuai Jadwal yang Ditetapkan	Kualitas Output Kegiatan Perlu Ditingkatkan Lagi	
		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di	Jumlah Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja	1	Kegiatan	1	Kegiatan	Output Kegiatan masih Perlu Ditingkatkan karena Kurangnya Pemahaman dari Tujuan Kegiatan tersebut	Koordinasi dengan Instansi Terkait untuk Kelancaran Pelaksanaan Kegiatan	

		Kecamatan	Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan							
		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Jumlah Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan Kepada Camat	2	Kegiatan	2	Kegiatan	Kegiatan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan Kepada Camat Terlaksana sesuai Target	Supaya Tetap Mempertahankan Kerjasama yang Baik dengan Semua Pihak Guna Mendukung Kegiatan tersebut	
		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	Persentase Pelayanan Yang	####		100%		Program pemberdayaan masyarakat	Tingkat Akurasi Perencanaan	

		DESA DAN KELURAHAN	Dilaksanakan Tepat Waktu					kelurahan telah terealisasi sesuai target	dan Realisasi Anggaran Perlu Ditingkatkan	
		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah Desa Yang Dikoordinasi Dalam Kegiatan Pemberdayaan Desa	9	Desa	9	Desa	Kurang SDM sehingga koordinasi kurang maksimal	Penataan ulang SDM yang ada untuk membantu pekerjaan di setiap seksi	
		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan yang Terlaksana	12	Kegiatan	12	Kegiatan	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Terlaksana Tepat Waktu	Supaya Lebih Fokus pada Kegiatan yang Dibutuhkan Masyarakat di Wilayah Kelurahan	

		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakat Tingkat Kecamatan	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakat Tingkat Kecamatan	1	Kegiatan	1	Kegiatan	Kegiatan Pembinaan Ketua RT/RW Se-Kecamatan Pare Terlaksana Sesuai Target	Volume Kegiatan Perlu Ditambah lagi	
		PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Pelayanan Yang Dilaksanakan Tepat Waktu	####		###		Secara umum situasi wilayah sangat kondusif	Masih perlu ditingkatkan kewaspadaan untuk menciptakan ketentraman ketertiban di wilayah kecamatan	
		Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah	Jumlah Desa dan Kelurahan yang	9 / 1	Desa / Kel	9 / 1	Desa / Kel	Kegiatan Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah	Kualitas Pelaksanaan Kegiatan Perlu Ditingkatkan	

		dan Peraturan Kepala Daerah	Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah nya Terkoordinasi					dan Peraturan Kepala Daerah nya Terlaksana sesuai Target	Lagi	
		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Desa da Kelurahan Yang Dilakukan Kegiatan Koordinasi Dalam Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan	9 / 1	Desa / Kel	9 / 1	Desa / Kel	Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum Telah Dilaksanakan di 9 Desa dan 1 Kelurahan	Kualitas Pelaksanaan Kegiatan Perlu Ditingkatkan Lagi	

			Ketertiban Umum							
		PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Pelayanan Yang Dilaksanakan Tepat Waktu	###		##		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Terlaksana sesuai dengan Target	Kualitas Pelaksanaan Kegiatan Perlu Ditingkatkan Lagi	
		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	2	Kegiatan	2	Kegiatan	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah Telah Terlaksana sesuai Target	Volume Kegiatan Perlu Ditambah lagi	
		PROGRAM PEMBINAAN DAN	Persentase Pelayanan	###		##		Pembinaan dan Pengawasan	Tingkat Ketepatan	

		PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Yang Dilaksanakan Tepat Waktu					Pemerintah Desa Terlaksana sesuai Target	Waktu Pelkasanaan Kegiatan Perlu Ditingkatkan	
		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah Desa Yang Dilakukan Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	9	Desa	9	Desa	Target Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa di 9 Desa Sudah Terfasilitasi dengan Baik	Tingkat Ketepatan Waktu Penyelesaian Administrasi Keuangan Pemerintah Desa perlu Ditingkatkan	

Perangkat Daerah	Uraian Program	Jumlah Indikator Kinerja Program	Rata-rata Tingkat Ketercapaian Indikator Kinerja Program (%)	Jumlah Indikator Kinerja Kegiatan	Rata-rata Tingkat Ketercapaian Indikator Kinerja Kegiatan (%)	Tingkat Kesesuaian Kinerja Program dan Kegiatan (%)
1	2	3	4	5	6	7 (4/6)
KECAMATAN PARE	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1	100,00%	7	100%	100%
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	1	100%	4	100%	100%
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	1	100%	3	100%	100%

	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	1	100%	1	100%	100%
	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	1	100%	1	100%	100%
	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	1	100%	1	100%	100%

18) KECAMATAN KEPUNG

PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9
KECAMATAN KEPUNG	Penguatan Tugas-Tugas Kewilayahan	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	PERSENTASE PEMENUHAN PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	100%	100%			
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja yang	5 Dokumen	5 Dokumen	Tidak Ditemukan Permasalahan, Semua Dokumen		

			Tersusun			Telah Tersusun		
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Waktu Yang Dibutuhkan Untuk Melaksanakan Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	12 bulan	12 bulan	Tidak Ditemukan Permasalahan		
		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Barang Milik Daerah Yang Tersusun	2 Laporan	2 Laporan	Tidak Ditemukan Permasalahan, Semua Laporan telah Tersususn		
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Waktu Yang Dibutuhkan Untuk Melaksanakan Kegiatan	12 bulan	12 bulan	Tidak Ditemukan Permasalahan		

			Administrasi Umum Perangkat Daerah Yang Terlaksana					
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah yang Terealisasi	2 unit	2 unit	Tidak Ditemukan Permasalahan		
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Waktu Yang Dibutuhkan Untuk Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Yang Terlaksana	12 Bulan	12 Bulan	Tidak Ditemukan Permasalahan		
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan	Waktu Yang Dibutuhkan Untuk Pemeliharaan Barang Milik	12 Bulan	12 Bulan	Tidak Ditemukan Permasalahan		

		Pemerintahan Daerah	Daerah Yang Terlaksana					
		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	CAKUPAN PENYELENGGARAAN KEGIATAN PEMERINTAHAN TINGKAT KECAMATAN	100%	100%			
		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	5 Kegiatan	5 Kegiatan	Tidak Ditemukan Permasalahan		
		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja	Jumlah Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak	3 Kegiatan	3 Kegiatan	Tidak Ditemukan Permasalahan		

		Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan					
		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Jumlah Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan Kepada Camat	1 Kegiatan	1 Kegiatan	Kegiatan Rapat Koordinasi Masih Sangat Terbatas Karena Pandemi COVID 19	Dengan Menerapkan Protokol Kesehatan Yang Ketat dan Pembatasan Peserta	
		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	CAKUPAN KOORDINASI PEMBERDAYAAN DESA / KELURAHAN	100%	100%			

		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah Kegiata Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa Yang Terlaksana	5 Kegiatan	5 Kegiatan	Tidak Ditemukan Permasalahan		
		PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	CAKUPAN KOORDINASI KETENTRAMAN KETERTIBAN DI WILAYAH KECAMATAN	100%	75%			
		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Yang Terlaksana	8 kegiatan	6 kegiatan	Kegiatan Rapat Koordinasi Masih Sangat Terbatas Karena Pandemi	Dengan Menerapkan Protokol Kesehatan Yang Ketat dan Pembatasan	

						COVID 19	Peserta Rapat	
		PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	CAKUPAN PENYELENGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM YANG DITANGANI	100%	50%			
		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	4 Kegiatan	2 Kegiatan	Kegiatan Rapat Koordinasi Masih Sangat Terbatas Karena Pandemi COVID 19	Dengan Menerapkan Protokol Kesehatan Yang Ketat dan Pembatasan Peserta Rapat	
		PROGRAM PEMBINAAN DAN	PERSENTASE PEMERINTAHAN	100%	100%			

		PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	DESA YANG DIBINA					
		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah Desa Yang Dilakukan Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	10 Desa	10 Desa	Tidak Ditemukan Permasalahan		

Perangkat Daerah	Uraian Program	Jumlah Indikator Kinerja Program	Rata-Rata Tingkat Ketercapaian Indikator KinerjaProgram (%)	Jumlah Indikator Kinerja Kegiatan	Rata-Rata Tingkat Ketercapaian Indikator Kinerja Kegiatan (%)	Tingkat Kesesuaian Kinerja Program dan Kegiatan (%)
1	2	3	4	5	6	7 (4/6)
KECAMATAN KEPUNG	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	1	100%	7	100%	100%

	DAERAH KABUPATEN/KOTA					
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	1	100%	3	100%	100%
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	1	100%	1	100%	100%
	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	1	75%	1	100%	75%
	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	1	50%	1	100%	50%

	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	1	100%	1	100%	100%

19) KECAMATAN KANDANGAN

PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9
KECAMATAN KANDANGAN	Penguatan Tugas-Tugas Kewilayahan	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	PERSENTASE PEMENUHAN PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	87%	95%			

		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja yang Tersusun	6 Dokumen	6 Dokumen	Tidak Ditemukan Permasalahan, Semua Dokumen Telah Tersusun		
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Waktu Yang Dibutuhkan Untuk Melaksanakan Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	12 bulan	12 bulan	Tidak Ditemukan Permasalahan		
		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Waktu yang dibutuhkan untuk pembayaran Penatausahaan Barang Milik Daerah (BMD) pada SKPD	12 bulan	12 bulan	Tidak Ditemukan Permasalahan		
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Waktu Yang Dibutuhkan Untuk Melaksanakan	12 bulan	12 bulan	Tidak Ditemukan		

			Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah Yang Terlaksana			Permasalahan		
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah yang Terealisasi	5 unit	5 unit	Tidak Ditemukan Permasalahan		
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Waktu Yang Dibutuhkan Untuk Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Yang Terlaksana	12 Bulan	12 Bulan	Tidak Ditemukan Permasalahan		
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Waktu Yang Dibutuhkan Untuk Pemeliharaan Barang Milik Daerah Yang Terlaksana	12 Bulan	12 Bulan	Tidak Ditemukan Permasalahan		
		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN	CAKUPAN PENYELENGGARAAN KEGIATAN	100%	100%			

		PELAYANAN PUBLIK	PEMERINTAHAN TINGKAT KECAMATAN					
		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	7 Kegiatan	7 Kegiatan	Tidak Ditemukan Permasalahan		
		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Jumlah Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	6 Kegiatan	6 Kegiatan	Tidak Ditemukan Permasalahan		
		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Jumlah Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan Kepada Camat	3 Kegiatan	3 Kegiatan	Tidak Ditemukan Permasalahan		

		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	CAKUPAN KOORDINASI PEMBERDAYAAN DESA / KELURAHAN	100%	100%			
		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah Kegiata Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa Yang Terlaksana	5 Kegiatan	5 Kegiatan	Tidak Ditemukan Permasalahan		
		PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	CAKUPAN KOORDINASI KETENTRAMAN KETERTIBAN DI WILAYAH KECAMATAN	100%	100%			
		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Yang Terlaksana	2 kegiatan	2 kegiatan	Tidak Ditemukan Permasalahan		

		PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	CAKUPAN PENYELENGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM YANG DITANGANI	100%	100%			
		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	3 Kegiatan	3 Kegiatan	Tidak Ditemukan Permasalahan		
		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	PERSENTASE PEMERINTAHAN DESA YANG DIBINA	100%	100%			
		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah Desa Yang Dilakukan Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	12 Desa	12 Desa	Tidak Ditemukan Permasalahan		

Perangkat Daerah	Uraian Program	Jumlah Indikator Kinerja Program	Rata-Rata Tingkat Ketercapaian Indikator KinerjaProgram (%)	Jumlah Indikator Kinerja Kegiatan	Rata-Rata Tingkat Ketercapaian Indikator Kinerja Kegiatan (%)	Tingkat Kesesuaian Kinerja Program dan Kegiatan (%)
1	2	3	4	5	6	7 (4/6)
KECAMATAN KANDANGAN	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1	87%	7	95%	92%
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	1	100%	3	100%	100%
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA	1	100%	1	100%	100%

	DAN KELURAHAN					
	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	1	100%	1	100%	100%
	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	1	100%	1	100%	100%
	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	1	100%	1	100%	100%

20) KECAMATAN TAROKAN

PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9
KECAMATAN TAROKAN	Penguatan Tugas-Tugas Kewilayahan	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	PERSENTASE PEMENUHAN PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	100%	94%			
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja yang Tersusun	5 Dokumen	5 Dokumen	Tidak Ditemukan Permasalahan, Semua Dokumen		

						Telah Tersusun		
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Yang Tersusun	65 laporan	65 laporan	Tidak Ditemukan Permasalahan, Semua Dokumen Laporan Telah Tersusun		
		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Barang Milik Daerah Yang Tersusun	12 Dokumen	12 Dokumen	Tidak Ditemukan Permasalahan, Semua Laporan telah Tersususn		

		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah Yang Terlaksana	52 Kegiatan	52 Kegiatan	Tidak Ditemukan Permasalahan, semua kegiatan dapat terlaksana		
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah	110 unit	110 unit	Tidak Ditemukan Permasalahan		
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Kegiatan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Yang Terlaksana	37 Kegiatan	37 Kegiatan	Tidak Ditemukan Permasalahan, semua kegiatan dapat		

						terlaksana		
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Yang Terlaksana	37 Kegiatan	37 Kegiatan	Tidak Ditemukan Permasalahan, semua kegiatan dapat terlaksana		
		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	CAKUPAN PENYELENGGARAAN KEGIATAN PEMERINTAHAN TINGKAT KECAMATAN	100%	100%			
		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	20 Kegiatan	20 Kegiatan	Tidak Ditemukan Permasalahan		

		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Jumlah Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	15 Kegiatan	15 Kegiatan	Tidak Ditemukan Permasalahan		
		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Jumlah Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan Kepada Camat	1 Kegiatan	1 Kegiatan	Tidak Ditemukan Permasalahan		
		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	CAKUPAN KOORDINASI PEMBERDAYAAN DESA / KELURAHAN	100%	91%			
		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah Desa Yang Dikoordinasi Dalam Kegiatan Pemberdayaan	10 Desa	10 Desa	Tidak Ditemukan Permasala		

			Desa			han		
		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakat Tingkat Kecamatan	Jumlah Desa Yang Mengikuti Kegiatan Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	10 Desa	10 Desa	Tidak Ditemukan Permasala han		
		PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	CAKUPAN KOORDINASI KETENTRAMAN KETERTIBAN DI WILAYAH KECAMATAN	100%	100%			
		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Desa Yang Dilakukan Kegiatan Koordinasi Dalam Upaya Ketentraman dan Ketertiban Umum	10 Desa	10 Desa	Tidak Ditemukan Permasala han		
		PROGRAM PENYELENGGARAAN	CAKUPAN PENYELENGARAAN	100%	82%			

		URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	URUSAN PEMERINTAHAN UMUM YANG DITANGANI					
		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	15 Kegiatan	15 Kegiatan	Jumlah Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah		
		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	PERSENTASE PEMERINTAHAN DESA YANG DIBINA	100%	95%			

		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah Desa Yang Dilakukan Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	10 Desa	10 Desa	Tidak Ditemukan Permasalahan		

Perangkat Daerah	Uraian Program	Jumlah Indikator Kinerja Program	Rata-Rata Tingkat Ketercapaian Indikator KinerjaProgram (%)	Jumlah Indikator Kinerja Kegiatan	Rata-Rata Tingkat Ketercapaian Indikator Kinerja Kegiatan (%)	Tingkat Kesesuaian Kinerja Program dan Kegiatan (%)
1	2	3	4	5	6	7 (4/6)
KECAMATAN TAROKAN	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1	94%	7	100%	94%
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN	1	100%	3	100%	100%

	PELAYANAN PUBLIK					
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	1	91%	2	100%	91%
	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	1	100%	1	100%	100%
	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	1	82%	1	100%	82%
	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	1	95%	1	100%	95%

21) KECAMATAN KUNJANG

PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9
KECAMATAN KUNJANG	Peningkatan stabilitas wilayah dan pelayan Publik	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase indikator program yang tercapai	100%	85,59%		Melaksanakan Koordinasi perencanaan , penganggaran , dan evaluasi kinerja secara optimal	
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi	10.933.260	7.728.000	Tidak ditemukan permasalahan, dokumen	Menyusun Dokumen Perencanaan, penganggaran	

		Daerah	Kinerja yang Tersusun			sudah tersusun	dan evaluasi tepat waktu	
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Kegiatan Administrasi Keuangan Yang Terlaksana	1.895.796.125	1.817.705.780	Tidak ditemukan permasalahan	Mengajukan usulan penambahan Pejabat & Staf yang kosong	
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Kegiatan Administrasi Umum Yang Terlaksana	107.025.400	36.518.641	Tidak ditemukan permasalahan		
		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah Yang Dilaksanakan	52.510.000	30.536.380	Tidak ditemukan permasalahan, semua laporan telah dibuat		

		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah	54.515.400	45.614.714	Tidak ditemukan permasalahan		
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Yang Dilaksanan	28.146.768	26.883.725	Tidak ditemukan permasalahan		
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan	Jumlah Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Yang Terlaksana	55.000.000	30.536.380	Tidak ditemukan permasalahan		

		Daerah						
		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	CAKUPAN PENYELENGGARAAN KEGIATAN PEMERINTAHAN TINGKAT KECAMATAN	41.059.500		Tidak ditemukan permasalahan		
		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	12.311.000		Tidak ditemukan permasalahan		

		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Jumlah Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	3.748.500		Tidak ditemukan permasalahan		
		Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	15.000.000	15.000.000	Tidak ditemukan permasalahan		

		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Jumlah Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	10.000.000	9.945.274	Tidak ditemukan permasalahan		
		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	CAKUPAN KOORDINASI PEMBERDAYAAN DESA / KELURAHAN	100%	71,25%	Tidak Ditemukan Permasalahan		
		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	35.200.000	25.082.000			
		PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN	CAKUPAN KOORDINASI KETENTRAMAN			Tidak Ditemukan Permasalahan		

		DAN KETERTIBAN UMUM	KETERTIBAN DI WILAYAH KECAMATAN					
		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	-	0%	Tidak Ditemukan Permasalahan		
		PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	CAKUPAN PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM			Tidak Ditemukan Permasalahan		
		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan	Jumlah Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai	81.373.000	78.592.700	Tidak Ditemukan Permasalahan		

		Kepala Daerah	Penugasan Kepala Daerah					
		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	PERSENTASE PEMERINTAHAN DESA YANG DIBINA					
		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	24.150.000	13.980.000	Kurangnya SDM yang membidangi		

Perangkat Daerah	Uraian Program	Jumlah Indikator Kinerja Program	Rata-rata Tingkat Ketercapaian Indikator Kinerja Program (%)	Jumlah Indikator Kinerja Kegiatan	Rata-rata Tingkat Ketercapaian Indikator Kinerja Kegiatan (%)	Tingkat Kesesuaian Kinerja Program dan Kegiatan (%)
1	2	3	4	5	6	7 (4/6)
KECAMATAN KUNJANG	7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1	70,68%	4	85,59%	83%
	7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	1	48,40%	3	100,00%	48,40%
	7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	1	71,25%	2	87,88%	81,08%

	7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	1	96,58%	1	96,58%	100%
	7.01.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	1	57,88%	1	79,60%	72,71%

22) KECAMATAN BANYAKAN

PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9

KECAMATAN BANYAKAN	Penguatan Tugas-Tugas Kewilayahan	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	PERSENTASE PEMENUHAN PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	100%	96,39%	Tingkat ketepatan waktu penyelesaian dokumen perencanaan karena SDM terbatas	Pembagian tugas sesuai dengan kapasitas dan jumlah SDM yang tersedia	
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja yang Tersusun	5 Dokumen	5 Dokumen	Tingkat ketepatan waktu penyelesaian dokumen perencanaan karena SDM terbatas	Pembagian tugas sesuai jumlah SDM yang tersedia	
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Waktu Yang Dibutuhkan Untuk Melaksanakan Kegiatan Administrasi Keuangan	12 bulan	12 bulan	Ada beberapa formasi pejabat struktural yang belum terisi	Pengajuan / Usulan ke Badan Kepegawaian Daerah	

			Perangkat Daerah					
		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Barang Milik Daerah Yang Tersusun	12 bulan	12 bulan	Tingkat ketepatan waktu penyelesaian Laporan Administrasi Barang Milik Daerah	Membuat daftar prioritas penyelesaian laporan BMD	
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Waktu Yang Dibutuhkan Untuk Melaksanakan Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah Yang Terlaksana	12 bulan	12 bulan	Tingkat ketepatan waktu pelaksanaan kegiatan administrasi umum belum maksimal	Memaksimalkan penggunakan media sosial yang ada	

		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah yang Terealisasi	10 unit	10 unit	Kurang koordinasi dengan bidang aset BPKAD terkait klasifikasi aset	Meningkatkan koordinasi secara offline dan online, membekali pengurus barang dengan pedoman/aturan terkait pengadaan barang / jasa	
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Waktu Yang Dibutuhkan Untuk Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Yang Terlaksana	12 Bulan	12 Bulan	Perencanaan kurang, masih ada kebutuhan yang belum terakomodir di DPA dan DPPA	Melakukan koordinasi dengan semua seksi dan LKK lebih awal sebelum jadwal penyusunan perencanaan dilaksanakan	

		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Waktu Yang Dibutuhkan Untuk Pemeliharaan Barang Milik Daerah Yang Terlaksana	12 Bulan	12 Bulan	Masih banyak BMD yang belum teridentifikasi untuk dilakukan pemeliharaan	Melakukan koordinasi dengan semua seksi dan LKK lebih awal sebelum jadwal penyusunan perencanaan dilaksanakan	
		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	CAKUPAN PENYELENGGARAAN KEGIATAN PEMERINTAHAN TINGKAT KECAMATAN	100%	98,10%	Penyelenggaraan kegiatan Pemerintahan Tingkat Kecamatan sudah terlaksana		
		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di	Jumlah Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan	5 Kegiatan	5 Kegiatan	Kurang nya informasi tentang Penyelenggaraa	Meningkatkan koordinasi dengan instansi	

		Tingkat Kecamatan	Pemerintahan di Tingkat Kecamatan			n pemerintahan kelurahan	vertikal terkait	
		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Jumlah Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	3 Kegiatan	3 Kegiatan	Pelayanan masyarakat harus tetap dilaksanakan secara offline meskipun di masa pandemi	Melengkapi sarpras pelayanan masyarakat dengan fasilitas prokes untuk mencegah penyebaran covid 19	
		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Jumlah Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan Kepada Camat	0 Kegiatan	0 Kegiatan	Kegiatan Tidak bisa terlaksana karena pandemi covid	Tetap Dianggarkan karena pelaksanaan kegiatan menyesuaikan kondisi yang ada	

		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	CAKUPAN KOORDINASI PEMBERDAYAAN DESA / KELURAHAN	100%	85%	Program pemberdayaan masyarakat kelurahan belum dapat terealisasi secara maksimal	Perangkat kelurahan harus lebih aktif mengajukan usulan pembangunan, sarpras wilayah dan kegiatan pemberdayaan masyarakat kelurahan ke instansi terkait	
		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah Kegiata Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa Yang Terlaksana	5 Kegiatan	5 Kegiatan	Kurang SDM sehingga koordinasi kurang maksimal	Penataan ulang SDM yang ada untuk membantu pekerjaan di setiap seksi	

		PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	CAKUPAN KOORDINASI KETENTRAMAN KETERTIBAN DI WILAYAH KECAMATAN	100%	85%	Secara umum situasi wilayah sangat kondusif	Masih perlu ditingkatkan kewaspadaan untuk menciptakan ketentraman ketertiban di wilayah kecamatan	
		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Yang Terlaksana	8 kegiatan	7 kegiatan	Faktor eksternal yang tidak bisa diprediksi sebagai penyebab munculnya kondisi yang tidak kondusif	Meningkatkan koordinasi, melengkapi sarpras tanggap bencana dan situasi darurat lainnya	

		PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	CAKUPAN PENYELENGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM YANG DITANGANI	100%	90,00%	Permasalahan utama adalah di bidang keuangan (penyusunan dan penetapan dana desa)	Intensifikasi pelaksanaan bimtek dan sosialisasi terkait penyusunan dana desa oleh instansi vertikal terkait	
		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	4 Kegiatan	4 Kegiatan	Ketidaksesuaian Prosedur antara penetapan nilai pagu anggaran dana desa dan penetapan dana desa	Meningkatkan koordinasi dengan instansi vertikal terkait, untuk mencari solusi yang efektif dan efisien terkait penetapan anggaran dana desa	

		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	PERSENTASE PEMERINTAHAN DESA YANG DIBINA	100%	90,00%	Capaian kinerja secara kualitas kegiatan pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa masih kurang	Peningkatan pemahaman terkait peraturan yang berlaku tentang tata pemerintahan desa melalui bimtek dan sosialisasi oleh Narasumber yang membidangi	

		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah Desa Yang Dilakukan Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	9 Desa	9 Desa	Peraturan dan Perundang-undangan yang berlaku tentang pemerintahan desa belum bisa diterapkan secara maksimal	Meningkatkan koordinasi dan menjalin komunikasi yang aktif dengan aparat pemerintahan desa sebagai salah satu upaya meminimalisir terjadinya penyimpangan	

Perangkat Daerah	Uraian Program	Jumlah Indikator Kinerja Program	Rata-Rata Tingkat Ketercapaian Indikator Kinerja Program (%)	Jumlah Indikator Kinerja Kegiatan	Rata-Rata Tingkat Ketercapaian Indikator Kinerja Kegiatan (%)	Tingkat Kesesuaian Kinerja Program dan Kegiatan (%)
1	2	3	4	5	6	7 (4/6)
KECAMATAN BANYAKAN	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1	96,39%	7	100%	96,39%
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	1	98,10%	3	100%	98,10%
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	1	85,00%	1	100%	85,00%
	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN	1	85,00%	1	88%	97,14%

	KETERTIBAN UMUM					
	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	1	90,00%	1	100%	90,00%
	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	1	90,00%	1	100%	90,00%

23) KECAMATAN RINGINREJO

PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9
KECAMATAN	Penguata	PROGRAM	PERSENTASE	100%	100%			

RINGINREJO	n Tugas-Tugas Kewilayahan	PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	PEMENUHAN PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH					
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja yang Tersusun	4 Dokumen	4 Dokumen	Tidak Ditemukan Permasalahan, Semua Dokumen Telah Tersusun		
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	38 Laporan	38 Laporan	Tidak Ditemukan Permasalahan		
		Administrasi Barang Milik	Jumlah Laporan Administrasi	14 Laporan	14 Laporan	Tidak Ditemukan		

		Daerah pada Perangkat Daerah	Barang Milik Daerah Yang Tersusun			Permasalahan, Semua Laporan telah Tersususn		
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah yang terlaksana	44 Kegiatan	44 Kegiatan	Tidak Ditemukan Permasalahan		
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah yang Terealisasi	3 Kegiatan	3 Kegiatan	Tidak Ditemukan Permasalahan		
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Kegiatan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan	24 Kegiatan	24 Kegiatan	Tidak Ditemukan Permasalahan		

			Daerah yang Terlaksana					
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Kegiatan Pemiliharaan Barang Milik Daerah Yang terlaksana	8 Kegiatan	8 Kegiatan	Tidak Ditemukan Permasalahan		
		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	CAKUPAN PENYELENGGARAAN KEGIATAN PEMERINTAHAN TINGKAT KECAMATAN	100%	100%			
		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat	Jumlah Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di	1 Kegiatan	1 Kegiatan	Tidak Ditemukan Permasalahan		

		Kecamatan	Tingkat Kecamatan					
		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Jumlah Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	Tidak Ditemukan Permasalahan		
		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	CAKUPAN KOORDINASI PEMBERDAYAAN DESA / KELURAHAN	100%	100%			
		Koordinasi Kegiatan	Jumlah Desa yang di Koordinasi	11 Desa	11 Desa	Tidak Ditemukan		

		Pemberdayaan Desa	dalam Pemberdayaan Desa			Permasalahan		
		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	Tidak Ditemukan Permasalahan		
		PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	CAKUPAN KOORDINASI KETENTRAMAN KETERTIBAN DI WILAYAH KECAMATAN	100%	100%			
		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Desa yang dilakukan Kegiatan Koordinasi dalam	11 desa	11 desa	Tidak Ditemukan Permasalahan		

			Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum					
		PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	CAKUPAN PENYELENGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM YANG DITANGANI	100%	100%			
		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	13 Kegiatan	13 Kegiatan	Tidak Ditemukan Permasalahan		

Perangkat Daerah	Uraian Program	Jumlah Indikator Kinerja Program	Rata-Rata Tingkat Ketercapaian Indikator KinerjaProgram (%)	Jumlah Indikator Kinerja Kegiatan	Rata-Rata Tingkat Ketercapaian Indikator Kinerja Kegiatan (%)	Tingkat Kesesuaian Kinerja Program dan Kegiatan (%)
1	2	3	4	5	6	7 (4/6)
KECAMATAN RINGINREJO	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1	100%	7	100%	100%
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	1	100%	2	100%	100%
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	1	100%	2	100%	100%
	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN	1	100%	1	100%	100%

	KETERTIBAN UMUM					
	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	1	100%	1	100%	100%

24) KECAMATAN KAYEN KIDUL

PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9
KECAMATAN KAYEN KIDUL	Meningkatnya pelayanan masyarakat dalam mendukung	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase indikator program yang tercapai	6 keg	6 keg	Perencanaan, penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat	Melaksanakan Koordinasi perencanaan, penganggara	

	terciptanya suasana kehidupan yang bertolerans, harmonis, dan saling menghormati dalam semangat keberagaman didukung dengan pelayanan masyarakat yang baik.	KABUPATEN/KOTA				Daerah kurang optimal	n, dan evaluasi kinerja secara optimal	
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja yang Tersusun	5 dok	5 dok	Jumlah Dokumen Perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja telah tersusun	Menyusun Dokumen Perencanaan, penganggaran dan evaluasi tepat waktu	
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Kegiatan Administrasi Keuangan Yang Terlaksana	12 bl	12 bl	Kegiatan Administrasi Keuangan kurang terlaksana dengan baik, dikarenakan	Usulan pengisian jabatan yang kosong	

						terdapat kekosongan jabatan		
		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah Yang Dilaksanakan	12 bl	12 bl	Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah telah terlaksana		
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Kegiatan Administrasi Umum Yang Terlaksana	12 bl	12 bl	Kegiatan Administrasi umum telah terlaksana		
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Yang Dilaksanan	12 bl	12 bl	Jasa penunjang urusan Pemerintah Daerah telah terlaksana		

		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Yang Terlaksana	12 bh	12 bh	Kegiatan pemeliharaan Barang Milik Daerah yang terlaksana		
		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	CAKUPAN PENYELENGGARAAN KEGIATAN PEMERINTAHAN TINGKAT KECAMATAN	4 keh	4 keg	Penyelenggaraan kegiatan Pemerintahan Tingkat Kecamatan Belum Optimal dikarenakan terbatasnya SDM	Usulan penambahan SDM	
		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di	Jumlah Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan	12 bl	12 bl	Koordinasi penyelenggaraan kegiatan Pemerintah di		

		Tingkat Kecamatan	Pemerintahan di Tingkat Kecamatan			tingkat Kecamatan sudah berjalan baik		
		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Jumlah Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	12 bl	12 bl	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan telah dilaksanakan		

		Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	12 bl	12 bl	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum telah dilaksanakan tanpa adanya jadwal yang tersusun		
		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang	Jumlah Pelaksanaan Urusan Pemerintahan	1 keg	0 keg	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang		

		Dilimpahkan kepada Camat	yang Dilimpahkan kepada Camat			Dilimpahkan kepada Camat telah terlaksana		
		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	CAKUPAN KOORDINASI PEMBERDAYAAN DESA / KELURAHAN	12 desa	12 desa	Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa telah dilaksanakan		
		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	12 desa	12 desa	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa telah terlaksana		
		PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN	CAKUPAN KOORDINASI KETENTRAMAN KETERTIBAN DI WILAYAH	12 bl	12 bl	Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum telah dilaksanakan		

		UMUM	KECAMATAN					
		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	12 bl	12 bl	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum telah dilaksanakan		
		PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	CAKUPAN PENYELENGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM YANG DITANGANI	12 bl	12 bl	Penyelenggaraan urusan Pemerintahan Umum yang ditangani berjalan optimal		

		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	12 bl	12 bl	Anggaran tidak terserap maksimal dikarenakan merupakan pergeseran anggaran kegiatan baru (FORKOMPIMCAM) di bulan November	Merencanakan kegiatan di akhir tahun	Anggaran terserap maksimal
		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	PERSENTASE PEMERINTAHAN DESA YANG DIBINA	12 desa	12 desa	Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa telah dilaksanakan		

		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	12 desa	12 desa	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa telah dilaksanakan		

Perangkat Daerah	Uraian Program	Jumlah Indikator Kinerja Program	Rata-rata Tingkat Ketercapaian Indikator Kinerja Program (%)	Jumlah Indikator Kinerja Kegiatan	Rata-rata Tingkat Ketercapaian Indikator Kinerja Kegiatan (%)	Tingkat Kesesuaian Kinerja Program dan Kegiatan (%)
1	2	3	4	5	6	7 (4/6)
KECAMATAN KAYEN KIDUL	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1	88,53	6	97,50	91%

	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	1	100,00	3	100,00	100%
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	1	100,00	1	100,00	100%
	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	1	100,00	1	100,00	100%
	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	1	40,26	1	40,26	100%
	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	1	94,74	1	94,74	100%

25) KECAMATAN KAYEN KIDUL

PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9
KECAMATAN NGASEM	Penguatan Tugas-Tugas Kewilayahan	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	PERSENTASE PEMENUHAN PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	100%	95,92%			
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja yang Tersusun	5 Dokumen	5 Dokumen	Tingkat ketepatan waktu penyelesaian dokumen perencanaan karena SDM terbatas	Pembagian tugas sesuai dengan kapasitas dan jumlah SDM yang tersedia	

		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Waktu Yang Dibutuhkan Untuk Melaksanakan Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	12 bulan	12 bulan	Ada beberapa formasi pejabat struktural yang belum terisi	Pengajuan / Usulan ke Badan Kepegawaian Daerah	
		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Barang Milik Daerah Yang Tersusun	12 bulan	12 bulan	Tingkat ketepatan waktu penyelesaian Laporan Administrasi Barang Milik Daerah	Membuat daftar prioritas penyelesaian laporan BMD	
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Waktu Yang Dibutuhkan Untuk Melaksanakan Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah Yang Terlaksana	12 bulan	12 bulan	Tingkat ketepatan waktu pelaksanaan kegiatan administrasi umum belum maksimal	Memaksimalkan penggunakan media sosial yang ada	

		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah yang Terealisasi	3 unit	3 unit	Kurang koordinasi dengan bidang aset BPKAD terkait klasifikasi aset	Meningkatkan koordinasi secara offline dan online, membekali pengurus barang dengan pedoman/aturan terkait pengadaan barang / jasa	
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Waktu Yang Dibutuhkan Untuk Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Yang Terlaksana	12 Bulan	12 Bulan	Tidak Ditemukan Permasalahan		

		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Waktu Yang Dibutuhkan Untuk Pemeliharaan Barang Milik Daerah Yang Terlaksana	12 Bulan	12 Bulan	Masih banyak BMD yang belum teridentifikasi untuk dilakukan pemeliharaan	Melakukan koordinasi dengan semua seksi dan LKK lebih awal sebelum jadwal penyusunan perencanaan dilaksanakan	
		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	CAKUPAN PENYELENGGARAAN KEGIATAN PEMERINTAHAN TINGKAT KECAMATAN	100%	99,47%			
		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di	Jumlah Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan	5 Kegiatan	5 Kegiatan	Kurang nya informasi tentang Penyelenggaraa	Meningkatkan koordinasi dengan instansi vertikal terkait	

		Tingkat Kecamatan	Pemerintahan di Tingkat Kecamatan			n pemerintahan Desa		
		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Jumlah Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	3 Kegiatan	3 Kegiatan	Pelayanan masyarakat harus tetap dilaksanakan secara offline	Melengkapi sarpras pelayanan masyarakat dengan fasilitas	
		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Jumlah Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan Kepada Camat	0 Kegiatan	0 Kegiatan	Kegiatan Tidak bisa terlaksana karena anstisipasi terdapat pandemi	Tetap Dianggarkan karena pelaksanaan kegiatan menyesuaikan kondisi yang ada	

		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	CAKUPAN KOORDINASI PEMBERDAYAAN DESA / KELURAHAN	100%	100%			
		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah Kegiata Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa Yang Terlaksana	5 Kegiatan	5 Kegiatan	Kurang SDM sehingga koordinasi kurang maksimal	Penataan ulang SDM yang ada untuk membantu pekerjaan di setiap seksi	
		PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	CAKUPAN KOORDINASI KETENTRAMAN KETERTIBAN DI WILAYAH KECAMATAN	100%	100%			
		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan	8 kegiatan	6 kegiatan	Faktor eksternal yang tidak bisa diprediksi sebagai	Meningkatkan koordinasi, melengkapi sarpras tanggap	

			Ketertiban Umum Yang Terlaksana			penyebab munculnya kondisi yang tidak kondusif	bencana dan situasi darurat lainnya	
		PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	CAKUPAN PENYELENGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM YANG DITANGANI	100%	93,00%			
		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	4 Kegiatan	2 Kegiatan	Ketidaksesuaian Prosedur antara penetapan nilai pagu anggaran dana desa dan penetapan dana desa	Meningkatkan koordinasi dengan instansi vertikal terkait, untuk mencari solusi yang efektif dan efisien terkait penetapan anggaran dana desa	

		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	PERSENTASE PEMERINTAHAN DESA YANG DIBINA	100%	98,00%			
		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah Desa Yang Dilakukan Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	15 Desa	15 Desa	Peraturan dan Perundang-undangan yang berlaku tentang pemerintahan desa belum bisa diterapkan secara maksimal	Meningkatkan koordinasi dan menjalin komunikasi yang aktif dengan aparat pemerintahan desa sebagai salah satu upaya meminimalisir terjadinya penyimpangan	

Perangkat Daerah	Uraian Program	Jumlah Indikator Kinerja Program	Rata-Rata Tingkat Ketercapaian Indikator KinerjaProgram (%)	Jumlah Indikator Kinerja Kegiatan	Rata-Rata Tingkat Ketercapaian Indikator Kinerja Kegiatan (%)	Tingkat Kesesuaian Kinerja Program dan Kegiatan (%)
1	2	3	4	5	6	7 (4/6)
KECAMATAN NGASEM	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1	96%	7	100%	96%
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	1	99%	3	100%	99%
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	1	100%	2	100%	100%
	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN	1	100%	1	100%	100%

	KETERTIBAN UMUM					
	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	1	95%	2	100%	95%
	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	1	94%	5	100%	94%

26) KECAMATAN BADAS

PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9
KECAMATA	Penguatan Tugas-Tugas	PROGRAM	PERSENTASE	95%	97%			

N BADAS	Kewilayahan	PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	PEMENUHAN PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH					
	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja yang Tersusun	5 Dokumen	5 Dokumen	Tidak Ditemukan Permasalahan, Semua Dokumen Telah Tersusun		
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase terlaksananya Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100%	97%	Tidak Ditemukan Permasalahan		

		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Barang Milik Daerah Yang Tersusun	2 Laporan	2 Laporan	Tidak Ditemukan Permasalahan, Semua Laporan telah Tersususn		
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase terlaksananya Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah Yang Terlaksana	100%	98%	Tidak Ditemukan Permasalahan		
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase terlaksananya kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%	93%	Tidak Ditemukan Permasalahan		

			Yang Terlaksana					
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase terlaksananya kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%	87%	Tidak Ditemukan Permasalahan		
		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	CAKUPAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	100%	100%			
		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	34 Kegiatan	34 Kegiatan	Tidak Ditemukan Permasalahan		

		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Jumlah Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan Kepada Camat	1 Kegiatan	1 Kegiatan	Tidak Ditemukan Permasalahan		
		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	CAKUPAN KOORDINASI PEMBERDAYAAN DESA / KELURAHAN	100%	100%			
		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah Kegiata Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa Yang Terlaksana	4 Kegiatan	4 Kegiatan	Tidak Ditemukan Permasalahan		
		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Jumlah kegiatan Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan yang dilaksanakan	3 Kegiatan	3 Kegiatan	Tidak Ditemukan Permasalahan		

		PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	CAKUPAN KOORDINASI KETENTRAMAN KETERTIBAN DI WILAYAH KECAMATAN	100%	100%			
		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Yang Terlaksana	12 kegiatan	12 kegiatan	Tidak Ditemukan Permasalahan		
		PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	CAKUPAN PENYELENGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM YANG DITANGANI	100%	100%			

		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	10 Kegiatan	10 Kegiatan	Tidak Ditemukan Permasalahan		
		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	PERSENTASE PEMERINTAHAN DESA YANG DIBINA	100%	100%			
		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah Desa Yang Dilakukan Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	8 Desa	8 Desa	Tidak Ditemukan Permasalahan		

Perangkat Daerah	Uraian Program	Jumlah Indikator Kinerja Program	Rata-Rata Tingkat Ketercapaian Indikator KinerjaProgram (%)	Jumlah Indikator Kinerja Kegiatan	Rata-Rata Tingkat Ketercapaian Indikator Kinerja Kegiatan (%)	Tingkat Kesesuaian Kinerja Program dan Kegiatan (%)
1	2	3	4	5	6	7 (4/6)
KECAMATAN BADAS	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1	97%	6	100%	97%
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	1	100%	2	100%	100%
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	1	100%	2	100%	100%

	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	1	100%	1	100%	100%
	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	1	100%	1	100%	100%
	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	1	100%	1	100%	100%

3.4 Kebijakan Strategis yang Ditetapkan

Sebagaimana arah kebijakan pada RPJMD Provinsi Jawa Timur Tahun 2019 – 2024, maka tema pembangunan Provinsi Jawa adalah :

“Pemulihan Ekonomi dan Reformasi Struktural dalam Rangka Meningkatkan Daya Saing Daerah di Era Industri Perdagangan Berbasis Agro”

Berdasar tema tersebut ditetapkan 7 (tujuh) agenda pembangunan sebagai berikut : Pemulihan ekonomi kerakyatan melalui peningkatan nilai tambah ublic sekunder dan pariwisata;

1. Penguatan konektivitas antar wilayah dalam upaya pemerataan hasil pembangunan serta peningkatan layanan infrastruktur;
2. Peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, produktivitas dan daya saing ketenagakerjaan serta pengentasan kemiskinan;
3. Peningkatan kepedulian ublic dan pelestarian nilai-nilai budaya ubli;
4. Peningkatan kemandirian pangan dan pengelolaan sumber daya ublic;
5. Peningkatan ketahanan bencana dan kualitas lingkungan hidup; dan
6. Peningkatan ketentraman, ketertiban umum dan peningkatan kualitas pelayanan ublic bagi masyarakat di Jawa Timur.

3.4.1 Prioritas Pembangunan Kabupaten Kediri

Sebagaimana dijelaskan sebelumnya bahwa RPJMD Kabupaten Kediri Tahun 2021 – 2026 sedang dalam proses penyusunan sehingga prioritas pembangunan Kabupaten Kediri tahun 2022 berpedoman pada visi Bupati dan Wakil Bupati berikut :

”Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Kediri yang Maju, Berkarakter Nasionalis-Religius, serta Sejahtera Berdasarkan Ekonomi Kerakyatan yang Didukung Birokrasi yang Melayani”

Penjabaran makna dari visi Kabupaten Kediri yaitu :

MAJU

suatu kondisi harapan yang akan diwujudkan untuk masyarakat Kediri dengan semakin meningkatnya daya saing daerah yang diiringi dengan kemajuan pembangunan kawasan, sumber daya manusia, birokrasi pemerintahan, layanan publik, serta dukungan teknologi yang unggul.

BERKARAKTER NASIONALIS RELIGIUS

merupakan cara berpikir, bersikap, dan berbuat yang menunjukkan kesetiaan, kepedulian, dan penghargaan yang tinggi terhadap nilai-nilai kebangsaan, gotong royong, norma agama, sosial budaya sehingga menempatkan pribadi sebagai manusia yang beradab dalam bingkai Pancasila.

SEJAHTERA

merupakan kondisi masyarakat Kediri yang memiliki taraf hidup yang baik dan mampu memenuhi standar kebutuhan hidup yang layak melalui kegiatan keseharian yang mapan.

EKONOMI KERAKYATAN

merupakan sistem ekonomi yang ditujukan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat banyak melalui kegiatan ekonomi yang menitikberatkan pada peran masyarakat dengan mempergunakan sumber daya ekonomi lokal yang tumbuh menjadi satu kesatuan bangunan ekonomi daerah.

BIROKRASI YANG MELAYANI

merupakan kondisi birokrasi pemerintahan yang memenuhi sebagian besar reformasi birokrasi, manajemen perubahan, penataan tata laksana, penataan sistem manajemen SDM, penguatan pengawasan, dan penguatan akuntabilitas kinerja untuk bertransformasi menjadi pelayan publik yang baik sekaligus mitra dan pengayom masyarakat menuju kesejahteraan dan kemajuan Kediri.

Visi tersebut dijabarkan lebih rinci dengan tujuan dan sasaran pada masing misi-misi sebagai berikut :

Tabel 18

TUJUAN DAN SASARAN MASING-MASING MISI

Tujuan	Sasaran
Misi 1 Pengembangan Sumber Daya Manusia yang Berkarakter Nasionalis-Religius	
Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing	a. Meningkatnya Aksesibilitas, Kualitas dan Manajemen Pendidikan b. Meningkatnya Aksesibilitas dan Kualitas Layanan Kesehatan Masyarakat c. Meningkatnya Daya Saing Tenaga Kerja Lokal d. Meningkatnya Perlindungan dan Pemberdayaan Sosial serta Pengendalian Penduduk
Tujuan	**Sasaran**
Meningkatkan Harmonisasi dan Kondusivitas Daerah	Meningkatnya Penerapan Nilai Nasionalisme, Agama, dan Semangat Demokrasi di Masyarakat
Misi 2 Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik	

Tujuan	Sasaran
Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	a. Meningkatnya Koordinasi, Akuntabilitas, dan Profesionalitas Penyelenggaraan Pemerintahan di Daerah b. Meningkatnya Pelayanan Publik dan Informasi Publik Berbasis IT c. Meningkatkan Peran Masyarakat dalam Menjaga Keamanan dan Ketertiban Umum
Misi 3 Pengembangan Ekonomi Kerakyatan dan Peningkatan Investasi Daerah	
Meningkatkan Daya Saing Sektor Ekonomi Daerah	a. Meningkatnya Daya Dukung Perekonomian Lokal dan Nilai Tambah Potensi Unggulan Daerah b. Meningkatnya Investasi Daerah
Misi 4 Revitalisasi Pertanian untuk Ketahanan dan Swasembada Pangan	
Meningkatnya Daya Dukung dan Kemandirian Sektor Pertanian dan Pangan Daerah	ningkatnya Produktivitas, Ketahanan, dan Peran Ekonomi Sektor Pertanian dalam Arti Luas
si 5 ningkatan Infrastruktur dan Konektivitas antar Wilayah	
Menurunkan Kesenjangan Pembangunan antar Wilayah	Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Infrastruktur Kawasan dan Daerah serta Aksesibilitas antar Wilayah
Misi 6 Optimalisasi Kepariwisataan Berbasis Kearifan Lokal	
Meningkatkan Daya Saing Pariwisata Daerah	Meningkatnya Kontribusi Sektor Pariwisata bagi Perekonomian Daerah
Misi 7 Optimalisasi Tata Kelola Lingkungan Hidup, Sumber Daya Alam dan Mitigasi Bencana	
Meningkatan Kualitas Lingkungan Hidup dan Kelestarian Sumber Daya Alam	a. Meningkatnya Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup b. Meningkatnya Sinergitas antar Pemerintah, Masyarakat dan Swasta dalam Penanggulangan Bencana
Tujuan	**Sasaran**
Misi 8	

Tujuan	Sasaran
Pengembangan Seni Budaya, Olahraga dan Kreativitas Pemuda	
Meningkatkan Potensi Seni Budaya dan Peran Generasi Muda untuk Pembangunan Daerah	Meningkatnya Kelestarian Seni Budaya Lokal dan Daya Dukung Generasi Muda bagi Daerah
Misi 9 Perwujudan Kemandirian Desa untuk Kesejahteraan Masyarakat	
Mendorong Daya Saing Ekonomi Masyarakat dan Desa	Meningkatnya Kemandirian Masyarakat dan Desa

Dengan menganalisa hasil evaluasi, isu strategis, rancangan kerangka ekonomi daerah dan kerangka pendanaan serta dalam rangka pencapaian prioritas pembangunan tahun 2022, serta berpedoman pada visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih, maka tema pembangunan Kabupaten Kediri Tahun 2022 adalah : **"Kediri Bangkit : Memantapkan Pemulihan Ekonomi, Transformasi Manajemen Birokrasi, dan Sinergitas Pembangunan"**, dengan arah kebijakan sebagai berikut :

a. Transformasi Birokrasi dan Pelayanan;
b. Kedekatan dengan Masyarakat;
c. Pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) Optimal;
d. Pemulihan Ekonomi Pasa Covid; dan
e. Penyelesaian Infrastruktur Nasional.

Dalam menentukan prioritas pembangunan RKPD Kabupaten Kediri Tahun 2022 juga memperhatikan pokok-pokok pikiran DPRD Kabupaten Kediri sebagai berikut :

1. Pembangunan Ekonomi

   Pemerintah daerah diharapkan dapat melaksanakan pembangunan ekonomi kerakyatan melalui peningkatan pertanian, UMKM, Koperasi dan Pariwisata, yang diwujudkan melalui program pembangunan Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan, pengembangan kawasan agropolitan, revitalisasi pertanian, pengembangan pola kemitraan inti plasma yang berwawasan pasar, pengembangan smart pertanian melalui pemanfaatan inovasi teknologi, optimalisasi lahan kurang produktif, pengembangan UMKM, penguatan dan pemberdayaan koperasi, pengembangan ekonomi digital, peningkatan investasi dan daya saing produk unggulan berbasis sumber daya lokal dan penggunaan teknologi informasi dan pemanfaatan *artificial inteligence*, pengembangan pariwisata daerah, serta optimalisasi perusahaan daerah.

2. Pembangunan Konektivitas

   Pemerintah daerah diharapkan aktif dalam membaca segala peluang investasi dan dampak positif, serta mampu memprediksi dan meminimalisir

dampak negatif atas pelaksanaan pembangunan konektivitas antar wilayah, diantaranya pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (PSN) Jalan Tol Kertosono-Kediri-Tulungagung, Jaringan Jalur Strategis antar wilayah pusat sub wilayah pengembangan wilayah Kediri sekitarnya, serta berupaya maksimal dalam peningkatan jaringan jalan strategis antar kecamatan, antar desa, dan desa dengan ibukota kecamatan, guna mendukung aktivitas perekonomian warga masyarakat Kabupaten Kediri.

3. Pembangunan Sumber Daya Manusia

   Pemerintah daerah tetap konsisten dalam peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan, serta pengentasan kemiskinan melalui program peningkatan kualitas pendidikan, peningkatan pemerataan dan kualitas pelayanan kesehatan, penurunan angka kemiskinan, peningkatan kualitas dan perlindungan tenaga kerja, serta perlindungan perempuan dan anak.

4. Pembangunan Karakter

   Pemerintah daerah dituntut aktif dalam upaya pembangunan karakter yang sejalan dengan revolusi mental dan nilai-nilai kearifan lokal dengan peningkatan kualitas keimanan dan ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, penanaman nilai-nilai nasionalisme dan wawasan kebangsaan, pencegahan paham radikalisme dan terorisme, peningkatan nilai-nilai toleransi dan kerukunan SARA, serta penanaman nilai-nilai kearifan lokal seperti gotong royong, aspiratif, kepedulian dan pengembangan budaya lokal.

5. Pembangunan Infrastruktur

   Pemerintah daerah harus meningkatkan pembangunan infrastruktur pada pusat produksi, pusat distribusi dan pelayanan dasar melalui optimalisasi pemanfaatan sarana prasarana irigasi, peningkatan infrastruktur pada lahan kering, kurang produktif, kawasan non budidaya dan kawasan terisolir, pembangunan rumah tidak layak huni, pembangunan infrastruktur energi alternatif, pembangunan embung untuk pertanian, penanggulangan bencana dan energi air, serta pembangunan infrastruktur di kawasan ekonomi khusus seperti di Kampung Inggris, SLG, Kawasan Bandara, PDP Margo Mulyo dan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi.

6. Pembangunan Lingkungan Hidup dan Penanggulangan Bencana

   Peningkatan ketahanan bencana dan pelestarian lingkungan hidup harus dilakukan pemerintah daerah melalui penegakan peraturan lingkungan hidup, penanganan dan pengelolaan persampahan, peningkatan dan pengembangan Ruang Terbuka Hijau, serta mitigasi dan deteksi dini daerah rawan bencana untuk dapat melindungi keselamatan warga masyarakat Kabupaten Kediri.

7. Pembangunan Stabilitas Daerah dan Pelayanan Publik

   Peningkatan ketentraman dan ketertiban umum, serta pelayanan publik harus dapat diwujudkan dengan menjalankan pemerintahan daerah yang profesional, serta berkomitmen melaksanakan reformasi birokrasi yang ditujukan

pada perubahan mental aparatur dengan harapan mendorong terciptanya budaya kerja positif yang kondusif bagi terciptanya birokrasi yang bersih dan akuntabel, efektif dan efisien, serta mampu memberikan pelayanan yang berkualitas.

Selanjutnya masing-masing prioritas pembangunan daerah dijelaskan dalam program dan kegiatan prioritas, sebagaimana tabel berikut :

Tabel 19

PENJELASAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

No.	Kesesuian Prioritas Pembangunan	Program Prioritas	Indiktor Kinerja	Perangkat Daerah Leading Sector
1.	**Pembangunan Ekonomi**			
	Nasional : "Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan Berkualitas dan Berkeadilan" **Provinsi :** "Pembangunan Ekonomi Kerakyatan melalui	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	Persentase kelompok tani yang dilakukan monitoring dalam pemanfaatan sarana pertanian	Dinas Pertanian dan Perkebunan
No.	**Kesesuian Prioritas Pembangunan**	**Program Prioritas**	**Indiktor Kinerja**	**Perangkat Daerah Leading Sector**
	Peningkatan Nilai Tambah Ekonomi dan Pariwisata" **Kabupaten Kediri :** "Pembangunan Ekonomi Kerakyatan melalui Peningkatan Pertanian, UMKM, Koperasi, dan Pariwisata"			
		Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	Persentase Pemanfaatan benih/bibit unggul pertanian	Dinas Pertanian dan Perkebunan
		Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	Jumlah Desa yang melaksanakan inovasi Tani Organik	Dinas Pertanian dan Perkebunan
		Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Prosentase Prasarana pertanian dengan kondisi baik	Dinas Pertanian dan Perkebunan

No.	Kesesuian Prioritas Pembangunan	Program Prioritas	Indiktor Kinerja	Perangkat Daerah Leading Sector
		Program Pengendalian dan penanggulangan Bencana pertanian	Cakupan pencegahan dan penanggulangan bencana pertanian (serangan OPT)	Dinas Pertanian dan Perkebunan
		Program Penyuluhan Pertanian	Cakupan bina kelompok tani	Dinas Pertanian dan Perkebunan
		Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Prosentase Prasarana Pertanian dengan kondidi baik	Dinas Pertanian dan Perkebunan
		Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	Prosentase pemanfaatan benih/bibit unggul pertanian	Dinas Pertanian dan Perkebunan
		Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	Jumlah desa yang melaksanakan Inovasi Tani Organik	Dinas Pertanian dan Perkebunan
		Program Penyuluhan Pertanian	Cakupan bina kelompok tani	Dinas Pertanian dan Perkebunan
		Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	Persentase Pemanfaatan benih/bibit unggul pertanian	Dinas Pertanian dan Perkebunan
		Pengembangan Kebudayaan	Prosentase peningkatan budaya lokal dan kesenian lokal yang dilestarikan	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan

No.	Kesesuian Prioritas Pembangunan	Program Prioritas	Indiktor Kinerja	Perangkat Daerah Leading Sector
		Pengembangan Kesenian Tradisional	Prosentase peningkatan group kesenian yang diberdayakan	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
		Pelestarian Dan Penge lolaan Cagar Budaya	Prosentase cagar budaya yang dilestarikan	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
		Pengelolaan Permuseuman	Prosentase sarpras museum yg dipelihara	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
		Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Prosentase peningkatan obyek dan daya tarik wisata	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
		Program Pemasaran Pariwisata	Lama Tinggal (Length of Stay) wisatawan di Kabupaten Kediri	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
		Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Prosentase SDM pariwisata dan ekonomi kreatif yg berkompetensi dasar	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
		Program Pemberdayaan Usaha Menengah , Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM)	Persentase Partisipasi Usaha Mikro	Kopusmik
		Program Pengembangan UMKUM	Persentase Usaha Mikor yang meningkat omsetnya	Kopusmik
		Program Pengelolaan	Prosentase ketersediaan pangan	DKPP

No.	Kesesuian Prioritas Pembangunan	Program Prioritas	Indiktor Kinerja	Perangkat Daerah Leading Sector
		Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan dan Kemandirian Pangan	utama (beras) per penduduk (kg/kapita/tahun)	
No.	**Kesesuian Prioritas Pembangunan**	**Program Prioritas**	**Indiktor Kinerja**	**Perangkat Daerah Leading Sector**
		Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Persentase pembinaan dan pendampingan pelaku usaha perikanan yang dilakukan	Dinas Perikanan
			Persentase pembinaan dan pendampingan pelaku usaha perikanan budidaya yang dilakukan	Dinas Pertanian dan Perkebunan
2.	**Pembangunan Konektivitas**			
	Nasional : “Pembangunan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan” **Provinsi :** “Pembangunan Konektivitas Antar Wilayah dalam Upaya Pemerataan Hasil Pembangunan serta Peningkatan Pelayanan Infrastruktur” **Kabupaten Kediri :** “Pembangunan Konektivitas antar	Program Penyelenggaraan Jalan	Jalan Kabupaten dalam Kondisi baik	Dinas PUPR

No.	Kesesuian Prioritas Pembangunan	Program Prioritas	Indiktor Kinerja	Perangkat Daerah Leading Sector
	Wilayah”			
3.	**Pembangunan Sumberdaya Manusia**			
	Nasional : “SDM Berkualitas dan Berdaya Saing” **Provinsi :** “Peningkatan kualitas Pendidikan, Kesehatan, Produktivitas dan Daya Saing Ketenagakerjaan, Perluasan Kesempatan Kerja serta Pengentasan Kemiskinan dengan Penggunaan Teknologi Informasi dan Pemnafaatan artificial intelligence	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan penunjang urusan pemerintahan	Dinas Kesehatan
No.	**Kesesuian Prioritas Pembangunan**	**Program Prioritas**	**Indiktor Kinerja**	**Perangkat Daerah Leading Sector**
	” **Kabupaten Kediri :** “Peningkatan Kualitas Pendidikan, Kesehatan, Ketenagakerjaan, serta Pengentasan Kemiskinan”			
		Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Persentase Kecamatan STBM	Dinas Kesehatan
			Persentase Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) terakreditasi	

No.	Kesesuian Prioritas Pembangunan	Program Prioritas	Indiktor Kinerja	Perangkat Daerah Leading Sector
			Indeks Keluarga Sehat	
			Persentase Fasilitas Kesehatan Tingkat Lanjutan (FKTL) terakreditasi	
			Persentase Nakestrad dan Hattra yang memiliki izin	
			AKI	
			AKB	
		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	Persentase kecukupan rasio dan kompetensi tenaga kesehatan	Dinas Kesehatan
		Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman	Prosentase Pemberian Rekomendasi Apotek, Toko Obat, Toko. Alkes Dan Optikal, UMOT	Dinas Kesehatan
			Prosentase Produk Makanan Minuman Tertentu Yang Bersertifikat P-IRT	
		"Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang	Persentase UKBM Purnama Mandiri (Posyandu balita, poskestren, poskesdes, SBH, desa siaga)	Dinas Kesehatan
		Kesehatan"	Persentase Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial yang mendapatkan program rehabilitasi Sosial	Dinas Sosial

No.	Kesesuian Prioritas Pembangunan	Program Prioritas	Indiktor Kinerja	Perangkat Daerah Leading Sector
		Program Rehabilitasi Sosial	Presentase Pengembangan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial yang tertangani	Dinas Sosial
		Program Pemberdayaan Sosial	Persentase Jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial yang ditangani	Dinas Sosial
No.	**Kesesuian Prioritas Pembangunan**	**Program Prioritas**	**Indiktor Kinerja**	**Perangkat Daerah Leading Sector**
		Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	Persentase kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu ke rencana tenaga kerja	Dinas Tenaga Kerja
		Program Perencanaan Tenaga Kerja	Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi	Dinas Tenaga Kerja
		Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	Persentase Tenaga Kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan antar kerja dalam wilayah kabupaten/kota	Dinas Tenaga Kerja
		Program Penempatan Tenaga Kerja	Persentase perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak	Dinas Tenaga Kerja
		Program hubungan indrustrial	Persentase tenaga kerja yang ditempatkan melalui mekanisme transmigrasi	Dinas Tenaga Kerja
		Program	Persentase Satuan	Dinas

No.	Kesesuian Prioritas Pembangunan	Program Prioritas	Indiktor Kinerja	Perangkat Daerah Leading Sector
		pengelolaan Pendidikan	Pendidikan SD yang terakreditasi A	Pendidikan
			Persentase Satuan Pendidikan SMP yang terakreditasi A	
			Persentase Satuan Pendidikan PAUD yang terakreditasi A	
			Cakupan Layanan Pendisikan Non formal/kesetaraan	
			Persentase LKP/PKBM yang terakreditasi	
		Program Pengembangan Kurikulum	Persentase penerapan kurikulum merdeka belajar pada satuan pendidikan	Dinas Pendidikan
No.	**Kesesuian Prioritas Pembangunan**	**Program Prioritas**	**Indiktor Kinerja**	**Perangkat Daerah Leading Sector**
		Program Pendidik dan Tenaga Pendidik	Rasio guru pendidikan dasar, PAUD dan pendidikan non formal dengan peserta didik	Dinas Pendidikan
		Program Pengendalian Perizinan Pendidikan	Persentase izin pendidikan dasar, PAUD dan pendidikan non formal yang diselenggarakan masyarakat	Dinas Pendidikan
		Program Pengarus utamaan Gender dan Pemberdayaan	Persentase OPD yang responsif gender	DP2KBP3A

No.	Kesesuian Prioritas Pembangunan	Program Prioritas	Indiktor Kinerja	Perangkat Daerah Leading Sector
		Perempuan		
		Program Perlindungan Perempuan	Persentase kasus kekerasan terhadap perempuan yang tangani oleh P2TP2A	DP2KBP3A
		Program Peningkatan Kualitas Keluarga	Peresentase Kegiatan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak yang dilaksanakan di tingkat desa	DP2KBP3A
		Program Perlindungan Khusus Anak	Persentase kasus kekerasan terhadap anak yang diselesaikan oleh P2TP2A	DP2KBP3A
		Program Pengendalian Penduduk	Persentase desa/kelurahan yang memiliki data mikro keluarga	DP2KBP3A
		Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	Persentase Peserta KB aktif	DP2KBP3A
		Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	Cakupan keluarga sasaran menjadi anggota kelompok kegiatan (BKB, BKR, BKL)	DP2KBP3A
No.	**Kesesuian Prioritas Pembangunan**	**Program Prioritas**	**Indiktor Kinerja**	**Perangkat Daerah Leading Sector**
		Program Kawasan Permukiman	Terpenuhinya jumlah KK yang menerima Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni di Kab. Kediri	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman

No.	Kesesuian Prioritas Pembangunan	Program Prioritas	Indiktor Kinerja	Perangkat Daerah Leading Sector
			Terpenuhinya relokasi pembangunan Rumah Layak huni bagi warga dampak dari retakan tanah di Dukuh Badut Dusun Besuki Desa Jugo Kecamatan Mojo	Dinas Kesehatan
4.	**Pembangunan Karakter**			
	Nasional : "Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan" **Provinsi :** "Meningkatkan Kepedulian Sosial dan Pelestarian Nilai-nilai Budaya Lokal" **Kabupaten Kediri :** "Revolusi Mental dan Nilai-nilai Kearifan Lokal"	Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika serta Budaya Politik	Prosentase Konflik sosial terselesaikan	Lintas Sektor
		Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi Sosial dan Budaya	Persentase kelompok masyarakat yang dibina terkait narkoba, kerukunan agama dan kepercayaan	Bakesbangpol
		Program Pembinaan Sejarah	Prosentase sejarah lokal yang dilestarikan	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
5.	**Pembangunan Infrastruktur**			
	Nasional : "Infrastruktur untuk Ekonomi dan Pelayanan Dasar"	Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri	Jumlah industri yang terstandarisasi	Dinas Perdagangan

No.	Kesesuian Prioritas Pembangunan	Program Prioritas	Indiktor Kinerja	Perangkat Daerah Leading Sector
	Provinsi :			
No.	**Kesesuian Prioritas Pembangunan**	**Program Prioritas**	**Indiktor Kinerja**	**Perangkat Daerah Leading Sector**
	"Peningkatan Ketahanan Pangan dan Pengelolaan EBT" **Kabupaten Kediri :** "Peningkatan Infrastruktur pada Pusat Produksi, Pusat Distribusi, dan Pelayanan Dasar"			
6.	**Pembangunan Lingkungan Hidup dan Penanggulangan Bencana**			
	Nasional : "Lingkungan Hidup, Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim" **Provinsi :** "Peningkatan Ketahanan Bencana dan Lingkungngan Hidup melalui Pengarusutamaan Upaya Adaptasi dan Mitigasi Perubahan Iklim" **Kabupaten Kediri :** "Peningkatan Ketahanan Bencana dan Pelestarian Lingkungan Hidup"	Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Prosentase hasil pemantauan kualitas lingkungan yang memenuhi baku mutu	Dinas Lingkungan Hidup
		Program Perencanaan Lingkungan Hidup	Tingkat ketersediaan kajian pengelolaan lingkungan hidup	Dinas Lingkungan Hidup
		Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI)	Persentase Ruang Terbuka Hijau kawasan perkotaan(%)	Dinas Lingkungan Hidup
		Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Pengelolaan	Persentase Usaha dan/atau Kegiatan berizin Lingkungan dan PPLH yang dibina	Dinas Lingkungan Hidup

No.	Kesesuian Prioritas Pembangunan	Program Prioritas	Indiktor Kinerja	Perangkat Daerah Leading Sector
		Lingkungan Hidup (PPLH)		
		Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	Persentase Penanganan pengaduan / kasus pencemaran lingkungan yang dapat diselesaikan	Dinas Lingkungan Hidup
		Program Pengelolaan Persampahan	Prosentase sampah yang dikelola	Dinas Lingkungan Hidup
		Program Penanggulangan Bencana	Meningkatkan ketahanan daerah dalam upaya mengurangi resiko bencana	BPBD
No.	**Kesesuian Prioritas Pembangunan**	**Program Prioritas**	**Indiktor Kinerja**	**Perangkat Daerah Leading Sector**
7.	**Peningkatan Stabilitas Daerah dan Pelayanan Publik**			
	Nasional : Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang Ditangani	Satpol PP
		Program Aplikasi Informatika	Cakupan layanan jaringan intra Pemerintah Daerah	Dinas Komunikasi dan Informatika
	Provinsi : Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik bagi Masyarakat di Jawa Timur	Program Pelayanan Penanaman Modal	Prosentase Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu.	DPMPTSP
		Program Penyelenggaraan Pengawasan	Opini Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Inspektorat,

No.	Kesesuian Prioritas Pembangunan	Program Prioritas	Indiktor Kinerja	Perangkat Daerah Leading Sector
	Kabupaten Kediri : Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dan Pelayanan Publik melalui Pemerintahan yang Profesional	Program Kepegawaian Daerah	Indeks Profesionalisme dimensi Kinerja dan Disiplin	BKD
		Program Sumber daya Manusia	Indeks Profesionalisme dimensi Kualifikasi dan Kompetensi	BKD
		1) Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Prosentase Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	Bagian Hukum

3.5 Tindak lanjut Rekomendasi DPRD Tahun Anggaran Sebelumnya

1. ISIAN BIDANG EKONOMI

Rekomendasi DPRD Tahun N-1	Perangkat Daerah	Tindak Lanjut	Tujuan/Masalah Yang Diselesaikan
d. Bidang EKONOMI. 1) Perdagangan. a. Dalam rangka mengenalkan komoditi unggulan dan potensi perdagangan yang ada di Kabupaten Kediri kepada masyarakat luas, maka Pemkab Kediri perlu menyediakan informasi terkait komoditi dan potensi perdagangan yang dimiliki oleh Kabupaten Kediri secara *up to date* melalui *website* yang memadai. Penyediaan informasi berbasis *website* tersebut bertujuan	DINAS PERDAGANGAN	- Menyediakan aplikasi www.simarko.kedirikab.com	- Menampilkan harga-harga bahan pokok dan bahan penting yang ada di 12 pasar kabupaten Kediri. Kabupaten Kediri merupakan sentra produksi dan pemasok tingkat nasional produk cabe rawit, cabe merah, cabe keriting, bawang merah, dan beras. Dari aplikasi simarko dapat diketahui fluktuasi harga harian dari produk tersebut.

agar masyarakat luas dapat mengakses informasi mengenai komoditi unggulan Kabupaten Kediri secara lebih mudah, sehingga dapat memulihkan daya beli masyarakat terhadap komoditi pertanian yang sempat menurun karena adanya pandemi Covid-19 b. Pemkab Kediri perlu melakukan revitalisasi terhadap sarana dan prasarana yang ada di pasar tradisional, guna menghapus kesan kumuh dan meningkatkan daya saing pasar tradisional dengan ritel modern.		- Berencana menyediakan aplikasi e-catalog untuk mewadahi IKM/UMKM yang ada di kabupaten kediri - Memfasilitasi label halal pada kemasan dan izin merk bagi IKM	- Diharapkan dari aplikasi tersebut dapat mengenalkan dan memasarkan produk hasil olahan unggulan maupun produk barang di Kabupaten Kediri agar bisa dikenal oleh khalayak dari luar Kediri. - Dalam rangka memenuhi target pemasaran dan membangun kepercayaan serta rasa aman konsumen terhadap produk-produk unggulan IKM kabupaten Kediri Merevitalisasi pasar tradisional sesuai dengan Peraturan yang berlaku & berkualitas sebagaimana Spesifikasi

c. Dalam rangka melindungi pedagang yang ada di pasar tradisional, maka Pemkab Kediri perlu melakukan penertiban terhadap ritel modern dengan menerapkan sistem zonasi.		- Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan - Tersedianya fasilitas yang memadai untuk menunjang kegiatan di pasar rakyat, dengan harapan akan tercapai penataan pasar yang menarik minat masyarakat untuk belanja ke pasar rakyat (terlihat lebih tertata, rapi, bersih dan nyaman bagi pengunjung), dalam rangka untuk menggerakkan & menumbuhkan perekonomian masyarakat	Teknis, sehingga kegiatan pembangunan berjalan optimal dan sesuai kebutuhan, serta memberikan impact "Positif" (nilai manfaat) jangka pendek dan jangka Panjang, sebagai berikut : **1. Jangka Pendek** Tersedianya fasilitas yang memadai untuk menunjang kegiatan pedagang berjualan di pasar **2. Jangka Panjang** Umur bangunan diproyeksikan 10 th, bangunan pasar masih aman terhadap perkembangan jaman, misal : Dampak pekerjaan pembangunan dari PUPR, yaitu berupa levelling jalan & drainase perkotaan,

			misal selama 5 tahun sekali jalan dinaikkan 5 cm, jadi selama 10 tahun perkerasan jalan jadi 10 cm, maka posisi bangunan terhadap penambahan saluran drainase perkotaan & penambahan pelapisan jalan kabupaten masih TETAP AMAN. Membatasi pendirian minimarket dan swalayan berskala nasional yang ada di kabupaten Kediri melalui verifikasi kepengurusan Pertimbangan Teknis sebagai salah satu syarat bagi palaku usaha yang mengurus Persetejuan Bangunan Gedung di Dinas Perkim untuk pembangunan minimarket dan

		Mengaplikasikan Perda No. 4 Tahun 2018 Pasal 8, tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan, Toko Modern di Kabupaten Kediri, sebagai dasar penerbitan Pertimbangan Teknis dalam mengurus Persetujuan Bangunan Gedung minimarket dan swalayan berskala nasional.	swalayan berskala nasional
2) nanaman Modal a. Minat investor untuk berinvestasi di Kabupaten Kediri mengalami peningkatan semenjak keberadaan bandara di Kabupaten Kediri dan adanya rencana pembangunan jalan Tol	DPMPTSP	1. Dalam rangka upaya fasilitasi/kemudahan investasi pada tahun 2022, DPMPTSP telah menyusun naskah akademis Perda	peningkatan pertumbuhan ekonomi dan penguatan daya saing daerah

	Nganjuk-Kediri-Tulungagung. Untuk merespon hal tersebut, maka Pemkab Kediri perlu memfasilitasi kemudahan berinvestasi dengan tetap memperhatikan kondisi sosial masyarakat dan kelestarian lingkungan hidup secara berkelanjutan.		Penanaman Modal yang diharapkankan selesai pada tahun 2023 (progres: sudah diajukan ke Bagian Hukum). Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Daerah ini meliputi: (1) kebijakan dasara penanaman modal (2) kelembagaan dan kewenangan penyelenggaraan penanaman modal di Daerah (3) perencanaan penanaman modal (4) pengembangan potensi dan peluang penanaman modal di daerah (5) pelayanan penanaman modal (6) data dan	

		sistem informasi penanaman modal (7) pemberdayaan usaha (8) hak, kewajiban dan tanggung jawab penanam modal (9) pengendalian pelaksanaan penanaman modal (10) insentif dan kemudahan penanaman modal (11) promosi penanaman modal (12) ketentuan dan sanksi. 2. Pada Tahun 2022, Pelayanan perizinan keliling telah dijadwalkan di 24 kecamatan Kabupaten Kediri Pada Tahun 2022, DPMPTSP Kabupaten Kediri	

b. Pemkab Kediri harus memprioritaskan investor lokal dan warga sekitar terkait keberadaan bandara dan rencana pembangunan jalan Tol Nganjuk-Kediri-Tulungagung untuk menghindari persoalan yang adapt terjadi di kemudian hari. Pemberian prioritas kepada		telah menyelenggarakan sosialisasi perizinan kepada 100 pengusaha lokal di Kabupaten Kediri. Dalam sosialisasi tersebut ada muatan terkait potensi dan peluang investasi Kabupaten Kediri. Dengan adanya sosialisasi tersebut diharapkan dapat memberikan pengetahuan dan memperluas investasi yang ada dengan mengembangkan potensi yang ada.	mendekatkan pelayanan perizinan ke masyarakat dan memberikan kepastian hukum (SK izin) atas usaha yang dilakukan. memberikan pengetahuan penanaman modal dan potensi peluang investasi yang dapat dikembangkan pengusaha lokal sehingga memperluas investasi

investor lokal dan warga sekitar tersebut merupakan salah satu upaya yang dapat meningkatkan kesejahteraan warga Kabupaten Kediri.			yang ada di Kabupaten Kediri .

Rekomendasi DPRD Tahun N-1	Perangkat Daerah	Tindak Lanjut	Tujuan/Masalah Yang Diselesaikan
3) Pariwisata & Kebudayaan a. Melakukan berbagai macam terobosan serta program-program inovatif yang berkaitan dengan strategi memajukan sektor pariwisata khususnya di tengah masa pandemic covid-19	DINAS PARBUD	1. Melaksanakan pameran melalui Jatim Travel Ekshibition Wisata Kabupaten Kediri secara digital; 2. Promosi Wisata melalui Virtual tour; 3. Pembayaran Tiket Masuk Obyek Wisata secara digital	Tetap memajukan sektor pariwisata meskipun di tengah masa pandemi dengan berbagai terobosan dan program inovatif

		(Q-RISS) 4. Melaksanakan pertunjukan seni budaya dgn aplikasi digital: a. Live streaming kerjasama TMII b. Kerjasama secara Typping TVRI dan Disbudparprop Jatim c. Shooting dilanjut upload via Youtube 5. Pagelaran Seni Budaya dengan penonton terbatas & penerapan Protokol Kesehatan 1. Pembangunan Penampungan Air di Kawasan Wisata (KW) Gunung Kelud untuk	

b. Meningkatkan ketersediaan infrastruktur yang paling dasar misalnya berupa akses jalan, air bersih, listrik, jaringan telekomunikasi untuk menunjang pengembangan sektor pariwisata.		ketersediaan air bersih dan toilet 2. Pembangunan Loket KW Gunung Kelud 3. Pembangunan Toilet di Area Parkir KW Gunung Kelud 4. Pembangunan Mushola di Area Parkir KW Gunung Kelud 5. Pembanguna Tangga Wisata Ironggolo di KW Besuki 6. Pembangunan Tugu Branding di Monumen SLG 7. Pembuatan Masterplan KW Corah-Pare 8. Pembangunan Gapura Masuk Air Terjun Dolo KW Besuki 9. Pembuatan Kios PKL Dolo	Memberikan keamanan, kenyamanan dan ke selamatan pengunjung wisata

c. Melakukan peningkatan promosi serta pembinaan terhadap aktor-aktor penggerak wisata.		di KW Besuki 1. Direct Promotion, yaitu promosi langsung ke calon konsumen wisata yang potensial di Luar Daerah dengan mengajak pelaku usaha pariwisata dan ekonomi kreatif, yang terdiri dari Desa Wisata, Pusat Oleh-oleh, Pelaku Usaha Wisata Swasta, Wisata Kuliner, Wisata Edukasi, Wisata Religi, Hotel, Agen Travel dan Pelaku Seni Budaya. Ke Pacitan, Jogjakarta dan Bandung 2. Ekshibisi Kesenian yaitu mengajak langsung aktor/pelaku seni & budaya	

		untuk menampilkan kreativitasnya dan memperoleh tanggapan/penilaian dari ahlinya yang ada di ISI Jogjakarta, Denpasar dan Bandung 1. Kegiatan Anugerah Desa Wisata yaitu pengembangan Desa Wisata melalui pembinaan elemen masyarakat desa dan lomba potensi seni, budaya sekaligus spot potensial desa wisatanya 2. Lomba Foto dan Video Desa Wisata (dalam rangkaian Anugerah Dsa Wisata), memberikan pembinaan langsung pada	Meningkatkan kemampuan pelaku usaha pariwisata dan ekonomi kreatif dan pangsa pasar wisata Kabupaten Kediri

d. Pemerintah Kabupaten Kediri dapat mendorong optimalisasi potensi wisata tidak hanya di tingkat Kecamatan dan Desa/Kelurahan saja, namun juga hingga ke tingkat RT. Dengan melibatkan seluruh elemen Masyarakat, besar harapan kami agar program-program di sektor ini		elemen masayarakat desa dan lomba kreatif foto dan video desanya 3. Lawatan Sejarah dan Budaya dengan mengajak langsung guru dan siswa melihat lokasi potensi sejarah dan budaya Kabupaten Kediri 4. Cagar Budaya Masuk Sekolah, mengajak langsung siswa sebagai upaya memperkenalkan cagar budaya sehingga mereka akan bisa mencintai potensi dan nilai tinggi cagar budaya Kabupaten Kediri	Meningkatkan potensi wisata desa dan kemampuan elemen masyarakat desa dalam mengelola desa wisata

	akan membuka banyak lapangan pekerjaan, serta menjadi potensi pendapatan yang besar bagi Masyarakat kita. Selain itu, izinkan kami juga mengingatkan agar Pemerintah Kabupaten Kediri dapat mengoptimalkan promosi pariwisata-pariwisata berbasis kearifan lokal ini melalui inovasi-inovasi sehingga dapat lebih menarik para wisatawan untuk datang berwisata dan membeli produk- produk asli Masyarakat Kabupaten Kediri.			

Rekomendasi DPRD Tahun N-1	Perangkat Daerah	Tindak Lanjut	Tujuan/Masalah Yang Diselesaikan

<table>
<tr>
<td>4) Pertanian dan Ketahanan Pangan
a) Dalam mewujudkan misi revitalisasi pertanian untuk ketahanan dan swasembada pangan perlu adanya program kebijakan Bupati Kediri untuk memberi stimulus kepada anak-anak muda agar mau bertani didesanya masing-masing dengan memberi bantuan pelatihan, modal, lahan, bibit, pupuk dan</td>
<td>DIPERTABUN</td>
<td>Dalam mewujudkan misi revitalisasi pertanian untuk ketahanan dan swasembada pangan perlu adanya program kebijakan Bupati Kediri untuk memberi stimulus kepada anak – anak muda agar mau nertani didesanya masing – masing dengan memberi bantuan pelatihan, modal, lahan bibit, pupuk dan menyediakan pasar pasca panen. Misalnya dengan membuat program atu desa satu kelompok pemuda tani yang betul – betul dibina dan difasilitasi oleh pemerintah daerah.

Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Kediri pada Tahun 2022 telah memfasilitasi kelompok tani yang anggotanya para petani muda milenial dalam bentuk bantuan hibah uang untuk mendukung usahataninya, seperti budidaya hidroponik, budidaya melon dalam green house, budidaya jamur dan produk olahan (nanas). Kelompok tani tersebut adalah :
<table>
<tr><th>No</th><th>Nama Poktan/ KWT</th><th>Alamat</th><th>Anggaran (Rp)</th><th>Keterangan</th></tr>
<tr><td>1</td><td>Poktan Taruna</td><td>Desa Sempu Kec.</td><td>100.000.000,-</td><td>Budidaya Hidroponik</td></tr>
</table>
</td>
<td></td>
</tr>
</table>

	meneyediakan pasar pasca panen. Misalnya dengan membuat program satu desa satu kelompok pemuda tani yang betul-betul dibina dan difasilitasi oleh pemerintah daerah.			Tani Petani Muda Agrapana	Ngancar		
			2	Poktan Taruna Tani Tunas Harapan	Desa Karangtalun Kec. Kras	100.000.000,-	Budidaya Jamur
			3	Poktan Taruna Tani Jayataji Sejahtera	Desa Langenharjo Kec. Plemahan	100.000.000,-	Budidaya Hidroponik
			4	Poktan Taruna Tani Tirtoasri Berkarya	Desa Wonosari Kec. Grogol	100.000.000,-	Budidaya Hidroponik dan Bibit

	Wonoasri Raya			
5	Poktan Tani Muda Melo Hydro Ngadiluwih	Desa Ngadiluwih Kec. Ngadiluwih	100.000.000,-	Budidaya Melon Dalam *Green House*
6	KWT Sritani	Desa Butuh Kec. Kras	50.000.000,-	Olahan Nanas

1. Dalam rangka upaya pengendalian inflasi dampak dari kenaikan harga BBM khususnya di sektor peternakan, pada tahun 2022 telah disalurkan bantuan stimulus sebesar @Rp 3.000.000 untuk mendorong usaha peternakan bagi 1.794 peternak unggas skala kecil agar tetap bertahan di tengah kenaikan harga pakan yang sangat memepengaruhi produksi peternakan unggas. Selanjutnya terus dilaksanakan kegiatan peningkatan kemampuan peternak dalam meningkatkan produksi peternakan secara berkelanjutan melalui pelatihan

	DKPP	peningkatan produksi peternakan ruminansia dan non ruminansia serta pelatihan pengembangan agribisnis peternakan (pengolahan hasil peternakan) yang melibatkan kelompok muda sebagai peserta yang bertujuan mendorong motivasi peternak muda dalam mengembangkan usaha peternakan yang modern dan berteknologi. Pelatihan ini sekaligus juga memberikan gambaran analisis usaha peternakan sehingga menarik minat pemuda untuk memilih beternak sebagai sumber pendapatan yang menjanjikan. 2. Adanya wabah Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) juga berdampak besar pada sektor peternakan di Kabupaten Kediri. Banyaknya ternak sapi mati menyebabkan kerugian ekonomi bagi peternak. Untuk membantu peternak terdampak secara ekonomi akibat wabah PMK, Bupati Kediri melalui DKPP memberikan bantuan stimulus sebesar @Rp 6.000.000 bagi 373 peternak sapi yang kehilangan ternak akibat PMK. Halini diharapkan dapat sedikit mengobati kekecewaan peternak yang kehilangan ternak dan mau melanjutkan usaha peternakannya. 3. Dalam kurun waktu tahun 2022 , DKPP mendorong	1. Menstimulus pengembangan usaha peternakan dalam rangka peningkatan produksi peternakan dan kesejahteraan peternak.

		terwujudnya ketahanan pangan di tingkat rumah tangga dengan melaksanakan kegiatan pemanfaatan lahan pekarangan yang kurang produktif melalui Pekarangan Pangan Lestari (P2L). Kegiatan ini bertujuan untuk memberdayakan masyarakat mulai tingkat rumah tangga untuk menyediakan sumber pangan dan gizi bagi keluarga melalui pemanfaatan pekarangan. Bentuk kegiatan berupa sosialisasi dan pelatihan serta pemberian bantuan bibit/benih tanaman sayur dan sarana produksi pertanian pekarangan kepada 260 orang kader PKK desa, ibu rumah tangga dan kelompok wanita tani di 13 lokasi. Dengan pelaksanaan kegiatan P2L yang berkelanjutan diharapkan dapat menjadi sumber pendapatan keluarga serta mendukung upaya Pemerintah Kabupaten Kediri dalam penanganan stunting.	2. Menstimulus pengembangan usaha peternakan dalam rangka peningkatan produksi peternakan dan kesejahteraan peternak. 3. Mewujudkan ketahanan pangan dan peningkatan pendapatan di

			tingkat rumah tangga
b) Perlu optimalisasi pembangunan dan perawatan saluran irigasi sehingga kegiatan pertanian akan lebih optimal.	PUPR	- Pelaksanaan Pembangunan Jaringan Irigasi - Pelaksanaan kegiatan Normalisasi dan Pemeliharaan rutin pada jaringan irigasi dan sungai di Kab Kediri.	- Kekurangan air irigasi pada lahan per tanian dapat teratasi. - Banjir dan se dimentasi pada saluran dan sungai dapat tertanggulangi.
c) Memfasilitas pe ningkatan usaha peternakan skala rumah tangga dan mendorong berdirinya kelompok ternak yang dikelola secara baik, mandiri	DKPP	Dalam rangka upaya peningkatan usaha peternakan, tahun 2022 telah dilaksanakan hibah uang untuk pengembangan peternakan bagi 124 kelompok ternak produktif serta bantuan hibah peralatan pemrosesan pakan ternak dan hibah pengolahan limbah sebagai sumber energi alternatif (biogas). Selain itu terus dilaksanakannya kegiatan peningkatan kemampuan peternak dalam meningkatkan produksi peternakan secara berkelanjutan melalui pelatihan peningkatan produksi	Menstimulus pengembangan usaha peternakan dalam rangka peningkatan pro duksi peternakan dan kesejahteraan peternak

dan berkelanjutan.		peternakan ruminansia dan non ruminansia serta pelatihan pengembangan agribisnis peternakan yang bertujuan mendorong berkembangnya usaha peternakan dengan wawasan bisnis yang mampu menghasilkan produk peternakan yang berdaya saing. Tahun 2022 telah dilaksanakan pelatihan untuk pengembangan Sekolah Peternakan Rakyat (SPR) sebanyak 3 (tiga) kawasan peternakan sapi potong yakni di Plosoklaten, Mojo dan Kandat. Sekolah Peternakan Rakyat (SPR) dilaksanakan untuk meningkatkan skala usaha peternakan dari yang bersifat tradisional menjadi usaha peternakan yang modern dan memanfaatkan perkembangan teknologi sehingga diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan peternak.	
d) Sektor pertanian dan ketahanan pangan perlu diberikan peningkatan kuantitas maupun kualitas program.	DIPERTABUN DKPP	-Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Kediri bersama – sama dengan dinas terkait (Dinas PUPR dan Bappeda) sudah berkoordinasi terkait dengan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B). Untuk luas LP2B yang akan dimasukan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kediri, Dinas Pertanian dan Perkebunan Kab. Kediri masih menunggu revisi yang sedang dilakukan oleh Dinas PUPR terkait dengan LSD	

	Untuk dapat benar-benar terealisasi, sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2019 tentang Sistem Budi Daya Pertanian Berkelanjutan. Selain itu, izinkan kami untuk mengingatkan agar lahan-lahan yang digunakan sebagai lahan pertanian, dapat kita jaga bersama-sama, sebagaimana amanat Undang-		(Luas Sawah yang Dilindungi). -UApaya peningkatan kemampuan peternak dalam meningkatkan produksi peternakan secara berkelanjutan terus dilakukan melalui pelatihan peningkatan produksi peternakan ruminansia dan non ruminansia serta pelatihan pengembangan agribisnis peternakan yang bertujuan mendorong berkembangnya usaha peternakan dengan wawasan bisnis yang mampu menghasilkan produk peternakan yang berdaya saing. Pelatihan ini melibatkan generasi muda sebagai peserta dengan harapan dapat menggugah minat kaum milenial untuk mau dan mampu mengembangkan usaha peternakan modern dan melek teknologisebagai mata pencaharian yang menjanjikan. Tahun 2022 juga telah dilaksanakan pelatihan untuk pengembangan Sekolah Peternakan Rakyat (SPR) sebanyak 3 (tiga) kawasan peternakan sapi potong yakni di Plosoklaten, Mojo dan Kandat. Sekolah Peternakan Rakyat (SPR) dilaksanakan untuk meningkatkan skala usaha peternakan dari yang bersifat tradisional menjadi usaha peternakan yang modern dan memanfaatkan perkembangan teknologi sehingga diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan peternak.	Menstimulus pengembangan usaha peternakan dalam rangka peningkatan pro duksi peternakan dan kesejahteraan peternak

	Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan. Agar kesejahteraan para petani maupun para pelaku usaha di sektor pertanian benar-benar diperhatikan, melalui peningkatan kualitas serta kuantitas program-program dari Pemerintah			

	Kabupaten Kediri kedepannya. Selain itu, besar harapan dari kami agar Pemerintah Kabupaten Kediri dapat menciptakan program-program yang mendorong lahirnya para petani-petani muda di Kabupaten Kediri, sebagai generasi yang akan melanjutkan tongkat estafet pemanfaatan potensi pertanian di Kabupaten Kediri.			

Rekomendasi DPRD Tahun N-1	Perangkat Daerah	Tindak Lanjut	Tujuan/Masalah Yang Diselesaikan
5) Pengelolaan Pasar a) Dalam rangka meningkatkan kualitas pengelolaan pasar, agar kemudian Pemerintah Kabupaten Kediri dapat meningkatkan fasilitas-fasilitas mendasar serta bantuan terhadap para pedagang maupun kenyamanan berbelanja para pengunjung, serta menggalakkan slogan #AyoKePasar untuk mengajak serta mengingatkan masyarakat agar terus membelanjakan uang di pasar-pasar Kabupaten Kediri.	DINAS PERDAGANGAN	– Banner untuk menggalakkan slogan “Ayo ke Pasar” –Pemkab telah merevitalisasi 6 pasar dan sedang merevitalisasi pasar wates untuk tahun 2023 on prosess Revitalisasi Pasar Ngadiluwih –Menyediakan pembayaran non tunai melalui QRis	–Sosialisasi program/slogan ‘Ayo ke Pasar’ –Untuk menyediakan fasilitas dan tempat berbelanja yang representative Memudahkan pedagang dan pembeli bertransaksi di pasar.

		untuk mempermudah transaksi di pasar	

Rekomendasi DPRD Tahun N-1	Perangkat Daerah	Tindak Lanjut	Tujuan/Masalah Yang Diselesaikan
6) Pengelolaan Perusahaan Daerah a) Reformasi tata kelola BUMD dalam rangka pengelolaan BUMD yang profesional dan berdaya saing, dan peningkatan pelayanan publik serta berperan aktif untuk membantu menekan angka kemiskinan. b) Program pengembangan lembaga ekonomi pedesaan tahun 2021 tidak terlihat capaian programnya. Kedepan	BAGIAN PEREKONOMIAN	Telah dilaksanakan proses Seleksi Terbuka Pengisian Jabatan Dewan Pengawas dan anggota Direksi Perusahaan daerah Kabupaten Kediri diharapkan meningkatkan pengelolaan Perusahaan Daerah secara efektif dan efisien BUMDesa merupakan sokoguru perekonomian di	Peningkatan Kinerja dalam Pengembangan Unit Usaha Perusahaan daerah

	harus dimaksimalkan mengingat saat ini setiap desa sedang gencar- gencarnya mendirikan Badan Usaha Milik Desa. Tentu kondisi ini diperlukan pembinaan dan pengawasan agar betul-betul berjalan dengan baik sesuai tujuan.	DPMPD	desa sesuai Undang-Undang Desa nomor 6 Tahun 2014 dimana diamanatkan BUM Desa dibentuk oleh Pemerintah Desa untuk mendayagunakan segala potensi ekonomi, kelembagaan perekonomian, serta potensi sumber daya alam dan sumber daya manusia dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa. Di kabupaten kediri telah dilaksanakan kegiatan pelatihan pengelolaan keuangan BUMDes yang bekerjasama dengan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dengan penerapan Sistem Informasi	BUMDes dapat menyajikan laporan keuangan dengan lebih baik

c) Evaluasi perlu dilakukan secara berkala dan menyeluruh yang kemudian dijadikan sebagai landasan agar pengelolaan terhadap		Akuntansi BUMDes (SIA BUMDES) pada Tahun Anggaran 2022 bagi semua BUMDes di Kabupaten Kediri sehingga diharapkan pengelolaan keuangan BUMDes dapat dilaksanakan secara lebih akuntabel dan pengawasan dapat dilakukan dengan lebih efektif Telah dilaksanakan Pembinaan pengembangan SDM dan Meningkatkan pelayanan Perusahaan Daerah Kabupaten Kediri sehingga diharapkan dapat mengoptimalkan Pengelolaan	

Perusahaan-Perusahaan Daerah Kabupaten Kediri dapat lebih optimal dalam memperoleh laba. d) Dalam proses rekrutmen organ Perusahaan Umum Daerah ini dapat dilaksanakan secara transparan serta mengutamakan dari kalangan profesional yang memang memiliki kapasitas, sehingga dapat maksimal dalam menjalan amanah.	Bagian Perekonomian	Perusahaan Daerah Telah dilaksanakan proses Seleksi Terbuka Pengisian Jabatan Dewan Pengawas dan Direktur Utama PDP. Margomulyo,Anggota Direksi PD. Canda Birawa Dan Direktur Utama PD. BPR Bank Daerah berdasarkan Permendagri 37 Tahun 2018	Peningkatan Profesionalisme dan peningkatan PAD Peningkatan Profesionalisme dan peningkatan PAD

Rekomendasi DPRD Tahun N-1	Perangkat Daerah	Tindak Lanjut	Tujuan/Masalah Yang Diselesaikan
7) Pengairan, Pertambangan dan Energi a) Peningkatan pengawasan usaha galian C serta penegakan hukum terhadap penyelenggaraan usaha galian C yang tidak sesuai ketentuan dan berpotensi merusak lingkungan.	PUPR	akan berkoordinasi dengan forkopimda terkait pembuatan gugus tugas pertambangan dan akan berkoordinasi dengan tim satker terkait, untuk membuat regulasi kegiatan pertambangan	tertatanya kegitan pertambangan di Kabupaten Kediri sehingga meminalisir dampak lingkungan dan sosial, serta meningkatnya PAD
b) Memfasilitasi produksi dan penggunaan sumber energi yang dapat dihasilkan dan dikelola dalam skala kecil sesuai potensi lokal di Kabupaten Kediri, seperti biogas, mikro hidro, tenaga angin dan panel surya.		telah memfasilitasi dan mengupayakan PLTS roof top untuk pondok pesantren baik dari dana pusat maupun apbd	penghematan energi yang berbasis energi baru terbarukan sehingga Rencana Umum Energi Nasional (RUEN) dan Rencana Umum Energi Daerah (RUED) tercapai

Rekomendasi DPRD Tahun N-1	Perangkat Daerah	Tindak Lanjut	Tujuan/Masalah Yang Diselesaikan
8) Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah a) Melakukan pendataan dan profiling terhadap Koperasi dan UMKM di Kabupaten Kediri sebagai basis data dalam implementasi program peningkatan kinerja koperasi dan pemberdayaan UMKM. Pendataan dan profiling yang terupdate juga dibutuhkan dalam mengidentifikasi potensi dan produk unggulan UMKM pada setiap desa atau kecamatan.	DINAS KOPUSMIK	a. Pendataan koperasi mengoptimalkan penggunaan aplikasi sappakop (sappakop.kedirikab.go.id) sedangkan untuk pendataan usaha mikro di lakukan bersinergi dengan kementrian koperasi dan UKM untuk melakukan pendataan usaha mikro melalui pendataan lengkap usaha mikro pada tahun 2022 terdata 29.246 usaha mikro	a. Identifikasi potensi dan produk unggulan UMKM pada setiap desa atau kecamatan

b) Salah satu Misi Bupati adalah mengembangkan Koperasi sebagai sokoguru pembangunan ekonomi kerakyatan. Akan tetapi dilihat dari realisasi program pada tahun 2021 hanya 54,79%. Tentu ini tidak mencerminkan keseriusan pemberdayaan Koperasi. Di Kabupaten Kediri masih banyak sekali Koperasi yang tidak aktif. Untuk itu Upaya pertumbuhan usaha mikro menjadi usaha kecil/ menengah perlu ditingkatkan. c) Dalam rangka mewujudkan misi Bupati yaitu pengembangan ekonomi kerakyatan dan peningkatan investasi daerah, maka ke depan harus diwujudkan dalam bentuk kebijakan, yang utamanya		b. Berdasarkan data ODS untuk koperasi aktif di Kabupaten Kediri sudah mengalami peningkatan di tahun 2022 yaitu 60,35 %	b. Peningkatan koperasi aktif melalui pemberdayaan koperasi

memberi perhatian khusus kepada para pelaku start up (pelaku usaha pemula) di bidang inovasi, baik konvensional maupun digital yang berada di kabupaten Kediri. Para pelaku usaha tersebut harus didukung penuh agar menjadi trigger ekonomi dan peningkatan lapangan pekerjaan. d) Perlu adanya peningkatan kuantitas maupun kualitas terhadap program-program yang mendorong kemajuan pelaku usaha UMKM khususnya dalam rangka program pemulihan ekonomi nasional.		c. Penumbuhan produk unggulan untuk olahan komiditi nanas dan rosella dengan sasaran generasi milenial dan untuk tahun 2023 akan bekerjasama dengan karang taruna untuk penumbuhan wirausaha baru dari start up (pemula)	c. Pelaksanaan kegiatan dengan sasaran start up (pemula)

e) Bantuan-bantuan yang dapat diberikan oleh Pemerintah Kabupaten Kediri terhadap para pelaku usaha UMKM dapat berupa bantuan alat produksi, peningkatan promosi, serta bantuan modal, serta secara rutin melakukan *monitoring* dan pendampingan terhadap pelaku usaha UMKM di Kabupaten Kediri.		d. Untuk peningkatan kualitas produk usaha mikro di lakukan melalui pelatihan manajemen usaha, pelatihan inovasi produk dan pelatihan kemasan sehingga di harapkan dapat meningkatkan nilai jual produk usaha mikro e. Bantuan promosi telah di berikan melalui fasilitasi promosi melalui media cetak (shopping festival), pameran luar daerah, pameran dalam daerah serta katalog produk	d. Peningkatan kuantitas dan kualitas usaha mikro

		UMKM online sedangkan untuk bantuan alat produk kita kerjasamakan dengan TSLP melalui pendanaan CSR (148 usaha mikro), sedangkan untuk bantuan modal usaha mikro di fasilitasi melalui kegiatan kemitraan bekerjasama dengan bank daerah serta bank peyalur Kredit Usaha Rakyat (KUR)	e. Bantuan alat produksi, peningkatan promosi dan bantuan modal usaha untuk usaha mikro

2. ISIAN BIDANG HUKUM DAN PEMERINTAHAN

Rekomendasi DPRD Tahun N-1	Perangkat Daerah	Tindak Lanjut	Tujuan/Masalah Yang Diselesaikan
E. Bidang Hukum dan Pemerintahan. 4) Pelayanan Ketenagaker		1. Pemberdayaan Pekerja Migran purna Penempatan (pelatihan wirausaha baru) bagi Pekerja Migran Indonesia (PMI) Purna dan Keluarganya. Objek Pelatihannya sesuai dengan potensi yang ada di	1. Meningkatkan ketrampilan kepada Pekerja Migran

jaan i. Pelayanan Ketenagakerjaan Memfasilitasi pelatihan kewirausahaan dan peningkatan ketrampilan pencari kerja terutama pada tiga sektor yang di masa pandemi Covid-19 terbukti tetap tumbuh positif, yakni Sektor Pertanian, Perdagangan dan Industri Pengolahan.	DINAS TENAGA KERJA	desa. 2. Pelaksanaan Pelatihan Berdasarkan kluster kompetensi : 1. Pelatihan Teknis Las 3G (240 JP) 2. Pelatihan Teknis Otomotif Sepeda Motor (200 JP) 3. Pelatihan Teknis Pengaturan Tata Udara dan Pendinginan/AC (200 JP) 4. Pelatihan Teknis Desain Grafis (200 JP) 5. Pelatihan Teknis Menjahit (120 JP) 6. Pelatihan Teknis Tata Boga (120 JP) 7. Pelatihan Teknis Tata Kecantikan Wajah (120 JP) 8. Pelatihan Teknis Tata Kecantikan Rambut (120 JP) 9. Pelatihan Pijat Tradisional (120 JP) 10. Pelatihan Pemijatan Bayi dan Spa (80 JP) 11. Pelatihan Membatik Tulis dan Cap (80 JP) 12. Pelatihan Barista (80 JP)	Indonesia (PMI) purna dan keluarganya untuk memanfaatkan potensi modal yang dimiliki guna membangun desanya dan mengurangi pengangguran. 2.Meningkatkan ketrampilan kerja dalam rangka mengembangkan kompetensi diri untuk memenuhi

ii. Dampak akibat pandemik Covid-19angka pengangguran dari tahun 2020 terus meningkat. Hal ini perlu keseriusan untuk membuat terobosan program lapangan pekerjaan dan/atau stimulan kepada mereka untuk berwirausaha dengan pendampingan yang komprehensif.		13. Pelatihan Videografi (80 JP) 14. Pelatihan Fotografi (80 JP) 15. Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) AVSEC di Poltekbang Surabaya (3 angkatan, 60 orang, 30 hari) 16. Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) Basic Cargo di Poltekbang Surabaya (3 angkatan, 60 orang, 5 hari) 1. Memberikan pelatihan ketrampilan kerja berbasis kompetensi sesuai kebutuhan pasar kerja, baik pelatihan di BLK maupun pelatihan di kelompok masyarakat guna menambah ketrampilan pencari kerja dalam bersaing di pasar kerja juga menumbuhkan wirausaha baru, dalam rangka menciptakan lapangan kerja baru (entrepreneurship) 2. Perluasan kesempatan kerja dalam kegiatan Padat Karya Infrastruktur untuk menyerap tenaga kerja (penganggur dan setengah penganggur serta	peluang permintaan pasar kerja dan menyiapkan sumber daya manusia (SDM) kebandarudaraan.

		masyarakat miskin) 3. Meningkatkan jalinan kerjasama keperusahaan perusahaan terkait kebutuhan tenaga kerja Formal melaui aplikasi Smartnaker Job Fair/ bursa kerja on line maupun Off Line	Meningkatkan ketrampilan pencari kerja dalam upaya mengurangi pengangguran.

Rekomendasi DPRD Tahun N-1	Perangkat Daerah	Tindak Lanjut	Tujuan/Masalah Yang Diselesaikan
5) Pembinaan Hukum a) Sosialisasi program kegiatan yang terkait pembangunan bidang hukum kepada masyarakat dan meningkatkan hubungan yang sinergis antar SKPD termasuk instansi vertikal (Kejaksaan, Kepolisian, TNI dan Linmas Desa).	BAGIAN HUKUM	1. Telah dilaksanakan penyuluhan hukum terpadu kepada masyarakat dan perangkat desa serta pejabat di SKPD lingkungan Pemerintah Kabupaten Kediri akan aturan – aturan hukum yang berlaku, sebanyak 18 Kecamatan dengan narasumber dari Instansi vertikal antara lain : 1. BNN (Badan Narkotika Nasional) Kabupaten Kediri dengan materi Fasilitasi P4GN; 2. Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri dengan	juan Penyuluhan Hukum Terpadu : a. Mewujudkan kesadaran hukum masyarakat dan perangkat desa serta pejabat di SKPD lingkungan Pemerintah Kabupaten Kediri yang lebih baik dan menghayati hak dan kewajibannya sebagai Warga Negara; b. Mewujudkan budaya hukum dalam sikap dan perilaku yang sadar, patuh dan taat terhadap aturan hukum serta menghormati hak asasi manusia.

		materi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak; 3. Kejaksaan Negeri Kabupaten Kediri dengan materi Keadilan Restoratif ; 4. POLRI terdiri dari Polres Kediri Kota dengan materi Selamatkan Anak Bangsa dari Perilaku Kekerasan dan Polres Kediri dengan materi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak; dan 5. DPRD Kabupaten Kediri	

		dengan materi Perda Kabupaten Kediri Nomor 6 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum. 2. Telah dilaksanakan Kegiatan Pembinaan Keluarga Sadar Hukum (Kadarkum) dengan maksud sebagai wadah yang berfungsi menghimpun warga masyarakat yang dengan kemauannya sendiri berusaha untuk meningkatkan kesadaran hukum bagi dirinya, sebanyak 4 Pembinaan Keluarga Sadar Hukum dengan Narasumber : 1. Kantor Wilayah Jawa Timur Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia	

		Republik Indonesia dengan materi Pembinaan / Pembentukan Desa / Kelurahan Sadar Hukum di Kabupaten Kediri; 2. Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur dengan materi Dukungan APBDesa Dalam Mewujudkan Desa Sadar Hukum; 3. Kejaksaan Negeri Kabupaten Kediri dengan materi Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang; 4. POLRI (Polres Kediri Kota dan Polres Kediri dengan materi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan	

		Angkutan Jalan Kota); dan 5. DPRD dengan materi Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Telah dilaksanakan publikasi Informasi hukum melalui: a. Media cetak (Koran Demonstran); b. Penerbitan buku himpunan produk hukum daerah dan Lembaran Daerah; c. Media elektronik melalui website JDIH (Jaringan Dokumentasi Informasi dan Hukum) Terkait good governance	

b) Menyediakan informasi hukum melalui media cetak, elektronik maupun langsung.		Pemerintah Kabupaten Kediri telah menyusun Peraturan Bupati nomor 57 Tahun 2021 tentang Road Map Reformasi Birokrasi. Dalam RMRB tersebut, dijelaskan bahwa sasaran 1) Birokrasi yang bersih dan akuntabel dengan indikator Predikat SAKIP, Opini BPK, dan Indeks Reformasi Birokrasi; 2) Birokrasi yang kapabel dengan indikator Indeks Professionalitas ASN; dan 3) Pelayanan publik yang prima dengan indikator Indeks Kepuasan Masyarakat. Perkembangan lima indikator sasaran yang telah ditetapkan tersebut adalah sebagai berikut; 1. Indikator Predikat SAKIP:	Tujuan Publikasi Informasi Hukum adalah memberikan informasi dan dokumentasi berupa produk hukum daerah dengan menggunakan media cetak / elektronik maupun langsung : 1. Publikasi Informasi hukum melalui media cetak dilaksanakan sebulan sekali dalam setahun; 2. Penerbitan buku himpunan

	BAGIAN HUKUM	RPJMD Pemerintah Kabupaten Kediri tahun 2021-2026 telah disusun menggunakan pendekatan SMART Aplikasi e-SAKIP yang mencakup perencanaan, pelaporan, pengukuran, dan pengevaluasian secara elektronik untuk efisiensi waktu, biaya dan memimalisir kekeliruan. 2. Opini BPK Predikat Opini BPK Pemerintah Kabupaten Kediri mendapatkan predikat WTP selama 6 tahun berturut-turut. 3. Indeks Reformasi Birokrasi Road Map Reformasi Birokrasi	produk hukum dilaksanakan 4 (empat) bulan sekali dalam setahun sedangkan penerbitan Lembaran Daerah dilaksanakan setahun sekali; dan 3. Publikasi elektronik melalui Alamat website JDIH : www.jdih.kedirikab.go.id

c) Terkait dengan bidang hukum dan tata kelola pemerintahan, menerapkan prinsip-prinsip good governance, terutama berkaitan dengan prinsip integritas, agar kemudian dapat dilaksanakan dalam rangka untuk meningkatkan performance maupun kedisiplinan para Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kediri sehingga dapat berorientasi kepada kinerja yang maksimal.	Bagian Organisasi	telah disusun dan dijadikan sebagai dasar pelaksanaan perkembangan reformasi birokrasi di Pemerintah Kabupaten Kediri 4. Indeks Professioanlitas ASN Laun ching Panjalu Jayati Corporate University yang mengedepankan pengembangan kompetensi ASN di Kabupaten Kediri dapat mendongkrak Indeks Professionalitas ASN 5. Indeks Kepuasan Masyarakat Capaian Indeks Kepuasan Masyarakat Pemerintah Kabupaten Kediri secara bertahap mengalami peningkatan, hal tersebut	

		dikarenakan adanya perbaikan-perbaikan dalam fasilitas layanan, kualitas layanan, dan ketepatan waktu layanan pada 57 OPD di Pemerintah Kabupaten Kediri.	

3. ISIAN KEHIDUPAN DEMOKRASI

Rekomendasi DPRD Tahun N-1	Perangkat Daerah	Tindak Lanjut	Tujuan/Masalah Yang Diselesaikan
b. Bidang Kehidupan Berdemokrasi, Berbangsa dan Bernegara. 6) Partisipasi Masyarakat. a) Pemkab Kediri harus memfasilitasi setiap aspirasi masyarakat terkait program-program pemerintah maupun janji kampanye Bupati dan Wakil Bupati Kediri sebagai wujud komitmen pemimpin daerah	BAKESBANGPOL	1. Pemberian Bantuan Keuangan Parpol 2. Pemberian Bantuan Keuangan Hibah ormas	1. Peran Masyarakat dalam bidang politik dan Pendidikan Politik melalui Pemberdayaan Parpol. 2. Organisasi Kemasyaraatan dapat lebih berperan aktif dalam Pembangunan.

sebagai pelayan masyarakat.		3. Fasilitasi Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) 4. Pembinaan Karakter Bangsa dengan Wasbang, serta Fasilitasi Purna Paskibraka. Meningkatkan diseminasi dan	3. Masyarakat dapat terlibat langsung dalam Pencegahan dan deteksi dini atas semua Konflik di Masyarakat dengan pendekatan Kearifan Lokal dari dan oleh masyarakat sendiri. 4. Nilai kebangsaan, Perekatan Jiwa Nasionalisme serta Wawasan atas bangsa bagi masyarakat dapat ditingkatkan ditengah Modernisasi kearah Individualisme serta Peranan Anak muda dapat diwujudkan dengan berpartisipasi aktif pada Paskibraka dan Purna Paskibraka. Menyampaikan informasi yang sebenarnya terjadi.

b) Pemkab Kediri perlu menghadirkan keterbukaan dan transparansi kepada masyarakat agar meningkatkan partisipasi masyarakat dalam program pembangunan. Hal tersebut selaras dengan misi yang dimiliki oleh Pemkab Kediri terkait pelaksanaan reformasi birokrasi dan pelayanan publik. c) Partisipasi dapat diwujudkan dengan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah yang tinggi, oleh karena itu jajaran Pemkab Kediri harus mampu menunjukkan erja terbaiknya.	KOMINFO	publikasi informasi melalui media pemerintah, yaitu website, medsos (instagram, FB, youtube, tiktok dan twitter), videotron, media pengumuman	
	BAKESBANGPOL	Pembentukan Pokja IDI (Indeks Demokrasi Indonesia) sebagai Mediasis, Fasilitasi beberapa SKPD dalam mencapai Indikator2 dalam Capaian Indeks Demokrasi. Disamping memberikan Pendidikan Politik Bagi Masyarakat Kabupaten Kedir	Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) Kabupaten Kediri merupakan Indeks dalam Capaian Tujuan MISI I dalam RPJMD yang menjadi salah satu ukuran dalam mencapai Target yang telah ditetapkan

7) Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Hubungan Antar Penyelenggara Pemerintahan.			
a) Dalam rangka mewujudkan ketentraman dan ketertiban umum, maka Pemerintah Kabupaten Kediri perlu berperan secara aktif untuk melakukan pencegahan dan penegakan hukum sesuai dengan kewenangan daerah. b) Aktif menanggulangi tersebarnya informasi palsu, berita bohong, atau fakta yang direkayasa yang dapat merusak ketentraman dan ketertiban umum. c) Pemkab Kediri perlu mengoptimalkan	SATPOL PP	- Melakukan operasi penertiban dalam rangka pencegahan dan penegakan perda/perkada untuk mewujudkan trantibum. - Mengadakan Sosialisasi Penegakan Perda Penyelengaraan Ketertiban Umum kepada masyarakat - Mengadakan Pelatihan Satlinmas di desa-desa Peningkatan monitoring dan aspirasi public melalui aplikasi	Meningkatkan kepatuhan masyarakat terhadap peraturan yang berlaku

pemanfaatan kanal-kanal resmi yang dimiliki oleh Pemkab Kediri untuk menyebarkan berbagai informasi sekaligus mengedukasi masyarakat. Hal tersebut dimaksudkan untuk mencegah terjadinya penyebaran disinformasi yang dapat menimbulkan disorientasi di lingkungan masyarakat	KOMINFO KOMINFO	monitoring media online dan medsos Meningkatkan diseminasi dan publikasi informasi melalui media pemerintah, yaitu website, medsos (instagram, FB, youtube, tiktok dan twitter), videotron, media pengumuman seperti bando, baliho	Informasi fakta tersampaikan kepada masyarakat Menyampaikan informasi yang sebenarnya terjadi

4. ISIAN KEIMANAN

Rekomendasi DPRD Tahun N-1	Perangkat Daerah	Tindak Lanjut	Tujuan/Masalah Yang Diselesaikan
2. **Implementasi Strategi dan Arah Kebijakan Daerah** a. **Bidang Keimanan dan Ketakwaan Kepada Tuhan Yang Maha Esa** 8) Realisasi pemberian insentif	BAGIAN		

(Bisyaroh) kepada guru agama non-formal pada TA 2021 untuk dapat dilanjutkan dan ditingkatkan pada tahun yang akan datang dengan tetap memperhatikan kemampuan anggaran pemerintah daerah serta menambah fasilitas belajar mengajar di pondok pesantren agar santri dapat maksimal dalam belajar agama.	KESEJAHTERAAN RAKYAT	Realisasi pemberian insentif (Bisyaroh) kepada guru agama non-formal tidak dilaksanakan oleh Bagian Kesra	
9) Pemerintah daerah memfasilitasi ketersediaan sarana dan prasarana penunjang tempat ibadah sesuai ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.	BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Ketersediaan sarana dan prasarana penunjang tempat ibadah telah difasilitasi oleh Pemerintah Kabupaten Kediri melalui pemberian bantuan hibah kepada lembaga keagamaan.	Menghimbau agar calon penerima hibah segera mengajukan proposal hibah sehingga sarana dan prasarana penunjang tempat ibadah bisa menjadi lebih baik dan nyaman untuk digunakan.
10) Sinkronisasi kerukunan umat beragama, diharap pemerintah terus mengadakan pembinaan agar	BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Pembinaan kerukunan umat beragama telah dilakukan melalui kegiatan keagamaan	Bagian Kesra terus berkoordinasi dan menjalin komunikasi dengan SKPD terkait dan lembaga keagamaan.

hubungan antar umat beragama tetap harmonis, serta penanggulangan kelompok radikal yang dapat mengganggu kerukunan antar umat beragama.	BAKESBANGPOL	seperti Peringatan Hari Besar Agama, Istighosah dan Doa Bersama di Wilayah Kabupaten Kediri.	

5. ISIAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT HARI INI

Rekomendasi DPRD Tahun N-1	Perangkat Daerah	Tindak Lanjut	Tujuan/Masalah Yang Diselesaikan
c. Bidang Kesejahteraan Masyarakat. 11) Peningkatan Mutu, Akses dan Sarana Prasarana Pendidikan. a) Pemkab Kediri perlu melakukan peningkatan terhadap kualitas SDM tenaga pendidik yang dapat diwujudkan melalui proses	DINAS PENDIDIKAN	Capaian sertifikasi guru ASN : Tahun 2021 TK : 352 orang SD : 2.475 orang SMP : 1.406 orang Total : 4.233 orang	Adanya sertifikasi guru bermanfaat bagi guru karena selain meningkatkan profesionalisme yang mengarah kepada peningkatan kinerja juga meningkatkan kesejahteraan guru yaitu mendapatkan Tunjangan Profesi Guru (TPG).

	rekrutmen pegawai sesuai dengan syarat dan ketentuan yang berlaku maupun melalui upaya sistem lain yang menjadi kewenangan pemerintah daerah. Berapa capaian sertifikasi guru pada tahun 2021 perlu dicantumkan di dalam LKPJ sehingga terlihat capaian kinerja anggarannya.		Tahun 2022 TK : 340 orang SD : 2.353 orang SMP : 1.356 orang Total : 4.049 orang Capaian sertifikasi guru ASN tahun 2022 menurun dibanding tahun 2021 karena jumlah guru yang pensiun lebih besar dibandingkan dengan jumlah guru yang lulus sertifikasi guru.	Tujuan dari sertifikasi guru yaitu untuk menentukan kelayakan guru dalam melaksanakan tugas sebagai agen pembelajaran dan mewujudkan tujuan pendidikan nasional, meningkatkan proses dan mutu hasil pendidikan, meningkatkan martabat guru serta meningkatkan profesionalitas guru.
b)	Pemkab Kediri harus mampu memfasilitasi akses pendidikan bagi calon peserta didik secara adil dan merata, salah satunya dengan menerapkan sistem zonasi yang tidak diskriminatif dan menyelenggarakan pendidikan gratis terutama bagi pengimplentasian program wajib belajar 12 tahun, serta		Merujuk Permendikbud Nomor 1 Tahun 2021 tentang PPDB dan Perbup Kediri Nomor 26	Pemerataan kesempatan peserta didik untuk mendapatkan layanan pendidikan

melakukan perluasan terhadap akses pendidikan bagi peserta didik tertentu untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang perguruan tinggi.		Tahun 2021 Pedoman Pelaksanaan PPDB di Kabupaten Kediri bahwa zonasi menjadi prioritas pada PPDB di Kabupaten Kediri yang dilaksanakan secara online. Hal ini terbukti persentasi jalur zonasi mendominasi (50%) dibandingkan jalur yang lain. Namun, sebaran sekolah di Kabupaten Kediri secara geografis tidakah merata sehingga ada peserta didik yang tinggal pada beberapa desa tidak tertampung di SMPN (blank area). Untuk mengatasi hal itu, maka pada jalur prestasi terdapat sub jalur peringkat rombel dengan harapan bisa mengakomodir	
c) Peningkatan akses pendidikan bagi calon peserta didik dengan mendukung penyelenggaraan pendidikan informal yang telah tumbuh dan berkembang di masyarakat.			

d) Peningkatan akses pendidikan bagi calon peserta didik juga dapat diwujudkan melalui penyelenggaraan program paket A, B dan C.		blank area. Selain itu berbagai kebijakan khusus pada blank area juga menjadi fokus pada PPDB Pengembangan Koordinasi dan Kerja sama diantara tiga jalur pendidikan, yaitu In-Formal, Formal, dan Non-Formal	Pemahaman tentang Permendikbud Nomor 129 Tahun 2014 tentang Sekolah Rumah
e) Peningkatan daya saing peserta didik diformulasikan melalui pengembangan kurikulum pendidikan didasarkan pada bakat dan minat peserta didik serta perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.		Di Kabupaten Kediri telah berkembang PKBM yang diselenggarakan oleh masyarakat (swasta) sebanyak 30 lembaga di 22 Kecamatan.	Peningkatan peran Pusat

		Pada tahun ajaran 2022 melayani 3.833 peserta didik Paket A, B, dan C. Namun masih terdapat warga masyarakat yang drop out dan/atau lulus tidak melanjutkan sebanyak 5.485 orang yang akan dilayani pada PKBM terdekat.	Kegiatan Belajar Masyarakat/PKBM sebagai penyelenggara Pendidikan Kesetaraan baik Paket A, B, dan C
f) Peningkatan kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana pendidikan khususnya untuk mengimplementasikan program pendidikan wajib belajar 12 tahun. g) Perlu dioptimalkan dan didayagunakan secara menyeluruh dan sosialisasi yang meluas dalam program bantuan keuangan bagi anak didik di Kabupaten Kediri yang melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi baik negeri maupun swasta bagi anak didik yang kurang mampu berkaitan biaya.		Pengembangan kurikulum pendidikan didasarkan pada bakat dan minat peserta didik serta perkembangan IPTEK ini sejalan dengan filosofi dari Implementasi Kurikulum Merdeka (IKM). Pada kurikulum merdeka ada 2 paradigma baru pembelajaran yakni pembelajaran	Pengembangan bakat dan minta serta percepatan digitalisasi

h) Fasilitas belajar mengajar perlu dipetakan dan dianalisis kembali mana-mana yang rusak dan harus diperbaiki termasuk sarana dan prasarana praktek dan ruang perpustakaan siswa. i) Target angka harapan lama sekolah bagi peserta didik yang pada tahun 2021 tercapai di angka 13,44 agar dinaikkan, mengingat angka maksimal harapan lama sekolah adalah 18.		diferensiasi dan Projek Penguatan Profil Pelajar Pancasila (P5). Pembelajaran diferensiasi ini mengakomodir berbagai potensi, bakat, dan minat peserta didik. Pada P5 dikembangkan berbagai dimensi dasar peserta didik mulai dari beriman bertakwa, mandiri, berkhebinekaan global, gotong royong, benalar kritis dan kreatif. Pengembangan P5 ini sejalan dengan digitalasi dan perkembangan zaman. Pada tahun pelajaran ini	Pendidikan.

j) Pemkab Kediri perlu menggalakkan diklat kepegawaian bagi ASN guna meningkatkan kinerja aparatur. Dengan adanya peningkatan terhadap kinerja ASN, maka dapat menekan terjadinya pelanggaran yang dilakukan oleh para pegawai di lingkungan Pemkab Kediri.		(2022/2023) 100% satuan pendidikan telah mengimplementasikan Kurikulum Merdeka (Mandiri Belajar). Pada tahun ajaran baru berikutnya (2023/2024) maka serentak akan bergeser ke Mandiri Berubah. Rehabilitasi, pembangunan dan pengadaan kebutuhan sarana dan prasarana Pendidikan Dasar Program penyaluran bantuan beasiswa pendidikan bagi	

		keluarga kurang mampu melalui GNOTA pada tahun 2022 salah satunya mengalokasikan 464 mahasiswa, pemohon bantuan sebanyak 1.466 mahasiswa.	Terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana Pendidikan Dasar.
k) Kesejahteraan guru menjadi salah satu permasalahan krusial yang perlu diperhatikan oleh Pemkab Kediri. Hal itu dikarenakan hingga saat ini kesejahteraan guru masih belum dapat terpenuhi. Sehubungan dengan hal tersebut, Pemkab Kediri perlu meningkatkan kesejahteraan guru dan menempatkannya menjadi satu kesatuan strategis dalam penyelenggaraan pendidikan agar lebih		Melaksanakan pemetaan dan menganalisis kebutuhan baik sarana maupun prasarana sebagai penunjang proses kegiatan belajar mengajar pada Pendidikan Dasar.	Pemanfaatan sosial media sebagai salah satu jalur informasi program-program bantuan keuangan khususnya melalui GNOTA

berkualitas. l) Rasio jumlah peserta didik terhadap guru di Kabupaten Kediri masih di bawah angka 20, hal tersebut mengindikasikan bahwa tingkat pengawasan dan perhatian guru terhadap murid cenderung masih kurang, sehingga berimplikasi pada mutu pengajaran yang cenderang. Oleh		Angka HLS menunjukkan peluang anak usia 7 tahun ke atas untuk mengenyam pendidikan formal pada waktu tertentu. HLS Kabupaten Kediri pada tahun 2021 sebesar 13,44 tahun. Artinya, secara rata-rata anak usia 7 tahun yang masuk jenjang pendidikan formal pada tahun 2021 memiliki peluang untuk bersekolah selama 13,44 tahun atau setara dengan Diploma II.	Terpenuhinya sarana dan prasarana yang layak sebagai penunjang kegiatan belajar mengajar pada Pendidikan Dasar.

	karena itu, Pemkab Kediri perlu meningkatkan mutu pengajaran yang ada di lingkungan Kediri dengan menekankan pada tingkat pengawasan dan perhatian guru terhadap murid.		Pemkab Kediri telah mencanangkan program pengembangan SDM yang diberikan nama “Panji Corpu”. Program ini membawa Kabupaten Kediri meraih ASN Achievement Award 2022 dari Gubernur Jawa Timur. Sejalan dengan program tersebut, Dinas Pendidikan terus berkomitmen menyelenggarakan berbagai macam kegiatan peningkatan SDM berupa sosialisasi, pelatihan, workshop, pendampingan, sampai pada perlombaan.	Angka Harapan Lama Sekolah (HLS) didefinisikan sebagai lamanya sekolah (dalam tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang. Peningkatan kompetensi ASN (Guru) dalam upaya

		Tercatat pada 2022 ini telah diterbitkan lebih dari 5000 sertifikat untuk guru. Muara dari berbagai program tersebut yakni peningkatan kompetensi, penurunan pelanggaran, serta meningkatnya layanan Pendidikan. Dinas Pendidikan Kabupaten Kediri sejak tahun 2021 telah memberikan insentif bagi Guru dan Tenaga Kependidkan Non ASN. Untuk Tahun 2021, penerima insentif bagi Guru dan Tenaga Kependidkan Non ASN maksimal TMT bekerja 31 Desember 2018 :	peningkatan layanan Pendidikan.

		PAUD : 2.230 orang SD : 3.560 orang SMP : 1.116 orang Total : 6.906 orang Untuk Tahun 2022, penerima insentif bagi Guru dan Tenaga Kependidkan Non ASN maksimal TMT bekerja 31 Desember 2019 : PAUD : 2.290 orang SD : 3.530 orang SMP : 820 orang Eks. K2 : 581 orang Total : 7.221 orang	Pemberian insentif bagi Guru dan Tenaga Kependidkan Non ASN Pemerintah Kabupaten Kediri melalui Dinas Pendidikan memberikan perhatian kepada Guru dan Tenaga Kependidkan Non ASN untuk meningkatkan

			kualitas penyelenggaraan pendidikan.
		Sebagaimana Permendikbud No 22 Tahun 2016 Tentang Standar Proses Pendidikan Dasar dan Menengah bahwa di Kabupaten Kediri untuk Satuan Pendidikan SD/MI dengan Jumlah Rombongan Belajar 6-24 maka jumlah maksimum peserta didik Per Rombongan Belajar adalah 28 sedangkan untuk Satuan Pendidikan SMP/MTs dengan jumlah Rombongan Belajar 3-33 maka jumlah maksimum peserta didik Per Rombongan Belajar adalah 32 Sebagaimana Permendikbud No 22 Tahun 2016 Tentang	Peningkatkan mutu pengajaran yang ada di lingkungan Pemkab Kediri dengan menekankan pada tingkat pengawasan dan perhatian guru terhadap murid

		Standar Proses Pendidikan Dasar dan Menengah bahwa di Kabupaten Kediri untuk Satuan Pendidikan SD/MI dengan Jumlah Rombongan Belajar 6-24 maka jumlah maksimum peserta didik Per Rombongan Belajar adalah 28 sedangkan untuk Satuan Pendidikan SMP/MTs dengan jumlah Rombongan Belajar 3-33 maka jumlah maksimum peserta didik Per Rombongan Belajar adalah 32	dengan melaksanakan program-program kegiatan yang mendukung peningkatan pada pengawasan dan perhatian guru terhadap murid.

Rekomendasi DPRD Tahun N-1	Perangkat Daerah	Tindak Lanjut	Tujuan/Masalah Yang Diselesaikan
12) Pelayanan Kesehatan a) Jumlah fasilitas kesehatan seperti rumah sakit, puskesmas, rumah bersalin, posyandu, dan klinik kesehatan di Kabupaten Kediri dari tahun 2020 ke tahun 2021 cenderung mengalami peningkatan dan tersebar merata di seluruh kecamatan, sehingga kebutuhan masyarakat telah terpenuhi. Meski demikian, Pemkab Kediri perlu meningkatkan kualitas pelayanan kecamatan di tingkat puskesmas, mulai dari SDM administrasi, SDM tenaga kesehatan, peralatan kesehatan,infrastruktur bangunan, hingga melaksanakan evaluasi internal secara rutin dan terukur. Hal tersebut bertujuan	DINAS KESEHATAN	baya meningkatkan akses dan pelayanan kesehatan yang bermutu di Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) dan Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjut (FKRTL) baik milik pemerintah Kabupaten Kediri maupun milik swasta dilakukan antara lain dengan : 1) Pemenuhan sarana, prasarana, alat kesehatan dan SDM kesehatan yang berkualitas pada fasilitas kesehatan milik pemerintah daerah agar sesuai dengan standar. 2) Meningkatkan kompetensi	a. Upaya peningkatan akses dan pelayanan Kesehatan yang bermutu di Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTL) dan Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjut (FKRTL) baik milik Pemerintah Kabupaten Kediri maupun milik swasta b. Validitas data

untuk menegakkan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang ada dan mewujudkan layanan kesehatan prima.		SDM baik tenaga kesehatan maupun non kesehatan di fasilitas kesehatan milik pemerintah daerah melalui diklat, seminar, OJT dan lainnya. 3) Supervisi dan pembinaan mutu pelayanan kepada fasiltas pelayanan kesehatan milik swasta baik FKTP (klinik pratama, utama) maupun FKRTL (Rumah Sakit) dalam hal pemenuhan standar sarana, prasarana, alat kesehatan dan SDM kesehatannya. 4) Peningkatan kapasitas SDM kesehatan fasiilitas pelayanan kesehatan swasta dengan menyelenggarakan	c. Penambahan atau perluasan penerima Jaminan Kesehatan

b) Pemkab Kediri perlu melakukan peninjauan ulang dan melakukan perbaikan terhadap validitas Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), guna menghindari terjadinya pemberian program pelayanan kesehatan yang tidak tepat sasaran. c) Pemkab Kediri perlu melakukan perluasan terhadap penerima Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda). Pemberian Jamkesda tersebut merupakan salah satu upaya yang dapat dilakukan oleh Pemkab Kediri untuk meningkatkan pemerataan dan meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan bagi keluarga miskin yang tidak tercover sebagai PBI JKN (Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan Nasional) baik dari pusat maupun provinsi.		*workshop* atau pertemuan-pertemuan. Pemberian pelayanan kesehatan kepada masyarakat Kabupaten Kediri yang masuk dalam kategori DTKS (calon Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan) sudah melalui verifikasi dan validasi data oleh pemerintah desa dan Dinas Sosial dan ditetapkan oleh Menteri Sosial. 1. Sesuai dengan Permendagri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran	

		Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 pada romawi (v) dalam rangka menjamin keberlangsungan dan ketersediaan pembiayaan atas jaminan layanan kesehatan, pada (poin vi) bahwa Pemerintah Daerah tidak diperkenankan mengelola sendiri (sebagian atau seluruhnya) Jaminan Kesehatan Daerahnya dengan manfaat yang sama dengan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), termasuk mengelola sebagian Jaminan Kesehatan Daerahnya dengan skema ganda. 2. Menindaklanjuti hal tersebut	

		saat ini sedang dilaksanakan perubahan Peraturan Bupati Nomor 56 Tahun 2021 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pembiayaan Pelayanan Kesehatan bagi Masyarakat Miskin di Kabupaten Kediri menjadi Peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan Pembiayan Pelayanan Kesehatan bagi Masyarakat di Luar Cakupan Jaminan Kesehatan Nasional. 3. Pencapaian Universal Health Coverage (UHC) Kabupaten Kediri pada Tahun 2020 sebesar 71,18%, Tahun 2021 sebesar 72,77% dan pada akhir Tahun 2022 sebesar	d. Pemanfaatan mobil siaga desa

d) Pemkab Kediri perlu melakukan pengawasan terhadap pengimplementasian SOP, monitoring, serta evaluasi pemanfaatan Mobil Siaga Desa. Hal itu bertujuan untuk menghindari hal-hal di luar ketentuan sekaligus menghindari timbulnya persoalan baru di kemudian hari. Sebab, pada dasarnya keberadaan Mobil Siaga tersebut ditujukan untuk memperluas jangkauan dan meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan bagi warga Kabupaten Kediri.		78,74% (mengalami kenaikan sebesar 6,03%), sehingga masih ada sebesar 21,26% masyarakat Kabupaten Kediri belum mempunyai jaminan pelayanan kesehatan baik dari PBI-APBN, PBI-APBD, PBPU (PNS dan swasta), PPU, dan BP; 4. Dalam rangka percepatan pen capain UHC tersebut, Kabupaten Kediri sudah mempunyai Keputusan Bupati Nomor : HK.04/398/418.08/2022 tentang Pembentukan Tim Percepatan Pencapaian Universal Health Coverage (UHC) Program Jaminan Kesehatan Nasional	

		Kabupaten Kediri. 1. Sesuai dengan Surat Edaran Sekretaris Daerah yang ditujukan kepada Kepala Desa se-Kab. Kediri, nomor 900/5047/418,24/2021 tanggal 17 November 2021 perihal Petunjuk Teknis Pemberian Bantuan Keuangan Khusus Untuk Pengadaan Mobil Siaga Desa Tahun Anggaran 2121, pada romawi II huruf B disampaiakan bahwa Mobil Siaga Desa adalah mobil dinas Pemerintah Desa yang diperuntukkan antara lain: a. Menjunjung kelancaran tugas tugas kedinasan	e. Harmonisasi tentang

e) Dalam rangka menciptakan harmonisasi		b. Meningkatkan fungsi pelayanan kepada masyarakat c. Meningkatkan kualitas hasil kerja d. Menjunjung pelaksanaan program program Pemerintah Desa 2. Menunujuk surat tersebut, mobil siaga desa sudah dimanfaatkan untuk mengangkut warga yang membutuhkan transportasi ke fasyankes untuk mendapatkan pelayanan kesehatan. Berdasarkan Pedoman Teknis Ambulans, Dirjen Fasyankes Kementerian Kesehatan tahun 2019, dijelaskan bahwa setiap kendaraan	penyelenggaraan pelayanan Kesehatan masyarakat f. Digitalissai penangan pasien yang tersinkron antara Puskesmas dan Rumah Sakit.

antara program pemerintah kabupaten dengan pemerintah provinsi dan kementerian dan lembaga pemerintah di tingkat pusat terkait penyelenggaraan pelayanan kesehatan masyarakat, maka Pemkab Kediri perlu meningkatkan koordinasi dan sinkronisasi secara berkala terhadap program yang dicanangkan. f) Perlu dioptimalkan teknis digitalisasi penanganan pasien yang tersinkron antara Puskesmas dan Rumah sakit.		dapat dipergunakan untuk mengangkut orang sakit akan tetapi tidak setiap kendaraan tersebut dapat disebut sebagai ambulans. Suatu kendaraan dapat disebut sebagai ambulans apabila memenuhi spesifikasi teknis tertentu, memiliki alat kesehatan dan mampu memberikan pelayaan kesehatan terhadap orang sakit/korban/pasien. 3. Dinas Kesehatan telah melaksanakan pelatihan pemanfaatan mobil siaga desa dalam kegawatdaruratan, dengan sasaran 688 orang (setiap desa mengirim 2 orang)	g. Armada kendaraan untuk antar jemput pasien h. Keberadaan Posyandu di Desa

		pada tanggal 22 Agustus 2023 s/d 15 September 2023 di Kampus STIKES PAMENANG Pare. ordinasi telah dilaksanakan dan berupaya kegiatan sesuai petunjuk teknis (juknis). Mengingat di pelayanan kesehatan dibiayai banyak sumber dana baik DAU, DAK, DBHCHT dan Pajak Rokok. 1. Berdasarkan Surat Edaran Nomor : HK.02.02/I/1161/2022 tentang Implementasi Penggunaan Aplikasi Sistem Rujukan Terintegrasi (SISRUTE) dalam Penyelenggaraan Rujukan	

g) Armada kendaraan untuk antar jemput pasien perlu dioptimalkan bila ada kekurangan perlu ditambah jumlahnya.		Pelayanan Kesehatan Perorangan, Dinas Kesehatan sudah melaksanakan sosialisasi penggunakan SISRUTE kepada rumah sakit dan Puskesmas. Semua Puskesmas dan Rumah Sakit sudah melaksanakan registrasi dan pendaftaran akun SISRUTE. Untuk implementasi sampai dengan saat ini, belum semua rujukan dilaksanakan melalui SISRUTE dikarenakan kendala masalah jaringan yang kurang stabil dan petugas yang masih kurang paham IT. 2. SISRUTE merupakan	

h) Posyandu di Desa perlu didayagunakan dan dioptimalkan pembinaannya.		teknologi informasi berbasis internet yang dapat menghubungkan data pasien dari tingkat layanan lebih rendah ke tingkat layanan lebih tinggi atau sederajat (horisontal maupun vertikal) dengan tujuan untuk mempermudah dan mempercepat proses rujukan pasien. 1. Armada kendaraan untuk antar jemput pasien sudah tersedia di semua Puskesmas Kabupaten Kediri berjumlah 37 ambulans dan semuanya masih dalam kondisi sangat baik (data terlampir). 2. Dinas Kesehatan sudah be	i. AKI dan AKB

		kerja sama dengan Organisasi Masyarakat untuk pemanfaatan kendaraan Ormas guna antar jemput pasien yaitu dengan MobizNU (Mobil Siaga NU) 3. Perencaan tahun 2023, Dinas Kesehatan akan pengadaan 3 kendaraan ambulans gawat darurat, untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat yang membutuhkan rujukan gawat darurat dan pelayanan kesehatan sebelum masuk Rumah Sakit (*Pre Hospital Care*) 1. Jumlah Posyandu tahun	

		2022 sebanyak 1743 posyandu yang tersebar di 343 desa 1 kelurahan. 2. Upaya yang dilakukan dalam pendayagunaan posyandu : a. Meningkatkan kapasitas pengetahuan dan ketrampilan kader. b. Sesuai Permendagri nomor 18 tahun 2018 tentang Kedudukan Posyandu sebagai LKD (Lembaga Kemasyarakatan Desa) dengan tujuan agar pelaksanaan posyandu berjalan lebih optimal. c. Melengkapi sarana dan prasana posyandu terutama antroprometri	

		kit (alat pemantauan pertumbuhan balita) sejumlah 812 set, kekurangan akan dilengkapi secara bertahap. d. Kegiatan posyandu ini berdampak pada pemantauan pertumbuhan kesehatan balita sebagai generasi penerus bangsa.	
i) Di sektor kesehatan, pada tahun 2021 angka kematian ibu dan bayi masih tinggi dan cenderung meningkat dibandingkan tahun 2020. Perlu peningkatan pemantauan, pelayanan dan penanganan pada ibu hamil, khususnya pada Hari Pertama Kehidupan Bayi (HPK). Mengingat pada tahun 2021 telah dianggarkan 134,3 Milyar rupiah lebih		3. Pembinaan yang dilakukan kegiatan Posyandu a. Pengingkatan kapasitas berupa pelatihan-pelatihan antara lain pengukuran. pertumbuhan balita, komunikasi antar pribadi, penilaian strata PHBS	

untuk program pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan masyarakat.		dan lain-lain b. Pembinaan pada posyandu strata madya agar meningkat menjadi purnama. c. Peningkatan pengetahuan berbagai ilmu pengetahuan covid-19, TBC, germas, membuat menu balita dan lain-lain. Optimalisasi peran Pokja posyandu desa, pokjanal tingkat kecamatan dan tingkat kabupaten bertujuan agar pelaksanaan posyandu lebih bermanfaat bagi masyarakat. 1. Kematian Ibu th 2020 sebanyak 19 sedangkan th 2021 sebanyak 29 ibu meninggal	

		Hal ini disebabkan oleh : a. 51,72 % ibu hamil meningggal karena covid (kehamilan merupakan Komorbid) b. Belum semua ibu hamil mendapatkan vaksinasi c. Terdapat pembatasan Akses pelayanan kesehatan Ibu dan anak Upaya ; 1. Meningkatkan pendampingan ibu hamil 2. Meningkatkan capaian imunisasi Covid 3. Meningkatkan skrening Covid sehingga bisa melakukan pengobatan sedini mungkin 4. Membuka layanan Ante	

		natal care sesuai standart dengan protokol kesehatan 2. Angka kematian Bayi Kematian Bayi tahun 2020 sebanyak 162 untuk tahun 2021 sebanyak 152. 46 bayi terlahir dalam kondisi BBLR dari ibu yang menderita covid ataupun ibu hamil Kurang Energi Kronis. 14 bayi meninggal karena aspixia. Upaya : 1. Meningkatkan pendampingan ibu hamil 2. Meningkatkan capaian imunisasi Covid 3. Meningkatkan skrening	

		Covid sehingga bisa melakukan pengobatan sedini mungkin 4. Membuka layanan Ante natal care sesuai standart dg protocol kesehatan	

6. ISIAN KEUANGAN

Rekomendasi DPRD Tahun N-1	Perangkat Daerah	Tindak Lanjut	Tujuan/Masalah Yang Diselesaikan
1. Pengelolaan Keuangan Daerah b. **Pengelolaan Pendapatan Daerah** 1) Inovasi terkait pelayanan Perpajakan dan Retribusi Daerah hendaknya terus ditingkatkan untuk mendukung optimalisasi peningkatan hasil Pajak	BAPENDA	Pemerintah Kabupaten Kediri terus mengupayakan peningkatanan PAD melakukan inovasi diantaranya: a. Pendataan ulang potensi pajak daerah dengan menggandeng PPKBD dan Karang Taruna; b. Penguatan proses pemungutan	a. Terkait dengan UU Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah, perlu adanya update database pajak daerah yang merupakan kewenangan Pemerintah

dan Retribusi Daerah.		melalui perubahan Perda terkait perubahan tarif pajak dan retribusi menyesuaikan dengan UU Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah; c. Efisiensi pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah melalui digitalisasi pembayaran serta penyempurnaan aplikasi pelayanan pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah; d. Cetak SPPT PBB-P2 dan SSPD PBB-P2 yang dilakukan serempak di seluruh desa Se-Kabupaten Kediri	Kabupaten Kediri, sekaligus pendataan objek Pajak Kendaraan Bermotor (opsen PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (opsen BBNKB); b. Tahun 2023 Perda Pajak Daerah dan Retribusi Daerah selesai diundangkan, sebagai dasar pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah tahun 2024; c. Peningkatan PAD; d. Mempermudah pelayanan pajak daerah dan meningkatkan kepatuhan wajib pajak daerah.
2) Peran BUMD dan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan perlu untuk terus ditingkatkan sehingga peningkatan	Bagian Perekonomian	Telah dilaksanakan Pembinaan Pengembangan Unit Usaha Perusahaan Daerah Kabupaten Kediri sehingga diharapkan dapat	Peningkatan Unit Usaha dan Peningkatan PAD

PAD tidak bergantung pada peningkatan hasil Pajak dan Retribusi Daerah semata.		mengoptimalkan Pengelolaan Potensi daerah	
3) Realisasi Pendapatan Transfer Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp 2.401.475.948.751,00 telah melebihi target yang ditetapkan serta meningkat sebesar Rp 196.095.354.646,00 (8,89%) dibandingkan realisasi Pendapatan Transfer Tahun Anggaran 2020. Koordinasi dan komunikasi efektif dengan Pemerintah Pusat dan Provinsi diharapkan terus dapat dijaga agar realisasi pendapatan terus mengalami peningkatan.	BPKAD	Penyaluran Pendapatan Transfer dari Pemerintah Pusat ke Pemerintah daerah memedomani PMK No. 50/PMK.07/2017 bahwa terdapat ketentuan dan persyaratan untuk syarat salur Pendapatan Transfer dari Pemerintah Pusat yang harus dipenuhi oleh Pemerintah Daerah. Mengingat hal tersebut terus diupayakan koordinasi dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Propinsi dan memenuhi syarat salur Pendapatan Transfer dari Pemerintah Pusat sesuai ketentuan PMK 50 tahun 2017.	

4) Pendapatan Daerah masih sangat bergantung pada Dana Perimbangan atau Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat, oleh sebab itu peningkatan kontribusi Pendapatan Asli Daerah terhadap Pendapatan Daerah harus terus diupayakan dengan beragam inovasi terutama pandemi Covid-19 masih menjadi ancaman serius perkembangan ekonomi lokal, nasional dan global. Kami meyakini bahwa meskipun COVID-19 melanda, ada geliat ekonomi yang mulai tumbuh di masyarakat dari beberapa sektor yang mempengaruhi perolehan PAD. Dengan demikian, maka kebijakan dan program pemerintah harus diarahkan pada pemulihan dan peningkatan ekonomi	BAPENDA	Kontribusi Pendapatan Asli Daerah terhadap Pendapatan Daerah terus ditingkatan dengan melakukan upaya-upaya diantaranya: a. Menginisiasi perubahan Perda terkait perubahan/diversifikasi tarif pajak daerah dan retribusi daerah; b. Pemerintah kabupaten kediri masih memberlakukan penghapusan sanksi/denda administratif atas keterlambatan pembayaran pajak daerah; c. Pembentukan tim optimalisasi PAD.	a. Dengan perubahan tarif/diversifikasi tarif pajak daerah dan retribusi daerah pengenaan ketetapan pajak/retribusi lebih tepat sasaran dan berkeadilan; b. untuk mengurangi beban masyarakat dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. c. agar peningkatan PAD bisa integratif, sinergis, efektif dan efisien

masyarakat agar berimplikasi pada peningkatan PAD.			
5) Peningkatan PAD juga perlu dibarengi dengan kebijakan maupun program yang mampu menyentuh masyarakat secara langsung dan tepat sasaran agar menumbuhkan *trust* bagi masyarakat. *Trust* merupakan modal utama kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak. Ketika masyarakat patuh, secara simultan akan mempengaruhi PAD. Hal tersebut juga perlu dibarengi dengan inovasi dan akuntabilitas pengelolaan pajak serta retribusi daerah.	BAPENDA	Kebijakan Pemerintah Kabupaten Kediri dalam meningkatkan pelayanan dan kepatuhan wajib pajak dibarengi dengan program-program: a. Penganggaran Bantuan Keuangan Khusus (BKK) Desa untuk pelayanan pajak daerah; b. Melakukan digitalisasi pelayanan pajak daerah dan retribusi daerah; c. Melakukan pembayaran non tunai bagi pajak daerah melalui bank jatim serta open channel bank jatim dan bank himbara (BNI, Mandiri, BRI)	a. Penyediaan sarana dan prasarana pelayanan pajak daerah sehingga Cetak SPPT PBB-P2 dan SSPD PBB-P2 dapat dilaksanakan serempak di desa Se-Kabupaten Kediri; b. Meningkatkan akuntabilitas pelayanan publik dan mengurangi tatap muka antara fiskus dan masyarakat; c. Mempermudah wajib pajak dalam melakukan pembayaran.

6) Sebagian besar Pendapatan Daerah ditopang oleh Dana Perimbangan atau Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat, oleh karena itu upaya yang serius dari pemerintah daerah untuk meningkatkan PAD harus menjadi *concern* utama. Meredanya kasus COVID-19, khususnya varian Omicron menjadi peluang bagi pemerintah untuk melakukan pemulihan ekonomi yang bisa memberikan dampak bagi masyarakat secara umum dan PAD secara khusus.	BAPENDA	Dalam rangka peningkatan PAD, Pemerintah Kabupaten Kediri mengupayakan pemberian apresiasi kepada wajib pajak dengan melaksanakan Pekan panutan PBB-P2; Pemberian Hadiah bagi wajib pajak PBB-P2; Pemberian bantuan partisipatif pada desa dan kecamatan yang lunas PBB-P2 tepat waktu; dan Menambah alat pencatatan transaksi usaha (APTU/TMD/POS) pada wajib pajak restoran dan hotel.	Memastikan peningkatan penerimaan pajak daerah tepat waktu
c. **Pengelolaan belanja daerah**			
1) Dana refocusing Covid-19 perlu dipetakan tingkat keberhasilan dan penyerapan anggarannya.	BPKAD	Anggaran dukungan ekonomi t.a 2022 dampak pandemi covid 19 sebesar Rp.28.743.680.000,00 sedangkan realisasi sebesar	

		Rp.17.909.580.000,00 atau sebesar 62,31%	
2) SiLPA yang masih cukup tinggi menandakan penyerapan anggaran dari SiLPA sebelumnya tidak optimal, dana SiLPA cenderung statis tidak mengalami perubahan yang signifikan.	BPKAD	SiLPA t.a 2022 (data sementara) sebesar Rp.438.971.110.856,90 mengalami penurunan sebesar 22,67% dibanding SiLPA t.a 2021 yaitu sebesar Rp. 567.686.997.533,33	
3) Persentase Realisasi Belanja Daerah Tahun 2021 Pemerintah Kabupaten Kediri yakni 88,02% atau sebesar Rp 1.994.571.255.560,31 dari target anggaran. Mengalami peningkatan sebesar Rp 105.139.805.859,30 (3,71%) dibanding Realisasi Belanja Daerah Tahun 2020. Meskipun	BPKAD	Penyerapan Realisasi Belanja diupayakan optimal dari tahun ketahun. Penyerapan Belanja T.A 2022 telah mengalami kenaikan dibanding Penyerapan Belanja T.A 2021 dengan gambaran sbb: Realisasi Belanja daerah T.A 2022 sebesar Rp.3.112.720.728.539,57 atau sebesar 90,78% dari Anggaran	

realisasinya di atas 80 persen dan mengalami peningkatan 3,71 persen dari realisasi belanja daerah tahun sebelumnya, terdapat beberapa hal yang perlu disorot. Diantaranya adalah belanja operasi, khususnya belanja bantuan sosial yang terealisasi hanya 80,21 persen. Mengingat bantuan sosial memiliki urgensitas yang tinggi di era pandemi COVID-19, seharusnya belanja bantuan sosial masih bisa dioptimalkan atau disalurkan secara menyeluruh kepada masyarakat berpenghasilan rendah atau masyarakat miskin yang rentan terhadap COVID-19.		Belanja Daerah T.A 2022 yaitu sebesar Rp. 3.428.699.159.232,00. Sedangkan penyerapan Belanja Bantuan Sosial secara umum t. a 2022 sudah optimal yaitu sebesar 98,53% atau sebesar Rp.114.120.453.745,00 dari anggaran Belanja Bantuan Sosial sebesar Rp. 115.825.786.273,00.(data unaudited)	

4) Berdasarkan LKPJ, secara keseluruhan Belanja Operasi Tahun Anggaran 2021 mengalami peningkatan sebesar Rp174.165.922.552,02 (9,57%). Peningkatan terjadi pada Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa dan Belanja Bantuan Sosial. Peningkatan secara signifikan terjadi pada Belanja Barang dan Jasa sebesar Rp 156.116.457.661,85 (27,18%), namun di sisi lain realisasinya hanya 80% dari target anggaran. Faktor penyebab rendahnya realisasi anggaran Belanja Barang dan Jasa perlu dievaluasi kembali, dalam artian dicari	BPKAD	Penyerapan Realisasi Belanja Operasi diupayakan optimal dari tahun ketahun. Penyerapan Belanja Operasi T.A 2022 telah mengalami kenaikan dibanding Penyerapan Belanja Operasi T.A 2021 dengan gambaran sbb: Realisasi Belanja Operasi T.A 2022 sebesar Rp.2.129.304.986.630,98 atau sebesar 92,52% dari Anggaran Belanja Operasi T.A 2022 yaitu sebesar Rp. 2.301.452.268.711. (data unaudited)	

penyebabnya. Penyerapan yang kurang optimal ini disebabkan karena kapasitas fiskal yang sempit, kapasitas birokrasi dan komitmen politik, atau pola penyerapan anggaran di akhir periode.			
5) Peningkatan Belanja Pegawai TA 2021 diharapkan diikuti peningkatan kualitas SDM dan profesionalitas pegawai sehingga kualitas pelayanan kepada masyarakat dan program pembangunan meningkat.	BKD	Upaya Peningkatan kualitas dan profesionalitas SDM apararatur dilaksanakan dengan meningkatkan kompetensi, kualifikasi, dan kinerja melalui *Corporate University,* serta disiplin pegawai.	Pelaksanaan pengembangan kompetensi melalui *corporate university* menjangkau lebih banyak ASN
6) Realisasi belanja modal, khususnya belanja modal tanah juga sangat rendah, yakni hanya 49,15 persen. Kurang optimal atau rendahnya penyerapan anggaran perlu menjadi	DINAS PERKIM	Realisasi Belanja Modal di Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman pada Tahun 2022 sebesar 90,33% dimana terdapat belanja modal pengadaan tanah yang tidak terealisasi.	Pengadaan Tanah yang tidak terealisasi di Tahun Anggaran 2022 akan dilaksanakan di Tahun Anggaran 2023

perhatian serius Pemkab Kediri. Pemkab perlu menganalisis faktor- faktor penyebab kurang optimalnya penyerapan anggaran, mungkin dari persoalan internal Organisasi Perangkat Daerah (OPD), persoalan mekanisme pengadaan barang dan jasa, dokumen pelaksanaan anggaran dan mekanisme revisi, dan persoalan lain-lain. Kami merekomendasikan beberapa langkah perbaikan termasuk merevisi beberapa peraturan agar permasalahan yang ada dapat diatasi, baik dalam jangka pendek maupun dalam jangka menengah.			

7) Selama ini banyak pemerintah daerah berlomba-lomba menghabiskan anggaran meskipun dampak penyerapannya tidak optimal. Hal ini menjadi keprihatinan bersama. Oleh karena itu Pemkab Kediri perlu melakukan upaya peningkatan efektivitas Belanja Daerah dengan memfokuskannya pada pos-pos anggaran yang mengedepankan kepentingan publik Seperti alokasi belanja yang lebih besar bagi pembangunan infrastruktur dibandingkan dengan belanja yang tidak terkait langsung dengan pembangunan seperti halnya belanja hibah dan bantuan sosial. Komitmen dan partisipasi aktif seluruh jajaran Pemerintah Kabupaten Kediri untuk menjadi garda terdepan dalam peningkatan kualitas belanja daerah	BAPPEDA	Pemerintah Kabupaten Kediri terus berupaya meningkatkan efektivitas Belanja Daerah dengan memfokuskan pada pos-pos anggaran yang mengedepankan kepentingan publik serta program-program dalam upaya meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat. Belanja Infrastruktur Daerah menurut data Perhitungan Belanja Infrastuktur Pemerintah Kabupaten Kediri yang bersumber dari Transfer ke Daerah yang penggunaannya bersifat umum dialokasikan sebesar Rp. 665.035.087.862,92 atau 61,07%. Berdasarkan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2021 pasal 11 ayat (24) dinyatakan	

harus terus dipupuk dan dilaksanakan secara disiplin.		bahwa “Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penggunaan dana transfer umum paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) diatur dengan Peraturan menteri Keuangan. Mendasari ketentuan diatas maka Pemerintah Kabupaten Kediri telah konsisten dan berkesinambungan dalam mengalokasikan anggaran belanja infrastruktur daerah yang bersumber dari transfer ke daerah yang penggunaannya bersifat umum minimal 25% dari penjumlahan DAU dan DBH yang penggunaannya bersifat umum dikurangi DAU dan DBH untuk ADD. Hal ini sejalan sebagaimana Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan	

		Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021.	
8) Meskipun realisasi anggaran belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi mencapai 94,03 persen dari target anggaran, kerusakan jalan di Kabupaten Kediri masih sering terjadi. Banyaknya jalan yang rusak di Kabupaten Kediri saat musim penghujan tiba perlu menjadi pekerjaan rumah. Kondisi jalan yang rusak sering menyebabkan kecelakaan, bahkan mengakibatkan jatuh korban dan kerugian harta benda akibat terperosok atau terserempet atau ditabrak kendaraan lain saat menghindari jalan rusak tersebut. Bupati Kediri telah melakukan cara yang tepat dengan	PUPR	Mengoptimalkan kinerja Tim Reaksi Cepat yang sudah dimiliki oleh Dinas PUPR dengan menambah personil, alat dan alokasi dana untuk pemeliharaan rutin jalan.	a. Penanganan kerusakan jalan lebih cepat, tepat dan akurat sehingga meminimalisir kecelakaan lalu lintas yang disebabkan oleh kerusakan jalan, terutama saat musim hujan. b. Penanganan kerusdakan jalan lebih terstruktur dan terencana dengan adanya tahap perencanaan, sehingga hasil pekerjaan lebih akurat dan sesuai dengan kebutuhan

	membentuk Tim Khusus untuk menangani jalan rusak. Tim khusus tersebut perlu bekerja keras untuk melakukan pendataan secara berkala dan masif dengan mendengarkan aspirasi dan keluhan warga terkait lokasi jalan rusak maupun berlubang.			
9)	BUMDes memiliki peluang besar sebagai inkubator sekaligus katalisator bisnis bagi UMKM di tiap desa untuk tumbuh dan berkembang. Selain dukungan permodalan, agar BUMDes dapat lahir dan tumbuh secara optimal, maka pemerintah perlu menyusun dan menjalankan program khusus bagi tumbuh kembangnya BUMDes untuk menghindari BUMDes mati suri	DPMPD	Di Kabupaten Kediri keberadaan BUMDesa sudah diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 7 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Desa dan Peraturan Bupati Kabupaten Kediri Nomor 22 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 7 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Desa. Keberadaan BUMDes memang sangat diharapkan dapat	Pengelola BUMDes diharapkan memiliki kemampuan dalam menganalisa peluang usaha serta upaya pemenuhan kebutuhan masyarakat yang dapat dikelola oleh BUMDesa

tidak lama setelah kelahirannya.		menjadi pendorong tumbuh kembangnya perekonomian di desa. Namun hingga saat ini ada BUMDesa yang masih belum sesuai harapan dan baru ada beberapa BUMDes yang sudah dapat memberikan kontribusi baik langsung maupun tidak langsung bagi perekonomian desa. Langkah yang sudah diambil oleh DPMPD adalah melaksanakan pembinaan dan pelatihan yang bersifat administratif (pengelolaan keuangan) dan teknis (pelatihan usaha dan pemasaran) di tahun anggaran 2022. Ke depan kami mengharapkan dapat melaksanakan kegiatan yang lebih dapat mengakselerasi pengembangan BUMDes dengan melaksanakan kegiatan yang	

		bersifat teknis dan kolaboratif serta mendorong kesadaran pengelola BUMDes dalam membaca peluang usaha dan pemenuhan kebutuhan masyarakat sehingga dapat meminimalisir kemungkinan kegagalan usaha	
10) Tingkat penyerapan yang tidak merata ada yang di bawah 50%, ada yang di atas 50% ada yang 100%. Hal ini perlu dikaji secara menyeluruh dengan analisa laporan keuangan yang memadai agar penyerapan bisa maksimal. Oleh karena itu diperlukan aplikasi keuangan yang modern, sebagai alat untuk menganalisa secara spesifik sektor apa saja yang penyerapannya kecil.	Bagian Pembangunan dan Layanan Pengadaan	Pemkab Kediri telah menggunakan aplikasi SIPD sesuai dengan amanat UU 23/2014 tentang Pemerintah Daerah dan Permendagri 70/2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah. Dan melalui program kegiatan Bag. Pembangunan dan Pengadaan Barang/Jasa dilaksanakanlah Monitoring dan evaluasi penyerapan realisasi anggaran secara berkala melalui rapat TEPRA bersama pimpinan	

		dan seluruh SKPD se Kab. Kediri. Ke depan, kami telah mengusulkan adanya aplikasi baru, SIPA (Sistem Informasi Penyerapan Anggaran) melalui perubahan anggaran, dalam rangka pemantauan secara online dan *real time* terkait progress pencapaian serapan anggaran SKPD.	
11) SiLPA yang masih cukup tinggi menandakan penyerapan anggaran dari SiLPA sebelumnya tidak optimal, dana SiLPA cenderung statis tidak mengalami perubahan yang signifikan.		SiLPA t.a 2022 (data sementara) sebesar Rp.438.971.110.856,90 mengalami penurunan sebesar 22,67% dibanding SiLPA t.a 2021 yaitu sebesar Rp. 567.686.997.533,33.	

Rekomendasi DPRD Tahun N-1	Perangkat Daerah	Tindak Lanjut	Tujuan/Masalah Yang Diselesaikan
3. Gender dan Perlindungan Anak, Peran Pemuda dan Masalah Sosial. a) Jumlah kasus perceraian di Kabupaten Kediri yang disebabkan oleh kekerasan dalam rumah tangga di tahun 2021 mencapai 121 kasus, jumlah tersebut mengalami peningkatan disbanding tahun 2020 yang terdiri dari 77 kasus. Oleh karena itu, ditengah maraknya persoalan ketimpangan gender, eksploitasi, serta kekerasan terhadap perempuan dan anak, khususnya yang terjadi dalam rumah tangga, Pemkab Kediri perlu berupaya untuk memberikan sosialisasi dan edukasi secara masif kepada warga Kabupaten Kediri mengenai gender serta perlindungan	DP2KBP3A	DP2KBP3A melakukan pendampingan dan penjangkauan kepada korban kekerasan terhadap perempuan dan anak termasuk kekerasan yang terjadi dalam rumah tangga.	Peningkatan pelayanan aduan tindak kekerasan melalui aplikasi Sanak dan Cafe Sanak Pendampingan terhadap korban kekesaran serta Anak yang berhadapan dengan hukum.

terhadap perempuan dan anak. b) Dalam rangka meningkatkan wawasan gender, perlindungan perempuan dan anak serta peningkatan aktivitas produktif lainnya, maka Pemkab Kediri harus memfasilitasi aktivitas organisasi kepemudaan di tingkat desa. Dengan memfasilitasi aktivitas organisasi kepemudaan di tingkat desa, maka dapat memupuk kesadaran warga di lapisan bawah (***grassroots***) mengenai urgensi wawasan gender serta perlindungan perempuan dan anak.		DP2KBP3A pada pertemuan PUSPA (Partisipasi Publik untuk Kesejahteraan Perempuan dan Anak), GOW (Gabungan Organisasi Wanita), P2TP2A (Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak), Satgas PPA, Rakor Penyuluh KB dan berbagai kesempatan selalu melakukan edukasi tentang Perlindungan Perempuan dan Anak termasuk pencegahan	

		terjadinya kekerasan terhadap Perempuan dan Anak. - Sosialisasi dan edukasi juga telah dilaksanakann kepada masyarakat baik melaui forum anak, PKK dan Kelompk remaja kecamatan maupun sekolah tahun 2023 sosialisasi dan edukasi akan dilaksanakan secara lebih masif - Pembinaan kepada kelompok remaja, Kelompok PIK Remaja dan Forum anak melalui sosialisasi dan edukasi	

4. Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) a) Dalam rangka menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah dan pembangunan di bidang sosial yang merupakan urusan wajib, maka Pemkab Kediri harus berperan aktif dalam menertibkan, membina, serta melakukan penanganan terhadap Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS).	DINAS SOSIAL	Memberikan layanan rehabilitasi dasar meliputi penyediaan permakanan, penyediaan sandang, penyediaan layanan kedaruratan, penyediaan layanan penelusuran keluarga, dan reunifikasi keluarga bagi orang terlantar yang ada di wilayah Kabupaten Kediri - Tahun 2023 akan dilaksanakan pemutakhiran data disabilitas dan lansia Kabupaten kediri - Mengadakan pelatihan	PMKS mendapatkan layanan sesuai SPM bidang sosial

b) Pemkab Kediri perlu melakukan pen dataan dan pemutakhiran data PMKS sebagai basis data terlaksananya program penanganan PMKS. Adapun program penanganan PMKS yang dapat dilakukan Pemkab Kediri meliputi pemberian pelatihan keterampilan dan praktik kerja bagi anak terlantar, pembinaan alih profesi eks lokalisasi, pemberian pelatihan dan keterampilan eks korban narkotika, serta pemberian pendidikan dan pelatahian (diklat) bagi anak putus sekolah di panti sosial remaja terlantar (PSRT). Berkaitan dengan hal tersebut, Pemkab Kediri perlu melaksanakan program penanganan PMKS secara efektif, agar permasalahan PMKS di Kabupaten Kediri dapat teratasi dengan baik.		bagi disabilitas sesuai permintaan Musrenbang - Memberikan fasilitasi bagi anak putus sekolah untuk mendapatkan pelatihan keterampilan di UPT PSBR Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap PMKS yang telah menerima	- Data yang valid akan memudahkan pengambilan kebijakan dan analisis kebutuhan bantuan - PMKS mendapatkan pelatihan keterampilan sesuai dengan kebutuhan sehingga dapat mengembalikan fungsi sosialnya di

c) Indikator keberhasilan pelayanan sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) adalah berapa jumlah PMKS yang berhasil dientaskan, tidak hanya sekedar jumlah PMKS yang dilayani. Oleh karena itu, program ke depan harus berorientasi pada pengentasan PMKS.		bantuan dan pelatihan keterampilan	masyarakat Mengetahui kondisi dan perkembangan usaha PMKS yang telah mendapatkan layanan

Rekomendasi DPRD Tahun N-1	Perangkat Daerah	Tindak Lanjut	Tujuan/Masalah Yang Diselesaikan
5. Angka Kemiskinan a) Pemkab Kediri berperan aktif dalam melaksanakan pendataan dan pemutakhiran data warga miskin yang ada di Kabupaten Kediri. Selain itu, Pemkab Kediri dapat merumuskan dan mengusulkan kriteria kemiskinan yang sesuai dengan kondisi	DINAS SOSIAL	Pemutakhiran Data Kemiskinan terus dilaksanakan secara periodikdi masing-masing Desa melalui aplikasi SIKS NG (Sistem Informasi	Pemerintah Daerah memiliki Data Kemiskinan yang valid dan tepat sasaran berdampak dalam penurunan jumlah keluarga fakir miskin

riil di daerah yang dijadikan acuan bagi pelaksanaan pendataan dan pemutakhiran data warga miskin. b) Pemkab Kediri perlu meningkatkan koordinasi dengan lembaga pemerintah terkait sinkronisasi data dan penggunaan data warga miskin dalam berbagai program pemerintah. c) Pada tahun 2021, persentase jumlah penduduk miskin di Kabupaten Kediri mengalami peningkatan sebesar 0,06 persen dibanding tahun		Kesejahteraan Sosial Next Generation) Kementerian Sosial RI Peningkatan koordinasi dan sinkronisasi Data Kemiskinan dengan Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Pusat (Kementerian Sosial) Koordinasi lintas sektor SKPD terkait program kegiatan penanggulangan kemiskinan di bawah koordinator Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah - Pelatihan keterampilan	- Pemerintah Daerah memiliki Data Kemiskinan yang dapat bersinergi dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Desa serta dapat melihat peta kemiskinan daerah sebagai dasar dalam perencanaan program kegiatan - Untuk menyamakan persepsi dan intervensi program kegiatan dalam penanggulangan kemiskinan dan penanganan permasalahan sosial

	2020. Salah satu penyebab terjadinya peningkatan terhadap jumlah penduduk miskin, yaitu banyak perusahaan yang menutup usahanya dan terpaksa merumahkan para karyawan karena pandemi Covid-19, sehingga kebutuhan warga tidak dapat terpenuhi. Sehubungan dengan hal tersebut, Pemkab Kediri perlu melakukan penguatan terhadap program-program penanggulangan kemiskinan dan pemberdayaan masyarakat secara berkelanjutan. Selain itu, Pemkab Kediri perlu membuat sistem data base terkait program- program penanggulangan kemiskinan secara online, agar dapat diakses dengan mudah oleh para pemangku kepentingan (stakeholders) dan warga Kabupaten Kediri.		bagi keluarga fakir miskin dan pemberdayaan bagi penerima Bansos yang memiliki motivasi mengembangkan usahanya - Pengembangan Aplikasi Simnangkis (Sistem Informasi Manajemen Penanggulangan Kemiskinan) dan pemutakhiran Data kemiskinan secara periodik melalui Aplikasi SIKS NG - Penanganan rumah tidak layak huni menjadi prioritas Pemerintah Kabupaten Kediri yang mana tahun 2022 menangani lebih dari 2000	- Peserta pelatihan dan penerima Bansos memiliki motivasi untuk mengembangkan usaha sehingga akan dapat membantu meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan keluarga - Pemerintah Daerah memiliki data kemiskinan yang dapat bersinergi dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintahan desa serta dapat melihat peta kemiskinan daerah sebagai dasar dalam perencanaan program kegiatan penanggulangan kemiskinan

d) Data rumah tidak layak huni di Kabupaten Kediri masih sangat tinggi, ke depan untuk mempercepat supaya dalam RPJMD Tahun 2021-2026 dan dalam programnya mengalokasikan lebih banyak sasaran program bedah rumah dan menambah alokasi volume dan biayanya.	DINAS PERKIM	rumah melalui program BSPS dan RTLH. - Pada tahun 2022 Kabupaten Kediri mendapatkan penghargaan sebagai juara umum Tim BSPS Terbaik se-Jawa Timur	- Pemberian bantuan rumah tidak layak huni melaui tahap verifikasi yang baik sehingga tepat sasaran - Kemampuan keuangan daerah yang terbatas tidak membuat Kabupaten Kediri tergantung APBD saja tetapi juga dari sumber pendanaan pemerintah pusat yaitu program BSPS

BAB IV
CAPAIAN KINERJA PELAKSANAAN TUGAS PEMBANTUAN DAN PENUGASAN

4.1 Urusan Pemerintahan yang Ditugas-Pembantuan

4.1.1. Identifikasi tugas pembantuan urusan pemerintahan yang diterima dari pemerintah tingkat atasnya

- Nomor & Tanggal DIPA : DIPA-909.02.4.051754/2022 4 Februari 2022
- Kementerian Negara : Kementerian Perdagangan
- Unit Organisasi : Direktorat Jenderal Perdagangan Dalam Negeri
- Program : Program Perdagangan Dalam Negeri
- Kegiatan : Pengembangan Sarana Distribusi Perdagangan dan Kapasitas Logistik Perdagangan
- Satker Penerima Dana TP : Dinas Perdagangan Kab. Kediri
- Rincian Output : Pembangunan/Revitalisasi Pasar Rakyat
- Lokasi : Desa Tawang Kecamatan Wates Kabupaten Kediri
- Alokasi Dana TP : **Rp. 12.000.000.000,-** *(Dua Belas Milyar Rupiah)*
- Realisasi Dana TP : Rp. 8.668.194.090,00
  Biaya Fisik : Rp. 8.571.330.090,00
  (Dihibahkan kepada Pemerintah Kabupaten Kediri)
  Biaya Administrasi : Rp. 96.864.000,00
- Sumber Dana TP : APBN TA. 2022

4.2 Hambatan/Permasalahan dalam Pelaksanaan Tugas Pembantuan dan Upaya Penyelesaian

1) Hambatan/permasalahan pelaksanaan Tugas Pembantuan Pekerjaan Revitalisasi Pasar Wates Desa Tawang, Kecamatan Wates Kabupaten Kediri

Hasil DED untuk Revitalisasi Pasar Wates Desa Tawang Kecamatan Wates sekitar Rp. 16.378.886.000,00.

Pemerintah Pusat memberikan Dana Tugas Pembantuan sebesar Rp. 12.000.000.000,00 (dua belas milyar rupiah) dan terealisasi untuk fisik sebesar Rp. 8.571.330.090,00 (delapan milyar lima ratus tujuh puluh satu juta tiga ratus tiga puluh ribu sembilan puluh rupiah) dan sudah dihibahkan kepada Pemerintah Kabupaten Kediri pada tanggal 22 Februari 2023.

Dari jumlah anggaran yang disediakan dan proses fisiknya belum bisa menuntaskan revitalisasi Pasar Wates.

2) Faktor-faktor pendukung dalam upaya Penyelesaian Hambatan/Permasalahan Pelaksanaan Tugas Pembantuan Pekerjaan Revitalisasi Pasar Wates Desa Tawang, Kecamatan Wates Kabupaten Kediri.

   Bahwa pasar merupakan fasilitas umum sementara anggaran dari Tugas Pembantuan tidak diberikan sesuai kebutuhan perencanaan, sehingga untuk melanjutkan pembangunan tersebut pada tahun 2023 dianggarkan melalui APBD Pemerintah Kabupaten Kediri.

BAB V

P E N U T U P

Substansi pokok yang harus ada dalam Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Pemerintah Daerah Kabupaten Kediri kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kediri adalah hasil penyelenggaraan urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Kediri selama satu tahun anggaran 2022.

Dari paparan pada bab-bab di atas dapat dipahami bahwa ada dua hal pokok yang sudah dijelaskan. *Pertama,* Pemerintah Daerah Kabupaten Kediri telah memaparkan dan menjelaskan hasil penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang telah dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Kediri. *Kedua,* Pemerintah Daerah Kabupaten Kediri telah memaparkan dan menjelaskan hasil pelaksanaan tugas pembantuan dan penugasan.

Tidak lupa kami sampaikan terima kasih kepada seluruh perangkat daerah Kabupaten Kediri yang sudah bekerja sama dalam penyusunan LKPJ Pemerintah Daerah Kabupaten Kediri ini. Dan kepada DPRD Kabupaten Kediri mohon berkenan menerima Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Pemerintah Daerah Kediri Tahun 2022 ini.